



page267_tabel Program
Pembangunan daerah, pagu
indikasi, indikator kinerja,
SKPD penanggungjawab.

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
2021**



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang atau sebutan lain selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahunan.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi;

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan seluruh Perangkat Daerah.

BAB II

RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah, dan Keuangan Daerah, serta

Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 5

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
 - f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
 - h. BAB VIII INDIKATOR KINERJA; dan
 - i. BAB IX PENUTUP.
- (2) Uraian sistematika RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Daerah;
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
- c. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (55/3/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai rangkaian untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, maka Visi RPJMD 2021-2026 akan ditetapkan sesuai dengan arahan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 dengan penajaman oleh Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Arah penyusunan RPJMD didasarkan pada pertimbangan obyektif sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan serta strategi yang dipilih selama periode 2021-2026.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan tahun 2021-2026 meliputi:

1. menerjemahkan Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 –2025;
2. merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan; dan
3. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021– 2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bulungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan “asas transparan” yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing daerah serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.

huruf b

yang dimaksud dengan “asas responsif” yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

huruf c

yang dimaksud dengan “asas efisien” yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.

huruf d

yang dimaksud dengan “asas efektif” yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

huruf e

yang dimaksud dengan “asas akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

huruf f

yang dimaksud dengan “asas partisipatif” yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

huruf g

yang dimaksud dengan “asas terukur” yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

huruf h

yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” yaitu merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan

pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Huruf j

yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” yaitu bahwa pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud terjadinya perubahan yang mendasar mencakup antara lain; bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 44



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antara Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-22
1.5. Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026	I-23
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2. Kondisi Demografi	II-33
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-35
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-35
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-46
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-51
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar	II-51
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Dasar	II-66
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-68
2.3.4. Fokus Urusan Penunjang	II-74
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-76
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-76
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-78
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-82
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-84
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Gambaran Penyelenggaraan Keuangan Daerah	III-1
3.2. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.3. Kerangka Pendanaan	III-22
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1. Konsepsi Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bulungan	IV-1
4.2. Isu Strategis	IV-11



4.2.1 Pengembangan SDM	IV-11
4.2.2 Pengembangan Ekonomi Wilayah.....	IV-12
4.2.3 Prasarana Dasar	IV-12
4.2.4 Kebijakan Publik Pemerintahan dan Penegakan Hukum	IV-12
4.2.5 Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	IV-13
4.3. Program Prioritas Bupati 2021-2025.....	IV-13
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulungan	V-1
5.2. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulungan	V-3
5.3. Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulungan.....	V-7
5.4. Kaitan antara Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam Jangka Menengah dengan Sasaran RPJMD.....	V-8
5.5. Penanganan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Program Prioritas	V-23
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, INDIKASI PROGRAM DAN PENDANAAN	VI-1
6.1. Capaian dan Rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Bulungan.....	VI-1
6.1.1 Gambaran Keuangan dalam Pencapaian Indikator TPB	VI-2
6.1.2 Keuangan Daerah	VI-8
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulungan.....	VI-9
6.2.1 Perumusan Strategi Kebijakan	VI-9
6.2.2 Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Daerah.....	VI-14
6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bulungan dalam Jangka Menengah	VI-25
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	VIII-2
8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VIII-6
8.3. Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM)	VIII-7
BAB IX PENUTUP....	IX-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026.....	IX-1
9.2. Pedoman Transisi Dalam Rangka Menjaga Kestinambungan Pembangunan....	IX-4



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tinjauan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional 2021-2024 terkait Kabupaten Bulungan.....	I-13
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulungan	II-1
Tabel 2.2	Jumlah dan Luas Rata-rata Wilayah Kelurahan dan Desa di Masing-masing Kecamatan Kabupaten Bulungan	II-2
Tabel 2.3	Hubungan antara relief kemiringan lereng, dan Beda tinggi relatif Kabupaten Bulungan.....	II-7
Tabel 2.4	Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari 2020	II-9
Tabel 2.5	Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi, dan Tekanan Udara Dirinci per Bulan di Kabupaten Bulungan.....	II-10
Tabel 2.6	Deskripsi Jenis Batuan Kabupaten Bulungan.....	II-17
Tabel 2.7	DAS, Sub-DAS, dan Sungai di Kabupaten Bulungan.....	II-23
Tabel 2.8	Rencana Pola Ruang Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2041	II-25
Tabel 2.9	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan	II-34
Tabel 2.10	Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan.....	II-35
Tabel 2.11	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2016-2020	II-37
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2016-2020	II-39
Tabel 2.13	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	II-41
Tabel 2.14	PDRB per Kapita Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2020	II-43
Tabel 2.15	Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan	II-44
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan Tahun 2018-2020	II-44
Tabel 2.17	Komponen Penyusunan IPM Kabupaten Bulungan Tahun 2020.....	II-45
Tabel 2.18	Persentase penduduk 15 tahun keatas menurut karakteristik dan kemampuan membaca dan menulis.....	II-46



Tabel 2.19	Perkembangan nilai ALS di Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Utara	II-47
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk Pada Tahun 2019-2020.....	II-48
Tabel 2.21	Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dua tahun terakhir menurut karakteristik dan berat badan bayi yang Dilahirkan terakhir, 2020	II-50
Tabel 2.22	Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulungan 2018-2020.....	II-51
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kabupaten Bulungan 2018- 2020.....	II-52
Tabel 2.24	Rasio Ketersediaan Sekolah	II-52
Tabel 2.25	Jumlah Guru, Jumlah Murid, dan Rasio Guru Murid menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bulungan.....	II-53
Tabel 2.26	Jumlah Murid, Jumlah Sekolah, dan Rasio Murid dan Sekolah	II-53
Tabel 2.27	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Jumlah Balita Kabupaten Bulungan Tahun 2020.....	II-61
Tabel 2.28	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2020	II-62
Tabel 2.29	Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2020.....	II-62
Tabel 2.30	Rasio Dokter per Jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020.....	II-63
Tabel 2.31	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2020.....	II-63
Tabel 2.32	Kondisi Jalan Kab/Kota di Kabupaten Bulungan 2017-2020	II-64
Tabel 2.33	Rasio Tempat Beribadah Persatuan Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2019 -2020.....	II-65
Tabel 2.34	Partisipasi perempuan Dalam Lembaga Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2020.....	II-67
Tabel 2.35	Persentase penduduk yang memiliki Nomor induk Kependudukan (NIK) dan Akte Kelahiran menurut karakteristik dan Kelompok Umur, 2020	II-68
Tabel 2.36	Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bulungan 2020.....	II-68



Tabel 2.37	Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bulungan Tahun 2016- 2020	II-69
Tabel 2.38	Jenis Tanaman Hortikultura di Kabupupaten Bulungan Tahun 2020	II-71
Tabel 2.39	Populasi Ternak dan Populasi Unggas di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019-2020	II-72
Tabel 2.40	Produksi Ikan di Kabupaten Bulungan Tahun 2020.....	II-73
Tabel 2.41	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Unit di Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2019	II-74
Tabel 2.42	Jumlah Sambungan PDAM Kabupaten Bulungan	II-74
Tabel 2.43	Jumlah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten Bulungan 2019-2020.....	II-76
Tabel 2.44	Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kaputa	II-77
Tabel 2.45	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.....	II-80
Tabel 2.46	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-80
Tabel 2.47	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	II-81
Tabel 2.48	Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.49	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur Non Bintang di Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2019.....	II-82
Tabel 2.50	Angka Kriminalitas di Kabupaten Bulungan Setiap Tahunnya	II-83
Tabel 2.51	Struktur Umur Penduduk dan Rasio Ketergantungan 2018-2019	II-84
Tabel 2.52	Hasil Analisis Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bulungan.....	II-85
Tabel 2.53	Capaian Indikator TPB Kabupaten Bulungan terhadap Target Nasional	II-87
Tabel 2.54	Capaian Indikator TPB Berdasarkan Tujuan	II-89
Tabel 3.1	Rata-rata pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Bulungan	III-4
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Dasrah per 31 Desember 2017, 2018, 2019 dan 2020 Kabupaten Bulungan	III-7



Tabel 3.3	Realisasi Belanja Pemenuhan Kabutuhan Aparatur Tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan.....	III-10
Tabel 3.4	Rasio-rasio Keuangan Tahun 2017-2020 Kabupaten Bulungan	III-12
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan	III-14
Tabel 3.6	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan.....	III-15
Tabel 3.7	Defisit Riil Anggaran tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan	III-18
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan.....	III-19
Tabel 3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018-2020	III-20
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan	III-20
Tabel 3.11	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bulungan.....	III-25
Tabel 3.12	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2021-2026 Kabupaten Bulungan	III-28
Tabel 3.13	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan.....	III-31
Tabel 3.14	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan.....	III-31
Tabel 4.1	Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Kalimantan.....	IV-3
Tabel 4.2	Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2020	IV-8
Tabel 4.3	Arahan Sistem Perkotaan RTRW Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Bulungan.....	IV-18
Tabel 4.4	Arahan Sistem Jaringan Prasarana Utama RTRW Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Bulungan	IV-19
Tabel 4.5	Arahan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya RTRW Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Bulungan	IV-22
Tabel 4.6	Arahan Rencana Kawasan Strategis RTRW Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Bulungan.....	IV-24
Tabel 4.7	Indikator TPB Yang Belum Tercapai Pada Pilar Sosial	IV-38



Tabel 4.8	Indikator TPB Yang Belum Tercapai Pada Pilar Ekonomi.....	IV-40
Tabel 4.9	Indikator TPB Yang Belum Tercapai Pada Pilar Lingkungan	IV-41
Tabel 4.10	Indikator TPB yang Belum Tercapai pada Pilar Hukum & Tata Kelola Kelembagaan	IV-43
Tabel 5.1	Visi RPJPD Kabupaten Bulungan, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, RPJM Nasional, dan RTPJMD Provinsi Kalimantan Utara.....	V-2
Tabel 5.2	Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Bulungan dengan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara	V-7
Tabel 5.3	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Bulungan dengan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara	V-7
Tabel 5.4	Pemetaan dan Penyelarasan 15 Program Strategis Kepala Daerah Dengan Program Perangkat Daerah	V-12
Tabel 5.5	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bulungan	V-25
Tabel 6.1	Sinergritas Perangkat Daerah dalam Pencapaian TPB	VI-5
Tabel 6.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Bulungan 2021-2026.....	VI-11
Tabel 6.3	Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan.....	VI-17
Tabel 6.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bulungan	VI-19
Tabel 6.5	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bulungan.....	VI-26
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 Kabupaten Bulungan.....	VII-2
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulungan Tahun 2021- 2026.....	VIII-3
Tabel 8.2	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bulungan Tahun 2020.....	VIII-9
Tabel 8.3	Target Capaian Standart Pelayanan Minimal Kabupaten Bulungan Tahun 2022-2026.....	VIII-13
Tabel 8.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	VIII-17



DAFTAR GAMBAR dan GRAFIK

A. DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen.....	I-8
Gambar 1.2	Arah Kebijakan Pembangunan dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bulungan.....	I-11
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Bulungan	II-4
Gambar 2.2	Peta Geologi.....	II-16
Gambar 2.3	Peta DAS Kayan Terpadu Kabupaten Bulungan	II-22
Gambar 4.1	Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024.....	IV-2
Gambar 4.2	Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Kalimantan	IV-4
Gambar 4.3	Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Kalimantan	IV-5
Gambar 4.4	Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah di Kalimantan	IV-6
Gambar 4.5	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bulungan.....	IV-29
Gambar 4.6	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bulungan.....	IV-36
Gambar 4.7	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bulungan.....	IV-37
Gambar 6.1	Proses Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kabupaten Bulungan 2021-2026.....	VI-16
Gambar 8.1	Terminologi tahapan pencapaian Visi Pembangunan Daerah	VIII-1



B. DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Kumulatif Pengeluaran Perkapita dan Inflasi di Kabupaten Bulungan.....	II-42
Grafik 2.2	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara	II-44
Grafik 2.3	Perkembangan AHH di Kabupaten Bulungan Periode 2015-2019	II-49
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan AHH di Kabupaten Bulungan.....	II-49
Grafik 2.5	Angka Kematian Balita (AKB) di Kabupaten Bulungan Tahun 2014 – 2018 ...	II-55
Grafik 2.6	Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas Di Kabupaten Bulungan Tahun 2018.....	II 56
Grafik 2.7	Angka Kematian Balita di Kabupaten Bulungan Tahun 2014 – 2018.....	II-57
Grafik 2.8	Angka Kematian Balita Menurut Puskesmas Di Kabupaten Bulungan Tahun 2018.....	II-58
Grafik 2.9	Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kabupaten Bulungan Tahun 2014 – 2018.....	II-59
Grafik 2.10	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bulungan Tahun 2017 - 2018.....	II-60
Grafik 2.11	Luas Panen Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2020	II-70
Grafik 2.12	Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2019.....	II-78
Grafik 2.13	Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2019	II-79
Grafik 2.14	Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bulungan 2015-2019.....	II-79
Grafik 2.15	Kriteria Capaian Target Nasional TPB Kabupaten Bulungan	II-88
Grafik 6.1	Prioritas Pembangunan berdasarkan Pilar TPB dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan.....	VI-3
Grafik 6.2	Prioritas Pembangunan Sosial dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan	VI-3
Grafik 6.3	Prioritas Pembangunan Ekonomi dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan.....	VI-4
Grafik 6.4	Prioritas Pembangunan Lingkungan Hidup dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan.....	VI-4
Grafik 6.5	Prioritas Pembangunan Kemitraan dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan	VI-5



BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan baik untuk jangka Panjang maupun jangka menengah Daerah. Kabupaten Bulungan tentunya memiliki kewajiban pula dalam menyiapkan rencana pembangunan nasional, khususnya rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan RPJMD diawali dengan perumusan naskah teknokratik RPJMD yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir RPJMD yang nantinya menjadi perwujudan visi dan misi kepala daerah dalam Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah yang kemudian dijabarkan dalam rangkaian program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD pada tahap akhir nantinya menjadi masukan bagi diskusi Kepala Daerah baik dengan masyarakat melalui konsultasi publik dan juga diskusi Kepala Daerah dengan DPRD, yang selanjutnya menjadi masukan bagi musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan. Isu strategis daerah, visi dan misi Kepala Daerah, serta kemampuan sumber daya daerah menjadi masukan penting bagi penyusunan Rancangan Akhir RPJMD ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 41 menyebutkan bahwa untuk persiapan penyusunan RPJMD ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;



- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Adapun rancangan teknokratik RPJMD merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud diatas mencakup analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan perumusan isu strategis Daerah.

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Penyempurnaan Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Selanjutnya penyusunan Rancangan Akhir RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Bupati dan Wakil Bupati Bulungan terpilih adalah sebagai berikut :

Bupati : Syarwani, S.Pd.

Wakil Bupati : Ingkong Ala, S.E., M.Si.

Dilantik pada tanggal **26 Februari 2021**

Dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun



Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD 2021-2026 ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dengan ketentuan sistematika sebagai berikut :

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan Daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS

Sehubungan dengan berakhirnya periode Rencana pembangunan jangka menengah daerah sebelumnya maka Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya atau untuk tahun 2021-2026, berdasarkan perumusan yang dilakukan dalam kajian tahapan pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam penentuan visi, misi, sasaran, arah kebijakan, indikasi program dan anggaran maka sebagai perwujudan tahapan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan periode sebelumnya serta tentunya berkelanjutan untuk kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Rencana pembangunan ini disusun dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulungan, yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA”**.

RPJMD Kab.Bulungan ini disusun mengikuti masa jabatan Bupati, mengingat masa jabatan Bupati Kab.Bulungan dimulai saat tahun anggaran telah berjalan atau tahun 2021, maka capaian tahap pertama dalam RPJMD ini ditetapkan untuk direalisasikan dalam tahun 2021-2022, dimana pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian anggaran berjalan untuk mengakomodir 9 (Sembilan) program super prioritas, dan sisa capaian tahun pertama diselesaikan pada tahun anggaran 2022.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam KAK telah disampaikan dasar hukum dari pelaksanaan pekerjaan ini sebagai instrumental input yang perlu diperhatikan/diacu. Secara umum dasar hukum tersebut dapat dilengkapi dan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di



- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 - f. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
 - g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2012, Nomor 229)
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) dan Perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
- m. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73)
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
- p. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- q. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2018 Nomor 1619);

- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 288)
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- aa. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 1/39/2017)
- dd. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3);
- ff. Peraturan daerah kabupaten Bulungan No. 1 tahun 2021 tentang RTRW Daerah Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 1)

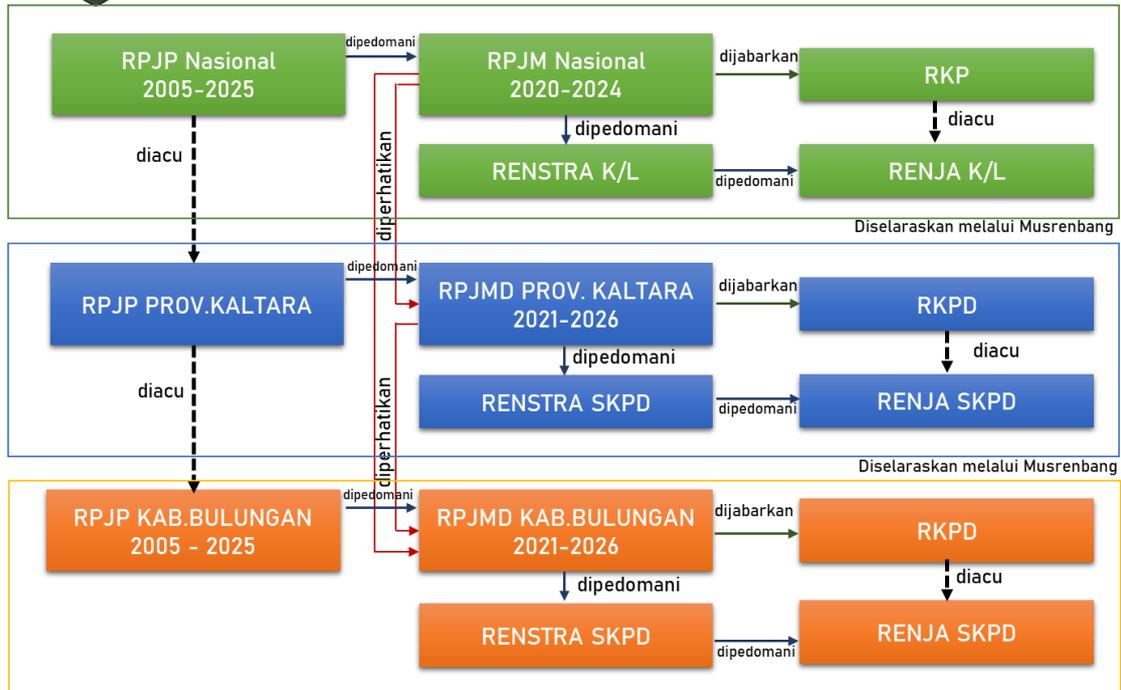


1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Provinsi, demikian pula rencana pembangunan Provinsi adalah bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Nasional merupakan pedoman penyusunan RPJP Provinsi, dan dokumen RPJP Provinsi merupakan pedoman bagi penyusunan RPJP Kabupaten/Kota. Apabila RPJM Nasional merupakan turunan dari RPJP Nasional, maka RPJMD merupakan turunan dari RPJPD. Demikian halnya RPJM Nasional dijabarkan dalam RKP dan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang bersifat perencanaan tahunan. RPJM Nasional juga dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga berdurasi 5 tahunan, dan RPJM Daerah dijabarkan secara implementatif dalam Rencana Strategis OPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025, RTRW Provinsi Kalimantan Utara, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan. Selanjutnya agar RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain apabila memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Bulungan.

Secara umum keterkaitan antar dokumen disampaikan dalam bagan berikut,



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Bulungan 2005-2025

Dokumen RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bulungan merupakan rujukan utama dalam menyusun RPJMD Teknokratik 2021-2026, agar pembangunan di Kabupaten Bulungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan periode implementasi RPJPD 2005-2025, maka periode RPJMD mendatang merupakan tahapan yang keempat atau terakhir.

Arahan RPJPD 2005-2025 yang digunakan dalam penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratik ini adalah VISI dan MISI yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang dan memperhatikan kondisi, potensi, keragaman daerah serta peluang dan tantangan masa depan, maka seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bulungan memiliki pandangan jauh ke depan yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, maka ditetapkan Visi dan Misi rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD 2005-2025) Kabupaten Bulungan, sebagai berikut:



“KABUPATEN BULUNGAN SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN YANG UNGGUL DALAM BIDANG AGROINDUSTRI SERTA DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH”

Visi dimaksud mengandung makna adanya harapan yang hendak dicapai oleh segenap masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian terutama bidang agroindustri yang unggul serta didukung oleh sumber manusia yang tangguh. Makna visi tersebut adalah:

- Unggul dalam bidang agroindustri, berdasarkan letak geografi kabupaten bulungan yang berada pada posisi strategis di wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Bulungan sangat tepat sebagai pusat perekonomian terutama di bidang agroindustri yang potensial untuk mengakses keluar daerah baik regional/ nasional misalnya ke Surabaya, Makassar maupun internasional misalnya ke Malaysia dan Filipina, dan kedalam sebagai hubungan dengan daerah lain dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur (Connecting Area) terhadap mobilitas barang dan jasa dengan penyediaan infrastruktur dasar kabupaten yang lengkap. Pengembangan agroindustri sebagai unggulan masa depan Kabupaten Bulungan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas yang dihasilkan dan penyerapan tenaga kerja yang terus bertambah dari tahun ke tahun.
- Sumber daya manusia yang Tangguh. Kabupaten Bulungan, sebagaimana layaknya kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur (Kalimantan Utara pada saat ini), memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Pengembangan sumber daya alam di Kabupaten Bulungan bersifat renewable (dapat diperbaharui) sehingga pembangunan secara berkelanjutan (sustainable) lebih mudah terwujud, serta dampak negatif terhadap perusakan lingkungan dapat diperkecil. Mewujudkan pusat perekonomian bidang agroindustri yang unggul tidaklah mudah, sebab harus didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh, yaitu sumber daya manusia yang kreatif, berkemauan keras untuk maju serta memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik (Iptek dan Imtaq). Keberhasilan dalam pembentukan sumber daya manusia yang tangguh merupakan modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Bulungan yang maju serta kunci keberhasilan bagi pengembangan sektor unggulan pada bidang agroindustri serta sektor-sektor lain yang terkait dalam satu atau rantai yang saling memperkokoh struktur perekonomian dan sosial Kabupaten Bulungan.



RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Keempat (terakhir) dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025. Secara khusus, periode terakhir RPJMD ini durasinya hanya empat (4) tahun, karena adanya wacana pemilu kepala daerah serentak pada tahun 2024 (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa visi RPJPD Kabupaten Bulungan 2005-2025 adalah “*Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Perekonomian Yang Unggul Dalam Bidang Agroindustri Serta Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Tangguh*”. Visi dimaksud mengandung makna adanya harapan yang hendak dicapai oleh segenap masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian terutama bidang agroindustri yang unggul serta didukung oleh sumber manusia yang tangguh.

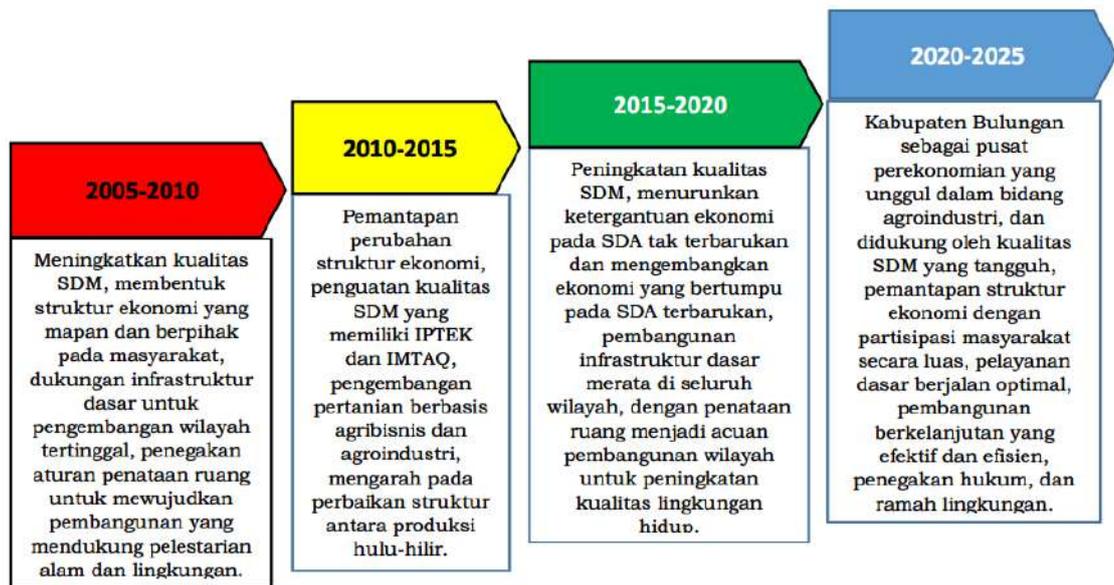
Berdasarkan makna kata yang membentuk visi tersebut, maka ditetapkan misi RPJPD 2005-2025 yang merupakan penjabarannya lebih lanjut, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian bidang agroindustri yang unggul dalam pasar regional dan internasional.
- 2) Mewujudkan kabupaten Bulungan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia bidang agroindustri yang tangguh dalam lingkungan regional dan internasional.
- 3) Mempercepat peningkatan infrastruktur dasar.
- 4) Menciptakan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan pengembangan sosial budaya.
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 7) Menegakkan supremasi hukum.
- 8) Meningkatkan pelayanan publik.
- 9) Mengembangkan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian, dari ke-9 misi tersebut diturunkan kembali ke dalam arah kebijakan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Bulungan secara bertahap harus dituangkan dalam RPJMD seperti tertera dalam Gambar 2.1, dan RPJMD mendatang yang akan disusun merupakan tahapan yang keempat atau terakhir. Arah kebijakan RPJPD untuk periode terakhir ini, yaitu *Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian yang unggul dalam bidang agroindustri, dan didukung oleh*

kualitas SDM yang tangguh, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat secara luas, pelayanan dasar berjalan optimal, pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien, penegakan hukum, dan ramah lingkungan.

Secara garis besar, arah kebijakan tersebut sudah cukup sejalan dengan visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih. Namun tetap perlu ada sinkronisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, dokumen RPJMD ini harus mengacu arah kebijakan tersebut dan juga mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam lima tahun terakhir, agar pembangunan berkelanjutan tetap terjaga dan penetapan prioritas pembangunan dapat dilakukan



Gambar 1.2 Arah Kebijakan Pembangunan dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bulungan

Sumber : RPJPD Kabupaten Bulungan 2005-2025

Berdasarkan tahapan dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Bulungan mengacu kepada arah kebijakan pada tahapan keempat atau tahap terakhir dengan arah kebijakan: Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian yang unggul dalam bidang agroindustri, dan didukung oleh kualitas SDM Tangguh, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat secara luas, pelayanan dasar berjalan optimal, pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien, penegakan hukum, dan ramah lingkungan.



b. Hubungan RPJMD Kabupaten Bulungan dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Bulungan harus mengacu dan selaras dengan RPJPD dan RPJMD Propinsi Kalimantan Utara karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan propinsi dan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan yang tertuang dalam **7 Agenda Pembangunan Nasional** menjadi payung besar dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2025.

Selain 7 agenda pembangunan nasional, RPJM Nasional Tahun 2020-2024 juga memuat 41 **Daftar Proyek Prioritas Strategis** (*Major Project*) RPJMN 2020-2024, dan diantaranya terdapat 1 proyek prioritas strategis yang terdapat di Kabupaten Bulungan, yakni Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor.

Jika dilihat arah kebijakan berdasarkan wilayahnya, yaitu Kalimantan, prioritas pembangunan wilayah Kalimantan pada tahun 2020-2024 yaitu:

- (1) hilirisasi pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas;
- (2) penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir;
- (3) pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
- (4) percepatan pembangunan kawasan perbatasan; serta, (5) pelestarian kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo).

Berikut rencana pembangunan yang terdapat di Kabupaten Bulungan dalam RPJM Nasional 2020-2024:



Tabel 1.1 Tinjauan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional 2021-2024 terkait Kabupaten Bulungan

No	ARAHAN PENGEMBANGAN	ARAHAN KEGIATAN	ARAHAN FUNGSI	TAHUN PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
1.	Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor (<i>Major Project</i>)	Penyediaan air baku di kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Kota Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan negara dan berdekatan dengan PKN Tarakan yang merupakan pusat kegiatan regional. Potensi kenaikan jumlah penduduk sebesar 8% dari eksisting 2019 hingga tahun 2024 (Kab. Bulungan) Meningkatkan indeks kota berkelanjutan di Kab. Bulungan 	2020-2024	APBN, Badan Usaha & Swasta / KemenPUPR
		Pembangunan bendungan baru yang dibangun (B.Kayan)		BUMN dan/atau swasta	
		Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT)		KemenPUPR	
		Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor		Kemenhub	
		Pengembangan Bandara Tanjung Harapan		Kemenhub	
		Pembangunan <i>Command Center</i>		POLRI	
		Pengembangan Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan		Kemenhub	



No	ARAHAN PENGEMBANGAN	ARAHAN KEGIATAN	ARAHAN FUNGSI	TAHUN PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
		(BRT) di Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan			
2	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	<i>Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor di Kalimantan Utara</i>		2022-2023	Kemenhub
3	Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan		Revitalisasi kawasan transmigrasi di antara lain Kawasan Transmigrasi Salim Batu		
4	Pengembangan Kawasan Strategis KI Tanah Kuning	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Tanah Kuning			
5	Pengembangan Kawasan Strategis	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Tanah Kuning	Pengelolaan Sumber Daya Air	2020-2024	KemenPUPR
6	Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan	Penyediaan fasilitas Sarana Pascapanen			



No	ARAHAN PENGEMBANGAN	ARAHAN KEGIATAN	ARAHAN FUNGSI	TAHUN PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
		Tanaman Pangan			
7	Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Akselerasi Replanting dan Penerapan			
8	Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Kawasan lada, pala, cengkeh di Prrovinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	2020-2024	
		<i>Pengembangan Bandara Tanjung Harapan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara</i>	Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	2021-2022	APBN /Kemenhub
9	Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran di Kabupaten Bulungan			
		Sertipikat Hak Pengelolaan		2021 & 2024	



No	ARAHAN PENGEMBANGAN	ARAHAN KEGIATAN	ARAHAN FUNGSI	TAHUN PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
		Transmigrasi di Kabupaten Bulungan			
		Sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan		2020-2022	
10	Pembangunan Desa Terpadu	Desa Digital (P3PD di Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan Sarana Prasarana Desa	2020, 2021, 2023	
		Penetapan Batas Desa			
11	Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan	Pendampingan pada 74.957 Desa di Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		2020-2024	
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			
		Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			



No	ARAHAN PENGEMBANGAN	ARAHAN KEGIATAN	ARAHAN FUNGSI	TAHUN PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
		Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes di Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	2020-2023	
		BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa di Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	2020-2023	
		BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya di Kab. Bulungan		2020-2024	



No	ARAHAN PENGEMBANGAN	ARAHAN KEGIATAN	ARAHAN FUNGSI	TAHUN PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
		Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry			
12	Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	2020-2024	
		Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL di Kab. Bulungan	Penyediaan Tanah Transmigrasi	2021 & 2024	
		Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan	2020-2024	



No	ARAHAN PENGEMBANGAN	ARAHAN KEGIATAN	ARAHAN FUNGSI	TAHUN PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
		dikembangkan dan fungsional di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan	Transmigrasi		
		Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan	Pengembangan Usaha Transmigrasi	2020, 2022, 2024	
		Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran di Kabu. Bulungan	Peningkatan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	2020-2022	

Sumber: Hasil analisis, 2021 & RPJMN 2020-2024

c. Hubungan RPJMD dengan RPJM Provinsi Kalimantan Utara

Rencana Pembangunan Propinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang hingga saat laporan ini dituliskan tertuang dalam Rancangan RPJMD Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merancang pembangunan di Kabupaten Bulungan sesuai kondisi daerah. Substansi permasalahan dan isu strategis



pembangunan propinsi lima tahunan yang tertuang dalam agenda “*Kalimantan Utara harus berubah, maju, dan sejahtera melalui 14 misi yang dirangkum dalam 10 program strategis*” (<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/sempernakan-rpjmd-gubernur-selenggarakan-konsultasi-publik/>) menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

d. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bulungan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RTRW Provinsi Kalimantan Utara dan RTRW Kabupaten Bulungan, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola, struktur tata ruang, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

e. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya

Sebagai bagian dari subsistem perencanaan pembangunan, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan substansi didalam RPJMD Kabupaten Bulungan yang disusun perlu ditelaah secara komprehensif, baik dokumen mulai dari



level Kabupaten Bulungan sendiri, Provinsi Kalimantan Utara, Nasional, dan Dokumen Perencanaan wilayah lain yang mungkin berkaitan. Beberapa dokumen yang perlu dikaji antara lain:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan
- RPJPD Kabupaten Bulungan
- RPJM dan RPJP Provinsi Kalimantan Utara
- Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kabupaten/Kota yang berbatasan yang mungkin ada keterkaitan
- Dokumen terkait lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RTRW Kabupaten Bulungan yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bulungan dalam jangka menengah selama 5 (lima) tahun kedepan, nilai-nilai hubungan keterkaitan atau pengaruh tersebut antara lain:

1. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda dan Litbang;
5. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;
7. Capaian RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026 pada tahun pertama merupakan kombinasi capaian 9 (Sembilan) program super prioritas yang dilakukan melalui penyesuaian anggaran berjalan melalui mekanisme perubahan anggaran atau penyesuaian kegiatan yang memiliki program yang selaras dengan 9 (Sembilan) program super prioritas, untuk selanjutnya keseluruhan capaian pada tahapan pertama RPJMD 2021-2026 diselesaikan pada tahun anggaran 2022.

Untuk menjaga nilai strategis dan politis sebagaimana dimaksud diatas, maka maksud maksud dari disusun dan ditetapkannya RPJMD ini adalah sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bulungan sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kabupaten Bulungan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, kolaboratif, integratif, koordinatif, dan berdaya saing.



Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyempurnaan RPJMD Teknokratik melalui penjabaran Visi dan Misi Bupati Bulungan Periode 2021-2026 yang diwujudkan kedalam nilai strategis dan politis, yaitu:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bulungan dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
5. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Bupati Kabupaten Bulungan dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bulungan periode 2021-2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026 yang terdiri dari 9 (sembilan) bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan beserta landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud, tujuan, sasaran, serta ruang lingkup pekerjaan.



BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada bagian ini akan berisi gambaran umum karakteristik wilayah Kabupaten Bulungan, serta gambaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulungan.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Pada bagian ini akan berisi gambaran umum keuangan daerah baik yang diambil dari data keuangan daerah maupun hasil analisis.

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Pada bagian ini akan disampaikan mengenai permasalahan yang ada didalam Pembangunan Kabupaten Bulungan berdasarkan kondisi daerah, dan juga isu strategis yang merupakan turunan dari permasalahan strategis yang dikombinasikan dengan rencana program prioritas jangka menengah daerah.

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini akan disampaikan mengenai visi dan misi Bupati Bulungan yang nantinya menjadi arahan bagi perumusan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, serta Indikator Kinerja pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bulungan untuk kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Bulungan dalam jangka menengah.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan



pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Kondisi Geografi dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bulungan secara astronomis, terletak antara 2° 09' 19" – 3° 34' 48" Lintang Utara dan 116° 04' 41" – 117° 57' 56" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bulungan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan;

Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;

Sebelah Barat : Kabupaten Malinau;

Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan.

Luas Wilayah Kabupaten Bulungan sekitar 13.181,92 km² yang terbagi menjadi 10 Kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Peso dengan luas wilayah mencapai 3.142,79 km² atau 23,84% dari luas Kabupaten Bulungan. Diurutan kedua ada Kecamatan Sekatak dengan luas wilayah mencapai 1.993,98 km² atau 15,13%, selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas dengan luas wilayah mencapai 1.755,74 km² dan Kecamatan Peso Hilir dengan luas wilayah 1.639,71 km². Sementara itu Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Bunyu dengan luas wilayah sebesar 198,32 km² atau 1,50% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan, Kemudian diikuti oleh Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor dan Tanjung Palas Utara. Selain wilayah daratan yang berada di Pulau Kalimantan, Kabupaten Bulungan juga memiliki wilayah daratan yang berupa pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 86 pulau yang tersebar di tujuh Kecamatan (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau
1. Bunyu	Bunyu Barat	198,32	1,50	7
2. Peso	Long Bia	3.142,79	23,84	-
3. Peso Hilir	Long Tunggu	1.639,71	12,44	-
4. Sekatak	Sekatak Buji	1.993,98	15,13	15
5. Tanjung Palas	Gunung Putih	1.755,74	13,32	1
6. Tanjung Palas Barat	Long Beluah	1.064,51	8,08	3
7. Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	624,95	4,74	-



Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau
8. Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	1.277,81	9,69	1
9. Tanjung Palas Utara	Karang Agung	806,34	6,12	59
10. Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	677,77	5,14	0
Kabupaten Bulungan		13.181,92	100,00	86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Secara Administrasi 10 Kecamatan di Kabupaten Bulungan di bagi menjadi 81 Kelurahan dan Desa. Dilihat dari jumlah desa per kecamatan (Tabel 2.2) ada dua hal yang menarik, pertama kesenjangan luas desa relatif sangat besar, kedua selama lima tahun terakhir tidak terjadi pemekaran desa dalam kecamatan yang wilayahnya luas (BPS, Kabupaten Bulungan, 2021) sebagai Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.2 Jumlah dan Luas Rata-rata Wilayah Kelurahan dan Desa di Masing-masing Kecamatan Kabupaten Bulungan

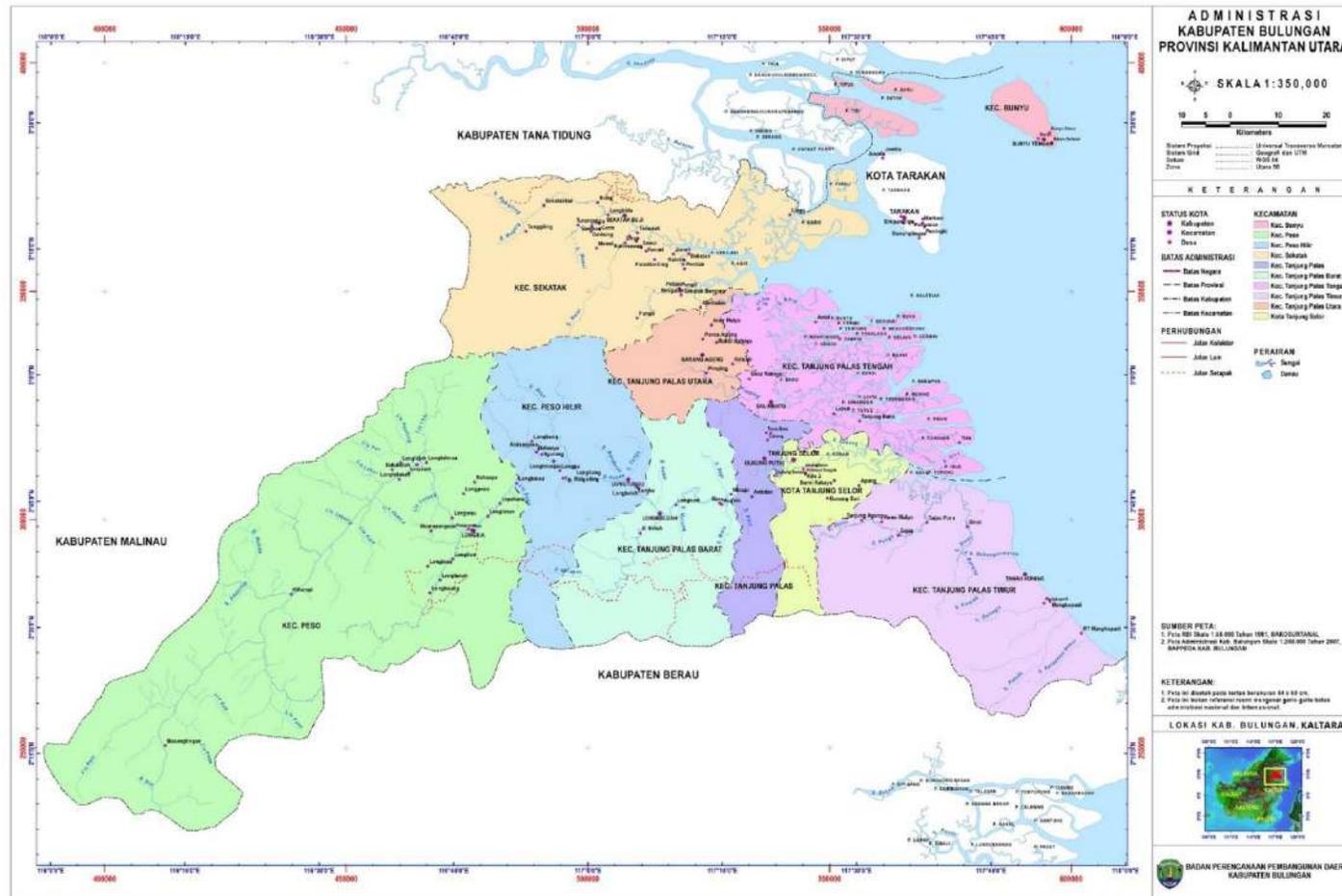
Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Proporsi luas Desa (%)
Bunyu	Bunyu Barat	198,32	1,50	3	0,50%
Peso	Long Bia	3.142,79	23,84	10	2,38%
Peso Hilir	Long Tunggu	1.639,71	12,44	6	2,07%
Sekatak	Sekatak Buji	1.993,98	15,13	22	0,69%
Tanjung Palas	Gunung Putih	1.755,74	13,32	9	1,48%
Tanjung Palas Barat	Long Beluah	1.064,51	8,08	5	1,62%
Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	624,95	4,74	3	1,58%
Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	1.277,81	9,69	8	1,21%
Tanjung Palas Utara	Karang Agung	806,34	6,12	6	1,02%
Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	677,77	5,14	9	0,57%
Kabupaten Bulungan		13.181,92	100,00	81	100,00%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021



Pemerataan Pembangunan pedesaan di Kabupaten Bulungan masih menghadapi permasalahan isolasi wilayah. Dampaknya, pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih terisolir belum dapat dilakukan secara maksimal, khususnya untuk infrastruktur dasar. Indikator yang digunakan untuk menilai status isolasi wilayah adalah letak geografis yang berhubungan dengan infrastruktur perhubungan, dan proporsi rata-rata luas wilayah desa. Berdasarkan indikator tersebut, desa-desa yang terisolasi terdapat di Kecamatan Peso, Peso Hilir, dan Tanjung Palas Barat.

Kondisi demikian harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan untuk lima tahun mendatang (RPJMD 2021-2026) yang akan diimplementasikan oleh kepala daerah hasil pemilihan umum daerah mendatang. Pemekaran jumlah desa untuk kecamatan dengan rata-rata proporsi luas desa >1,5% perlu didorong, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan menurunkan derajat isolasi wilayah. Rata-rata proporsi luas desa yang ideal berdasarkan data empiris untuk Kabupaten Bulungan adalah sekitar 1% dari luas wilayah kabupaten yang mencapai 13.181,92 km². Jadi ada lima kecamatan di Kabupaten Bulungan yang layak melakukan penambahan jumlah desa, tentunya dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi. Sehingga, pemekaran jumlah desa tersebut benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani pemerintah daerah.



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bulungan

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan



B. Topografi

Topografi Kabupaten Bulungan berupa pulau-pulau kecil, dataran, cekungan, perbukitan bergelombang, pegunungan, dan gunung-gunung. Topografi Kabupaten Bulungan mulai dari pantai Timur dengan ketinggian 0 meter dari permukaan laut (m dpl) hingga gunung-gunung di bagian Barat (Gunung Kundas 1.670 m dpl) yang meliputi Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Sekatak. Pembagian topografi dan kriteria bentuk lahan, ketinggian, kemiringan lereng di Kabupaten Bulungan dibagi menjadi lima wilayah sebagai berikut:

1. Wilayah yang relatif datar pada topografi dataran dan cekungan dengan batuan endapan dan bukan endapan. Dataran, dataran pantai, daerah rawa, daerah bantaran dan meander sungai. Wilayah ini kemiringan (0 - 8)%. Beda tinggi (5 - 10) meter terletak pada ketinggian (0 - 100) meter dpl.
2. Wilayah yang relatif miring atau berada pada topografi dataran miring hingga berombak, kemiringan lereng (8 - 15)% dengan beda tinggi (10 - 20) meter, terletak pada ketinggian (100 - 500) meter. Topografi berombak terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor (Apung dan Bumi Lestari), Kecamatan Sekatak dengan puncak bukit/gunung sekatak (250 m dpl) dan gunung Sulid (300m dpl), Kecamatan Tanjung Palas dengan puncak Gunung Putih (450 m dpl), Gunung Setarat, dan Gunung Takin.
3. Wilayah pegunungan, gunung, perbukitan dengan kemiringan lereng (15-25)%, relief dengan beda tinggi (20 - 30) meter terletak pada ketinggian (500 - 1000) meter dpl; Pegunungan dengan puncak gunung di Kecamatan Peso Puncak Gunung Ubut Lembung (700 m dpl), Gunung Brun (934 m dpl), di Kecamatan Tanjung Palas dengan puncak Gunung Mara (700 m dpl) dan Gunung Beras.
4. Daerah bukit terjal dan lereng atau berupa lereng bukit dan lereng gunung terjal kemiringan lereng (25 - 40) %. Relief dengan beda tinggi (30-50) meter, terletak pada ketinggian (1.000 - 1.500) meter dpl antara lain di Kecamatan Peso dengan puncak Gunung Jamuk, Gunung Kopoi, Gunung Keluh/Kelu (1.100 mdpl), di Kecamatan Tanjung Palas Gunung Sondong (1.052 m dpl), Gunung Beras, di Kecamatan Sekatak dengan puncak Gunung Sombang (1.450 m dpl)
5. Wilayah puncak gunung yang sangat terjal atau puncak bukit dengan kemiringan lereng >40%. Relief ini mempunyai beda tinggi >50 meter pada ketinggian >1.500 meter dpl, di Kecamatan Peso dengan puncak Gunung Bekayan (1.599 m dpl) dan Gunung Kundas (1.670 m dpl).



Bentuk lahan (Landform) Kabupaten Bulungan terdiri atas 8 (delapan) kelompok, yaitu daerah rawa pantai, rawa sungai dataran, dataran pantai, dataran alluvial, perbukitan kecil, perbukitan bergelombang, pegunungan, dan gunung. Deskripsi kondisi bentuk lahan 8 (delapan) kelompok fisik/ fisiografi adalah berikut.

1. Daerah rawa pantai yaitu daerah dataran banjir berawa yang terletak di tepi pantai dengan air payau terdapat di Kabupaten Bulungan bagian timur, yaitu kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bunyu.
2. Rawa sungai merupakan dataran/cekungan yang tergenang air terdapat pada lembah-lembah sempit dan bantaran sungai Bentuk lahan ini merupakan daerah cekungan dengan kemiringan lereng antara (0 - 2)% dan perbedaan tinggi < 5 meter. Rawa sungai tersebar di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan pulau-pulau di Kecamatan Bunyu.
3. Dataran pantai merupakan wilayah dataran yang masih dipengaruhi proses marin dengan kemiringan lereng (0-2)%, beda tinggi 5-10 meter, terletak di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bunyu.
4. Dataran alluvial dengan bentuk lahan relatif dataran dari batuan endapan dan bukan endapan, serta batuan beku mulai dataran landai dengan kemiringan lereng (2 - 8)%, beda tinggi (10-20) meter pada ketinggian (10 - 225) meter, Bentuk lahan ini terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bunyu.
5. Perbukitan kecil dengan ketinggian kurang dari 500 m dpl, kemiringan lereng (8 - 15)%; relief beda tinggi (10 - 50) meter. Bentuk lahan ini terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor (Apung dan Bumi Lestari), Kecamatan Sekatak dengan puncak bukit/Gunung Sekatak (250 m dpl) dan Gunung Sulid (300m dpl), Kecamatan Tanjung Palas dengan puncak Gunung Putih (450 m dpl), Gunung Setarat, dan Gunung Takin.
6. Perbukitan bergelombang dengan lereng pegunungan ketinggian antara (500 - 1000) m dpl, kemiringan lereng (8 - 15)%; sedangkan relief beda tinggi (10 - 50) meter. Bentuk Lahan ini terdapat di Kecamatan Peso Puncak Gunung Ubut Lembung (700 m dpl), Gunung Brun (934 m dpl), di Kecamatan Tanjung Palas dengan puncak Gunung Mara (700 m dpl) dan Gunung Beras.
7. Pegunungan dengan bukit punggung terjal, ketinggian (1000 - 1500) m dpl, kelerengan/ kemiringan lereng antara (15 - 40)% dengan relief beda tinggi (30 - 50) meter. Bentuk lahan ini merupakan perbukitan kapur di Kecamatan Peso



dengan puncak Gunung Jamuk, Gunung Kopoi, Gunung Keluh/Kelu (1.100 mdpl), di Kecamatan Tanjung Palas Gunung Sondong (1.052 m dpl), Gunung Beras, di Kecamatan Sekatak dengan puncak Gunung Sombang (1.450 m dpl).

- Gunung/ Volkan tua ketinggian >1.500 m dpl, kelerengan/ kemiringan lereng antara >40% dengan relief beda tinggi > 50 meter. Puncak-puncak gunung ini terletak di Kecamatan Peso, yaitu puncak Gunung Bekayan (1.599 m dpl) dan Gunung Kundas (1.670 m dpl).

Hubungan antara bentuk lahan, relief topografi, kemiringan lereng, beda tinggi, dan ketinggian Kabupaten Bulungan, dari hasil analisis kondisi fisik (unit relief, bentuk lahan, ketinggian, lereng, letak) penelitian ini dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Hubungan antara relief, kemiringan lereng, dan beda tinggi relatif Kabupaten Bulungan

No	Unit Relief	Bentuk lahan	Lereng %	Beda Tinggi Relatif (m)	Letak Ketinggian (m dpl)
1.	Topografi gisik dan rawa pantai	- Dataran pantai (gisik pantai) - Pasir pantai - Rawa pantai	0 - 2	< 2	0 - 5
2.	Topografi datar - hampir datar	- Lembah fluvial - Dataran fluvial - Dataran sekitar sungai	0 - 2	< 2	0 - 50
3.	Topografi berombak lereng landai	- Kaki perbukitan - Perbukitan denudasi	3 - 8	> 5	50 - 100
4.	Topografi miring dan berombak	- Kaki perbukitan - Perbukitan denudasi	8 - 15	5-10	100 - 500



5.	Topografi bergelombang lereng agak curam	– Perbukitan denudasi – Perbukitan terisolir	15 – 25	10-25	500-1000
6.	Topografi bukit bergelombang lereng curam	– Pegunungan Karst / Kapur	25 – 40	25-50	1000- 1500
7.	Topografi pegunungan dan Perbukitan sangat curam	– Punggung gunung Perbukitan tektonik, – Perbukitan karst	> 40	> 50	> 1500

Sumber : RPJMD Kabupaten Bulungan 2016-2021

Kabupaten Bulungan, yang menunjukkan hubungan antara bentuk lahan, relief topografi, kemiringan lereng, beda tinggi, dan ketinggian, yang diperoleh dari hasil analisis kondisi fisik, yang menggambarkan hubungan 7 (tujuh) macam unit relief topografi di Kabupaten Bulungan terhadap bentuk lahannya, yaitu (1) Topografi gisik dan rawa pantai, (2) Topografi cekungan dan dataran, (3) Topografi dataran dengan lereng landai, (4) Topografi berombak lereng miring, (5) Topografi berbukit dan bergunung lereng terjal, (6) Topografi berbukit terkikis lereng terjal, dan (7) Pegunungan/Gunung dan bukit terkikis dengan lereng sangat terjal.

C. Morfologi

Berdasarkan morfologi di wilayah Kabupaten Bulungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) satuan morfologi, yaitu: satuan morfologi dataran dan satuan morfologi perbukitan bergelombang. Satuan morfologi dataran menempati wilayah berketinggian antara 0-50 m dpl, dicirikan oleh kemiringan lereng $< 10^{\circ}$. Batuan pembentuk satuan morfologi ini terutama adalah endapan aluvium pantai dan sungai, dengan pola aliran sungai *anastomatik*, yang mencerminkan tingkat erosi dewasa. Sedangkan morfologi perbukitan bergelombang berkembang di daerah dengan ketinggian antara 50 – 1600 m dpl, dengan kemiringan lereng antara 10° – 40° . Batuan pembentuk satuan morfologi ini sebagian besar adalah satuan batuan sedimen dan vulkanik. Pola aliran sungai yang berkembang berbentuk dendritik – sub dendritik yang mencerminkan bahwa tahap erosi muda menuju dewasa.

D. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Bulungan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2021 sebesar 231,63 mm/tahun, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan desember yaitu 492,10 mm dan terendah pada bulan juni 131,10 mm. Rata-rata hari hujan selama tahun 2021 tercatat 20 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Oktober yaitu 23 hari dan terendah pada bulan April sebanyak 16 hari.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2021 sebesar 85,67%, tertinggi 87% pada Bulan Juli dan terendah 83,47% pada Bulan April. Temperatur berkisaran pada interval antara suhu minimal 22,70°C pada Bulan Desember dan suhu maksimum 35,50°C pada Bulan Mei dan Juni, dengan rata-rata suhu 27,48°C. Kondisi iklim menunjukkan gejala suhu yang semakin panas dibandingkan tahun sebelumnya yang rata-rata suhu hanya mencapai 26,65°C. Dengan demikian terjadi isu perubahan iklim yang lebih cepat dan perlu disikapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.4 Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari 2020

BULAN	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	257,30	21	59,45
Februari	229,70	22	62,81
Maret	246,70	20	69,49
April	156,20	16	86,94
Mei	171,10	19	67,58
Juni	131,10	20	55,10
Juli	235,20	22	69,21
Agustus	180,00	21	84,17
September	135,30	21	57,54
Oktober	381,60	23	63,71
November	163,30	21	69,09
Desember	493,10	21	55,19
Rata-rata	231,63	20,583	66,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Tabel 2.5 Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kabupaten Bulungan

BULAN	Suhu Udara (°C)			Lembab Nisbi (%)	Tekanan Udara (mb)
	Rata-rata	Max	Min		
Januari	27,11	34,80	22,80	86,58	1010,08
Februari	27,34	35,10	23,00	83,98	1011,06
Maret	27,42	34,00	23,60	85,90	1010,23
April	28,03	34,30	23,80	83,47	1010,04
Mei	28,17	35,50	23,90	85,56	1009,05
Juni	27,37	35,50	23,60	86,93	1009,07
Juli	27,06	34,20	23,00	87,00	1008,37
Agustus	27,89	35,30	23,00	83,73	1008,74
September	27,29	34,60	23,20	86,27	1008,79
Oktober	27,34	35,40	23,00	86,53	1008,01
November	27,63	34,20	23,20	85,16	1008,65
Desember	27,14	34,80	22,70	86,95	1007,79
Rata-rata	27,48	34,80	23,23	85,67	1009,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

E. Geologi

Kabupaten Bulungan menurut Bemmelen (1949) struktur utamanya merupakan gunung api tua dan sedimentasi, serta batuan metamorfik. Produk yang dihasilkan menutupi sebagian wilayah dari blok pegunungan dan membentuk perbukitan hingga dataran panepalain (dataran) bagian timur. Geologi Kabupaten Bulungan seperti Tabel 2.2, berdasarkan pembentukannya dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yaitu (1) batuan endapan permukaan, (3) batuan intrusiv, (3) batuan sedimen, dan (4) batuan vulkanik. Setiap kelompok terdiri dari beberapa formasi/ jenis batuan seperti Tabel 2.6.

Masing-masing jenis batuan diuraikan sebagai berikut:

- 1. Batuan endapan permukaan** di Kabupaten Bulungan merupakan endapan/ sedimen klastik atau endapan yang terbentuk oleh proses mekanik, berupa Endapan Alluvium (Qa) yang tersusun secara klastik, berumur *Holosen*, berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, dan lumpur. Lumpur pasir berwarna kelabu, plastisitas rendah dan lunak. Batu pasir berwarna putih keabuan, berbutir halus-sedang seragam. Komposisi satuan batu lumpur, pasir, kerakal, bahan tumbuhan perbandingan tidak selaras, di atas batuan dasar yang terlapuk. Sebarannya pada lingkungan sungai, rawa, pantai dan rawa pantai, yang



terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara (muara sungai), Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas tengah, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kec Tanjung Palas Timur.

2. **Batuan beku intrusive**(plutonik) merupakan proses pembentukan batuan beku dengan pendinginan batuan lambat, sehingga membentuk butir-butir kasar, padat, kuat, tidak berongga dan holokristalin. Batuan beku intrusif berupa granite berwarna cerah dan berbutir kasar, tersusun dari kwarsa, feldspar hingga gabro berwarna gelap berbutir kasar. Kandungan mineral magnesium besi (*ferro magnesian*) dan feldspar. Sebagian besar batuan beku intrusif berada pada susunan peralihan granit dan gabro, yang disebut granitik. Batuan granitik adalah batuan intrusif yang kasar dan berwarna cerah, terjadi sebagai formasi masif dan tidak berlapis, sering terdapat banyak retakan yang arahnya tidak teratur. Retakan terjadi akibat pendinginan dan atau pembebasan tekanan karena beban di atasnya tererosi. Batuan granitik tahan terhadap erosi, jika lapuk cenderung pecah atau terkelupas membentuk lapisan konsentris. Proses tersebut biasa disebut *eksfoliasi*. Batuan beku intrusif yang terdapat di Kabupaten Bulungan dapat dibedakan dalam 2 (dua) formasi/jenis batuan sebagai berikut:
 - a. Intrusif kuartar (Qpi) adalah batuan beku intrusif intermediate merupakan endapan plutonism sub-volcanic berupa diorit yang susunannya berkisar antara diorit sampai diorit kuarsa, dengan bintik mineral mafik terdapat sebagai stok. Setempat terpecah- pecah dan berubah. Formasi intrusif kuartar ini berumur Pleistosen Awal hingga Pleistosen Akhir. Jenis batuan ini dijumpai di Kecamatan Sekatak berasosiasi dengan endapan alluvium (Qa) dan Formasi Bakara (Mzb).
 - b. Sumbat Renas (Tmg) adalah batuan beku intrusif felsik, granitoid merupakan endapan plutonism sub-volcanic, merupakan campuran batuan beku dan sedimen. Susunannya terdiri dari batuan beku andesit, basal, dasit, diorit horeblend, dan basalt dengan bintik- bintik mafik, sebagai batuan terobosan (Stok). Batuan ini merupakan bahan galian konstruksi yang cukup potensial untuk dikelola. Sumbat rentas ditemukan di perbukitan Kecamatan Peso, berumur Miosen Tengah.
3. **Batuan sedimen** terbentuk dari hasil pemisahan atau penguraian batuan asal. Batuan sedimen dapat berupa batu pasir (sandstone), batu liat (shale), dan batu kapur (limestone). Batuan sedimen terbentuk karena pemisahan dan atau penguraian disebabkan oleh pengaruh fisik alam dan atau kimia alam. Pemisahan atau penguraian batuan biasa disebut pelapukan batuan



disebabkan faktor hujan, pendinginan, isolasi atau perubahan temperatur antara siang dan malam, dan angin. Partikel yang terpisah dibawa oleh angin, air atau mineral lain ke suatu tempat, diendapkan dan mengeras karena litifikasi (sementasi dan pemadatan karena timbunan endapan), dan terbentuk batuan sedimen, biasanya berlapis-lapis. Batuan sedimen merupakan batuan terluas di dunia. Klasifikasi batuan sedimen berdasarkan tekstur dan komposisi mineralogisnya dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu

Sedimen klastik, terbentuk oleh proses mekanik, dan Sedimen non-klastik, oleh proses kimiawi. Klasifikasi batuan sedimen umumnya didasarkan pada mode (jenis) kejadiannya, yaitu batuan sedimen klastik dan batuan sedimen non-klastik, meskipun batasnya tidak tegas. Batuan Endapan (Sedimen) yang terdapat di Kabupaten Bulungan, dapat dibedakan dalam 14 (empatbelas) formasi/ jenis batuan, masing-masing formasi/jenis batuan sebagai berikut:

- A. Formasi Long Bawan (KTlb), merupakan endapan batuan kapur/gamping yang tersusun secara klastik dari batuan endapan *flysch* terdiri dari argilit jingga hingga hijau muda, mudah hancur dan bersisipan batu pasir felsparan dan lapisan batubara setebal 0,5 hingga 1,5 m. Formasi ini merupakan proses fisik pendataran membentuk delta, berumur *Kapur Akhir* hingga *Paleosen Akhir*. Formasi Long Bawan tidak terdapat pada membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan
- B. Formasi Mentarang (KTme) merupakan endapan pasir yang tersusun secara klastik, terdiri dari batu pasir berwarna kelabu biru kehijauan, mengandung kuarsa dan felspar serta mika dan bersisipan argilit dan serpih. Formasi ini terjadi oleh endapan neritik dangkal, berumur *Kapur Akhir* hingga *Paleosen Akhir*. Formasi batuan ini membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan di hulu sungai Kayan. Sebaran di Kabupaten Bulungan sangat dominan di Kecamatan Peso dan Kecamatan Sekatak bagian barat.
- C. Formasi Bengara (Mzb) merupakan endapan kapur dengan proses klastik berupa batu gamping, kuarsa, dan grafit, setempat terdapat jalur koyak (patahan) batusabak berkembang baik. Banyak terdapat urat kuarsa, sulfide magmatik biasanya mengandung emas. Formasi ini dari endapan litoral pada proses marin dari laut dalam, yang terjadi pada *Kapur Awal* hingga *Kapur Akhir*. Di Kabupaten Bulungan formasi ini hanya terdapat di Kecamatan Sekatak dan separoh formasi terdapat di Kabupaten Tana Tidung.
- D. Formasi Kuaro (Tek) merupakan endapan pasir berupa batu pasir tufan, batu lanau, shale, yang tersusun secara klastik. Formasi ini dari endapan terrestrial, proses littoral, sistem punggung endapan linier lereng curam, terjadi pada Pliosen



- Awal. Sebaran berasosiasi dengan Formasi Mentarang (KTme) terdapat di Kecamatan Peso
- E. Formasi Malinau (Tema) merupakan endapan pasir berupa batu pasir tufan, batu lanau, shale, yang tersusun secara klastik. Formasi ini dari endapan terrestrial, proses littoral, pada sistem punggung endapan linier lereng curam, terjadi pada Eosen Tengah. Sebaran berasosiasi Anggota Batu gamping Jangkan (Tomj) terdapat di Kecamatan Peso (sekitar Long Pelban dan Long Lejah)
- F. Formasi Lubis-Tarakan-Malinau (Tes1) merupakan endapan peralihan berupa pasir berupa batu pasir tufan, batu lanau, shale, yang tersusun secara klastik. Formasi ini dari endapan terrestrial, proses littoral, pada sistem punggung endapan linier lereng curam, terjadi pada Eosen Tengah. Sebaran di Kecamatan Sekatak bagian tengah ke arah Utara
- G. Formasi Tanjung Redep (Tes2) merupakan endapan batuan lempung dengan sisipan batu pasir, serpih, dan batubara laut dangkal, yang tersusun secara klastik. Formasi ini dari batuan endapan litoral dengan proses pendataran membentuk delta, berumur Kapur Tengah. Sebaran formasi ini terletak di Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas, Tanjung Selor, dan Tanjung Palas Timur
- H. Formasi Sajau (TQps) merupakan endapan pasir tersusun secara klastik, terdiri dari perselingan antara lapisan tufa, breksi tufa, aglomerat dan lava andesit piroksen. Formasi ini merupakan endapan terrestrial pada proses fluvial yang membentuk delta, berumur Pliosen Awal hingga Plistosen Akhir. Sebaran di Kabupaten Bulungan terdapat di Kecamatan Bunyu dan Sekitar Muara Sekatak (Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas Tengah).
- I. Formasi Sajau (TQps2) merupakan endapan yang tersusun secara klastik, terdiri dari lapisan batu pasir kuarsa, batu lempung, batu lanau, batubara, lignit, dan konglomerat. Lapisan batu pasir kuarsa ini berwarna putih kotor, berbutir sedang hingga kasar, terpadu tetapi mudah digali. Formasi ini terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, dan Tanjung Palas Tengah. Formasi ini tersingkap di Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan singkapan batu pasir kuarsa tersebut merupakan aset sumber daya bahan galian yang potensial untuk Kabupaten Bulungan khususnya Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- J. Formasi Domaring (Tm pd) merupakan endapan batuan kapur/gamping neritik dangkal terdiri dari batuan gamping napalan, proses non klastik (dari coral reef) litoral, bertekstur halus hingga berbatuan (batu), pada formasi ini biasanya ditemukan kwarsit, firit batu pasir, skis, shale, berumur Miosen Akhir hingga

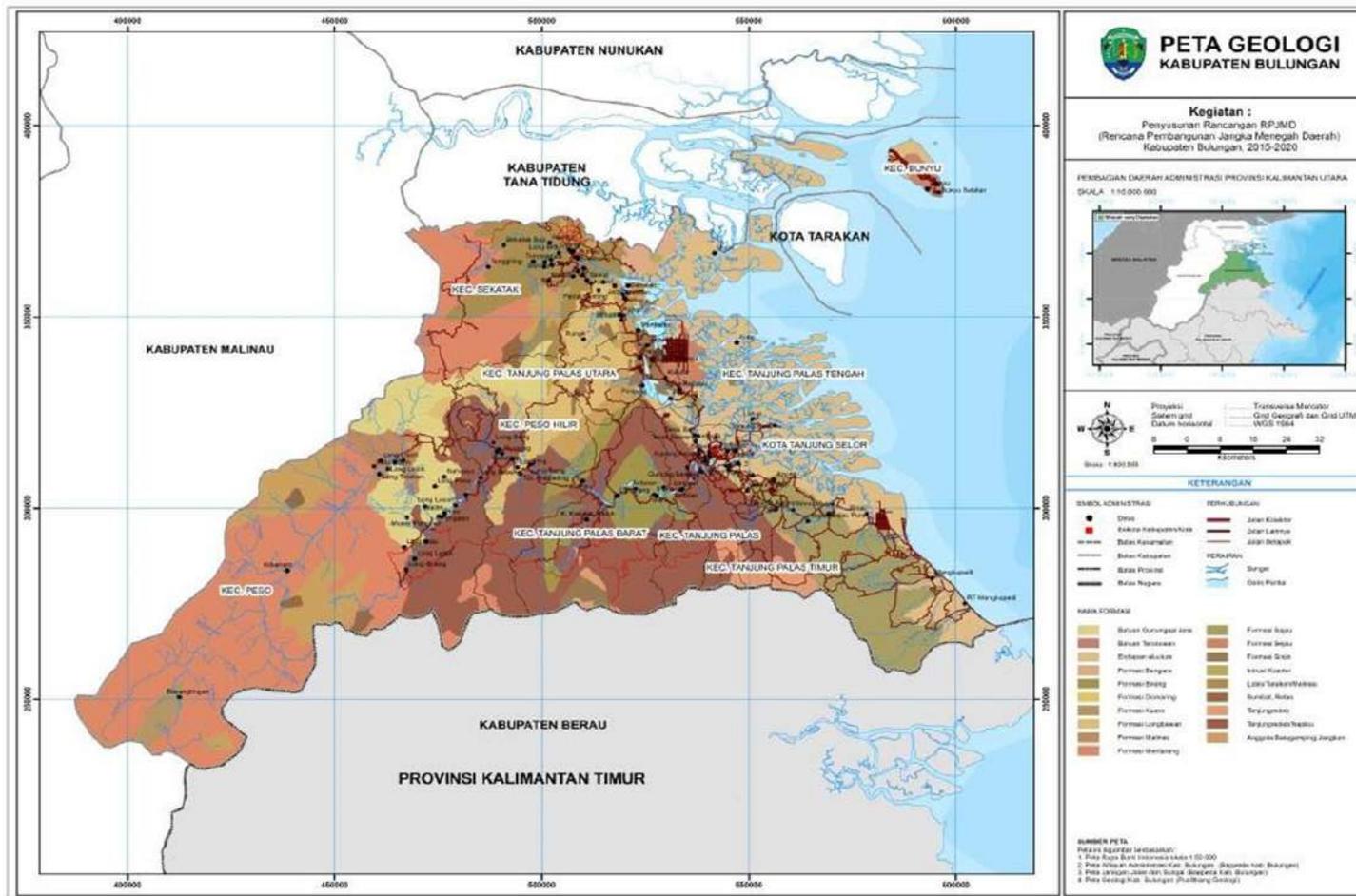


- Pliosen Awal. Sebaran di perbatasan Tanjung Palas Timur perbatasan dengan Kabupaten Berau
- K. Anggota Batu gamping (Tmt1) merupakan endapan batuan lempung dengan sisipan batu pasir, sebagian glokonit, yang tersusun secara klastik, terdapat pada dataran endapan bertufa perbukitan. Formasi ini berupa endapan litoral, berumur Miosen. Batuan ini terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- L. Formasi Birang (Tomb) merupakan endapan marl (pasir lumpur) yang tersusun secara klastik, berupa endapan litoral dari batuan breccia, yang terdiri dari tefra berbutir halus dan tefra berbutir kasar, berumur Oligosen Akhir hingga Miosen Awal. Sebarannya di Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Barat, dan Peso Hilir.
- M. Formasi Bongka (Tomb1) merupakan endapan konglomerat dengan proses klastik, berupa napal, tuff dan breksi andisit, dan batu pasir. Formasi ini merupakan endapan terrestrial transisi, berumur Miosen Akhir hingga Pliosen Awal. Formasi ini sebaran di Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Tanjung Palas Barat.
- N. Anggota Batu Gamping Jangkan (Tomj) merupakan endapan batuan kapur/gamping neritik dangkal terdiri dari batuan gamping napalan, proses non klastik (dari coral reef) litoral, bertekstur halus hingga berbatuan (batu), pada formasi ini biasanya ditemukan kwarsit, firit batu pasir, skis, shale, berumur Oligosen Akhir hingga Miosen Awal. Di Kabupaten Bulungan hanya terdapat di Kecamatan Sekatak.
- O. Batuan gunung api (Vulkanik/ekstrusif) tersusun dari aliran lava dan material piroklastik. Batuan gunung api (vulkanik) dari aliran lava merupakan proses pembekuan atau pendinginan batuan cair yang keluar dari kerucut gunungapi atau celah, dengan proses cepat sehingga kristal yang dihasilkan berukuran kecil (halus), bahkan tanpa kristal sama sekali. Batuan gunung api yang terdapat di Kabupaten Bulungan, merupakan gunung api (volkan) tua, dapat dibedakan dalam 3 (tiga) formasi/jenis batuan, yaitu:
- P. Batuan Gunungapi Jelai (Tomj1) merupakan batuan beku ekstrusif intermediate polymic berupa andisit bersisipan dengan breksi gunung api, berstruktur aliran setempat (subaerial), berumur Miosen Awal. Sebaran formasi ini terdapat di Kecamatan Sekatan, Peso Hilir, Peso.
- Q. Batuan Terobosan (Tomi) merupakan lava ekstrusif intermediate berupa lava basalt, andisit, tefra berbutir halus, tefra berbutir kasar, berstruktur aliran setempat (subaerial), berumur mulai Oligosen Awal hingga Miosen Akhir. Batuan ini terdapat di perbukitan Kecamatan Sekatak.



- R. Formasi Sajau (Tps) merupakan batuan beku ekstrusif intermediate pyroclastic, terdiri dari perselingan antara lapisan tufa, breksi tufa, aglomerat dan lava andesit piroksen terdiri dari perselingan antara lapisan tufa, breksi tufa, aglomerat dan lava andesit piroksen. Obsidian bersusunan dasitan. Tufa hablur terdiri dari kuarsa, felspart, dan massa dasar silica, klorit, hornblende berstruktur volkanik aliran setempat (subaerial), berumur Pliosen Awal hingga Pliosen Akhir. Sebarannya terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan Kecamatan Peso Hilir dan kalsit, setempat mengandung pecahan andisit. Satuan batuan ini.

Berdasarkan kondisi geologi dan geomorfologi, maka Kabupaten Bulungan mempunyai sumberdaya alam yang berpotensi untuk dikembangkan, adalah bahan galian tambang Golongan C, batubara, minyak dan gas bumi, serta methanol namun harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.



Gambar 2.2 Peta Geologi

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan



Tabel 2.6 Deskripsi Jenis Batuan Kabupaten Bulungan
(disarikan dari Peta Geologi Indonesia, PPG, Bandung, 1993)

Proses Batuan	Simbol	Formasi	Penyusunan	Endapan	Umur	
					Mulai	Akhir
Endapan Permukaan	Qa	Alluvium	Sediment: clastic: alluvium	Sediment terrestrial alluvium	Holosen	Holosen
Batuan Sedimen	KTlb	Formasi Longbawan	Sediment: clastic: Flysch	Sediment: Littoral: delta	Kapur Akhir	Paleosen Akhir
	KTme	Formasi Mentarang	Sediment: clastic: Flysch	Sediment Neritic continent slope	Kapur Akhir	Paleosen Akhir
	Mzb	Formasi Bengara	Sediment: clastic: flysch	Sediment: Deef marine	Kapur Awal	Kapur Akhir
	Tek	Formasi Kuaro	Sediment: clastic: sandstone	Sediment Littoral	Pliosen Awal	Pliosen Awal
	Tema	Formasi Malinau	Sediment: clastic: sandstone	Sediment Littoral	Eosen Tengah	Eosen Tengah
	Tes1	Lubis/ Tarakan Malinau	Sediment: clastic: sandstone	Sediment Littoral	Eosen Tengah	Eosen Tengah
	Tes 2	Tanjung Redeb	Sediment: clastic: fine: claystone	Sediment Littoral	Kapur Tengah	Kapur Tengah
	TQps	Formasi Sejau	Sediment: clastic: Flysch	Sediment terrestris fluvial deltaic	Pliosen Awal	Pleistosen Akhir
	TQps 2	Formasi Sajau	Sediment: clastic: Flysch	Sediment terrestris fluvial	Pliosen Akhir	Pleistosen Awal



Proses Batuan	Simbol	Formasi	Penyusunan	Endapan	Umur	
					Mulai	Akhir
	Tmpd	Formasi Domaring	Sediment: Reef: limestone	Sediment Littoral reef	Miosen Akhir	Pliosen Awal
	Tmt1	Angg Batu gamping	Sediment: clastic: fine: claystone	Sediment: littoral	Miosen	Miosen
	Tomb	Formasi Birang	Sediment: clastic: Marl	Sediment: littoral	Oligosen Akhir	Miosen Awal
	Tomb 1	Formasi Bongka	Sediment: clastic: coarse: conglomerat e	Sedimentatio n: terrestrial: transition	Miosen Akhir	Pliosen Awal
	Tomj	Ang batu gamping Jangkan	Sediment: Reef: Limestone	Sediment Littoral: Reef	Oligosen Akhir	Miosen Awal
Batuan Intrusif	Qpi	Intrusi Kwartir	Intrusive: intermediate	Plutonism: sub-volcanic	Pleistose n Awal	Pleistosen Akhir
	Tmg	Sumbat, Retas	Intrusive: felsic: granitoid	Plutonism: sub-volcanic	Miosen Tengah	Miosen Tengah
Batuan Gunungapi (Volkanik)	Tomj 1	Batuan gunung api Jelai	Extrusive: intermediate : polymic	Volcanism: Subaerial	Miosen Awal	Miosen Awal
	Tomi	Batuan Terobosan	Extrusive: interme- diate: lava	Volcanism: Subaerial	Oligosen Awal	Miosen Akhir
	Tps	Formasi Sinjin	Extrusive: interme diate: pyroclastic	Volcanism: Subaerial	Pliosen Awal	Pliosen Akhir

Sumber : RPJMD Kabupaten Bulungan 2016-2021



F. Hidrologi

Kondisi hidrologi permukaan di wilayah Kabupaten Bulungan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di kawasan tersebut. Sebagian besar sungai di wilayah ini berbentuk sempit memanjang dengan membentuk pola drainase dendritik dan paralel. Debit sungai-sungai tersebut relatif besar sebagai akibat dari panjangnya daerah aliran sungai (DAS), yang terbentuk oleh sistem sungai dengan cabang-cabang aliran (channel) yang panjang sehingga membentuk wilayah DAS yang cukup luas. Kondisi sungai dan anak sungainya, rawa pantai dan rawa belakang, merupakan faktor yang menentukan kondisi hidrologi di Kabupaten Bulungan.

Sungai terbesar dan terpanjang yang melalui Kabupaten Bulungan merupakan DAS terpadu antara DAS Kayan, Sub DAS Sekatak, Sub DAS Selor, dan Sub DAS sungai-sungai kecil. Sungai tersebut berbentuk anak-anak sungai memanjang membentuk pola drainase dendritik dan paralel yang merupakan perpaduan antara sungai utama dengan cabang-cabangnya. Sungai mengalir bebas ke berbagai arah pada material yang relatif homogen, seperti batuan sedimen dan volkan yang berstruktur horizontal. Informasi kondisi hidrologi berkaitan dengan ketersediaan air untuk pembangunan dan kehidupan sehari-hari diperoleh melalui pengambilan air di sungai, alur-alur drainase alamiah, cekungan-cekungan alam seperti rawa pantai dan rawa belakang, serta genangan di bantaran sungai. Ketersediaan air permukaan (sungai, rawa) sangat tergantung pada kondisi tempat (lokasi) dan waktunya (musim). Peta jaringan sungai, anak sungai pada Gambar 2.3. Berdasarkan informasi dari BPDAS Mahakam, maka Kabupaten Bulungan hampir seluruh wilayah masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan hanya bagian selatan masuk DAS Berau. Hubungan antar DAS Kayan, Sub-DAS, sungai dan anak-anak sungainya di Kabupaten Bulungan.

DAS Kayan dengan adanya sungai-sungai kecil hingga membentuk lebih dari 20 Sub-DAS, namun hanya ada 3 (tiga) Sub-DAS besar, yaitu Sub-DAS Salimbatu, Sub-DAS Selor, dan Sub-DAS Sekatak. Masing-masing Sub-DAS sebagai berikut:

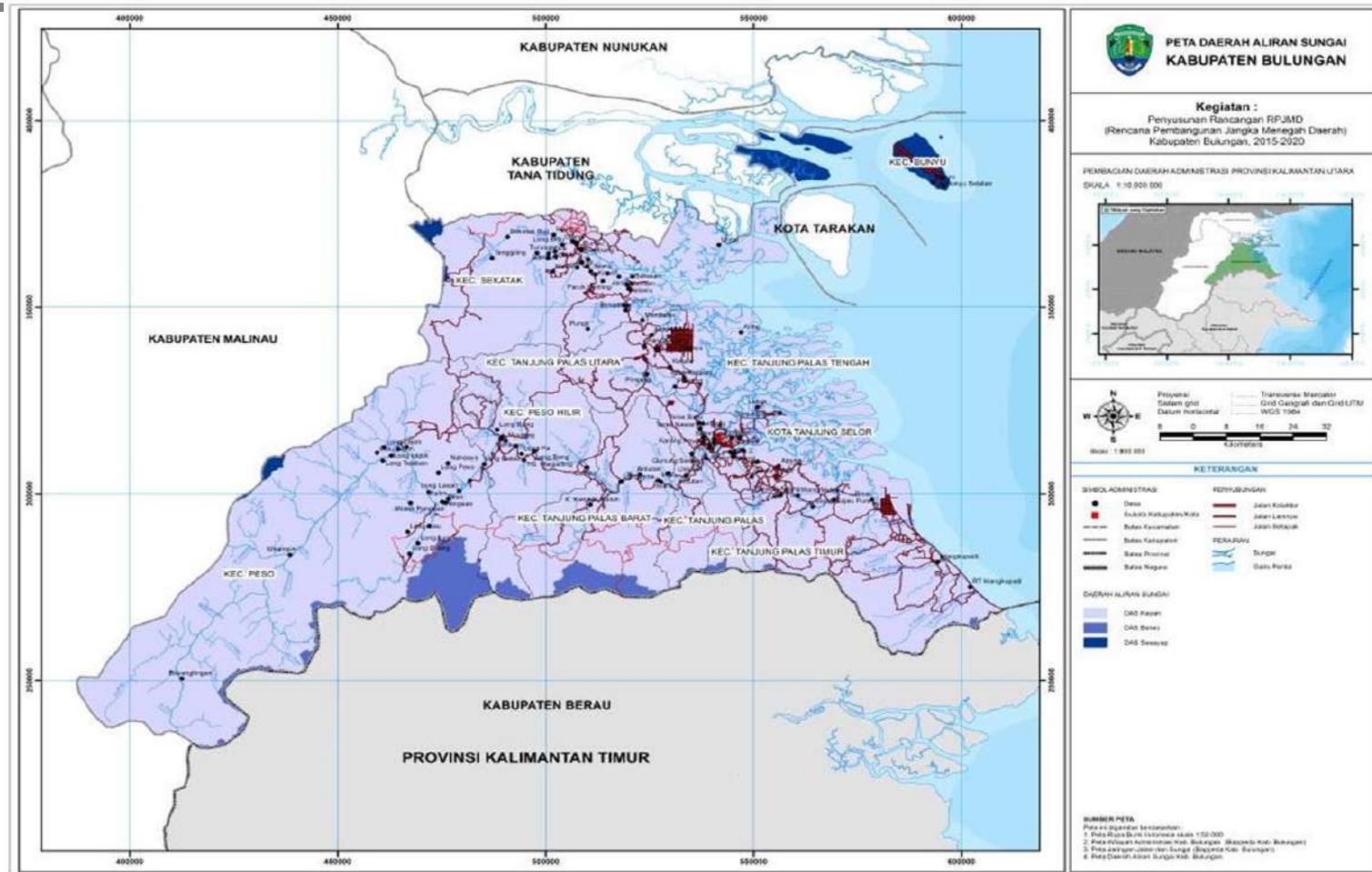
1. Sub-DAS Liupeto anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Peso. Sungai Liupeto mata air sungainya terletak di Kabupaten Malinau
2. Sub-DAS Liupaho anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Peso. Sungai Liupaho, sungai Segah, dan Sungai Liuplau.
3. Sub-DAS Bahau anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Peso. Sungai Bahau mata air sungainya terletak di Kabupaten Malinau. Sungai Bahau di Kabupaten Malinau juga memiliki anak sungai yaitu Sungai Aranbuih, yang cukup besar



4. Sub-DAS Liulejau anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Peso. Sungai Liulejau mata air sungainya berasal dari Gunung Ubutlebung, namun juga dari sungai-sungai kecil yang mata airnya berasal dari Gunung Klawit di Kabupaten Malinau.
5. Sub-DAS Pangean anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Peso. Sungai Pangean mata air anak-anak sungainya berasal dari Gunung Kundas, Gunung Isau, Gunung Jamuk, Gunung Batuputih, Gunung Api
6. Sub-DAS Brun anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Peso Hilir. Sungai Brun mata air sungainya berasal dari Gunung Ubutlebung dan Gunung Brun
7. Sub-DAS Mendurau anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Peso Hilir. Sungai Mendurau mata air sungainya dari Gunung Brun
8. Sub-DAS Tunggu anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Peso Hilir. Sungai Tunggu mata air sungainya berasal dari Gunung Brun
9. Sub-DAS Kobar anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Sungai Kobar mata air berasal dari Gunung Marukau
10. Sub-DAS Karabau anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Sungai Karabau mata air anak-anak sungainya berasal dari Gunung Marukau, Gunung Keluh, Gunung Nyeding, dan Gunung Kungpekan (Formasi Sinjin)
11. Sub-DAS Nyilung anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Sungai Nyilung mata air sungainya berasal dari perbukitan di Tanjung Palas Barat bagian selatan
12. Sub-DAS Mara anak sungai Kayan terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Sungai Mara mata airnya berasal dari perbukitan di Tanjung Palas Barat bagian selatan dan Gunung Batu bungkus
13. Sub-DAS Rapi anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Sungai Rapi mata air sungainya berasal dari perbukitan Merapi (Formasi Birang).
14. Sub-DAS Kora anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Sungai Kora mata air sungainya berasal dari perbukitan di Tanjung Palas bagian selatan
15. Sub-DAS Salimbatu anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Tengah. Sungai Salimbatu air sungainya berasal dari Sungai Kayan yang membelok kearah utara di Tanjung Palas dan Sungai Salimbatu mempunyai beberapa anak sungai, yaitu, Sungai Selurume (Tanjung Palas Utara), Sungai Pimping, Sungai Segerai, dan Sungai Malimpung terletak di Kecamatan Tanjung Palas Tengah



16. Sub-DAS Bulungan sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Sungai Bulungan ini merupakan lanjutan Sungai Kayan yang membentuk delta yang menyerupai kipas dari pulau-pulau (Pulau Tundung, Pulau Pekin, Pulau Temengah, Pulau Tutus, Pulau Mening, Pulau Mapakan, Pulau Limangun, Pulau Linta. Sungai yang membentuk delta tersebut bermuara di Selat Sulawesi
17. Sub-DAS Selor anak sungai Kayan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, dan Tanjung Palas Timur. Sungai Selor air sungainya berasal dari Sungai Kayan yang membelok ke arah timur di Tanjung Selor dan Sungai Selor mempunyai beberapa cabang (anak sungai), yaitu, Sungai Sabanar (Tanjung Selor), Sungai Ibus (Tanjung Palas Tengah), Sungai Sajau yang mempunyai cabang anak sungai Liwung (Tanjung Palas Timur), Sungai Binai yang mempunyai cabang anak sungai Rangau (Tanjung Palas Timur).
18. Sub-DAS Kuning, Mangkapadie, Pidada, Kataputan Besar terdapat di kecamatan Tanjung Palas Timur. Sungai Kuning, Sungai Mangkapadie, Sungai Pidada, dan Sungai Kataputan Besar mata airnya berasal dari perbukitan yang merupakan Formasi Sajau.
19. Sub-DAS Sekatak sebenarnya bukan cabang Sungai Kayan, namun karena anak sungai Mewel berasal dari Gunung Sondong dan Gunung Batubenalun di mana anak-anak sungai Kayan sebagian berasal dari gunung tersebut, maka Sungai Sekatak masuk Sub-DAS Kayan. Anak-anak sungai yang masuk dalam Sub-DAS Sekatak adalah Sungai Magang, Sungai Mewel, Sungai Matai, Sungai Laparan, Sungai Kalasiu, Sungai Bangara, Sungai Mantadau, Sungai Terusan Teladan, Sungai Sinarap, Sungai Payau, yang terletak di Kecamatan Sekatak, dan Sungai Ansam yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas Utara.



Gambar 2.3. Peta DAS Kayan terpadu di Kabupaten Bulungan

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan



Tabel 2.7. DAS, Sub-DAS, dan Sungai di Kabupaten Bulungan

DAS	SUB DAS	SUNGAI	KECAMATAN	
Kayan Sungai terletak di Kabupaten Bulungan 9 (Sembilan) Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Utara, dan Sekatak	Liupeto	Sungai Liupeto	Peso	
	Liupaho	Sungai Liupaho	Peso	
	Bahau	Sungai Bahau	Peso	
	Liulejau	Sungai Liulejau	Peso	
	Pangean	Sungai Pangean	Peso	
	Brun	Sungai Brun	Peso Hilir	
	Mendurau	Sungai Mendurau	Peso Hilir	
	Tungu	Sungai Tungu	Peso Hilir	
	Kobar	Sungai Kobar	Tanjung Palas Barat	
	Karabau	Sungai Karabau	Tanjung Palas Barat	
	Nyilung	Sungai Nyilung	Tanjung Palas Barat	
	Mara	Sungai Mara	Tanjung Palas Barat	
	Rapi	Sungai Rapi	Tanjung Palas	
	Kora		Sungai Kora	Tanjung Palas
			Singai Salimbatu	Tanjung Palas dan Tanjung Palas Tengah
			Sungai Segerai	Tanjung Palas Tengah
			Sungai Malimpung	Tanjung Palas Tengah
			Sungai Berasan	Tanjung Palas Tengah
			Sungai Tenau	Tanjung Palas Tengah
	Bulungan		Sungai Bara	Tanjung Palas Tengah
		Sungai Bulungan	Tanjung Palas Tengah	
Selor		Sungai Selor	Tanjung Selor	
		Sungai Ibus	Tanjung Palas Tengah	
		Sungai Sabanar	Tanjung Selor	
		Sungai Sajau	Tanjung Palas Timur	
		Sungai Liwung	Tanjung Palas	



DAS	SUB DAS	SUNGAI	KECAMATAN
			Timur
		Sungai Binai	Tanjung Palas Timur
		Sungai Rangau	Tanjung Palas Timur
		Sungai Bahungan Merah	Tanjung Palas Timur
	Kuning	Sungai Kuning	Tanjung Palas Timur
	Mangkapadie	Sungai Mangkapadie	Tanjung Palas Timur
	Pidada	Sungai Pidada	Tanjung Palas Timur
	Kataputan Besar	Sungai Kataputan Besar	Tanjung Palas Timur
		Sungai Sekatak	Sekatak
		Sungai Magang	Sekatak
		Sungai Mewel	Sekatak
		Sungai Matai	Sekatak
		Sungai Laparan	Sekatak
		Sungai Kalasiu	Sekatak
		Sungai Bangara	Sekatak
	Sekatak	Sungai Mantadai	Sekatak
		Sungai Terusan Teladan	Sekatak
		Sungai Sinarap	Sekatak
		Sungai Payau	Sekatak
Sungai Ansam		Tanjung Palas Utara	

Sumber : RPJMD Kabupaten Bulungan 2016-2021

G. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Penggunaan lahan, pola pemanfaatan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan 2021-2041 yaitu meliputi Kawasan budidaya sebesar 1.089.594 Ha dan Kawasan Lindung sebesar 266.186 Ha. Secara lengkap, rencana pola ruang pada tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Rencana Pola Ruang Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2041

No.	Rencana Pola Ruang		Luas (Ha)
1	Kawasan Lindung	Kawasan Perlindungan kawasan bawahannya	212.755
		Kawasan Perlindung Setempat	33.721
		Kawasan Lindung Geologi	4.986
		Kawasan Rawan Bencana	622
		Kawasan Ekosistem Mangrove	14.102
Luas Kawasan Lindung			266.186
2	Kawasan Budidaya	Kawasan Hutan Produksi	742.769
		Kawasan Perkebunan Rakyat	4.048
		Kawasan Pertanian	244.856
		Kawasan Perikanan	40.361
		Kawasan Pertambangan dan Energi	10.655
		Kawasan Peruntukan Industri	11.549
		Kawasan Pariwisata	79
		Kawasan Permukiman	35.246
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	31
Luas Kawasan Budidaya			1.089.594
Luas Total			1.355.780

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2041

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bulungan dalam pembahasannya mengacu pada arahan rencana penataan ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yang meliputi potensi pengembangan kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan Budidaya.

a. Kawasan Peruntukan Lindung

Sesuai dengan RTRW rencana kawasan Lindung tahun 2021-2041 terdiri dari Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan lindung geologi, Kawasan rawan bencana, dan Kawasan ekosistem *mangrove*.



1) Kawasan yang memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya memiliki luas kurang lebih sebesar 212.755 hektar terdiri atas :

a. Kawasan Hutan Lindung

Hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. kondisi kualitas dan kuantitas dan kuantitas air semakin berkurang. Hal ini akan berdampak pada degradasi lingkungannya. Salah satu penyebab penurunan kualitas dan kuantitas air adalah terjadinya pengurangan luas hutan lindung. Luas Hutan Lindung di Kabupaten Bulungan seluas kurang lebih sebesar 206.961 hektar, kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Tanjung Palas barat.

b. Kawasan Lindung Gambut

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

c. Kawasan Resapan Air

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air tersebar di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Sekatak.

2) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat memiliki luas kurang lebih sebesar 33.721 hektar terdiri atas :

a. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai tersebar di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur.

b. Sempadan Sungai

Sempadan pantai terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai yang tersebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh Daerah.

c. Kawasan Sekitar danau atau Waduk

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan sekitar danau dan waduk tersebar di Kecamatan Peso dan Kecamatan Bunyu.



3) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi memiliki luas kurang lebih sebesar 4.986 hektar, terdiri atas:

a. Kawasan Cagar Alam Geologi

Kawasan Cagar Alam Geologi terdiri atas, Kawasan keunikan batuan dan fosil yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat; dan Kawasan keunikan bentang alam, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air, terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Peso.

4) Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana ditetapkan seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh dua) hektar terdiri dari :

- a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan/atau longsor, di Kecamatan Sekatak;
- b. Kawasan rawan banjir, di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Peso, dan Kecamatan Peso Hilir; dan
- c. Kawasan rawan tsunami dan/atau abrasi, di sepanjang Kawasan pesisir Kabupaten Bulungan

Berdasarkan wilayah rawan bencana di Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan mengembangkan jalur evakuasi dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur darurat menuju lokasi evakuasi bencana dan ruang evakuasi berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dapat berbentuk lapangan, stadion, taman publik, bangunan kantor pemerintah, bangunan fasilitas sosial, dan/atau bangunan fasilitas umum di setiap wilayah kecamatan. Jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana disesuaikan dengan jenis ancaman bencana meliputi :

- a. Gerakan tanah atau tanah longsor pada Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Tanjung Selor.



- b. Bencana banjir pada, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Peso, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Peso Hilir
- c. Gelombang pasang atau tsunami, pada wilayah pesisir Kabupaten Bulungan.

5) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove memiliki luas kurang lebih sebesar 14.102 hektar tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, dan pertahanan dan keamanan.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan produksi yaitu adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi dan yang sengaja di kelola oleh manusia. Hutan produksi terbagi menjadi menjadi dua yaitu hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang adapat dikonversi. Luasan Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 742.769 hektar.

a. Hutan Produksi Terbatas

Adapun peruntukan untuk hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 461.196 hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur. Di dalam Kawasan hutan produksi terbatas terdapat *Outline* yang peruntukannya menjadi:

- a) Kawasan industri seluas kurang lebih 1.849 (seribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- b) Kawasan pembangkit tenaga listrik seluas kurang lebih 13.851 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh satu) hektar di Kecamatan Peso;
- c) Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 6.455 (enam ribu empat ratus lima puluh lima) hektar di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir dan Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- d) Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 9.965 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektar di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan



Tanjung Palas Barat Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Tanjung Selor;

- e) Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar di Kecamatan Peso; dan
- f) Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Kecamatan Peso dan di Kecamatan Tanjung Palas Timur

b. Hutan Produksi Tetap

Adapun peruntukan untuk hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 275.976 hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Bunyu.

Di dalam Kawasan hutan produksi tetap terdapat *Outline* yang peruntukannya menjadi:

- a) Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 1.676 (seribu enam ratus tujuh puluh enam) hektar di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
- b) Kawasan perikanan budidaya seluas kurang lebih 55.392 (lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- c) Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 17.922 (tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- d) Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 25.122 (dua puluh lima ribu seratus dua puluh dua) hektar di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Tanjung Selor;
- e) Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
- f) Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar di Kecamatan Sekatak

c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi

Adapun peruntukan untuk hutan produksi yang dapat dikonversi memiliki luas kurang lebih sebesar 5.597 hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir,



Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Sekatak.

Di dalam Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat *Outline* yang peruntukannya menjadi:

- a) Kawasan industri seluas kurang lebih 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- b) Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) hektar di Kecamatan Sekatak; dan
- c) Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 1.812 (seribu delapan ratus dua belas) hektar di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Kecamatan Tanjung Palas Timur

2) Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat memiliki luas sebesar 4.048 hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Selor.

3) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian memiliki luas sebesar 244.856 hektar, yang terdiri atas beberapa kawasan yaitu :

- a. **Kawasan tanaman pangan** terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu.

Pada Kawasan peruntukan tanaman pangan ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang selanjutnya dapat didetilkkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), seluas kurang lebih 17.973 (tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar, terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Tanjung Palas

- b. **Kawasan hortikultura** terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan Kecamatan Tanjung Palas.
- c. **Kawasan Perkebunan** terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas



Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu.

4) Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan memiliki luas kawasan seluas kurang lebih 40.361 hektar, yang terdiri atas :

- a. Kawasan perikanan tangkap
 - Tempat pelelangan ikan, terdiri atas: Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Tanjung Selor, Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Bunyu dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanah Kuning.
 - Sarana dan Prasarana Perikanan, terdiri atas: Balai Benih Ikan (BBI) Bunyu, Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Selor, Cold Storage di Kecamatan Tanjung Selor, dan Balai Benih Udang di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- b. Kawasan perikanan budidaya

Kawasan perikanan budidaya terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas; dan Kawasan perikanan budidaya lainnya pada perairan umum dalam bentuk sungai dan kolam air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan

5) Kawasan Pertambangan dan Energi

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan seluas kurang lebih 10.655 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:

- a. **Pertambangan mineral** berupa pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bunyu.
- b. **Pertambangan batu bara** terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Tanjung Selor.
- c. **Pertambangan batuan** tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulungan.
- d. **Pertambangan minyak dan gas bumi** terdapat di Kecamatan Bunyu.

6) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri memiliki luas sebesar 11.549 hektar, terdiri atas: kawasan industri yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu, dan Kecamatan Tanjung Selor, sedangkan sentra industri kecil dan menengah terdapat di Kecamatan Tanjung Palas dan sentra industri kecil dan menengah dan industri kecil menengah lainnya dapat dikembangkan pada setiap kecamatan dengan bidang usaha komoditas kerajinan rakyat yang dikelola dengan kearifan lokal.



7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata memiliki luas sebesar 79 hektar, terdiri atas :

- a. **Pengembangan Kawasan pariwisata alam** diarahkan pada kawasan wisata pantai di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Bunyu, dan kawasan wisata sungai yang terdapat di Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso; Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso Hilir; Kawasan wisata Giram Km.4 di Kecamatan Tanjung Palas Barat; Kawasan wisata Giram Bekiak di Kecamatan Tanjung Palas Barat; Kawasan wisata Air Terjun Km.18 dan Km.12 di Kecamatan Tanjung Selor; Kawasan wisata Air Terjun Ramban di Kecamatan Sekatak; Kawasan wisata Air Terjun Anang Dachlan di Kecamatan Peso Hilir; Kawasan wisata Air Terjun Km. 36 di Kecamatan Tanjung Selor; Kawasan wisata Air Terjun Sulok di Kecamatan Tanjung Palas Utara; Kawasan wisata alam Batu Tumpuk Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara; Kawasan water sport Km.16 di Kecamatan Tanjung Selor; dan Kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso.
- b. **Pengembangan Kawasan pariwisata budaya terdiri atas :** Kawasan wisata miniatur etnis budaya di Kecamatan Tanjung Palas; Kawasan wisata rumah adat di Kecamatan Tanjung Selor; Kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas; Kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas; Kawasan wisata Makam Syaid Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; Kawasan wisata Makam Syaid Achmad Maghribi di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; Kawasan wisata Makam Datu Adil di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; Kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur; Kawasan wisata Makam Makan Orang Kayan Kuno di Kecamatan Peso; Kawasan wisata Makam Keramat Syaid Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan Kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas.

8) Kawasan Peruntukan Permukiman

Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman adalah 35.246 hektar yang terdistribusi di seluruh kecamatan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan Kawasan permukiman perdesaan, tersebar di seluruh kecamatan



9) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan memiliki luas sebsar 31 hektar berupa :

- a. Kawasan Brigadir Infantri (BRIGIF) 24/BC Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- b. Kawasan Markas Brigadir Infantri (MABRIGIF) 24/ Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- c. Kawasan Kompi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
- d. Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;
- e. Kawasan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Pindada di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- f. Kawasan Pos Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- g. Kawasan Kompi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
- h. Kawasan Markas Komando Distrik Militer (MAKODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;
- i. Pos TNI AL Bunyu, POSAL Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu;
- j. Pos TNI AL Selor di Kecamatan Tanjung Selor; dan
- k. KORAMIL yang tersebar di wilayah

2.1.2 Kondisi Demografi

Data kependudukan merupakan salah satu informasi sangat penting untuk menjelaskan tentang gambaran umum suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 sebanyak 151.844 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama sepuluh tahun >8,66% (Tabel 2.9) . Berdasarkan tabel 2.9 terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah kecamatan Tanjung Palas Timur, dan sebaliknya satu kecamatan memiliki pertumbuhan penduduk negatif yaitu Kecamatan Peso Hilir.

**Tabel 2.9** Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan penduduk/Tahun		
	2010	2018	2019	2020	2010-2018	2018-2019	2019-2020
Bunyu	11.139	11.609	11.495	11.689	0,36	-0,98	9,09
Peso	4.327	4.053	4.033	4.400	-0,75	-0,49	7,88
Peso Hilir	3.484	3.833	3.832	4.134	1,11	-0,03	-0,37
Sekatak	9.278	8.859	8.928	10.824	-0,42	0,78	4,31
Tanjung Palas	14.029	16.543	16.829	17.556	2,22	1,73	24,04
Tanjung Palas Barat	5.832	6.379	6.440	6.416	1,16	0,96	3,20
Tanjung Palas Tengah	7.527	10.519	10.812	11.567	4,85	2,79	6,98
Tanjung Palas Timur	8.651	13.465	14.527	18.020	7,55	7,89	21,23
Tanjung Palas Utara	8.954	10.320	10.405	10.651	1,80	0,82	1,68
Tanjung Selor	39.439	50.624	52.432	56.569	3,66	3,57	7,31
Total Kab. Bulungan	112.660	136.204	139.733	151.844	2,67	2,59	8,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Berdasarkan aspek distribusi penduduk, Kecamatan Tanjung Selor merupakan wilayah yang menampung jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh kecamatan tanjung palas dan Tanjung Palas Timur, sedangkan kecamatan Bunyu menduduki urutan keempat. Tetapi berdasarkan kepadatan penduduk, Kecamatan Bunyu menduduki peringkat kedua sebagai wilayah kecamatan yang berpenduduk padat setelah Kecamatan Tanjung Selor (Tabel 2.10).

Sedangkan berdasarkan ratio jenis kelamin (L/P), semuanya mempunyai nilai ratio L/P > 100, yang berarti jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan (Tabel 2.10). Ketersediaan tenaga Manusia (SDM) didukung oleh data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Bulungan sudah memasuki era bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif (usia 15 tahun hingga 64 tahun) mencapai 68,03%, dan sisanya 27,62% merupakan kelompok usia muda (usia < 15 tahun) dan jumlah paling kecil merupakan penduduk kelompok umur ≥ 65 tahun (4,34%).

Tabel 2.10 Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Distribusi Jumlah Penduduk (%)		Kepadatan (org) Penduduk/km ²			Ratio Jenis Kelamin L/P		
	2018	2019	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bunyu	8,52	8,22	58,54	57,96	58,94	115,6	113,7	113,7
Peso	2,98	2,89	1,29	1,28	1,40	115,5	115,7	127,3
Peso Hilir	2,81	2,74	2,34	2,34	2,52	117,8	118,2	128,7
Sekatak	6,50	6,39	4,44	4,48	5,44	111,7	110,2	116,4
Tanjung Palas	12,15	12,04	9,42	9,59	10,00	108,3	109,9	110,8
Tanjung Palas Barat	4,68	4,61	5,99	6,05	6,03	120,2	120,9	117,7
Tanjung Palas Tengah	7,72	7,74	16,83	17,30	18,51	110,3	111,1	112,3
Tanjung Palas Timur	9,89	10,40	10,54	11,37	14,10	118,1	118,1	131,4
Tanjung Palas Utara	7,58	7,45	12,80	12,90	13,21	109,9	110,3	110,1
Tanjung Selor	37,17	37,52	74,69	77,36	83,46	115,6	109,7	110,9
Total Kab. Bulungan	100,00	100,00	10,33	10,60	11,52	111,7	112,0	115,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara makro dari beberapa indikator makro ekonomi, antara lain: capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan. Meski indikator - indikator di atas tidak memotret secara detail kondisi kesejahteraan rakyat pada level mikro, namun indikator-indikator tersebut umumnya digunakan guna mengukur aspek kesejahteraan rakyat secara umum.

A. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui tingkat struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per Kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat



kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi berdasarkan pertumbuhan harga produsen

Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 18,71 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 18,29 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Bulungan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 25,23 persen (angka ini mengalami penurunan dari 27,58 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,23 persen (meningkat dari 17,27 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,01 persen (menurun dari 14,26 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 12,88 persen (meningkat dari 11,61 persen di tahun 2016) dan lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 8,20 persen (meningkat dari 7,53 persen di tahun 2016).

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi dan perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertambangan dan Penggalian adalah kategori yang cenderung mengalami penurunan peranan. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Industri Pengolahan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen. Meningkatnya peranan sektor Konstruksi dan perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor merupakan salah satu efek yang ditimbulkan karena pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan mengingat statusnya sebagai Ibukota Provinsi.

**Tabel 2.11**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.355.195,15	17,27	2.500.399,08	16,38	2.657.691,50	15,82	2.849.438,58	15,57	3.079.456,75	16,45
B. Pertambangan dan Penggalian	3.760.946,34	27,58	4.428.989,01	29,01	4.858.544,32	28,93	4.945.723,18	27,03	4.722.536,29	25,23
C. Industri Pengolahan	1.944.131,16	14,26	2.147.957,21	14,07	2.352.101,73	14,00	2.547.409,67	13,92	2.623.234,28	14,01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.599,11	0,03	5.597,70	0,04	6.196,29	0,04	6.742,75	0,04	7.807,78	0,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.158,54	0,06	9.665,23	0,06	11.228,25	0,07	12.096,46	0,07	13.105,72	0,07
F. Konstruksi	1.583.478,22	11,61	1.716.961,90	11,25	1.939.266,46	11,55	2.325.259,58	12,71	2.411.449,16	12,88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.027.213,63	7,53	1.156.199,44	7,57	1.303.793,53	7,76	1.490.582,08	8,15	1.534.469,09	8,20
H. Transportasi dan Pergudangan	573.265,72	4,20	639.715,91	4,19	740.819,67	4,41	838.613,28	4,58	838.606,48	4,48
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	179.123,49	1,31	210.299,43	1,38	243.770,36	1,45	272.892,23	1,49	263.640,25	1,41
J. Informasi dan Komunikasi	298.704,76	2,19	339.348,66	2,22	377.399,95	2,25	439.404,64	2,40	494.655,62	2,64
K. Jasa Keuangan	115.252,52	0,85	123.355,41	0,81	137.293,51	0,82	149.386,78	0,82	158.625,92	0,85



Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
L. Real Estate	147.514,88	1,08	159.748,47	1,05	172.688,70	1,03	187.952,11	1,03	191.955,49	1,03
M,N. Jasa Perusahaan	16.139,39	0,12	17.533,41	0,11	18.767,28	0,11	20.174,14	0,11	21.827,03	0,12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	945.395,33	6,93	1.058.358,25	6,93	1.155.979,29	6,88	1.292.790,12	7,07	1.334.388,19	7,13
P. Jasa Pendidikan	460.539,33	3,38	509.934,85	3,34	562.324,18	3,35	625.835,49	3,42	685.007,21	3,66
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106.343,85	0,78	117.919,06	0,77	126.266,63	0,75	144.455,01	0,79	167.548,97	0,90
R,S,T,U. Jasa Lainnya	108.739,66	0,80	123.265,46	0,81	132.691,37	0,79	149.648,57	0,82	170.471,89	0,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.634.741,06	100	15.265.248,47	100	16.796.823,01	100	18.298.404,68	100	18.718.786,14	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021



Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah) 2016-2020

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.690.790,47	1,98	1.741.999,98	3,03	1 804 394,10	3,58	1 871 305,97	3,71	1 946 259,08	4,01
B. Pertambangan dan Pengalihan	2.984.088,42	-1,00	3.172.523,37	6,31	3 271 155,68	3,11	3 245 568,05	-0,78	3 112 171,83	-4,11
C. Industri Pengolahan	1.272.576,37	4,72	1.370.680,37	7,71	1 433 242,66	4,56	1 503 335,26	4,89	1 461 049,93	-2,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.088,15	7,58	4.581,10	12,06	4 995,61	9,05	5 245,68	5,01	5 865,88	11,82
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.761,59	4,57	8.405,81	8,30	9 078,49	8,00	9 632,28	6,10	10 100,77	4,86
F. Konstruksi	1.166.757,41	5,23	1.189.219,21	1,93	1 253 376,87	5,39	1 377 486,54	9,90	1 341 174,37	-2,64
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	743.348,64	4,07	798.931,06	7,48	864 912,34	8,26	943 675,02	9,11	951 412,18	0,82
H. Transportasi dan Pergudangan	422.955,61	3,55	452.330,81	6,95	494 257,04	9,27	533 800,97	8,00	520 668,96	-2,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	109.865,24	7,97	124.500,18	13,32	140 641,34	12,96	151 923,40	8,02	143 641,37	-5,45



Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
J. Informasi dan Komunikasi	280.453,90	6,98	301.419,89	7,48	325 219,83	7,90	354 505,91	9,01	378 498,85	6,77
K. Jasa Keuangan	82.074,33	4,83	82.047,53	-0,03	88 295,93	7,62	93 054,00	5,39	94 122,73	1,15
L. Real Estate	128.783,88	2,72	134.723,36	4,61	141 851,38	5,29	151 333,75	6,68	152 609,26	0,84
M,N. Jasa Perusahaan	11.625,52	0,15	12.154,94	4,55	12 689,86	4,40	13 319,52	4,96	13 250,78	-0,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	595.559,26	10,24	648.520,25	8,89	703 561,34	8,49	759 760,51	7,99	763 900,02	0,54
P. Jasa Pendidikan	337.985,16	4,26	357.487,76	5,77	378 842,24	5,97	417 851,49	10,30	443 431,66	6,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83.556,58	10,63	89.807,39	7,48	93 348,92	3,94	99 897,74	7,02	111 115,85	11,23
R,S,T,U. Jasa Lainnya	74.689,21	11,06	81.601,45	9,25	86 488,02	5,99	94 824,14	9,64	102 062,17	7,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.996.959,75	2,89	10.570.934,46	5,74	11 106 351,68	5,06	11 626 520,22	4,68	11 551 335,70	-0,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021



Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami penurunan, dari 11,62 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,51 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Bulungan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,6 persen.

Penurunan Pertumbuhan ekonomi terjadi dikarenakan Lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar -2,64 persen (angka ini menurun dari 9,90 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,77 persen (angka ini menurun dari 9,01 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82 persen (angka ini menurun dari 9,11 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,12 persen (angka ini menurun dari 10,30 persen di tahun 2019, dan lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,63 persen (angka ini menurun dari 9,64 persen di tahun 2019). Berdasarkan kelima lapangan usaha tersebut, semua kategori mengalami penurunan yang signifikan. Hal itu karena adanya wabah virus Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi di semua sektor.

Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

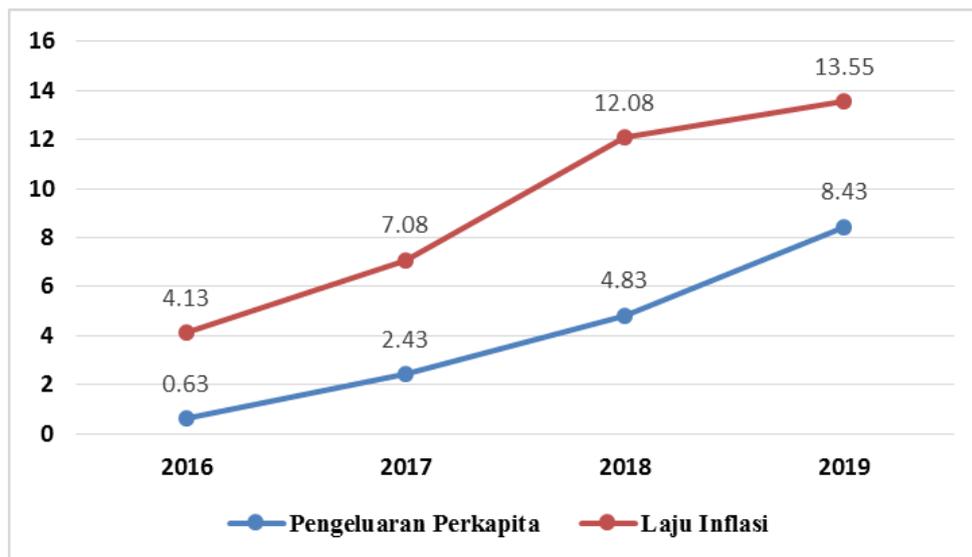
No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
1	2016	13.634.741,06	9.996.959,75
2	2017	15.265.248,47	10.570.934,46
3	2018	16.796.823,01	11.106.351,68
4	2019	18.298.404,68	11.626.520,22
5	2020	18.718.786,14	11.551.335,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Berdasarkan data diatas PDRB Kabupaten Bulungan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal itu dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu, sebesar Rp. 18.718.786,14 dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp. 18.298.404,68 sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 11.551.335,70 dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.626.520,22.

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Berdasarkan data grafik (3.1) bahwa daya beli masyarakat dalam lima tahun terakhir meningkat sebesar 8,43% atau rata-rata 2,11% pertahun. Tetapi pada sisi lain, dalam kurun waktu yang sama terjadi inflasi sebesar 13,55% dalam lima tahun atau rata-rata 3,39% per tahun. Jadi bila inflasi diperhitungkan dalam peningkatan daya beli masyarakat, maka daya beli masyarakat Kabupaten Bulungan justru mengalami penurunan sebesar 5,12% dalam kurun lima tahun atau rata-rata menurun 1,28% per tahun. Artinya kemampuan ekonomi masyarakat tidak dapat diharapkan untuk meningkatkan pengembangan SDM di daerah ini.



Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan kumulatif pengeluaran perkapita dan inflasi di Kabupaten Bulungan

Sumber : Naskah Teknokratik RPJMD 2021-2025

C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per Kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam



dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 129,03 juta rupiah, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 128,75 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika dilihat dengan menghilangkan inflasi, secara nominal nilai PDRB per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 79,94 juta rupiah menjadi 81,76 juta rupiah pada tahun 2019.

Tabel 2.14 PDRB Perkapita Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Nilai PDRB/GRDP (Triliun Rupiah/Trillion rupiahs)						
- ADHB/at current price	12,98	13,63	15,27	16,80	18,30	18,72
- ADHK/at 2010 Constant Price	9,72	10,00	10,57	11,11	11,63	11,55
PDRB per Kapita/ Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)						
- ADHB/at current price	100,29	102,88	112,43	120,95	128,75	129,03
- ADHK/at 2010 Constant Price	75,10	75,43	77,86	79,94	81,76	
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	-0,33	0,44	3,22	2,67	2,29	
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	129	133	136	130	142	151
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/Population Growth (Percent)	2,61	2,44	2,44	2,29	2,34	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Ket : * Angka Sementara/preliminary Figures, ** Angka Sangat Sementara/very preliminary Figures

D. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau lebih dikenal dengan penduduk miskin sebanyak 13,08 ribu jiwa (kondisi Maret 2020) atau sebesar 9,06 persen dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Bulungan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Selama 2017 -2020 garis kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada tahun 2017, tercatat garis kemiskinan Kabupaten Bulungan sebesar Rp.

398.397,00/kapita/bulan dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 9,06 persen menjadi Rp. 472.569/kapita/bulan.

Tabel 2.15 Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan

Tahun	Garis Kemiskinan Rupiah/Kapita/Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	398.397	13,40	9,93
2018	413.294	13,03	9,44
2019	448.548	12,40	8,78
2020	472.569	13,08	9,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

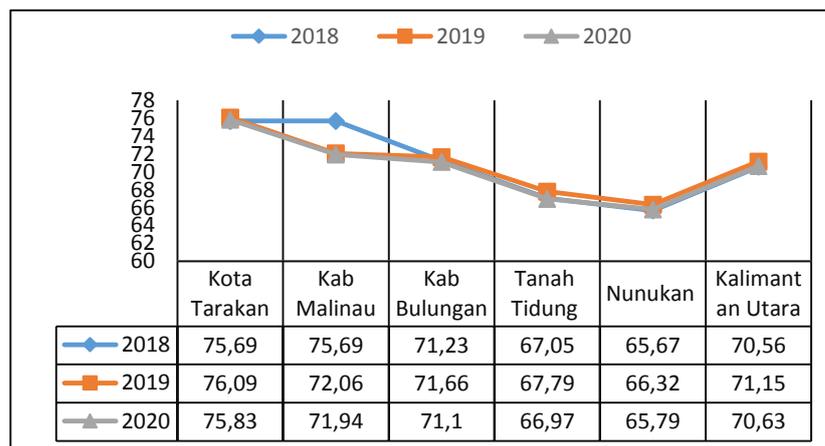
E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bulungan pada tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Bulungan mencapai 71,10. Terjadi penurunan -0,56 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2019 (71,66 tahun 2019 menjadi 71,10 tahun 2020).

Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan Tahun 2018-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2018	71,23
2019	71,66
2020	71,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021



Grafik 2.2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, 2021

Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 adalah IPM Kota Tarakan yang mencapai

75,83. Lalu peringkat kedua dan ketiga masing-masing adalah IPM Kabupaten Malinau (71,94) dan IPM Kabupaten Bulungan (71,10).

Tabel 2.17 Komponen Penyusunan IPM Kabupaten Bulungan tahun 2020

Uraian	2018	2019	2020
Indikator IPM			
Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,55	72,60	72,66
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,98	12,99	13,00
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	8,93	8,94
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000Rp)	9.310	9.648	9.121
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,23	71,66	71,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa, angka harapan hidup Kabupaten Bulungan mencapai 72,66 pada tahun 2020, angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tahun 2020, penduduk Bulungan memiliki harapan untuk hidup selama 72-73 tahun. Angka harapan hidup merupakan indikator capaian bidang kesehatan, dengan demikian Kabupaten Bulungan memiliki capaian tingkat kesehatan yang cukup baik.

Angka harapan lama sekolah menunjukkan angka yang dapat ditempuh oleh seseorang semenjak usia tujuh tahun karena mengikuti program wajib belajar pemerintah. Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah Bulungan mencapai 13,00 tahun, nilai tersebut melebihi target pemerintah. Artinya penduduk Bulungan dapat menempuh pendidikan formal dari usia tujuh tahun (sekolah dasar) selama 12 tahun (hingga sekolah menengah atas). Sedangkan Angka Rata-rata lama sekolah Bulungan pada tahun 2020 mencapai 8,94 tahun artinya, pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah yang ditempuh seseorang yang berusia 25 tahun keatas hanya sebesar 8,94 tahun. Dilihat berdasarkan RPJMD Kabupaten Bulungan, sasaran peningkatan IPM pada capaian saat ini masih dibawah 9 tahun, artinya rata-rata lama sekolah seorang siswa belum dapat mencapai masa kelulusan SMP.

Rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan (PPP) di Kabupaten Bulungan tahun 2020 mencapai Rp. 9.121.000,-. mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 9.648.000,-. Angka ini berguna untuk mengukur dimensi standar hidup layak dalam IPM dan memberikan gambaran mengenai paritas daya beli penduduk di wilayah Kabupaten Bulungan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang tercermin pada sejumlah indikator makro pembangunan manusia, antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelangsungan hidup bayi, Angka Usia Harapan Hidup (AHH), persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja, dan lain-lain.

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya) terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data bahwa terdapat 95,28 persen penduduk secara umum yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis huruf latin. Berdasarkan jenis kelamin, persentase 95,28 persen penduduk secara umum yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis huruf latin. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang melek huruf latin lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 96,19 persen untuk laki-laki dan 94,23 persen untuk perempuan. Terdapat 98,14 persen penduduk yang mampu membaca dan menulis yang berasal dari golongan pengeluaran 40 persen tengah.

Tabel 2.18 Persentase penduduk 15 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya
Jenis Kelamin		
Laki-laki	96,19	11,76
Perempuan	94,23	12,58
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	94,36	5,72
40 Persen Tengah	98,14	15,54
20 Persen Teratas	91,40	16,39
Kabupaten Bulungan	95,28	12,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

B. Rata-rata Lama Sekolah

Variabel angka rata-rata lama sekolah (ALS) merupakan indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan juga merupakan komponen IPM. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara (2020) peningkatan atau penambahan ALS untuk masyarakat Kabupaten Bulungan dalam enam tahun terakhir (2015-2020)



belum mencapai satu tahun, dari 8,29 tahun (2015) menjadi 8,94 tahun (2020). Laju pertumbuhan ALS selama enam tahun hanya 7,72% atau rata-rata pertumbuhannya 1,93% per tahun. Sedangkan untuk mencapai target ALS tahun 2020, yaitu 9,27 tahun, maka rata-rata pertumbuhan ALS harus mencapai 2,96% per tahun.

Berdasarkan data tersebut bahwa capaian kinerja pertumbuhan ALS di Kabupaten Bulungan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, karena dalam dokumen RPJMD 2016-2021 di targetkan pertumbuhan ALS rata-rata adalah 2,96% per tahun, namun kinerja yang terjadi baru mencapai 1,93% per Tahun, berarti kinerja pertumbuhan ALS selama enam tahun terakhir secara rata-rata baru mencapai 65,20% dari target yang ditetapkan.

Kinerja pendidikan di Kabupaten Bulungan belum dapat mendorong masyarakat untuk bersekolah lebih lama atau meningkatkan tarap pendidikannya, sampai dengan tahun 2020 baru mencapai tingkat setara dengan SMP dan belum semuanya lulus (baru 8,94 tahun). Dua tahun sebelumnya (2018-2019) capaian ALS di Kabupaten Bulungan lebih tinggi dari rata-rata tingkat Provinsi Kalimantan Utara, meskipun masih diatas capaian rata-rata nasional. Capaian kinerja ALS di Kabupaten Bulungan posisinya berada di tengah-tengah, dibawah Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau, tetapi masih diatas Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung.

Tabel 2.19 Perkembangan nilai ALS di Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bulungan	8,29	8,43	8,75	8,92	8,93	8,94
Malinau	8,29	8,56	8,88	9,04	9,05	9,39
Nunukan	7,22	7,57	7,65	7,73	7,81	8,00
Tana Tidung	7,85	8,11	8,23	8,49	8,53	8,54
Tarakan	9,91	9,92	9,93	9,94	9,96	9,97
Kalimantan Utara	8,36	8,49	8,62	8,87	8,94	9,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov Kalimantan Utara, 2021

C. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk



menurut partisipasi sekolah. Untuk mengetahuinya, antara lain : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari semua jenjang pendidikan merupakan indikator yang lazim digunakan mengukur efektivitas cakupan dan kualitas layanan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah , yang diukur pada tiap-tiap jenjang pendidikan.

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kabupaten Bulungan 2 (dua) Tahun terakhir mulai dari 2019 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan, baik di jenjang SD/MI dan SMP/MTS, sedangkan jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 94.73 menjadi 92.82 pada tahun 2020. Angka Partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antar siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kabupaten Bulungan dari tahun 2019-2020 mengalami kenaikan pada tahun 2020 baik dijenjang SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Secara rinci perkembangan APM dan APK dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk Pada Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2019	2020	2019	2020
SD/MI	90.81	93.28	101.50	106.08
SMP/MTS	75,97	82.34	95.31	101.80
SMA/SMK/MA	64.84	68.46	94.73	92.82

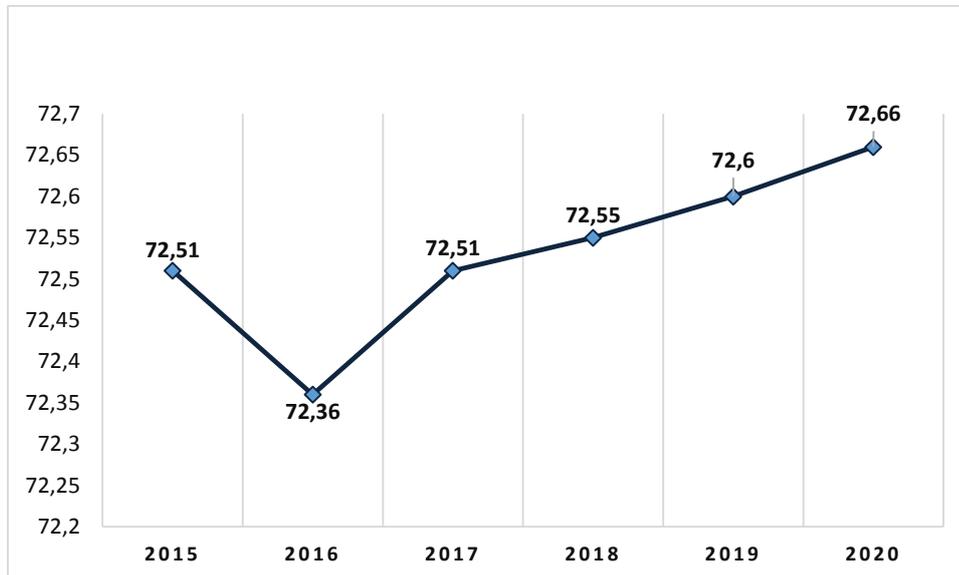
Sumber : Kabupaten Bulungan dalam Angka, 2021

D. Angka Usia Harapan Hidup

Indikator yang menjadi elemen kinerja pengembangan SDM adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Target kinerja pembangunan untuk AHH dalam lima tahun akan meningkat sebesar 0,9% atau rata-rata 0,18% per tahun. Sedangkan data BPS menunjukkan bahwa peningkatan AHH baru mencapai 0,54% selama empat tahun atau rata-rata 0,14% pertahun (grafik 2.3). Jadi capaian kinerja AHH Kabupaten Bulungan hingga tahun 2020 baru mencapai 60%.

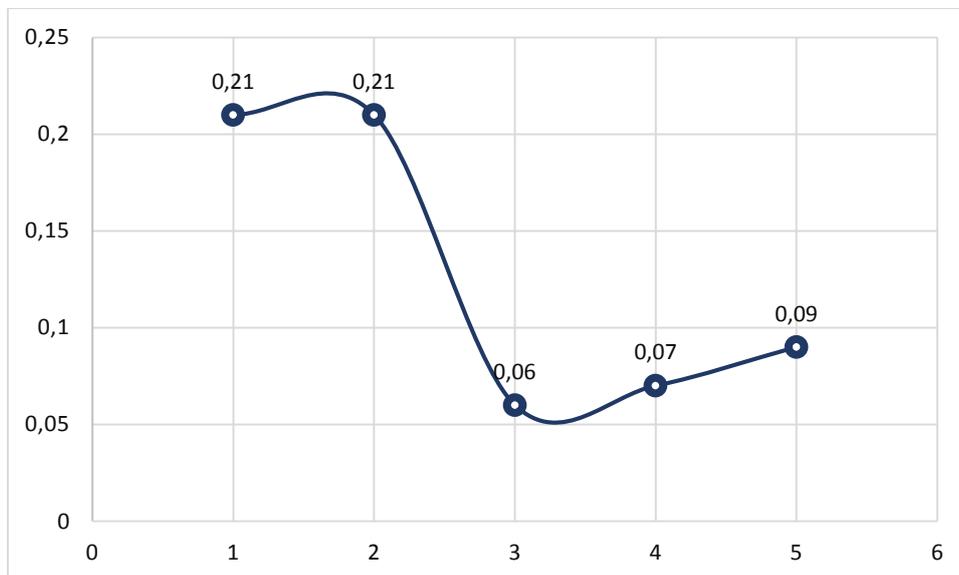
Permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan AHH ini adalah laju perkembangan justru cenderung menurun (Grafik 2.4), dengan rata-rata laju pertumbuhan selama lima tahun 0,14%, ternyata hanya laju pertumbuhan tahun pertama dan kedua yang tinggi, mencapai 0,21%. Tetapi laju pertumbuhan tahun ketiga hanya mencapai 0,06%, lalu naik sedikit pada tahun keempat menjadi 0,07%

dan naik sedikit pada tahun kelima menjadi 0,09 %. Sehingga secara umum laju pertumbuhan AHH mengalami perlambatan atau cenderung menurun.



Grafik 2.3 Perkembangan AHH di Kabupaten Bulungan Periode 2015-2019

Sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2020 dan diolah (2021)



Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan AHH di Kabupaten Bulungan

Sumber : Grafik 2.3

Data dukung untuk AHH yang menarik untuk diperhatikan adalah berkaitan dengan berat badan bayi saat dilahirkan. Oleh karena itu bayi yang dilahirkan dengan berat di bawah normal akan tumbuh menjadi individu dengan tingkat kesehatan yang tidak optimal, dan akhirnya akan mempengaruhi AHH yang bersangkutan. Data

statistik Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa ada sekitar 18% bayi yang dilahirkan di Kabupaten Bulungan mempunyai bobot < 2,5 kg (Tabel 2.21).

Tabel 2.21 Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dua tahun terakhir menurut karakteristik dan berat badan bayi yang dilahirkan terakhir, 2020

Karakteristik	< 2,5 kg	≥ 2,5 kg	Tidak Ditimbang	Jumlah
Kelompok Pengeluaran				
40% terbawah	15,370	84,630	0,000	100,000
40% tengah	5,510	94,490	0,000	100,000
20% teratas	33,720	45,950	20,330	100,000
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	20,320	79,680	0,000	100,000
SMP ke atas	14,970	78,740	6,290	100,000
Kabupaten Bulungan	17,978	76,698	5,324	100,000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Jika diperhatikan lebih cermat data tersebut (Tabel 2.18) diketahui, bayi yang lahir dengan berat <2,5 kg ternyata terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak miskin dan pendidikannya tidak rendah. Berdasarkan data tersebut berarti masyarakat kelompok pengeluaran 20% terjadi perkembangan pola konsumsi yang tidak sehat, dan terjadi pola salah asuh pada konsumsi anak sehingga memunculkan generasi dengan kualitas kesehatan yang rendah. Lebih lanjut, jika ditinjau dari tingkat pendidikan, ternyata kelompok masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dari tingkat SMP masih menghasilkan generasi “yang beresiko kesehatan” sekitar 15% (Tabel 2.21). Mungkin perlu dimasukkan lagi pendidikan “kesejahteraan keluarga” di tingkat SMP dan SMA sebagai program tidak lanjutnya.

E. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti cuti. Disamping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk



melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bulungan pada tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.22 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bulungan 2018-2020

No.	Indikator	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,84	66,66	67,38
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,12	4,57	4,45
3	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94,88	95,43	95,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bulungan mengalami kenaikan pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 67,38 persen. Hal demikian terjadi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan dari 4,57 persen menjadi 4,45 persen di tahun 2020, sedangkan Tingkat Kesempatan kerja mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 95,43 persen menjadi 95,55 persen di tahun 2020. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa nilai indikator tersebut mengalami penurunan maka kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja semakin rendah.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

A. Pendidikan

- Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari keikutsertaan penduduk dalam pendidikan dan merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini dapat dibedakan sesuai usia sekolah yaitu penduduk pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun yang bisa dikategorikan berada pada jenjang pendidikan SD,SMP dan SMA.

Berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2020 didominasi oleh karakteristik umur 7-12 Tahun. Pemerintah Daerah harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap rendahnya APS pada usia sekolah lanjutan, terutama lanjutan tingkat atas (SMA).



Tabel 2.23 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kabupaten Bulungan 2018-2020

Kelompok Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur		
	2018	2019	2020
7-12	97,30	97,56	98,35
13-15	97,64	97,16	96,55
16-18	16,18	73,39	73,68

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2021

Angka Partisipasi Sekolah terbesar ada pada kelompok umur 7-12 tahun yang menandakan bahwa baiknya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar. Terlihat pula bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin berkurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan.

- Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan tertentu. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24 Rasio Ketersediaan Sekolah

	Jumlah	Rasio
Jumlah Penduduk Sekolah usia sekolah dasar (5-9 tahun)	13.922	
Jumlah Sekolah Dasar (SD)	143	
Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		102,71
Jumlah Penduduk Sekolah usia sekolah Menengah (10-14 tahun)	13.106	
Jumlah Sekolah Menengah (SMP)	62	
Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah		47,30
Jumlah Penduduk Sekolah usia sekolah Menengah Atas (15-19 tahun)	10.102	
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	15	
Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan Atas		14,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (2021) dan diolah (2021)

- Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengidentifikasi ketersediaan tenaga

pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapainya kualitas pembelajaran. Semakin sedikit angka rasio guru terhadap muridnya maka diharapkan pembangunan pendidikan akan semakin membaik karena dengan sedikitnya murid yang di tangani oleh seorang guru diharapkan guru tersebut dapat lebih memperhatikan muridnya.

Rasio guru murid pada tahun ajaran 2019/2020 berada pada kisaran 11-13 untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA sederajat. Rasio guru murid paling kecil berada pada tingkat SMP/ sederajat sebesar 12,01 angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11,17 yang berarti setiap guru harus menanggung 11-12 murid. Semakin kecil rasio guru murid akan semakin mudah pula pengawasan yang dilakukan guru terhadap muridnya tersebut sehingga kualitas pengajaran cenderung semakin baik. Sebaliknya, rasio murid guru terbesar berada pada tingkat SD/ sederajat yaitu 13,62 yang berarti bahwa setiap satu orang guru SD/ sederajat harus menanggung sekitar 13-14 muridnya . Semakin banyak murid yang ditanggung maka akan semakin berat pula tugas guru untuk memperhatikan semua muridnya.

Tabel 2.25 Jumlah Guru, Jumlah Murid, dan Rasio Guru Murid Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bulungan, 2019 dan 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru		Jumlah Murid		Rasio Guru-Murid	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
SD/Sederajat	1.473	1.321	18.850	18.004	12,80	13,62
SMP/Sederajat	681	616	7.607	7.403	11,17	12,01
SMA/Sederajat	294	286	3.505	3.446	11,92	12,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (2021), dan diolah (2021)

- Rasio Jumlah Murid dan Sekolah

Rasio jumlah murid dan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 dibawah ini

Tabel 2.26 Jumlah murid, Jumlah Sekolah dan Rasio Murid dan Sekolah

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid		Jumlah Sekolah		Rasio Murid-Sekolah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
SD/Sederajat	18.850	18.004	142	143	132,74	125,90
SMP/Sederajat	7.607	7.403	61	62	124,70	119,40
SMA/Sederajat	3505	3.446	14	15	250,36	229,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (2021), dan diolah (2021)



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio jumlah murid dan sekolah pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. penyebab turunnya rasio Murid dan sekolah, karena pada tahun 2020 jumlah murid mengalami penurunan di semua jenjang pendidikan sedangkan jumlah sekolah mengalami peningkatan. Rasio Murid Sekolah pada tahun 2020 tertinggi pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat dan SD/Sederajat. Jenjang pendidikan SMA/ Sederajat rasio murid dan sekolah sebesar 229,73 yang artinya satu sekolah SMA/Sederajat menampung 230 siswa. Jenjang pendidikan SD/Sederajat dengan rasio sebesar 125,90 angka ini berarti satu sekolah SD/Sederajat menampung 126 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat rasio jumlah murid dan sekolah sebesar 119,40 yang artinya satu sekolah SMP/Sederajat menampung 120 siswa.

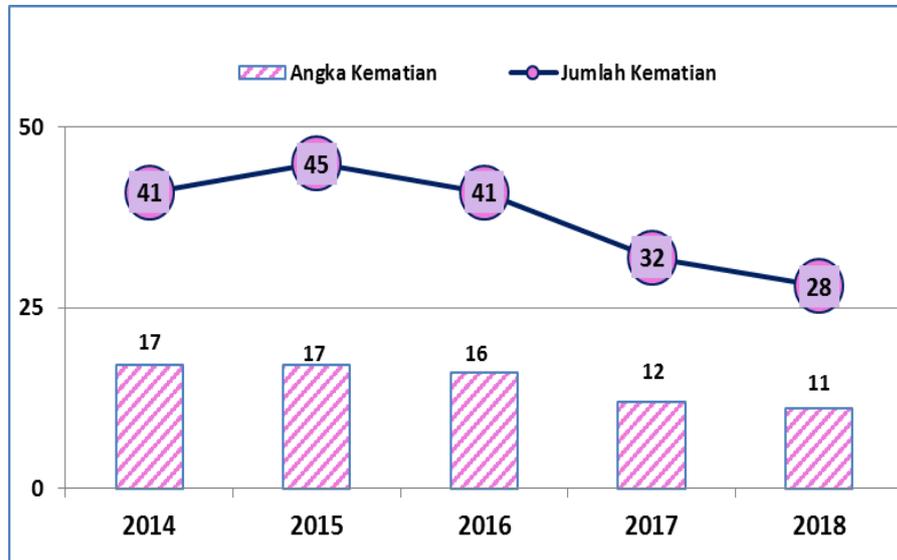
B. Kesehatan

- Angka Kematian bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang paling sensitif untuk menentukan derajat kesehatan di suatu daerah. Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB adalah gambaran status kelangsungan hidup di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh status kesehatan anak dan didukung oleh adanya status pelayanan kesehatan anak yang optimal.

AKB dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. AKB merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan. Bila AKB disuatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

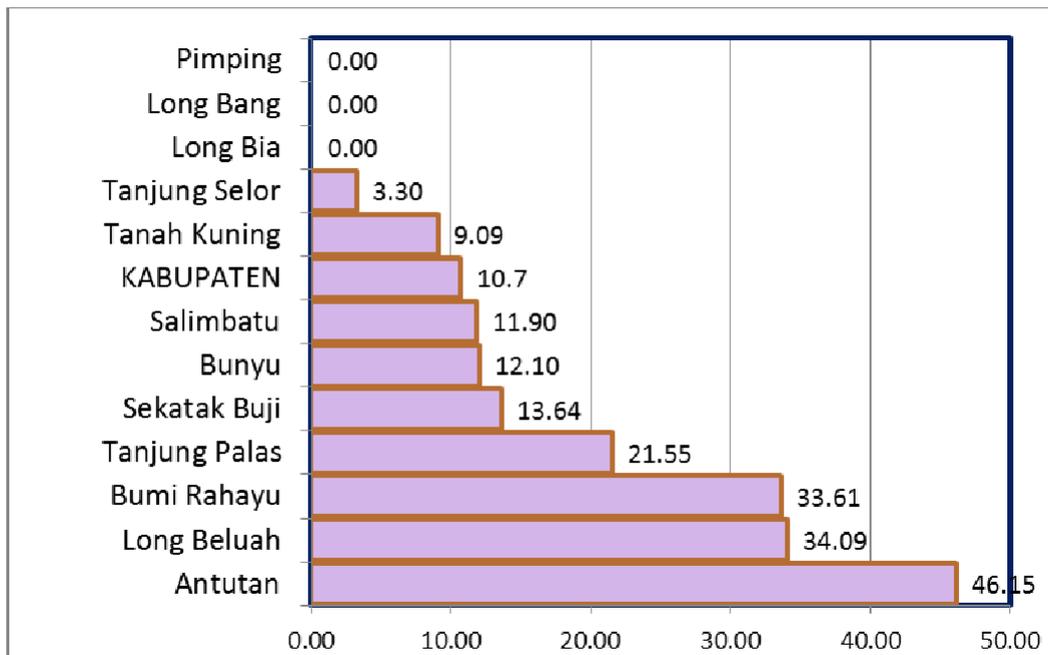
Dari data pelaporan dan pencatatan yang masuk bahwa angka kematian bayi yang ada di Kabupaten Bulungan lima tahun terakhir ini terlihat penurunan yang cukup signifikan. Angka kematian bayi di Kabupaten Bulungan yang tercatat dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.5 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bulungan Tahun 2014 – 2018

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2019

Jika melihat dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa AKB di Kabupaten Bulungan lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, Berdasarkan dari data yang masuk di Dinas Kesehatan tercatat pada tahun 2018 Angka Kematian bayi di Kabupaten Bulungan sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup dengan 28 jumlah kasus kematian bayi dari 2.617 kelahiran hidup. Penurunan kasus kematian bayi di Kabupaten Bulungan tidak lepas dari banyaknya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk menurunkan angka kematian ini salah satunya dengan pemerataan sarana dan prasarana baik dari segi pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga, serta semakin memadainya akses dan pelayanan kesehatan pra dan pasca melahirkan, menyediakan layanan dan program yang mendukung kesehatan. Untuk melihat angka kematian bayi menurut Puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 2.6 Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas Di Kabupaten Bulungan Tahun 2018

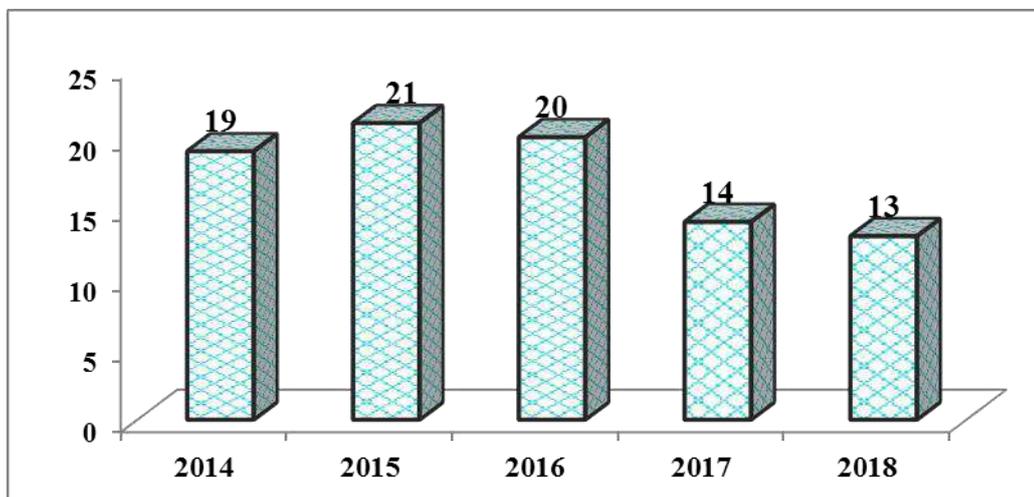
Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2019

Berdasarkan rekapitulasi laporan puskesmas se-Kabupaten Bulungan bahwa angka kematian tertinggi ada di wilayah Puskesmas Antutan sebesar 46,15 dan wilayah Puskesmas Long Beluah sebesar 34,04 per 1000 kelahiran hidup, untuk dua puskesmas dengan angka kematian terendah ada pada Puskesmas Tanjung Selor dengan 3,30 dan Puskesmas Tanah Kuning sebesar 9,09 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan untuk puskesmas wilayah Pimping, Long Bang, dan Long Bia tidak terdapat kasus kematian.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kematian bayi tetapi tidak mudah menemukan faktor yang paling dominan. Sebagianan keselamatan persalinan dan faktor pendukung lainnya. Besar faktor penyebab kematian bayi yaitu sebelum usia 1 bulan (masa neonatal yaitu pada usia 0 – 28 hari), kematian bayi tersebut terjadi pada bulan pertama kehidupan diantaranya berada pada minggu pertama kehidupannya. Penyebab kematian pada masa neonatal pada umumnya berkaitan dengan kesehatan ibu selama hamil, kesehatan janin selama didalam kandungan seperti asfiksia, premature, kelainan bawaan, dan lain-lainnya, sedangkan penyebab kematian pada usia 28 – 11 bulan disebabkan pneumonia, kelainan saluran cerna dan penyebab kematian lainnya.

- Angka Kematian Balita

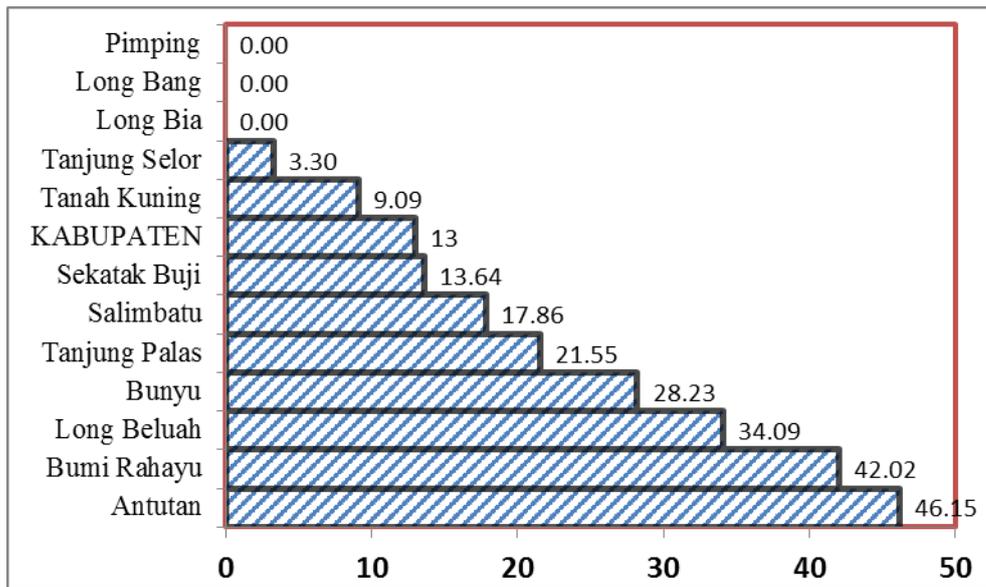
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun (≤ 60 bulan) pada periode waktu tertentu per 1.000 Kelahiran Hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita, seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sebagaimana pada Angka Kematian Bayi (AKB), kematian balita juga merupakan salah satu indikator penentu derajat kesehatan. Angka Kematian Balita (usia 0 –59 bulan) di Kabupaten Bulungan sebesar 12,99 per 1000 kelahiran hidup. Untuk lebih jelasnya perkembangan kematian balita selama kurun waktu 2014- 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.7 Angka Kematian Balita di Kabupaten Bulungan Tahun 2014 – 2018

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Tahun 2019

AKABA tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berbeda sedikit dari tahun sebelumnya dari 14 per 100 kelahiran hidup menurun menjadi 13 per 1000 kelahiran hidup. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan telah optimal dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menurunkan angka kematian ini, banyaknya usaha yang telah dikerahkan salah satunya dengan pemerataan pelayanan kesehatan dengan merekrut tenaga kesehatan yang berkompetensi, maupun meratakan dan menambah fasilitas penunjang baik sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas, pusku, posyandu, maupun fasilitas lainnya serta selalu mengoptimalkan Manajemen Terpadu pada anak (0 – 59 bulan).



Grafik 2.8 Angka Kematian Balita Menurut Puskesmas Di Kabupaten Bulungan Tahun 2018

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Kab.Bulungan Tahun 2019

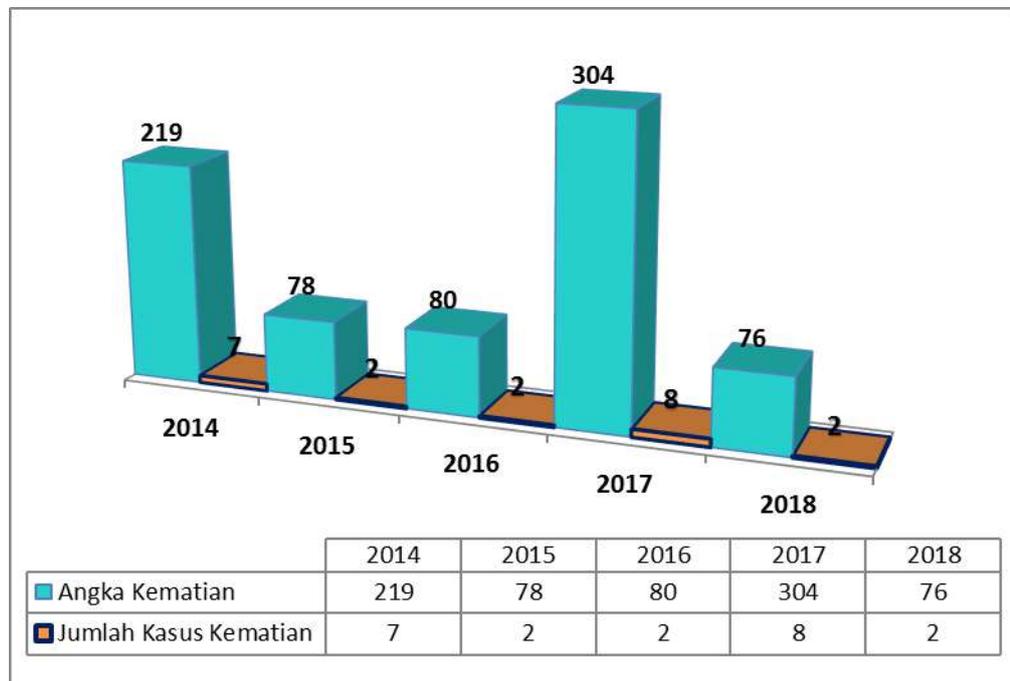
Berdasarkan grafik tersebut, puskesmas dengan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup tertinggi terdapat pada Puskesmas Antutan sebesar 46,15 per 1000 kelahiran hidup dan Bumi Rahayu sebesar 42,02 per 1.000 kelahiran hidup, untuk puskesmas dengan Angka Kematian Balita terendah yaitu Puskesmas Tanjung Selor sebesar 3,03 per 1000 kelahiran hidup dan Puskesmas Tanah Kuning sebesar 9,09 per 1000 kelahiran hidup. Untuk Puskesmas Pimping, Long Bang, dan Long Bia dengan tidak ada kasus kematian balita tahun 2018.

Penyebab kematian Balita atau anak usia 0 – 59 bulan (bayi dan anak balita) merupakan masa sangat rentan terhadap berbagai penyakit karena daya tahan tubuhnya yang masih lemah sehingga mudah tertular penyakit, khususnya penyakit pernafasan dan saluran cerna.

- **Angka Kematian Ibu Melahirkan**

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Jumlah kematian ibu merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Indikator untuk mengetahui besaran masalah kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian

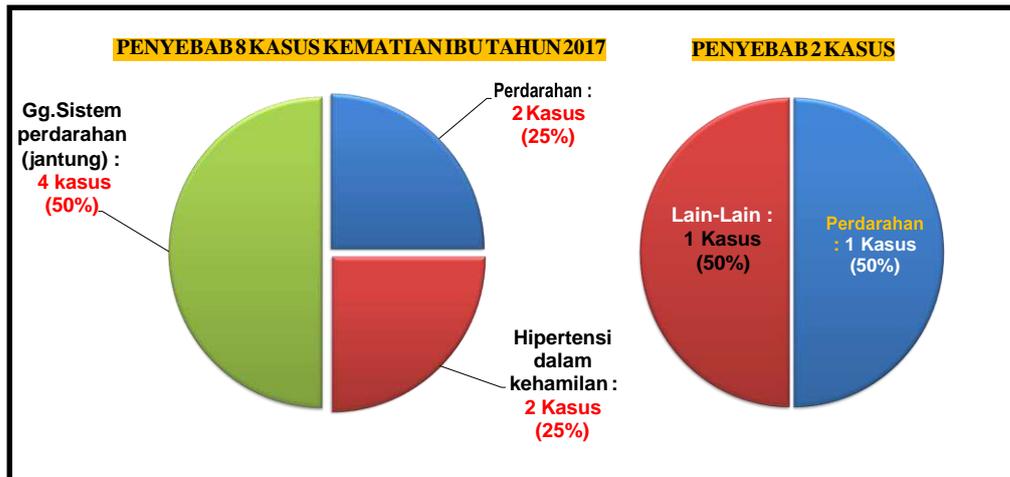
Ibu di Kabupaten Bulungan tahun 2018 adalah 76 / 100.000 Kelahiran Hidup dengan 2 kematian.



Grafik 2.9 Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kabupaten Bulungan Tahun 2014 – 2018

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bulungan Tahun 2018

Angka kematian ibu mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu sebesar 76 per 1000.000 kelahiran hidup, dengan dua kasus kematian, dibandingkan dari tahun sebelumnya terutama dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 304 per 100.000 kelahiran hidup dari total delapan kasus kematian. Jika melihat dari usia kematian Ibu di Kabupaten Bulungan terdapat dua kasus. Satu kasus kematian ini ada pada umur ≤ 20 tahun yang terdapat pada wilayah kerja Puskesmas Tanah Kuning dan satu kasus pada usia 20 – 34 di wilayah Puskesmas Tanjung Selor. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan kematian bayi di Kabupaten Bulungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.10 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bulungan Tahun 2017 - 2018

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Kab. Bulungan Tahun 2019

Kematian Ibu salah satu yang ada kasus di Tanah Kuning berhubungan juga dengan tingkat kelompok umur. Kehamilan terlalu muda usia < 20 tahun adalah umur yang beresiko bagi ibu dan juga bagi janinnya. Kehamilan di usia muda beresiko tinggi karena saat itu ibu masih dalam proses tumbuh akan terjadi kompetisi makanan antara janin dan ibunya sendiri yang masih dalam masa pertumbuhan dan adanya perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan. Faktor penyebab kasus yaitu karena pendarahan dan oedema paru post Sectio Caesar.

Banyak strategi ataupun upaya yang akan terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dari akses, mutu layanan kesehatan ibu, membangun kemitraan yang efektif melalui kerja sama lintas program dan lintas, dan tak kalah pentingnya adalah mendorong dan mengerakkan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu.

Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bulungan adalah dengan harapan langkah tersebut dapat meningkatkan jangkauan program K4 Ibu hamil, semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, dan di fasilitas kesehatan. Banyak upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan beserta jejaringnya seperti; puskesmas, pustu, poskesdes, polindes, dan lintas sektor (camat, desa, tokoh masyarakat dan kader), untuk menurunkan kematian ibu antara lain melalui pemerataan melalui penempatan bidan di desa, membentuk kelas Ibu hamil, kegiatan Promosi Gizi Seimbang, Penyuluhan Ibu hamil Resiko Tinggi Usia <20 tahun dan KB Pasca Persalinan, Kegiatan AMP (*Audit Maternal Perinatal*), penyediaan rumah tunggu, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, serta penyediaan Fasilitas Kesehatan Puskesmas Perawatan dan pelayanan obstetri



Neonatal Emergensi Dasar di puskesmas serta melalui program Jampersal (jaminan persalinan).

- **Rasio Pos Pelayanan Terpadu dan Jumlah Balita**

Rasio pos pelayanan terpadu (Posyandu) per satuan balita merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Rasio ideal 1 unit Posyandu untuk melayani balita adalah 75-100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu. Jumlah posyandu di Kabupaten Bulungan tahun 2020 sebanyak 203 buah dan jumlah balita sebanyak 2.636 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 1:13. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Bulungan hanya melayani 13 balita, artinya perbandingan rasio posyandu dengan balita telah terpenuhi.

Tabel 2.27 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan jumlah balita di Kabupaten Bulungan tahun 2020

No.	Uraian	2020
1.	Jumlah Posyandu	203
2.	Jumlah Balita	2.636
3.	Rasio Posyandu dan balita	12,98 atau 1: 13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021 dan diolah (2021)

- **Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu**

Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per seribu pada tahun 2020 sebesar 1:1.972, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang berarti satu Fasilitas kesehatan melayani 1.972 penduduk. Beberapa tahun terakhir ini ketersediaan fasilitas kesehatan ini semakin sedikit, dimana disebabkan peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi sementara jumlah fakses tidak mengalami penambahan kuantitas.

Tabel 2.28 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	18	12	12
2.	Jumlah Poliklinik	3	5	5
3.	Jumlah Puskesmas Pembantu	54	60	60
4.	Jumlah 1-3	75	77	77
5.	Jumlah Penduduk	136.204	139.733	151.844
6.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu	1.816,05	1.814,71	1.972
7.	Jumlah Kecamatan	10	10	10
8.	Rasio Puskesmas Per Kecamatan	1,8	1,2	1,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021 dan diolah (2021)

- **Rasio Rumah sakit Persatuan Penduduk**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosa serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara Kuantitas, pada tahun 2019 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit. Hal ini menyebabkan angka ketersediaan rumah sakit semakin buruk karena jumlah penduduk tiap tahunnya selalu mengalami penambahan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2019.

Tabel 2.29 Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1
2.	Jumlah Penduduk	136.204	139.733	151.844
3.	Rasio Rumah Sakit	1: 136.204	1: 139.733	1:151.844

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021 dan diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bulungan masih belum memadai, dilihat dari Rasio Rumah sakit, satu Rumah sakit di Kabupaten Bulungan harus melayani Seluruh penduduk di Kabupaten Bulungan, 1:151.844 penduduk. Hal ini dapat menyebabkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bulungan tidak maksimal karena kurangnya ketersediaan rumah sakit yang memadai.



- **Rasio Dokter Per satuan penduduk**

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu. idealnya satu orang dokter melayani 2500 penduduk.

Tabel 2.30 Rasio Dokter Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019	2020
1.	Jumlah Dokter	65	82
2.	Jumlah Penduduk	139.733	151.844
3.	Rasio Dokter per 1.000 penduduk	0,46	0,54
4.	Rasio Dokter terhadap penduduk	1:2.149,73	1:1.851,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021 dan diolah (2021)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,54 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 0,46 tahun 2019 yang berarti pada tahun 2020 satu dokter melayani 1.851 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Bulungan cukup memadai untuk melayani kesehatan masyarakat.

- **Rasio Tenaga medis Persatuan Penduduk**

Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data dibawah ini menunjukkan bahwa rasio tenaga medis per seribu penduduk pada tahun 2020 sebesar 5,80 yang berarti pada tahun 2020 satu tenaga medis melayani 172 penduduk. Berikut dibawah ini tabel rasio tenaga media per satuan penduduk.

Tabel 2.31 Rasio Tenaga medis Per satuan penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2020

No.	Uraian	2020
1.	Jumlah Perawat	514
2.	Jumlah Bidan	279
3.	Jumlah Farmasi	66
4.	Ahli Gizi	23
5.	Jumlah Semua Tenaga Medis	882



No.	Uraian	2020
6	Jumlah Penduduk	151.844
7	Rasio Tenaga Medis Per 1000	5,80
8	Rasio Tenaga Medis terhadap Penduduk	1:172.15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021 dan diolah (2021)

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan dasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. seperti Kondisi jalan, rasio tempat beribadah, luas RTH publik, Rasio Bangunann Ber-IMB, dan Ketaatan Terhadap RTRW.

a. Kondisi Jalan

Ketersediaan Infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan Jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah. Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, tahun 2019 di kabupaten Bulungan telah dibangun jalan sepanjang 512,66 km yang terdiri dari 512,66 Jalan kab/Kota .

Tabel 2.32 Kondisi Jalan Kab/Kota di Kabupaten Bulungan 2017-2020

Kondisi Jalan (Km)	2017	2018	2019	2020
Baik	165.06	198.54	235.71	248.19
Sedang	100.18	100.18	102.13	103.86
Rusak	150.29	137.23	127.04	117.41
Rusak Berat	97.13	76.72	47.79	43.20
Jumlah	512.67	512.67	512.67	512.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Panjang jalan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 panjang jalan dalam kondisi baik 165,06 km naik menjadi 248.19 km pada tahun 2020. Panjang jalan kondisi sedang dari 100,18 km meningkat menjadi 103.86 km. Sedangkan panjang jalan dalam kondisi rusak mengalami penurunan yaitu dari 150,29 km pada tahun 2017 menjadi hanya 117.41 km pada tahun 2020. Adapun panjang jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 97,13 km mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi 43.20 km.

b. Rasio Tempat Beribadah Persatuan Penduduk

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Tabel 2.33 Rasio Tempat Beribadah Persatuan Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2020

No.	Uraian	2019	2020
1.	Jumlah Tempat Beribadah	428	504
2.	Jumlah Penduduk	139.733	151.844
3.	Rasio Tempat Beribadah per 1.000 penduduk	3,06	3,31
4.	Rasio Tempat Beribadah terhadap penduduk	1:326	1:301

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021 dan diolah (2021)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rasio tempat ibadah per seribu penduduk pada tahun 2020 sebesar 3,31 yang berarti pada tahun 2020 satu tempat beribadah bisa menampung 301 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tempat beribadah di Kabupaten Bulungan cukup memadai.

c. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m²
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur; dan
- didominasi komunitas tumbuhan

d. Rasio Bangunan Ber-IMB Persatuan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,



mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

e. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentukan lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah.

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin taat suatu daerah pada RTRW, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja adalah jumlah sengketa yang terjadi per 1000 jumlah perusahaan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai

pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

B. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak

- Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34 Partisipasi perempuan Dalam Lembaga Pemerintah dan DPRD
Kabupaten Bulungan Tahun 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah Partisipasi perempuan di DPRD	-	4 orang	5 Orang
2	Jumlah PNS Perempuan di Lembaga Pemerintah	1.855 Orang	1.811 Orang	1.780 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah di Kabupaten Bulungan setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti PNS perempuan yang berada di lembaga pemerintah mengalami penurunan dari 1.811 orang pada tahun 2019 menjadi 1.780 orang pada tahun 2020.

C. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu tertib administratif kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK dan akte Kelahiran. Berdasarkan data tabel (2.32) menunjukkan bahwa penduduk yang memiliki NIK adalah penduduk yang rata-rata berumur 17 tahun ke atas dan yang paling dominan adalah penduduk perempuan dengan persentase sebesar 97,70%, sedangkan penduduk yang memiliki Akte Kelahiran rata-rata berumur 0-17 tahun dengan persentase 91,92 persen berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.35 Persentase penduduk yang memiliki Nomor induk Kependudukan (NIK) dan Akte Kelahiran menurut karakteristik dan Kelompok Umur, 2020

No	Uraian	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-laki
1	Persentase Penduduk Ber-NIK per Per satuan penduduk		
	Umur 5 tahun ke atas	97,09	95,49
	Umur 17 tahun Keatas	97,70	96,24
2	Persentase Penduduk Ber-Akte		
	Umur 0-17 tahun	85,65	91,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

D. Perhubungan

- Jumlah Kendaraan

Tabel 2.36 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bulungan 2020

Kendaraan	2018	2020
Mobil Penumpang	4.406	4936
Bus	103	109
Truk	4.199	4584
Sepeda Motor	67.643	66.747
Jumlah total Kendaraan	70.351	76.376

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Adanya peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya pada tahun 2018 sebanyak 70.351 unit kendaraan naik menjadi 76.376 unit kendaraan pada tahun 2020.

E. Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan SDM yang mempunyai kemampuan di bidang TIK Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan, karena dengan adanya skill para pegawai dan kualitas sumber daya dapat menggerakkan suatu pemerintahan dengan baik dan benar. Di era globalisasi seperti ini peranan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat penting dan berpengaruh salah satunya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dengan berkembang pesatnya dunia teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dan memudahkan dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga

pemerintahan. Adanya teknologi informasi dan komunikasi ini juga akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan di dalam manajemen sumber daya manusia yang sebelumnya dilakukan tanpa dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

F. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

- Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Berdasarkan data dibawah ini menunjukkan adanya perkembangan atau pertumbuhan jumlah koperasi dan koperasi aktif setiap tahunnya.

Tabel 2.37 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019/2020
1	Jumlah Koperasi	151	151	172	183
2	Jumlah Koperasi aktif	151	151	172	183
3	Persentase Koperasi aktif (%)	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

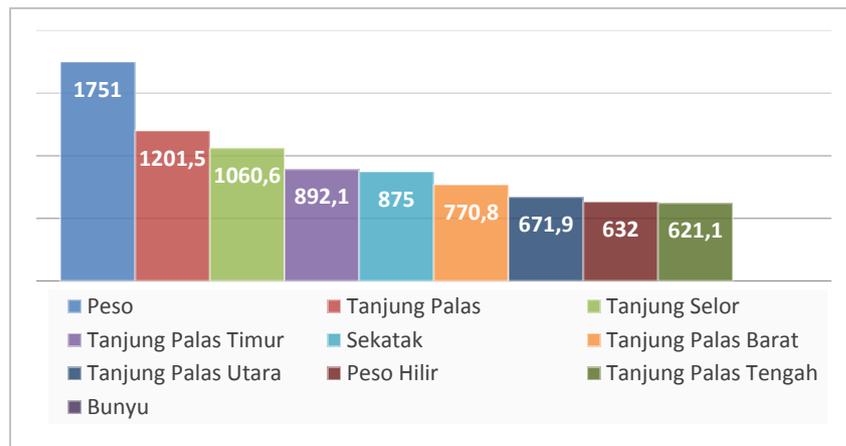
A. Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Bulungan mempunyai prospek yang baik dan masih dapat dikembangkan secara optimal. Daerah ini memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, agrowisata, maupun wisata budaya. Pada tahun 2020 tercatat 16 Objek wisata di Kabupaten Bulungan. Objek wisata tersebut terdiri dari 8 objek wisata alam, 5 objek wisata budaya, 1 objek wisata buatan, 1 objek wisata Adat, dan 1 objek wisata museum.

Berdasarkan Tingkat Penghuni Kamar (TPK) hotel di Kabupaten Bulungan pada akhir tahun 2019, tepatnya bulan Desember, sebesar 24,52. Nilai ini berarti bahwa rata-rata kamar yang terpakai setiap malamnya sebanyak 24,52 persen dari seluruh kamar yang tersedia di Kabupaten Bulungan. Sedangkan Rata-rata lama menginap Wisatawan pada bulan Desember 2019 adalah 1,55 hari artinya rata-rata lama orang menginap di Kabupaten Bulungan sekitar 1-2 hari.

B. Pertanian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, bahwa luas panen tanaman padi terluas terdapat di Kecamatan Peso. Sekitar 20,7 persen Sekitar 20,7 persen dari total luas panen padi di Kabupaten Bulungan dihasilkan dari kecamatan tersebut. Sedangkan luas panen padi paling sedikit terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Tengah yaitu kurang dari 10 ha. Sedangkan di Kecamatan Bunyu tidak terdapat penanaman padi. Berikut dibawah ini grafik Luas Panen Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan tahun 2019.



Grafik 2.11 Luas Panen Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Berdasarkan data diatas realisasi panen tanaman padi tahun 2020 di lahan seluas 4.327,52 Ha di Kabupaten Bulungan, dengan jumlah produksi 12.610,09 ton. Diperoleh Produktivitas padi pertahun rata-rata mencapai 2,9 ton per hektar. Apabila dikonversi ke komoditi pangan beras, maka beras yang dihasilkan Kabupaten Bulungan selama tahun 2020 adalah 7.061,65 ton beras (konversi dari padi ke beras = 56%). Kebutuhan beras per kapita pertahun sebanyak 120 kg perjiwa pertahun, maka dengan jumlah penduduk sebanyak 139.733 jiwa, Kabupaten Bulungan membutuhkan beras sebanyak 16.767.960 ton per tahun.

Pada jenis tanaman hortikultura, jenis tanaman cabai memiliki luas panen paling besar di tahun 2020 yaitu sekitar 265 ha, luas panen tomat 44 ha, dan luas panen petsai 133 ha. Tanaman cabai paling banyak ditanam di wilayah Kecamatan Sekatak seluas 34 ha dan Tanjung Selor seluas 51 ha. Tanaman Tomat paling banyak ditanam di Kecamatan Tanjung Selor seluas 11 ha dan Kecamatan Sekatak seluas 12 ha. Untuk tiga jenis tanaman hortikultura yang memiliki produksi terbesar adalah

tanaman cabai sebanyak 18.852 kwintal, tanaman petsai/sawi hijau sebanyak 6.460 kwintal, dan tanaman tomat sebanyak 4.559 kwintal. Tanaman cabai paling banyak diproduksi di Kecamatan Tanjung Selor. Tanaman petsai paling banyak diproduksi di Kecamatan Bunyu. Tanaman tomat paling banyak diproduksi di Kecamatan Tanjung Selor. Berikut dibawah ini tabel Jenis Tanaman Hortikultura di Kabupaten Bulungan tahun 2020.

Tabel 2.38 Jenis Tanaman Hortikultura di Kabupaten Bulungan tahun 2020

Jenis Tanaman Hortikultura	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwintal (Kw))
Cabai	265 Ha	18.852 kw
petsai/sawi hijau	133 Ha	6.460 kw
Tomat	44 Ha	4.559 kw

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Terdapat beberapa jenis buah produksi lokal Kabupaten Bulungan, seperti buah pisang, jeruk, salak, dll. Produksi tanaman pisang pada tahun 2020 adalah sebanyak 160.808 kwintal, dan paling banyak berasal dari kecamatan Tanjung Palas Timur. Produksi buah jeruk pada tahun 2020 adalah sebesar 34,002 kwintal. Produksi buah jeruk paling banyak berasal dari Kecamatan Tanjung Selor. Produksi buah salak adalah sebesar 4,338 kwintal. Produksi salak paling banyak berasal dari Kecamatan Bunyu.

Tanaman kelapa sawit memiliki area tanam paling luas sebesar 2.371 ha dan paling banyak ditanam di Kecamatan Sekatak. Area tanam kelapa adalah seluas 871 ha dan paling banyak ditanam di Kecamatan Sekatak. Luas area tanam tanaman kakao adalah sebesar 471 ha dan paling banyak ditanam di Kecamatan Tanjung Palas.

C. Pertenakan

Pada Bidang perternakan, tercatat populasi hewan ternak pada tahun 2019 sebesar 21.281 meningkat pada tahun 2020 sebesar 21.990. Sedangkan untuk ternak unggas pada tahun 2019 sebesar 1.027.049 meningkat pada tahun 2020 sebesar 1.043.056. Berikut dibawah ini tabel populasi ternak dan populasi unggas di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019-2020.



Tabel 2.39 Populasi ternak dan populasi unggas di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019-2020

uraian	Tahun	
	2019	2020
Populasi Ternak		
Sapi Potong	6.851	7181
Kerbau	16	16
Kuda	1	1
Kambing	7.943	8.312
Babi	6.470	6.480
Jumlah Populasi ternak	21.281	21.990
Populasi Unggas		
Ayam Kampung	457.850	463.391
Ayam Pendaging	562.200	568.594
Itik-itik Manila	6.999	11.071
Jumlah Populasi Unggas	1.027.049	1.043.056

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, 2021

Berdasarkan data diatas populasi ternak yang ada di Kabupaten Bulungan terdiri dari Sapi potong, kerbau, kuda, kambing dan babi. Pada tahun 2019 populasi ternak mengalami kenaikan di tahun 2020 yaitu sapi potong pada tahun 2019 sebesar 6.851 naik menjadi sebesar 7181 pada tahun 2020 dan ternak kambing mengalami kenaikan dari 7.943 pada tahun 2019 menjadi 8.312 pada tahun 2020. Ternak yang tidak mengalami kenaikan adalah kerbau dan kuda yang masih bertahan pada jumlah yang sama pada tahun 2019. Sama halnya dengan populasi unggas yang mengalami kenaikan di setiap hewan unggas, salah satu yang mengalami kenaikan besar dibandingkan hewan unggas lainnya adalah ayam kampung dari 457.850 pada tahun 2019 menjadi 463.391 pada tahun 2020.

D. Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Bulungan tahun 2020 menurut tempat penangkapan/ pemeliharaan. Berdasarkan data dibawah ini menunjukkan bahwa produksi ikan terbanyak adalah produksi ikan laut sebesar 6.780 ton dengan nilai sebesar Rp. 199.380.774, sedangkan Nilai tertinggi adalah produksi ikan dari pembesaran/pembenihan sebesar Rp. 360.804.000. Berikut dibawah ini tabel Produksi ikan di Kabupaten Bulungan tahun 2020.

Tabel 2.40 Produksi ikan di Kabupaten Bulungan Tahun 2020

	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)
Perikanan Tangkap di Laut	6.780	199.380.774
Tongkol	54	1.360.255
Udang	1.118	46.347.449
Lainnya	5.607	151.601.100
Perikanan Tangkap Perairan Umum	177	4.584.025
Udang	47	2.152.750
Ikan	126	2.374.275
Lainnya	4	57.000
Perikanan Pembesaran/Pembenihan	5.659	360.804.000
Patin	16	312.400
Lele	48	1.190.000
Nila	7	146.200
Bandeng	1.156	17.343.000
Udang	4.236	338.861.600
Ikan Lainnya	196	2.950.800

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, 2020

E. Energi

Listrik merupakan salah satu sumber penerangan dan energi bagi masyarakat yang sangat penting. Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan baik produksi maupun penjualan listrik di wilayah Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2019 produksi listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sekitar 982.200 KWh. Produksi listrik PLN berguna untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan listrik yang semakin besar dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik tidak hanya dikonsumsi oleh rumah tangga, tetapi juga perkantoran, usaha, termasuk industri. Pada tahun 2020, listrik yang dijual PLN ke masyarakat adalah sekitar 902.000 KWh. Dimana pelanggan listrik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pelanggan paling besar di wilayah Kabupaten Bulungan adalah rumah tangga. Pada tahun 2019 terdapat sekitar 35.672 pelanggan listrik yang terdaftar di PLN. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 33.582 pelanggan. Layanan listrik PLN telah mencapai seluruh kecamatan di wilayah Bulungan, meskipun belum seluruh desa dapat dijangkau. Pelanggan listrik paling banyak kedua setelah unit PLN Tanjung Selor adalah unit Gunung Sari, Tanjung Palas, dan Pimping. Berikut dibawah ini tabel Pelanggan listrik di Kabupaten Bulungan tahun 2019.



Tabel 2.41 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Unit di Kabupaten Bulungan tahun 2015-2019

Unit	2015	2016	2017	2018	2019
Tanjung Selor	11.643	12.722	14.614	16.150	17.439
Gunung Sari	2 049	2 158	2 454	3 804	3 804
Tanjung Palas	2 713	2 874	3 416	3 649	3 649
Salim Batu	467	531	905	1 008	1 517
Mara	393	396	406	433	433
Long Beluah	749	769	801	829	829
Long Peso	495	544	576	587	587
Pimping	2 465	2 533	2 723	3 219	3 219
Sekatak	665	692	780	883	1 175
Bunyu	2 260	2 405	2 804	3 020	3 020
Kabupaten Bulungan	23 899	25 624	29 476	33 582	35 672

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

F. Sumber Daya Air

Jumlah pelanggan air yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Danum Benuanta di wilayah Kabupaten Bulungan adalah sebanyak 14.300 pelanggan. Volume air yang disalurkan pada tahun 2019 adalah sebesar 4.572.710 m³, dengan nilai sekitar 24,4 miliar rupiah. Air PDAM hanya tersedia di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sekatak, dan Bunyu. Pengguna air PDAM paling banyak terdapat di Kecamatan Tanjung Selor.

Tabel 2.42 Jumlah Sambungan PDAM Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Pelanggan	Air di Salurkan (m ³)	Nilai (Rp)
Peso			
Peso Hilir			
Tanjung Palas Barat			
Tanjung Palas	1.962	526.611	2.544.898.250
Tanjung Selor	10.889	3.668.461	20.104.254.260
Tanjung Palas Timur			
Tanjung Palas Tengah	373	78.031	368.013.500
Tanjung Palas Utara			



Kecamatan	Pelanggan	Air di Salurkan (m3)	Nilai (Rp)
Sekatak	506	148.818	696.852.500
Bunyu	570	150.789	723.202.000
Kabupaten Bulungan	14.300	4.572.710	24.437.220.510

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

G. Perdagangan dan Perindustrian

Indikator hasil penanganan urusan industri dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah industri kecil dan menengah serta jumlah industri yang sudah memanfaatkan teknologi tepat guna.

2.3.4 Fokus Urusan Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, Dokumen Perencanaan daerah, diantaranya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .

B. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan tugas belajar dan ijin belajar di Kabupaten Bulungan merupakan salah satu indikator pendidikan dan pelatihan. Tahun 2016 sebanyak 74, tahun 2017 sebanyak 24, tahun 2018 sebanyak 33, dan tahun 2019 sebanyak 60 pegawai yang mendapat pendidikan tugas belajar dan ijin belajar. Hal ini menggambarkan masih antusiasnya para pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan didukung oleh adanya fasilitas pendidikan dengan sistem pembejaraan jarak jauh dan terbuka.

C. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilah tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan. Pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Instruksi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Lapran Hasil Pengawasan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat berkewajiban mengaudit sehingga menemukan beberapa temuan serta melakukan tindak lanjut terhadapnya.

D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Keberhasilan fasilitasi kepada pemerintah terkait penerapan inovasi daerah dapat dilihat dari jumlah inovasi daerah yang diterapkan oleh suatu pemerintah. Untuk Kabupaten Bulungan capaian indek inovasi daerah tahun 2019 dengan status kurang inovatif dgn nilai 110, namun ditahun 2020 meningkat status menjadi Inovatif dengan nilai 851.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek Daya saing daerah merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat sejahtera dengan tetap terbuka pada persaingan Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Perkapita

Indikator pengeluaran per kapita rata-rata konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Berikut dibawah ini tabel jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020.

Tabel 2.43 Jumlah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten Bulungan 2019-2020

Uraian	2019	2020
Pengeluaran Per Kapita (rupiah/tahun)	18.548,90	19.568,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Berdasarkan data diatas bahwa pengeluaran per kapita di Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan yaitu Rp. 1020 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pendekatan

pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat.

B. Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan dan sebagai salah satu alat ukur untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut dibawah ini tabel persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita di Kabupaten Bulungan tahun 2019-2020.

Tabel 2.44 Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita

Uraian	2019	2020
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	426.139	442.384
Aneka Barang dan Jasa	156.452	189.558
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	36.103	41.969
Barang Tahan Lama	68.242	62.701
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	47.088	49.849
Keperluan pesta dan Upacara	20.332	23.363
Total Pengeluaran non Pangan	790.356	809.825
Total Pengeluaran pangan	755.386	820.904
Total Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan	1.545.742	1.630.729

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Berdasarkan data diatas rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non pangan pada tahun 2019 sebesar Rp. 790.356 meningkat menjadi Rp. 809.825 pada tahun 2020. pengeluaran perkapita non pangan paling besar yaitu biaya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 426.139 dan tahun 2020 sebesar Rp. 442.384. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita non pangan paling rendah yaitu keperluan pesta atau upacara adat sebesar Rp. 20.332 pada tahun 2019 dan Rp. 23.363 pada tahun 2020. untuk keseluruhan rata-rata pengeluaran perkapita non pangan sebesar Rp. 790.356. Dilihat dari tabel tersebut bahwa pengeluaran masyarakat Kabupaten Bulungan lebih besar pada konsumsi non pangan dibandingkan dengan konsumsi pangan. Semakin besar pengeluaran rumah tangga terutama pada pengeluaran untuk non pangan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan semakin baik.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

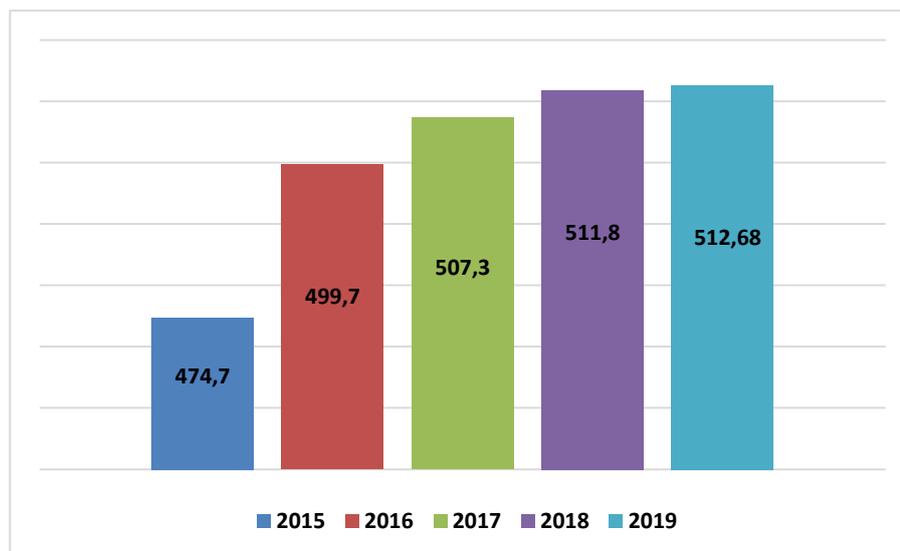
Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

A. Aksesibilitas Daerah

- Jaringan Jalan

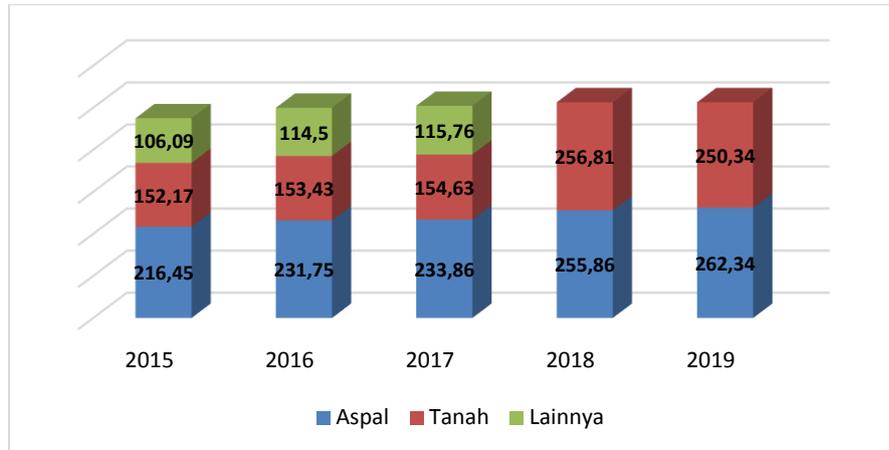
Jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk mempelancar kegiatan perekonomian, makin meningkat usaha pembangunan menuntut pola peningkatan pembangunan jalan untuk daerah ke daerah lain.

Panjang jalan Kabupaten Bulungan pada tahun 2019/2020 yang menjadi wewenang Kabupaten Bulungan mencapai 512,68 km. panjang jalan Kabupaten menurut rincian jenis permukaan adalah permukaan yang diaspal 262,34 km dan permukaan tanah 250,34 km. persentase panjang jalan dengan permukaan aspal adalah yang paling besar pada tahun 2019 yaitu sekitar 51,2%. Jika dilihat dari kondisi jalan pada tahun 2019, jalan dalam kondisi baik sepanjang 235,72 km, sedangkan kondisi sedang 99,96 km, kondisi rusak 126,65 km dan dalam kondisi rusak berat 50,35 km. Dengan demikian terlihat bahwa kondisi jalan berkategori baik meningkat. Jalan kondisi rusak telah mengalami penurunan banyak dibandingkan tahun 2018 yaitu telah turun sekitar 10 persen. Sementara kondisi jalan dengan kondisi permukaan baik meningkat sekitar 26 persen. Dilihat dari data yang ada bahwa jalan dengan kondisi buruk pada tahun sebelumnya telah diperbaiki.



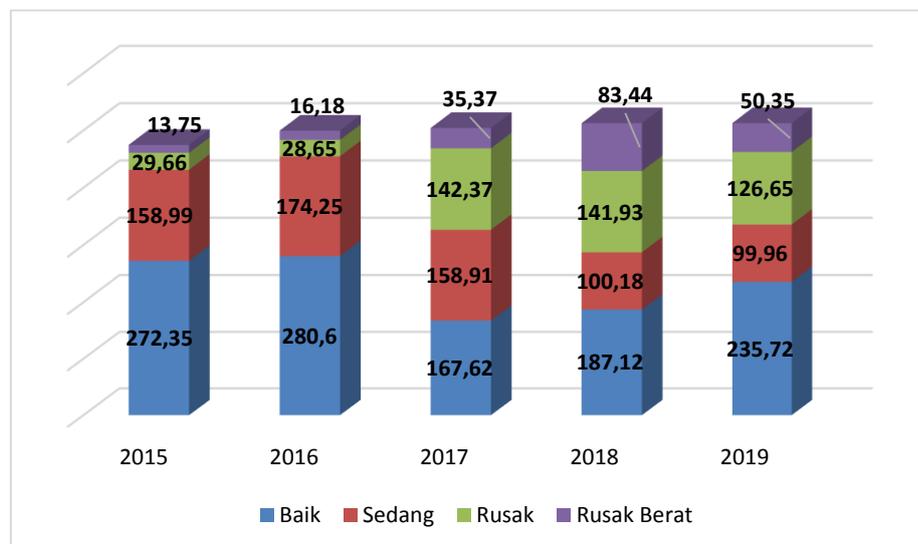
Grafik 2.12 Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bulungan tahun 2015-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021



Grafik 2.13 Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bulungan tahun 2015-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021



Grafik 2.14 Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bulungan 2015-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

- **Ketersediaan Air Bersih**

Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk hidup sehat, perkembangan ketersediaan air bersih di Kabupaten Bulungan dalam lima tahun terakhir masih fluktuatif dan cenderung meningkat pada empat tahun terakhir, meskipun peningkatannya masih relatif. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pada pembangunan mendatang, khususnya untuk penyediaan air minum yang layak berdasarkan standar kesehatan untuk masyarakat di pedesaan,

Tabel 2.45

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota dan Provinsi	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1 Bulungan	77,72	71,61	73,90	77,13	78,22
2 Malinau	66,05	62,67	66,88	75,36	68,04
3 Nunukan	83,59	82,31	84,14	91,98	91,63
4 Tana Tudung	88,34	81,66	87,91	80,41	78,68
5 Tarakan	95,50	95,75	93,75	96,40	98,13
Kalimantan Utara	84,59	82,69	83,78	88,30	87,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, 2020

Tabel 2.46

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Kab/Kota dan Provinsi	Sumber Air Minum Rumah Tangga (%)								
	Leading	Pompa	Air dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindungi	Mata Air Terlindung	Mata Air tak terlindung	Air Permukaan	Air Hujan
1 Bulungan	8,20	0,06	62,99	2,61	1,02	3,65	2,02	5,64	13,80
2 Malinau	14,79	0,00	54,46	0,61	0,89	2,15	6,69	16,65	3,77
3 Nunukan	3,66	2,46	64,11	2,33	1,58	2,99	0,37	2,27	20,22
4 Tana Tudung	2,84	3,17	50,62	0,64	1,00	0,51	0,10	4,43	36,69
5 Tarakan	4,73	3,43	83,90	1,30	0,74	0,76	0,49	0,00	4,64
Kalimantan Utara	6,30	2,06	69,39	1,73	1,05	2,10	1,51	3,97	11,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, 2021

Ketersediaan air minum layak untuk masyarakat jika ditinjau dari sumbernya masih sangat perlu mendapat perhatian, karena masyarakat harus menanggung biaya yang besar untuk memperoleh air minum yang layak, sekitar 63% masyarakat mengandalkan air dalam kemasan sebagai sumber air minum yang layak. Sedangkan sumber air minum layak yang berasal dari PDAM di Kabupaten Bulungan pada tahun

2019 baru mencapai 8,2%. Selain itu sekitar 13,8% masyarakat masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum, kondisi ini sangat perlu mendapat perhatian, oleh karena mutu air hujan saat ini tidak dapat diprediksi kualitasnya dengan adanya pengaruh kegiatan pembangunan yang menimbulkan pencemaran udara, yang selanjutnya mempengaruhi kualitas air hujan

- **Rumah Tangga/Pelanggan Yang Menggunakan Listrik**

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat pada era digital saat ini, karena listrik tidak hanya sebagai sumber penerangan, tetapi juga merupakan prasarana dasar untuk kegiatan masyarakat bidang komunikasi dan industri yang merupakan kegiatan produktif masyarakat.

Tabel 2.47

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020

Kab/Kota dan Provinsi	Sumber Penerangan Rumah Tangga		
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
1 Bulungan	94,22	5,51	0,27
2 Malinau	77,23	22,62	0,15
3 Nunukan	89,65	9,63	0,72
4 Tana Tudung	61,58	38,08	0,34
5 Tarakan	98,87	1,13	0,00
Kalimantan Utara	91,26	8,46	0,28

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, 2021*

Meskipun ketersediaan listrik PLN di kabupaten Bulungan telah mencapai 94,22% dan hanya di bawah Kota Tarakan rankingnya di provinsi Kalimantan utara, tetapi durasi ketersediaan listrik dalam periode 24 jam ditengarai masih rendah, khususnya di wilayah perdesaan. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pembangunan di seluruh Kecamatan masih terjadi Kesenjangan.

- **Restoran/Hotel**

Ketersediaan restoran pada suatu daerah dapat menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah restoran/rumah makan di Kabupaten Bulungan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 jumlah restoran/rumah makan sebesar 85 mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya sebesar 74 di tahun 2019. Berikut dibawah ini jumlah restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Bulungan tahun 2016-2020

Tabel 2.48 Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Bulungan
Tahun 2016-2020

Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Bulungan	
Tahun	Jumlah
2016	40
2017	64
2018	74
2019	74
2020	85

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2021

Ketersediaan Penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangannya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Di Kabupaten Bulungan sendiri, jumlah akomodasi dan kamar setiap tahunnya mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2019 jumlah akomodasi yaitu, 37 unit dengan jumlah kamar sebanyak 677 kamar. Berdasarkan data tersebut bahwa masih lemahnya tingkat daya tarik investasi di Kabupaten Bulungan. Berikut dibawah ini tabel Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur non bintang di Kabupaten Bulungan tahun 2015-2019.

Tabel 2.49 Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur Non Bintang di Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2019

Tahun	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
2015	141	3.058	4.581
2016	157	3.295	4.772
2018	160	3.518	5.054
2019	37	677	1.020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2020

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus iklim berinvestasi sangat dipengaruhi oleh rasa aman yang diciptakan agar investor tertarik untuk berinvestasi. Salah satu yang menjadi halangan terbesar



dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kriminalitas. Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menggambarkan bahwa disiplin hukum berjalan dengan baik. Ketentraman dan ketertiban umum sangat berdampak positif dalam meningkatkan kenyamanan investasi. Investasi menjadi faktor yang sangat penting karena berperan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi akan memberikan manfaat terhadap banyak pihak baik itu investor, masyarakat dan pemerintah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Kondisi daerah terkait iklim berinvestasi dapat dilihat dari indikator : Angka Kriminalitas, dan Kemudahan perijinan.

A. Angka Kriminalitas

Indikator Kriminalitas berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Berikut dibawah ini tabel Angka Kriminalitas di Kabupaten Bulungan tahun 2020.

Tabel 2.50 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bulungan setiap tahunnya

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan	239	212	194
Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk (%)	0,17	0,14	0,13
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	68,20	69,34	87,11
Selang waktu terjadinya tindak pidana	131 jam 724 menit 79 detik	148 jam 754 menit 71 detik	162 jam 556 menit 70 detik

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang dilaporkan setiap tahunnya mengalami penurunan sama halnya dengan persentase penyelesaian tindak pidana setiap tahunnya mengalami kenaikan pada tahun 2019 69,34% kasus dapat diselesaikan dan pada tahun 2020 sebesar 87,11% kasus dapat diselesaikan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bulungan menggambarkan bahwa disiplin hukum di Kabupaten Bulungan berjalan dengan baik.

B. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyaknya faktor, salah satunya kemudahan perijinan .

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1/S2/S3. Kualitas tenaga kerja merupakan salah satu permasalahan yang ada, mengingat jumlah lulusan S1/S2/S3 masih terbilang kecil yang berbanding lurus dengan kecilnya rasio S1/S2/S3.

B. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif . penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif secara ekonomi masih tergantung pada orang tua. Berikut dibawah ini tabel struktur umur penduduk dan Rasio ketergantungan di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2019.

Tabel 2.51 Struktur Umur Penduduk dan Rasio Ketergantungan 2018-2019

Tahun	Struktur Umur				ABT
	0-14	15-64	65+	Jumlah	
2018	29,62	66,10	4,28	100,00	51,28
2019	29,22	66,24	4,54	100,00	50,97

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bulungan, 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk umur 0-14, 15-16, dan 65+ pada tahun 2019 mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018. Oleh karena itu, rasio ketergantungan pada tahun 2019 juga mengalami perubahan



dibandingkan tahun 2018. Rasio Ketergantungan disini yang dimaksud adalah yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia produktif (15-64) dengan penduduk tidak produktif (0-14 dan 65+). Angka ini sangat dipengaruhi oleh proporsi jumlah penduduk pada penduduk usia produktif, penduduk anak—anak berusia 0-14 tahun, dan penduduk lansia yang berusia 65 tahun keatas.

Pada tahun 2019, proporsi penduduk lansia meningkat dibandingkan tahun 2018 namun diikuti dengan penurunan proporsi penduduk anak-anak. Hal ini menyebabkan rasio ketergantungan sedikit menurun dari 51,28 pada tahun 2018 menjadi 50,97 pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) rata-rata menanggung 50 hingga 51 orang usia tidak produktif.

2.5. Capaian Kinerja Pembangunan

Pada bagian ini disampaikan terkait dengan hasil evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintah pada periode RPJMD sebelumnya dengan melihat realisasi capaian pada akhir tahun RPJMD

Tabel 2.52 Hasil Analisis Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bulungan

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL 2016	TARGET 2020	Capaian Kinerja 2020	CAPAIAN (%)
Indeks Pembangunan Manusia	69,37	72,12	71,10	98,59
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,23	6,01	4,67*	77,70
Persentase Penduduk Miskin	12,03	8,81	9,06	97,24
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,05	4,48	4,45	100,67
PDRB Perkapita (jutaan)	102,9	135,7	128,5*	94,69
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	-	100	85,5	85,5
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	71,21	100	77,78	77,78
PDRB Sektor Pertanian	2.234.707	3.192.738	2.865.138	89,73
Nilai Tukar Petani	98,62	96,41	103,43	107,28
PDRB Sektor Perindustrian	2.147.957,-	2.834.290,-	2.544.839,-	89,78
Pertumbuhan Ekonomi	5,23	6,01	4,67	77,70
Nilai Investasi	200 M	750 M	42.462 M	5,661



INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL 2016	TARGET 2020	Capaian Kinerja 2020	CAPAIAN (%)
Angka Kemiskinan	8,99	8,81	9,06	97,24
Presentase desa yang terhubung dengan pusat ekonomi	20	40	85.19	212,97
Rata-Rata Lama Sekolah	8,43	9,16	8,93	97,50
Harapan Lama Sekolah	12,75	13,48	13,00	96,43
Umur Harapan Hidup	72,36	72.86	72,66	99,72
Angka Pendapatan Perkapita	79.128.746	85.210.027	56.000.000*	65,71
Tingkat Pengangguran Terbuka	-	4,48	4,45	99,33
Indeks Pembangunan Gender	84,96	91,44	85.39	93,38
Jumlah Pemuda Yang Berprestasi	4	4	12	300
Angka Kriminalitas	22	18	0	100
Angka Konflik	0	0	0	100
Presentase Permukiman Yang Layak Huni	47	100	99,99	99,99
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Layak	82,97	85,20	91,98	107,95
Persentase Rumah Tangga Yang Terhubung Dengan Air Bersih	40,77	72,50	75,00	103,44
Indeks Pencemaran Air	PIj ≤ 5,0 (Cemar Ringan)	PIj ≤ 5,0 (Cemar Ringan)	3.21	100
Indeks Pencemaran Udara	ISPU 0-50 (Baik)	ISPU 0-50 (Baik)	96,08	96,08
Indeks Tutupan Lahan	87,16	87.16	85,04	97,56
Indeks Reformasi Birokrasi	-	BB	CC	75
Nilai SAKIP	C	BB	B	75
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	100
IKM	2	3	3	100
Nilai LPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	75



2.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

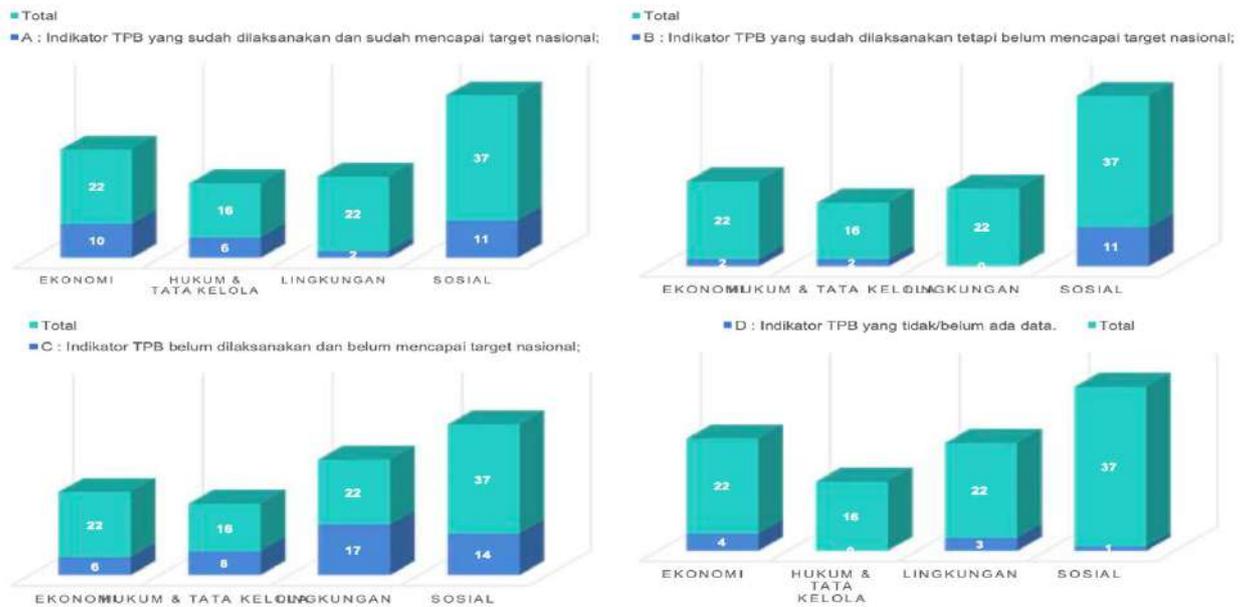
Berdasarkan pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 diperoleh bahwa terdapat 97 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari 220 indikator kewenangan kabupaten yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Bulungan. Adapun 97 indikator tersebut terdiri dari 22 indikator lingkungan hidup; 37 indikator sosial; 22 indikator ekonomi; dan 16 indikator hukum dan tata kelola. Dari total 97 indikator tersebut, terdapat 29 indikator masuk pada kategori A (Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional), 15 indikator masuk pada kategori B (Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional), 45 indikator masuk pada kategori C (Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional), serta 8 indikator yang masuk pada kategori D (Indikator TPB yang Tidak/Belum Ada Data). Capaian indikator terhadap target nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53. Capaian Indikator TPB Kabupaten Bulungan terhadap Target Nasional

No	Kriteria Indikator TPB	Jumlah	Persentase
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional	29	29,90%
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional	15	15,46%
3	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	45	46,39%
4	Indikator yang tidak/belum ada data	8	8,25%
Jumlah indikator TPB Kabupaten Bulungan berdasarkan kewenangan		97	100,00%

Sumber: KLHS-RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026

Kriteria capaian target nasional indikator TPB Kabupaten Bulungan berdasarkan pada pilar pembangunan disajikan pada gambar berikut.



Grafik 2.15. Kriteria Capaian Target Nasional TPB Kabupaten Bulungan

Sumber : KLHS-RPJMD Kab.Bulungan 2021-2026

Analisa KLHS-RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 terhadap capaian indikator TPB terdapat 15 tujuan dari 17 tujuan TPB yang diidentifikasi di Kabupaten Bulungan. Tujuan yang tidak terdapat di Kabupaten Bulungan adalah tujuan 14 terkait dengan ekosistem laut, dan tujuan 15 terkait dengan ekosistem darat.

Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat 10 indikator yang masuk pada tujuan 1, 3 indikator masuk pada tujuan 2, 14 indikator masuk pada tujuan 3, 6 indikator masuk pada tujuan 4, 4 indikator masuk pada tujuan 5, 4 indikator masuk pada tujuan 6, 3 indikator masuk pada tujuan 7, 3 indikator masuk pada tujuan 8, 3 indikator masuk pada tujuan 9, 7 indikator masuk pada tujuan 10, 8 indikator masuk pada tujuan 11, 8 indikator masuk pada tujuan 12, 2 indikator masuk pada tujuan 13, 16 indikator masuk pada tujuan 16, serta 6 indikator masuk pada tujuan 17. Tabel capaian indikator TPB berdasarkan tujuan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.54.** Capaian Indikator TPB Berdasarkan Tujuan

No. TPB	A	B	C	D	Total Keseluruhan
1	3	3	4	-	10
2	-	-	3	-	3
3	4	7	3		14
4	1	1	4	-	6
5	3	-	-	1	4
6	-	-	3	1	4
7	-	-	1	2	3
8	3	-	-	-	3
9		1	2	-	3
10	4	1	2	-	7
11	1	-	7	-	8
12	1	-	5	2	8
13		-	2	-	2
16	6	2	8		16
17	3	-	1	2	6
Total	29	15	45	8	97
Persentase	29,90%	15,46%	46,39%	8,25%	100%

Sumber: KLHS-RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Gambaran Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Bulungan membutuhkan arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pengaturan sumberdaya nasional dengan prinsip ini telah memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan secara berkeadilan dan bermanfaat, menuju masyarakat madani dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan sistem yang menyeluruh mengenai pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi dilaksanakan oleh pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah Daerah, yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Pendanaan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diatas menganut prinsip *Money follows Function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Lebih dalam lagi maknanya adalah bahwa pengeluaran (belanja daerah) harus berdasarkan kepada program dan kegiatan prioritas tinggi yang benar-benar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam musrenbang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.



Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan Pusat dibiayai dari APBN, baik dalam hal kewenangan pusat yang didekosentrasikan kepada Gubernur ataupun yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang baik di masa periode 2021-2026, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan, upaya penggalan potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja, serta mengembangkan sumber pembiayaan. Sehingga analisis terhadap kinerja keuangan daerah di masa lalu, yaitu periode tahun 2015-2020, perlu dilakukan.

3.2. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan Kabupaten Bulungan periode tahun 2015 - 2020 dapat diidentifikasi dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Gambaran kinerja keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

A. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dengan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah sebagaimana penjelasan berikut.

Gambaran mengenai perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 6 (enam) tahun (2015-2020) dapat dilihat pada Tabel 3.1. Analisis terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

- 1) Total pendapatan daerah secara umum cenderung menurun dengan rata-rata di angka 0,51%. Secara khusus, pendapatan terbesar didominasi oleh adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,28%.
- 2) PAD cenderung meningkat yang didominasi oleh kenaikan Pajak Daerah sebesar 22,25% kemudian adanya kenaikan Retribusi Daerah sebesar 13,81%, dan kenaikan pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 7,43%, walaupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan cenderung menurun.



- 3) Realisasi pendapatan daerah berupa bantuan keuangan cenderung menurun, yang mempengaruhi penurunan pendapatan secara umum, dengan penurunan rata-rata sebesar 26,85%.
- 4) Total Belanja cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 2,07%.
- 5) Defisit Anggaran (Pendapatan dikurangi Belanja) cenderung menurun rata-rata 39,12%. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya kekurangan Pendapatan untuk menutupi Belanja.
- 6) Dari sisi Pembiayaan, Pembiayaan Neto setiap tahun menurun, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cenderung menurun. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya penggunaan anggaran pembangunan.



Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Bulungan

Kode	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101,738,903,187.80	112,355,702,256.41	116,604,212,249.61	132,587,083,681.32	139,835,445,548.89	8.28
4.1.01	Pajak Daerah	15,769,221,352.15	33,734,827,198.22	37,671,145,883.38	40,825,412,552.42	35,224,884,278.87	22.25
4.1.02	Retribusi Daerah	5,208,439,554.41	7,388,466,432.00	8,873,386,574.00	8,321,179,693.00	8,738,466,394.50	13.81
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,842,768,427.11	21,863,258,938.90	19,913,790,877.79	18,617,998,089.62	10,739,852,281.36	-10.64
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63,918,473,854.13	49,369,149,687.29	50,145,888,914.44	64,822,493,346.28	85,132,242,594.16	7.43
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,102,711,281,282.80	880,419,497,684.29	971,691,095,841.28	1,076,617,078,810.16	1,044,564,602,108.45	-1.35
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,004,559,282,826.00	812,151,698,862.00	917,125,627,167.00	981,033,424,651.00	978,321,635,971.00	-0.66
4.2.01.01	Dana Perimbangan	954,708,986,826.00	748,789,002,862.00	844,880,074,167.00	897,070,061,651.00	875,463,721,971.00	-2.14
	- Dana Transfer Umum - DBH	389,161,200,141.00	157,175,299,846.00	188,951,404,902.00	178,010,061,362.00	178,406,206,602.00	-17.72
	- Dana Transfer Umum - DAU	462,110,308,000.00	470,131,592,000.00	497,449,426,000.00	528,242,829,000.00	525,055,889,000.00	3.24
	- Dana Transfer Khusus - DAK	103,437,478,685.00	121,482,111,016.00	158,479,243,265.00	190,817,171,289.00	172,001,626,369.00	13.56
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,069,932,000.00	0.00
4.2.01.05	Dana Desa	49,850,296,000.00	63,362,696,000.00	72,245,553,000.00	83,963,363,000.00	88,787,982,000.00	15.52
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98,151,998,456.80	68,267,798,822.29	54,565,468,674.28	95,583,654,159.16	66,242,966,137.45	-9.36
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	39,766,925,456.80	29,156,864,822.29	31,813,218,674.28	49,315,154,159.16	49,523,527,506.09	5.64
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	58,385,073,000.00	39,110,934,000.00	22,752,250,000.00	46,268,500,000.00	16,719,438,631.36	-26.85
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32,666,141,920.00	24,944,611,754.00	21,825,573,000.00	23,458,910,000.00	27,584,440,000.00	-4.14
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32,666,141,920.00	24,944,611,754.00	21,825,573,000.00	23,458,910,000.00	27,584,440,000.00	-4.14
Jumlah Pendapatan		1,237,116,326,390.60	1,017,719,811,694.70	1,110,120,881,090.89	1,232,663,072,491.48	1,211,984,487,657.34	-0.51
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	877,722,000,967.36	813,526,852,886.06	820,502,419,638.63	872,923,879,325.70	852,953,024,558.70	-0.71
5.1.01	Belanja Pegawai	518,447,146,025.00	482,369,817,242.00	466,491,108,951.00	513,886,002,683.00	491,915,968,891.42	-1.30



Kode	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315,332,469,966.71	279,601,637,627.46	318,069,381,454.98	326,245,421,519.70	297,712,805,812.28	-1.43
5.1.05	Belanja Hibah	43,587,384,975.65	51,390,398,016.60	35,446,929,232.65	31,352,375,123.00	63,024,249,855.00	9.66
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	355,000,000.00	165,000,000.00	495,000,000.00	1,440,080,000.00	300,000,000.00	-4.12
5.2	BELANJA MODAL	345,126,976,186.00	160,316,626,178.60	200,631,037,425.82	246,028,609,986.35	185,134,895,930.31	-14.42
5.2.01	Belanja Modal (Tanah, Peralatan & Mesin, Gedung & Bangunan, Jalan, Jaringan & Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya)	345,126,976,186.00	160,316,626,178.60	200,631,037,425.82	246,028,609,986.35	185,134,895,930.31	-14.42
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	616,312,113.00	15,800,000.00	0.00	3,000.00	22,801,142,638.00	146.63
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	616,312,113.00	15,800,000.00	0.00	3,000.00	22,801,142,638.00	146.63
5.4	BELANJA TRANSFER	108,348,686,262.00	127,734,506,509.05	135,114,511,000.00	157,329,005,000.00	164,106,592,000.00	10.94
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	2,124,802,000.00	4,895,872,000.00	130.42
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108,348,686,262.00	127,734,506,509.05	135,114,511,000.00	155,204,203,000.00	159,210,720,000.00	10.10
Jumlah Belanja		1,331,813,975,528.36	1,101,593,785,573.71	1,156,247,968,064.45	1,276,281,497,312.05	1,224,995,655,127.01	-2.07
Total Surplus/(Defisit)		-94,697,649,137.76	-83,873,973,879.01	-46,127,086,973.56	-43,618,424,820.57	-13,011,167,469.67	-39.12
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	331,745,269,239.36	236,582,979,927.18	147,677,052,131.59	101,653,037,259.45	61,067,563,146.93	-34.50
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	331,745,269,239.36	236,582,979,927.18	147,677,052,131.59	101,653,037,259.45	61,067,563,146.93	-34.50
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		331,745,269,239.36	236,582,979,927.18	147,677,052,131.59	101,653,037,259.45	61,067,563,146.93	-34.50
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	-26.32
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	-26.32
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	-26.32
Pembiayaan Netto		331,745,269,239.36	231,582,979,927.18	147,677,052,131.59	101,653,037,259.45	59,067,563,146.93	-35.04
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		237,047,620,101.60	147,709,006,048.17	101,549,965,158.03	58,034,612,438.88	46,056,395,677.26	-33.61
TOTAL APBD		1,331,813,975,528.36	1,106,593,785,573.71	1,156,247,968,064.45	1,276,281,497,312.05	1,226,995,655,127.01	-2.03

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, 2021



B. Neraca Daerah

Gambaran mengenai perkembangan posisi keuangan pada Neraca Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 3 tahun (2018-2020) dapat dilihat pada Tabel 3.2. Analisis terhadap perkembangan Neraca ini dapat dijelaskan antara lain:

- 1) Total Aset cenderung relatif statis dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0%.
- 2) Aset Lancar menurun dengan rata-rata penurunan yang tidak terlalu besar yaitu 0,05%. Penurunan ini karena adanya kecenderungan penurunan Kas yang sangat signifikan, yaitu rata-rata sebesar 0,3%. Walaupun Total Piutang mengalami kenaikan yang signifikan pula, tetapi tidak dapat meningkatkan Total Aset Lancar. Hal lain yang perlu difahami bahwa kenaikan Total Piutang ini berpotensi inefisiensi pengelolaan dana karena semakin besar dana tertahan pada piutang (tagihan).
- 3) Investasi Jangka Panjang cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,12%. Peningkatan ini karena didominasi oleh kenaikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, selain investasi pada Dana Bergulir (Investasi Jangka Panjang Non-Permanen).
- 4) Nilai Aset Tetap cenderung meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,05%. Semua komponen aset tetap naik, kecuali Asset Tetap Lainnya cenderung menurun 0,07%.
- 5) Kewajiban (Utang) cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,05%. Semua komponen utang cenderung turun, kecuali Utang Beban cenderung naik.
- 6) Ekuitas Dana (Modal Sendiri) cenderung mengalami penurunan sangat kecil, dan lebih cenderung mendekati statis dengan rata-rata penurunan pertumbuhan sebesar 0,01%.



Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah per 31 Desember 2017, 2018, 2019, dan 2020 Kabupaten Bulungan

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
ASET	5.984.372.287.128,35	6.036.380.906.144,79	5.938.886.142.784,81	5.938.886.142.784,81	0,00
ASET LANCAR	238.947.952.902,85	264.560.277.384,48	157.105.325.710,31	181.698.176.851,50	-0,05
Kas	147.737.358.706,89	101.555.658.662,03	59.613.723.107,88	48.492.824.725,26	-0,30
Piutang Pendapatan	40.833.511.380,49	113.745.885.936,72	61.082.342.559,86	73.568.909.801,86	0,51
Piutang Lainnya	16.044.501.125,00	22.825.890.606,00	8.964.707.413,00	6.251.001.362,00	-0,16
Penyisihan Piutang	-2.646.219.539,60	-15.114.927.885,31	-11.690.443.220,49	-10.134.923.043,04	1,45
Beban dibayar dimuka	16.284.673.777,44	109.728.166,67	33.430.833,33	59.467.312,58	-0,30
Persediaan	20.694.127.452,63	41.438.041.898,37	39.101.565.016,73	63.460.896.692,84	0,52
INVESTASI JANGKA PANJANG	321.344.968.853,78	325.972.819.211,31	432.387.633.155,13	435.071.270.519,67	0,12
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.050.578.382,66	5.095.317.801,19	5.187.497.408,84	5.221.791.295,40	0,01
Dana Bergulir	5.050.578.382,66	5.095.317.801,19	5.187.497.408,84	5.221.791.295,40	0,01
Investasi jangka Panjang Permanen	316.294.390.471,12	320.877.501.410,12	427.200.135.746,29	429.849.479.224,27	0,12
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	316.294.390.471,12	320.877.501.410,12	427.200.135.746,29	429.849.479.224,27	0,12
Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	
ASET TETAP	4.318.134.652.079,84	5.328.717.276.551,76	5.185.301.227.524,66	4.940.932.351.323,86	0,05



Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
Tanah	1.790.269.033.224,72	2.262.659.491.704,25	2.419.148.392.875,92	2.416.293.650.130,54	0,11
Peralatan dan Mesin	357.266.225.177,56	371.157.378.669,06	378.103.179.686,30	421.715.481.877,13	0,06
Gedung dan Bangunan	1.036.744.868.331,19	1.058.456.664.470,60	1.090.176.027.895,58	1.137.007.590.166,68	0,03
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.532.152.494.280,09	3.421.505.668.859,20	3.410.207.991.284,81	3.603.404.758.469,34	0,13
Aset Tetap Lainnya	19.783.858.070,75	14.582.946.571,75	14.497.843.566,10	15.312.917.606,10	-0,07
Konstruksi Dala Pengerjaan	34.347.733.212,76	93.569.009.743,20	132.343.830.279,96	14.463.402.482,59	0,42
Akumulasi Penyusutan	-1.452.429.560.217,23	-1.893.213.883.466,36	-2.259.176.056.064,01	-2.667.265.449.408,51	0,23
DANA CADANGAN	0	0	0	0	
Dana Cadangan	0	0	0	0	
ASET LAINNYA	1.105.944.713.291,88	117.130.532.997,24	164.091.956.394,71	186.777.763.144,78	-0,12
Tagihan Jangka Panjang	0	0	1.049.611.728,00	1.021.206.228,00	-0,03
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	325.135.780,39	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.942.756.041,00	3.037.290.126,57	3.011.897.070,42	2.367.479.270,75	-0,15
Aset Lainnya	1.102.001.957.250,88	114.093.242.870,67	160.030.447.596,29	183.063.941.865,64	-0,12
KEWAJIBAN	93.177.403.751,38	105.684.687.813,29	90.412.258.939,69	76.566.420.104,23	-0,05
Kewajiban Jangka Pendek	93.177.403.751,38	105.684.687.813,29	90.412.258.939,69	76.566.420.104,23	-0,05



Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	5.693.504,00	5.693.504,00	738.680,00	-0,29
Utang Bunga	0	0	0	0	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	
Pendapatan Diterima Dimuka	1.062.289.389,93	902.024.998,68	835.954.128,08	783.261.420,13	-0,10
Utang Beban	8.244.209.031,00	9.156.241.184,00	15.466.645.308,00	6.827.681.993,00	0,08
Utang Jangka Pendek Lainnya	83.870.905.330,45	95.620.728.126,61	74.103.965.999,61	68.954.738.011,10	-0,05
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	
Utang dalam Negeri	0	0	0	0	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	
EKUITAS DANA	5.891.194.883.376,98	5.930.696.218.331,49	5.848.473.883.845,12	5.667.913.141.735,58	-0,01%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.984.372.287.128,36	6.036.380.906.144,78	5.938.886.142.784,81	5.667.913.141.735,58	-0,02%

Sumber: Laporan Neraca 2017-2020, Kabupaten Bulungan



Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
A.	Belanja Pegawai	466,491,108,951.00	513,849,752,683.00	491,915,968,891.42	2.7
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	221,031,231,869.00	233,376,697,178.00	235,087,042,859.00	3.1
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	197,808,799,702.00	208,681,911,360.00	175,692,931,152.00	-5.8
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,610,000,000.00	3,610,000,000.00	3,556,432,722.00	-0.7
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	507,557,500.00	669,464,375.00	811,537,500.00	26.4
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	243,733,540.00	204,626,650.00	217,698,000.00	-5.5
6.	Honorarium PNS	32,836,804,497.00	30,554,188,000.00	28,875,521,500.00	-6.2
7.	Honorarium Non PNS	73,800,000.00	325,870,000.00	181,577,000.00	56.9
8.	Belanja Pegawai Dana BOS	5,780,622,500.00	5,680,957,000.00	6,566,318,500.00	6.58
9.	Belanja Pegawai RSUD selaku BLUD	1,819,494,099.00	26,386,463,688.00	37,074,343,617.42	40.5
10.	Belanja Pegawai Dana Kapitasi JKN	2,779,065,244.00	4,359,574,432.00	3,852,566,041.00	17.7
B.	Belanja Barang dan Jasa	223,901,869,963.14	214,589,333,646.39	192,337,033,043.54	-7.3
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	7,824,728,400.00	6,822,789,724.40	6,205,890,589.00	-10.9
2.	Belanja Jasa Kantor	96,971,520,111.14	75,275,532,911.00	82,126,584,732.00	-8.0
3.	Belanja Premi Asuransi	1,644,346,198.00	1,819,860,334.00	2,857,795,618.00	31.8
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7,242,743,664.00	7,336,958,658.00	6,886,256,042.00	-2.5
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,804,113,215.00	3,904,528,496.00	3,086,799,856.00	-9.9
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	726,948,250.00	715,527,000.00	521,135,000.00	-15.3
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	271,425,000.00	367,455,800.00	128,700,000.00	-31.1
8.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100,150,000.00	290,452,000.00	147,790,000.00	21.5
9.	Belanja Makanan dan Minuman	4,435,459,820.00	5,545,621,150.00	2,695,937,786.00	-22.0
10.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	305,541,000.00	576,321,000.00	61,514,000.00	-55.1
11.	Belanja Pakaian Kerja	243,950,000.00	62,115,000.00	385,446,725.00	25.7
12.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	534,275,000.00	703,436,900.00	398,652,890.00	-13.6
13.	Belanja Makanan dan Minuman	4,435,459,820.00	5,545,621,150.00	2,695,937,786.00	-22.0
14.	Belanja Perjalanan Dinas	87,141,780,154.00	80,403,571,020.00	53,352,410,544.00	-21.8



No.	Uraian	Realisasi (Rp.)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
15.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	779,000,000.00	514,000,000.00	425,000,000.00	-26.1
16.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	739,737,600.00	306,518,313.00	76,117,107.00	-67.9
17.	Belanja Pemeliharaan	6,589,988,931.00	4,758,152,439.00	4,875,695,181.00	-14.0
18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	110,702,800.00	270,960,100.00	1,121,778,771.00	218.3
19.	Belanja Barang & Jasa BLUD	0.00	19,369,911,650.99	24,287,590,416.54	25.4
C.	Belanja Hibah	16,286,400,000.00	15,522,760,000.00	17,977,700,000.00	5.1
1.	Hibah Dana Pendidikan dan Kebudayaan	16,286,400,000.00	15,522,760,000.00	17,977,700,000.00	5.1
D.	Belanja Modal	5,228,269,755.90	5,159,449,920.60	4,223,996,009.00	-10.1
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	534,863,950.00	643,743,825.00	650,959,450.00	10.3
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3,016,813,455.00	3,095,822,794.00	1,744,297,906.00	-24.0
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	876,134,130.90	968,223,801.60	917,622,543.00	2.3
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27,073,750.00	64,085,000.00	149,858,110.00	135.3
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	450,557,100.00	296,742,500.00	308,796,500.00	-17.2
6.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	322,827,370.00	90,832,000.00	452,461,500.00	18.4
JUMLAH (Rp.)		711,907,648,670.04	749,121,296,249.99	706,454,697,943.96	-0.38

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, 2021



Analisis neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah dan analisis rasio keuangan daerah dengan menghitung rasio-rasio: likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas aset, beserta penafsiran rasio-rasio tersebut. Analisis rasio keuangan daerah adalah perhitungan pos-pos neraca untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan daerah. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui seberapa besar Aset Lancar dapat menutupi Kewajiban Jangka Pendek (hutang). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui seberapa besar Jumlah Aset dapat menutupi Jumlah Kewajiban. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui seberapa efektif Jumlah Aset dikelola.

Tabel 3.4 Rasio-rasio Keuangan Tahun 2017-2020 Kabupaten Bulungan

No	Uraian	Realisasi			
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2017	2018	2019	2020
A	Rasio-Rasio Likuiditas				
1	Rasio Lancar	256%	250%	174%	210%
2	Rasio Kas	159%	96%	66%	82%
B	Rasio-Rasio Solvabilitas				
1	Rasio total utang terhadap total aset	1.56%	1.75%	1.52%	1,61%
2	Rasio total uang terhadap modal	1.58%	1.78%	1.55%	1,63%
C	Rasio aktivitas				
1	Perputaran Piutang (Kali Per tahun)	8	6	6	6
2	Rata-rata umur piutang (hari)	45	64	61	62

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulungan, 2021

Dari tabel di atas, diperoleh informasi tentang rasio-rasio keuangan yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan selama tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Analisis terhadap rasio-rasio keuangan tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1) Likuiditas:

- a. Rasio Lancar menunjukkan semakin kecil jaminan Jumlah Aset Lancar (Kas, Piutang, Persediaan) dapat menutupi Kewajiban (hutang) Jangka Pendek.



- b. Rasio Kas menunjukkan semakin kecil jaminan Jumlah Kas dapat menutupi Kewajiban (hutang) Jangka Pendek. Bahkan pada tahun 2018 dan 2019, jumlah Kas sudah lebih kecil dari jumlah Kewajiban (illikuid).

2) Solvabilitas:

- a. Rasio Total Utang terhadap Total Aset menunjukkan relative semakin menurun porsi Jumlah Utang terhadap Jumlah Aset, artinya semakin besar jaminan Jumlah Aset untuk membayar hutang. Porsi Jumlah Utang masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jumlah Aset, sehingga jaminan Jumlah Aset untuk membayar Utang masih sangat besar.
- b. Rasio Total Utang terhadap Modal (Ekuitas Dana) menunjukkan relatif semakin menurun porsi Jumlah Utang terhadap Ekuitas Dana (Modal Sendiri), artinya semakin besar jaminan Jumlah Modal Sendiri untuk membayar hutang. Porsi Jumlah Utang masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas Dana, sehingga jaminan Ekuitas Dana untuk membayar Utang masih sangat besar.

3) Aktivitas:

- a. Rasio perputaran piutang menunjukkan semakin menurun jumlah (kali) berputarnya piutang dalam satu tahun. Tahun 2017, Piutang berputar 8 kali; Tahun 2018, Piutang berputar 6 kali; dan tahun 2019, Piutang berputar 6 kali. Semakin sedikit jumlah (kali) berputarnya, semakin tidak baik.
- b. Rasio rata-rata Umur Piutang menunjukkan relatif semakin lambat piutang dapat ditagih. Tahun 2017, dana tertahan pada Piutang selama 45 hari; Tahun 2018, dana tertahan pada Piutang selama 64 hari; dan tahun 2019, dana tertahan pada Piutang selama 61 hari. Semakin lama dana yang tertahan pada Piutang, semakin tidak baik.

4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dapat diketahui dengan menganalisis proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Gambaran kebijakan terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan dijelaskan pada bagian berikut.

A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan penggunaan anggaran selama periode 2018-2020 dapat diidentifikasi dengan meng-analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, yang disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2018	711,907,648,670.04	1,156,247,968,064.45	61.57%
2.	Tahun Anggaran 2019	749,121,296,249.99	1,276,281,497,312.05	58.70%
3.	Tahun Anggaran 2020	706,454,697,943.96	1,226,995,655,127.01	57.58%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulungan, 2021

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 di atas adalah sebesar 61,57% pada tahun 2018, 58,70% pada tahun 2019, dan 57,58% pada tahun 2020 dari total pengeluaran (belanja dan pembiayaan pengeluaran). Data ini menunjukkan semakin menurun porsi belanja kebutuhan aparatur yang berarti semakin besar porsi belanja untuk kebutuhan pembangunan selama periode tersebut. Namun, kondisi ini masih kurang baik karena lebih dari 57% dari APBD digunakan untuk belanja kebutuhan aparatur.

Sebenarnya, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tidak mungkin dikurangi lagi, karena jumlah itu yang memang diperlukan. Hal ini hendaknya menjadi perhatian untuk tetap berupaya melakukan efisiensi anggaran aparatur untuk perencanaan di masa yang akan datang.



Tabel 3.6 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2018-2020 Kabuapten Bulungan

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
I.	BELANJA DAERAH	755,460,190,304.48	809,279,331,778.69	820,306,259,676.20	4.2
A.	BELANJA OPERASI	620,345,679,304.48	730,614,829,278.69	738,252,963,676.20	9.1
a.	Belanja Pegawai	433,580,504,454.00	482,969,694,683.00	462,858,870,391.42	3.3
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	221,031,231,869.00	233,376,697,178.00	235,087,042,859.00	3.1
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	197,808,799,702.00	208,681,911,360.00	175,692,931,152.00	-5.8
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,610,000,000.00	3,610,000,000.00	3,556,432,722.00	-0.7
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	507,557,500.00	669,464,375.00	811,537,500.00	26.4
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	243,733,540.00	204,626,650.00	217,698,000.00	-5.5
6.	Belanja Pegawai Dana BOS	5,780,622,500.00	5,680,957,000.00	6,566,318,500.00	6.6
7.	Belanja Pegawai RSUD selaku BLUD	1,819,494,099.00	26,386,463,688.00	37,074,343,617.42	351.4
8.	Belanja Pegawai Dana Kapitasi JKN	2,779,065,244.00	4,359,574,432.00	3,852,566,041.00	17.7
b.	Belanja Barang dan Jasa	166,533,074,850.48	153,457,872,095.69	171,211,822,284.78	1.4
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,386,040,497.50	4,056,684,826.20	3,633,348,247.50	-9.0
2.	Belanja Bahan/Material	13,199,830,565.00	2,502,947,345.00	3,030,498,439.00	-52.1
3.	Belanja Jasa Kantor	100,522,771,906.14	80,495,785,168.00	90,174,371,338.00	-5.3
4.	Belanja Premi Asuransi	10,122,784,821.00	11,106,738,909.70	14,293,146,833.18	18.8
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7,242,743,664.00	7,336,958,658.00	6,886,256,042.00	-2.5
6.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	779,000,000.00	514,000,000.00	425,000,000.00	-26.1
7.	Belanja Pemeliharaan	6,589,988,931.00	4,758,152,439.00	4,875,695,181.00	-14.0
8.	Belanja Barang & Jasa BOS	22,222,344,326.84	21,287,798,303.00	21,815,065,536.00	-0.9
9.	Belanja Barang & Jasa Kapitasi/JKN	1,467,570,139.00	2,028,894,795.80	1,790,850,251.56	10.5
10.	Belanja Barang & Jasa BLUD	0.00	19,369,911,650.99	24,287,590,416.54	25.4
c.	Belanja Hibah	20,232,100,000.00	15,522,760,000.00	22,128,975,000.00	4.6
1.	Hibah Dana BOS	3,945,700,000.00	0.00	4,151,275,000.00	2.6
2.	Hibah Dana Pendidikan dan Kebudayaan	16,286,400,000.00	15,522,760,000.00	17,977,700,000.00	5.1
B.	BELANJA TRANSFER	135,114,511,000.00	157,329,005,000.00	164,106,592,000.00	10.2



No.	Uraian	Realisasi (Rp.)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0.00	2,124,802,000.00	4,895,872,000.00	130.4
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	135,114,511,000.00	155,204,203,000.00	159,210,720,000.00	8.6
JUMLAH BELANJA WAJIB & MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA		755,460,190,304.48	809,279,331,778.69	820,306,259,676.20	4.2

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, 2021



B. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang diterima baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang

Dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan dibayar baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan atau desa.

Analisis pembiayaan daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui analisis terhadap: (1) Defisit Riil Anggaran; (2) Komposisi Penutup Defisit Anggaran; dan (3) Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan.

Analisis Defisit Riil Anggaran dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kekurangan pendanaan anggaran Pemerintah Daerah, yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1,110,120,881,090.89	1,232,663,072,491.48	1,211,984,487,657.34
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	1,156,247,968,064.45	1,276,281,497,312.05	1,224,995,655,127.01
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	2,000,000,000.00
A	Surplus/Defisit riil	(46,127,086,973.56)	(43,618,424,820.57)	(15,011,167,469.67)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	147,677,052,131.59	101,653,037,259.45	61,067,563,146.93
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	147,677,052,131.59	101,653,037,259.45	61,067,563,146.93
A-B	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	101,549,965,158.03	58,034,612,438.88	46,056,395,677.26

Sumber: Pengolahan data Laporan Realisasi APBD Tahun 2018-2020, Kabupaten Bulungan

Dari Tabel 3.7 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2018 terjadi defisit riil anggaran sebesar Rp. 46,127,086,973.56. Tahun 2019 defisit riil anggaran adalah sebesar Rp. 43,618,424,820.57. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi defisit riil anggaran sebesar Rp. 15,011,167,469.67. Selama periode 2018-2020 defisit riil anggaran cenderung menurun. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya selisih (kekurangan) pendapatan daerah terhadap belanja daerah.
- 2) Semakin berkurangnya defisit riil anggaran yang disebabkan oleh kenaikan Realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari kenaikan Realisasi Belanja Daerah. Artinya bahwa Belanja Daerah dilakukan untuk hal-hal yang memang diperlukan atau dibutuhkan.



- 3) Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah juga terus menurun dari tahun 2018 sebesar Rp 147,677,052,131.59, lalu tahun 2019 sebesar Rp 101,653,037,259.45, dan di tahun 2020 turun menjadi Rp 61,067,563,146.93
- 4) Terus menurunnya total realisasi penerimaan pembiayaan daerah dan berkurangnya defisit riil, berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan. Pada tahun 2018 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp 101,549,965,158.03, menurun hampir lebih dari setengahnya, yaitu Rp 46,056,395,677.26 di tahun 2020.

Data Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran selama periode tahun 2018-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2020
Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)		
		2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	320.2%	233.1%	406.8%
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulungan, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang Komposisi (proporsi atau prosentase) Penutup Defisit Riil Anggaran bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2017 adalah sebesar 320,2% dari total defisit tahun 2018. SiLPA tahun 2018 adalah sebesar 233,1% dari total deficit tahun 2019. Sedangkan SiLPA tahun 2019 adalah sebesar 406,8 % dari total defisit tahun 2020. Maknanya adalah defisit anggaran selama periode tahun berkenaan selalu dapat ditutupi oleh SiLPA tahun sebelumnya, karena proporsi SiLPA tahun sebelumnya selalu diatas 100% atau selalu melebihi total defisit selama periode tahun 2018-2020.

Data Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama periode tahun 2018-2020 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	101,549,965,158.03	100.0%	58,034,612,438.88	100.0%	46,056,395,677.26	100.0%
1.	Pelampauan penerimaan PAD	36,789,092,751.18	36.2%	36,573,632,271.32	63.0%	38,077,595,548.89	82.7%
2.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-69,726,151,609.39	-68.7%	-45,928,169,966.70	-79.1%	-43,347,463,748.24	-94.1%
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-258,941,054.11	-0.3%	1,374,395,945.89	2.4%	1,884,440,000.00	4.1%
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	134,785,519,645.65	132.7%	65,911,682,086.95	113.6%	46,408,873,168.56	100.8%
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
6.	Kegiatan lanjutan	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
7.	Koreksi SiLPA	-39,554,575.30	0.0%	103,072,101.42	0.2%	3,032,950,708.05	6.6%

Sumber: Pengolahan data Laporan Realisasi APBD Tahun 2018-2020, Kabupaten Bulungan

Tabel 3.10 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2018-2020 Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Saldo kas neraca daerah	101,549,965,158.03	58,034,612,438.88	46,056,395,677.26	-32.66
	Dikurangi:				
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00	0.00	0.00



No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran		101,549,965,158.03	58,034,612,438.88	46,056,395,677.26	

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, 2021

Dari Tabel 3.10 diatas dapat dijelaskan tentang Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama periode tahun 2018-2020 bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 32,66%. Walaupun hal ini menggambarkan potensi sumber dana pembangunan yang semakin menurun, tetapi disisi lain, penurunan jumlah SiLPA ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan mempunyai kinerja pembangunan yang semakin baik karena semakin besar porsi APBD yang dapat terserap.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (empat) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Bulungan tahun 2021-2026. Selanjutnya, langkah akhir adalah menghitung kerangka pendanaan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

A. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Perhitungan proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Bulungan tahun 2021-2026, menggunakan tahun dasar 2020. Asumsi yang digunakan untuk memproyeksi dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- 3) Meningkatnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu dana perimbangan untuk komponen: dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (fisik reguler dan non fisik), serta dana penyesuaian.
- 4) Menurunnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu dana perimbangan untuk komponen: dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.
- 5) Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Lain relatif stabil.
- 6) Meningkatnya belanja tidak langsung untuk komponen: belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan untuk desa.



- 7) Menurunnya belanja tidak langsung untuk komponen: belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- 8) Menurunnya belanja langsung untuk semua komponen: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan modal.
- 9) Menurunnya penerimaan pembiayaan daerah, yaitu Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
- 10) Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Bulungan yang terkait dengan Pertumbuhan ekonomi, inflasi, APBN, dan APBD, khususnya prediksi dampak pandemi covid19 menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Bulungan untuk 5 tahun kedepan.

Selain itu juga, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kegiatan ekonomi, pemerintah daerah diberikan kewenangan membentuk unit-unit usaha berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam Pasal 1 angka 40 UU Pemda disebutkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 331 UU Pemda dijelaskan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Perda. BUMD tersebut terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi (migas), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi secara tegas menyatakan bahwa Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD.

Adapun syarat BUMD tersebut menurut Pasal 3 adalah:

- a. perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;



- b. statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
- c. tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan *participating interest*.

Peluang untuk mendirikan BUMD khusus di bidang migas tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa kabupaten Bulungan memiliki potensi migas terdiri dari yang terukur untuk minyak terdapat 75 juta barel dan gas bumi mencapai 436 ribu MMSCF.1 Potensi minyak bumi Bulungan mencapai 453 juta barel dan gas bumi mencapai 900 ribu MMSCF.1 Potensi minyak bumi terdapat di kecamatan Bunyu, Sekatak, Tanjung Palas Timur, Tana Lia, Tanjung Selor, sementara gas Bumi di kecamatan Bunyu

Berikut proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Bulungan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bulungan

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Dasar)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	PENDAPATAN DAERAH							
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133,824,480,000.00		134,611,400,000.00	140,132,360,000.00	145,924,290,000.00	151,999,690,000.00	155,051,160,000.00
4.1.01	Pajak Daerah	46,885,000,000.00	4.00	48,760,400,000.00	50,710,820,000.00	52,739,250,000.00	54,848,820,000.00	55,935,040,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	5,673,480,000.00	5.00	5,957,150,000.00	6,255,010,000.00	6,567,760,000.00	6,896,150,000.00	7,066,450,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,000,000,000.00	-2.00	10,314,550,000.00	10,108,260,000.00	9,906,100,000.00	9,707,980,000.00	9,513,820,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	66,266,000,000.00	5.00	69,579,300,000.00	73,058,270,000.00	76,711,180,000.00	80,546,740,000.00	82,535,850,000.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,107,427,791,477.00		1,118,434,720,000.00	1,171,239,370,000.00	1,233,104,580,000.00	1,271,600,680,000.00	1,304,625,210,000.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,030,604,047,000.00		1,039,365,300,000.00	1,084,851,400,000.00	1,138,719,150,000.00	1,168,475,770,000.00	1,191,949,790,000.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	911,494,783,000.00		913,537,240,000.00	951,907,550,000.00	998,237,770,000.00	1,020,008,750,000.00	1,036,432,210,000.00
	- Dana Transfer Umum - DBH	148,454,342,000.00	-4.00	164,419,160,000.00	157,842,390,000.00	151,528,700,000.00	145,467,550,000.00	139,648,850,000.00
	- Dana Transfer Umum - DAU	524,393,445,000.00	6.00	555,857,050,000.00	589,208,470,000.00	629,560,980,000.00	654,364,220,000.00	681,606,380,000.00
	- Dana Transfer Khusus - DAK	238,646,996,000.00	6.00	193,261,030,000.00	204,856,690,000.00	217,148,090,000.00	220,176,980,000.00	215,176,980,000.00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	25,444,230,000.00	8.00	27,479,770,000.00	29,678,150,000.00	32,052,400,000.00	34,616,590,000.00	35,974,620,000.00
4.2.01.05	Dana Desa	93,665,034,000.00	5.00	98,348,290,000.00	103,265,700,000.00	108,428,980,000.00	113,850,430,000.00	119,542,960,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76,823,744,477.00		79,069,420,000.00	86,387,970,000.00	94,385,430,000.00	103,124,910,000.00	112,675,420,000.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	60,103,744,477.00	9.00	58,838,900,000.00	64,134,400,000.00	69,906,500,000.00	76,198,090,000.00	83,055,910,000.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	16,720,000,000.00	10.00	20,230,520,000.00	22,253,570,000.00	24,478,930,000.00	26,926,820,000.00	29,619,510,000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25,700,000,000.00		29,835,330,000.00	31,028,740,000.00	32,269,890,000.00	33,560,690,000.00	34,903,120,000.00



Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Dasar)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25,700,000,000.00	4.00	29,835,330,000.00	31,028,740,000.00	32,269,890,000.00	33,560,690,000.00	34,903,120,000.00
	Jumlah Pendapatan	1,266,952,271,477.00		1,282,881,450,000.00	1,342,400,470,000.00	1,411,298,760,000.00	1,457,161,060,000.00	1,494,579,490,000.00
5	BELANJA							
5.1	BELANJA OPERASI	909,338,018,980.26		877,199,640,000.00	894,234,380,000.00	939,126,440,000.00	934,478,850,000.00	957,567,790,000.00
5.1.01	Belanja Pegawai	531,684,184,841.00	3.50	550,293,130,000.00	569,553,390,000.00	589,487,760,000.00	610,119,830,000.00	631,474,030,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343,214,434,284.26	-1.00	291,788,320,000.00	288,870,440,000.00	283,121,920,000.00	287,121,920,000.00	288,121,920,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	33,939,399,855.00	2.00	34,618,190,000.00	35,310,550,000.00	66,016,760,000.00	36,737,100,000.00	37,471,840,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
5.2	BELANJA MODAL	229,793,161,174.00		265,875,800,000.00	294,966,220,000.00	308,956,890,000.00	347,034,490,000.00	352,673,550,000.00
5.2.01	Belanja Modal (Tanah, Peralatan & Mesin, Gedung & Bangunan, Jalan, Jaringan & Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya)	229,793,161,174.00	10.00	265,875,800,000.00	294,966,220,000.00	308,956,890,000.00	347,034,490,000.00	352,673,550,000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,250,000,000.00		5,625,000,000.00	5,063,000,000.00	4,556,000,000.00	4,101,000,000.00	3,691,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,250,000,000.00	-10.00	5,625,000,000.00	5,063,000,000.00	4,556,000,000.00	4,101,000,000.00	3,691,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	166,127,487,000.00		175,631,770,000.00	183,442,550,000.00	192,234,540,000.00	199,764,320,000.00	207,842,990,000.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,396,335,000.00	7.35	5,255,850,000.00	5,471,760,000.00	5,696,590,000.00	5,930,710,000.00	6,174,500,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161,731,152,000.00	7.01	170,375,920,000.00	177,970,790,000.00	186,537,950,000.00	193,833,610,000.00	201,668,490,000.00
	Jumlah Belanja	1,311,508,667,154.26		1,324,332,210,000.00	1,377,706,150,000.00	1,444,873,870,000.00	1,485,378,660,000.00	1,521,775,330,000.00
	Total Surplus/(Defisit)	44,556,395,677.26		41,450,760,000.00	35,305,680,000.00	33,575,110,000.00	28,217,600,000.00	27,195,840,000.00
6	PEMBIAYAAN							



Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Dasar)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46,056,395,67 7.26		41,450,760,00 0.00	37,305,680,00 0.00	33,575,110,00 0.00	30,217,600,00 0.00	27,195,840,00 0.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46,056,395,677 .26	-10.00	41,450,760,000 .00	37,305,680,000 .00	33,575,110,000 .00	30,217,600,000 .00	27,195,840,000 .00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	46,056,395,67 7.26		41,450,760,00 0.00	37,305,680,00 0.00	33,575,110,00 0.00	30,217,600,00 0.00	27,195,840,00 0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,500,000,000 .00		0.00	2,000,000,000 .00	0.00	2,000,000,000 .00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000. 00	0.00	0.00	2,000,000,000. 00	0.00	2,000,000,000. 00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1,500,000,000 .00		0.00	2,000,000,000 .00	0.00	2,000,000,000 .00	0.00
	Pembiayaan Netto	44,556,395,67 7.26		41,450,760,00 0.00	35,305,680,00 0.00	33,575,110,00 0.00	28,217,600,00 0.00	27,195,840,00 0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APBD	1,313,008,667 ,154.26		1,324,332,210 ,000.00	1,379,706,150 ,000.00	1,444,873,870 ,000.00	1,487,378,660 ,000.00	1,521,775,330 ,000.00

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, 2021



Tabel 3.12 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2021-2026
Kabupaten Bulungan

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Dasar)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
I.	BELANJA DAERAH	820,306,259,676.20		849,423,050,000.00	876,639,430,000.00	906,766,380,000.00	937,698,040,000.00	971,408,100,000.00
A.	BELANJA OPERASI	738,252,963,676.20		761,607,165,000.00	784,918,155,000.00	810,649,110,000.00	837,815,880,000.00	867,486,605,000.00
a.	Belanja Pegawai	462,858,870,391.42		479,179,770,000.00	496,138,830,000.00	513,772,830,000.00	532,123,380,000.00	551,238,030,000.00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	235,087,042,859.00	3.3	242,894,740,000.00	250,961,750,000.00	259,296,680,000.00	267,908,430,000.00	276,806,190,000.00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	175,692,931,152.00	3.3	181,528,040,000.00	187,556,940,000.00	193,786,070,000.00	200,222,080,000.00	206,871,850,000.00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,556,432,722.00	1.0	3,592,000,000.00	3,627,920,000.00	3,664,200,000.00	3,700,840,000.00	3,737,850,000.00
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	811,537,500.00	26.4	1,026,170,000.00	1,297,570,000.00	1,640,750,000.00	2,074,700,000.00	2,623,410,000.00
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	217,698,000.00	-5.5	205,740,000.00	194,440,000.00	183,770,000.00	173,670,000.00	164,140,000.00
6.	Belanja Pegawai Dana BOS	6,566,318,500.00	6.6	6,998,350,000.00	7,458,810,000.00	7,949,560,000.00	8,472,600,000.00	9,030,050,000.00
7.	Belanja Pegawai RSUD selaku BLUD	37,074,343,617.42	5.0	38,928,060,000.00	40,874,460,000.00	42,918,190,000.00	45,064,100,000.00	47,317,300,000.00
8.	Belanja Pegawai Dana Kapitasi JKN	3,852,566,041.00	4.0	4,006,670,000.00	4,166,940,000.00	4,333,610,000.00	4,506,960,000.00	4,687,240,000.00
b.	Belanja Barang dan Jasa	171,211,822,284.78		171,465,350,000.00	172,845,850,000.00	175,429,520,000.00	179,309,770,000.00	184,599,010,000.00
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,633,348,247.50	-9.0	3,306,920,000.00	3,009,830,000.00	2,739,420,000.00	2,493,310,000.00	2,269,310,000.00
2.	Belanja Bahan/Material	3,030,498,439.00	-15.0	2,575,920,000.00	2,189,540,000.00	1,861,100,000.00	1,581,940,000.00	1,344,650,000.00
3.	Belanja Jasa Kantor	90,174,371,338.00	-5.3	85,406,800,000.00	80,891,300,000.00	76,614,530,000.00	72,563,870,000.00	68,727,380,000.00
4.	Belanja Premi Asuransi	14,293,146,833.18	10.0	15,722,460,000.00	17,294,710,000.00	19,024,180,000.00	20,926,600,000.00	23,019,260,000.00
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,886,256,042.00	-2.5	6,714,650,000.00	6,547,310,000.00	6,384,150,000.00	6,225,060,000.00	6,069,920,000.00



No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Dasar)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
6.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	425,000,000.00	20.0	510,000,000.00	612,000,000.00	734,400,000.00	881,280,000.00	1,057,540,000.00
7.	Belanja Pemeliharaan	4,875,695,181.00	-5.0	4,631,910,000.00	4,400,310,000.00	4,180,300,000.00	3,971,280,000.00	3,772,720,000.00
8.	Belanja Barang & Jasa BOS	21,815,065,536.00	4.0	22,687,670,000.00	23,595,170,000.00	24,538,980,000.00	25,520,540,000.00	26,541,360,000.00
9.	Belanja Barang & Jasa Kapitasi/JKN	1,790,850,251.56	10.5	1,978,290,000.00	2,185,340,000.00	2,414,070,000.00	2,666,740,000.00	2,945,850,000.00
10	Belanja Barang & Jasa BLUD	24,287,590,416.54	15.0	27,930,730,000.00	32,120,340,000.00	36,938,390,000.00	42,479,150,000.00	48,851,020,000.00
c.	Belanja Hibah	22,128,975,000.00		23,146,160,000.00	24,212,200,000.00	25,329,490,000.00	26,500,570,000.00	27,728,070,000.00
1.	Hibah Dana BOS	4,151,275,000.00	2.6	4,258,040,000.00	4,367,560,000.00	4,479,890,000.00	4,595,120,000.00	4,713,300,000.00
2.	Hibah Dana Pendidikan dan Kebudayaan	17,977,700,000.00	5.1	18,888,120,000.00	19,844,640,000.00	20,849,600,000.00	21,905,450,000.00	23,014,770,000.00
B.	BELANJA TRANSFER	164,106,592,000.00		175,631,770,000.00	183,442,550,000.00	192,234,540,000.00	199,764,320,000.00	207,842,990,000.00
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4,895,872,000.00	7.4	5,255,850,000.00	5,471,760,000.00	5,696,590,000.00	5,930,710,000.00	6,174,500,000.00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	159,210,720,000.00	7.0	170,375,920,000.00	177,970,790,000.00	186,537,950,000.00	193,833,610,000.00	201,668,490,000.00
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA WAJIB & MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA		820,306,259,676.20		849,423,050,000.00	876,639,430,000.00	906,766,380,000.00	937,698,040,000.00	971,408,100,000.00

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, 2021



B. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Langkah akhir kerangka pendanaan adalah menghitung kerangka pendanaan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada Tabel 3.13. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah untuk tahun 2021 - 2026 dapat dijelaskan antara lain:

- 1) Penerimaan yang terdiri dari pendapatan daerah cenderung meningkat.
- 2) Sisa lebih riil perhitungan anggaran cenderung menurun.
- 3) Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebagai pengurang cenderung meningkat.
- 4) Kapasitas riil kemampuan keuangan cenderung meningkat karena lebih besarnya proporsi kenaikan total penerimaan daripada kenaikan belanja.

Berdasarkan data pada Tabel 3.13 maka dapat disusun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (empat) tahun ke depan sejak tahun 2021 hingga tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13.



Tabel 3.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Pendapatan	1,282,881,450,000.00	1,342,400,470,000.00	1,411,298,760,000.00	1,457,161,060,000.00	1,494,579,490,000.00
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	41,450,760,000.00	37,305,680,000.00	33,575,110,000.00	30,217,600,000.00	27,195,840,000.00
Total Penerimaan		1,324,332,210,000.00	1,379,706,150,000.00	1,444,873,870,000.00	1,487,378,660,000.00	1,521,775,330,000.00
Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	849,423,050,000.00	876,639,430,000.00	906,766,380,000.00	937,698,040,000.00	971,408,100,000.00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		474,909,160,000.00	503,066,720,000.00	538,107,490,000.00	549,680,620,000.00	550,367,230,000.00

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, 2021

Tabel 3.14 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		474,909,160,000.00	503,066,720,000.00	538,107,490,000.00	549,680,620,000.00	550,367,230,000.00
1.	Prioritas I	355,557,610,000.00	385,390,180,000.00	425,667,340,000.00	435,138,380,000.00	438,894,680,000.00
2.	Prioritas II	119,351,550,000.00	117,676,540,000.00	112,440,150,000.00	114,542,240,000.00	111,472,550,000.00

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, 2021



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan GAP antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sementara itu, isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Bulungan. Pembangunan daerah Kabupaten Bulungan kedepan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bulungan sebagaimana potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan. Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bulungan ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi yang ada, dan masalah keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan di Kabupaten Bulungan.

4.1. Konsepsi Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bulungan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara pencapaian kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi nyata pada saat perencanaan pembangunan disusun. Potensi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan secara umum lebih banyak timbul dari adanya potensi daerah yang belum dimanfaatkan atau diberdayakan secara optimal, kelemahan internal yang belum teratasi secara maksimal, besarnya peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta antisipasi yang belum maksimal dari adanya ancaman eksternal.

Permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari evaluasi pencapaian target-target pembangunan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Permasalahan pembangunan ini salah satunya dapat diperoleh dari hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya, dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Bupati baik dalam periode tahunan maupun pada akhir masa jabatan Bupati.

Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Bulungan untuk lima tahun mendatang masih relevan dengan arahan yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025, yaitu:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Pengembangan Ekonomi Wilayah;
- 3) Prasarana Dasar;
- 4) Kebijakan Publik Pemerintahan dan Penegakan Hukum;
- 5) Penataan Ruang dan Lingkungan.

Adapun isu utama pembangunan daerah Kabupaten Bulungan untuk lima tahun mendatang, dari lima isu tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penetapan isu-isu strategis tersebut di atas relevan dan sinergis dengan Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri dari tujuh agenda, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim; 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Gambar 4.1).



Gambar 4.1 Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024



Sumber : RPJMN 2020-2024

Pada periode tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Kalimantan akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Tabel 4.1 Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Kalimantan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Kalimantan Barat	1	Kota Pontianak*	Kalimantan Selatan	1	Kabupaten Barito Kuala
	2	Kabupaten Kubu Raya		2	Kota Banjarmasin
	3	Kabupaten Ketapang		3	Kabupaten Banjar
Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Lamandau		4	Kota Banjar Baru
	2	Kabupaten Kotawaringin Timur		5	Kabupaten Tanah Laut
	3	Kabupaten Katingan		6	Kabupaten Tanah Bumbu
	4	Kota Palangkaraya*		7	Kabupaten Kota Baru
Kalimantan Timur	1	Kota Balikpapan*	Kalimantan Utara	1	Kota Tarakan*
	2	Kota Samarinda*			
	3	Kabupaten Kutai Kartanegara			
	4	Kabupaten Penajam Paser Utara			
Koridor Pemerataan					
Kalimantan Utara	1	Kabupaten Malinau	Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Kotawaringin Barat
	2	Kabupaten Nunukan		2	Kabupaten Pulang Pisau
	3	Kabupaten Bulungan		3	Kabupaten Seruyan
	4	Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Barat	1	Kabupaten Sambas
Kalimantan Timur	1	Kabupaten Paser		2	Kota Singkawang*
	2	Kabupaten Kutai Barat		3	Kabupaten Bengkayang
	3	Kabupaten Kutai Timur		4	Kabupaten Landak
	4	Kabupaten Bontang		5	Kabupaten Mempawah
	5	Kabupaten Berau			

Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW

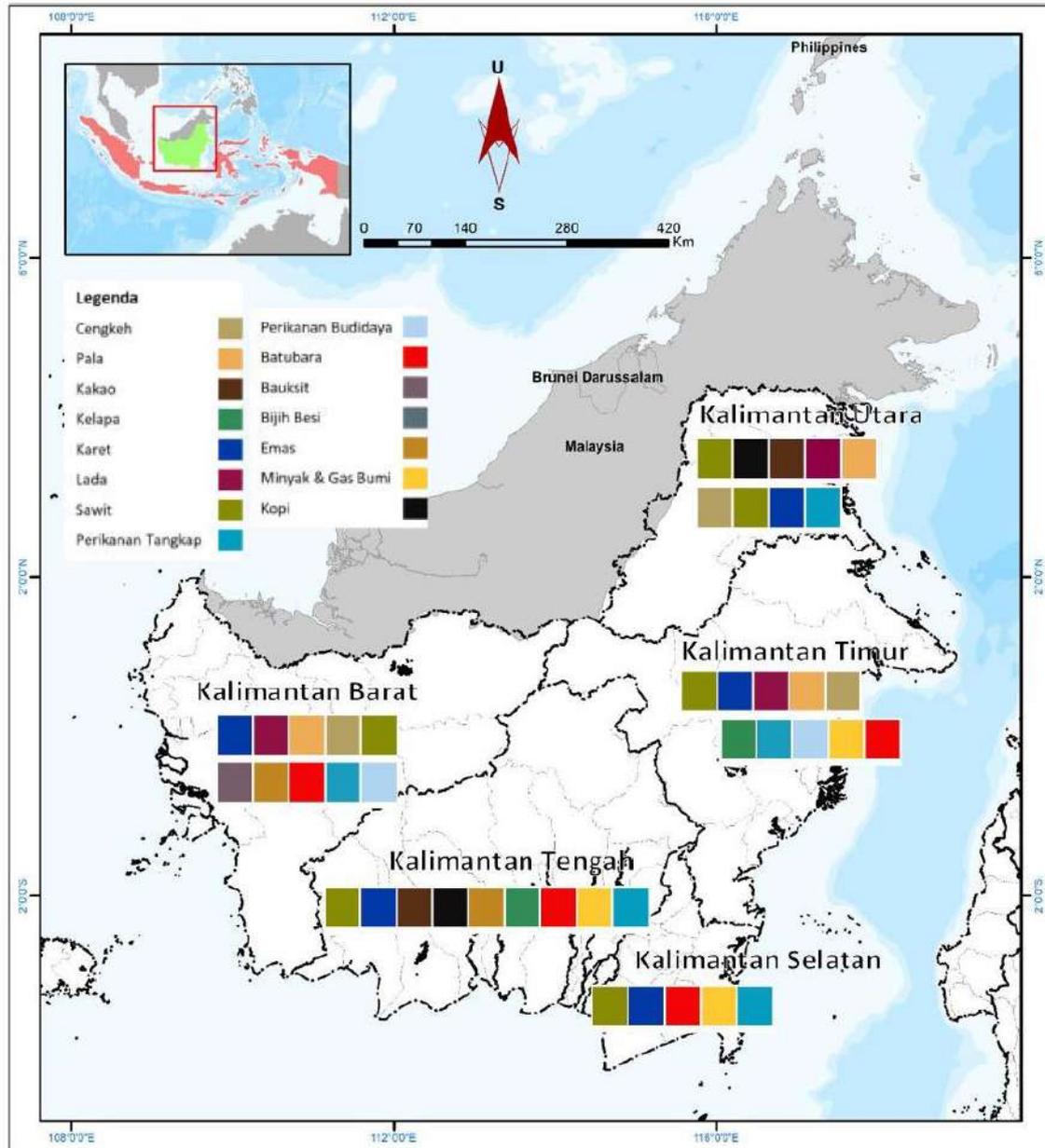
Sumber: Lampiran 4 RPJMN 2020-2024 - Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Kalimantan Utara diarahkan pada komoditas kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh dan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Proyek prioritas kawasan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Bulungan, antara lain Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) Tanah Kuning, pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, antara lain pembangunan Jalan Trans Kalimantan, serta jalan akses ke kawasan pariwisata dan



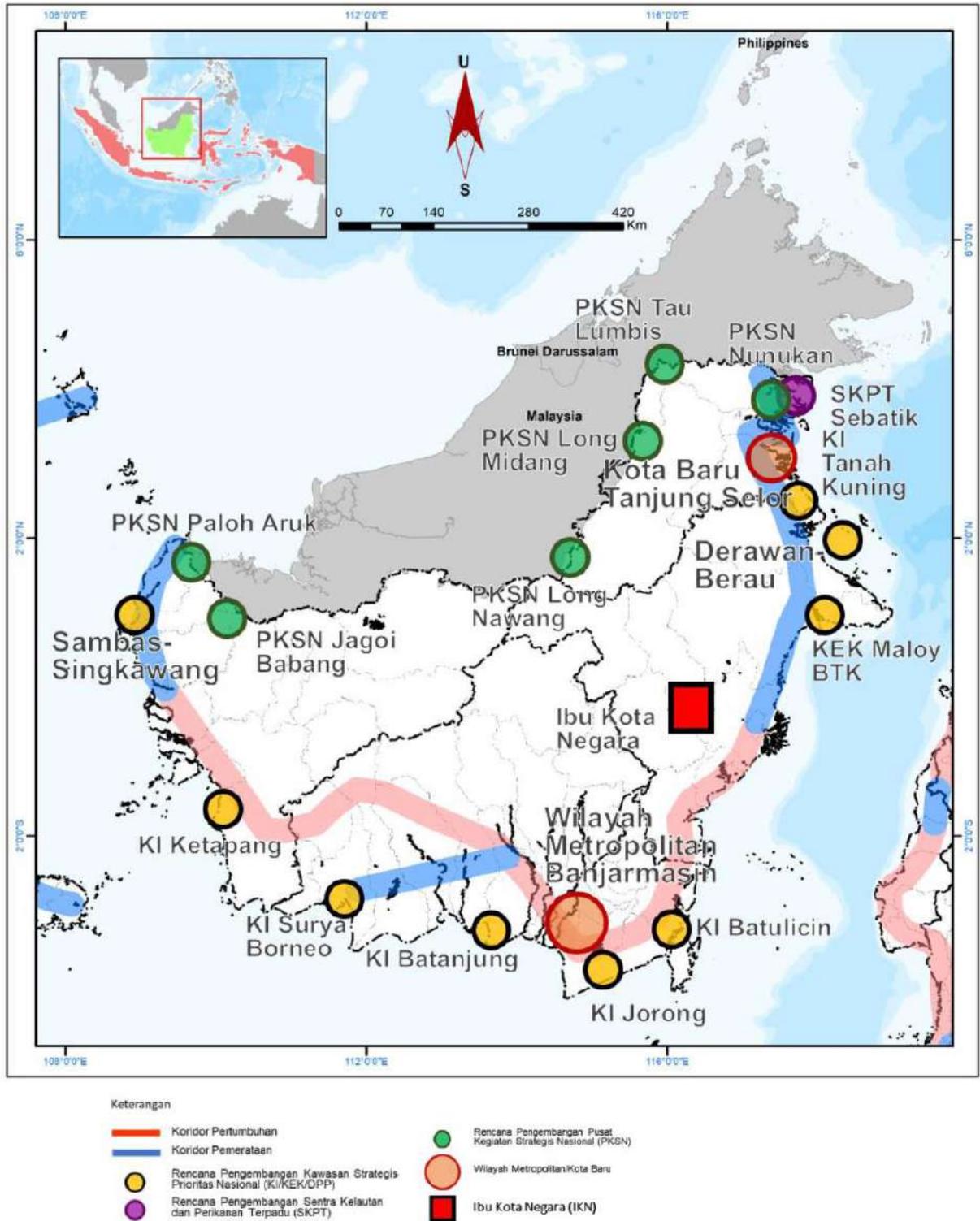
kawasan perbatasan, antara lain Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Selor, dan Pengembangan Bandara Tanjung Harapan.

Peta-peta sebaran rencana pengembangan komoditas unggulan, kawasan strategis, dan infrastruktur pengairan berdasarkan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



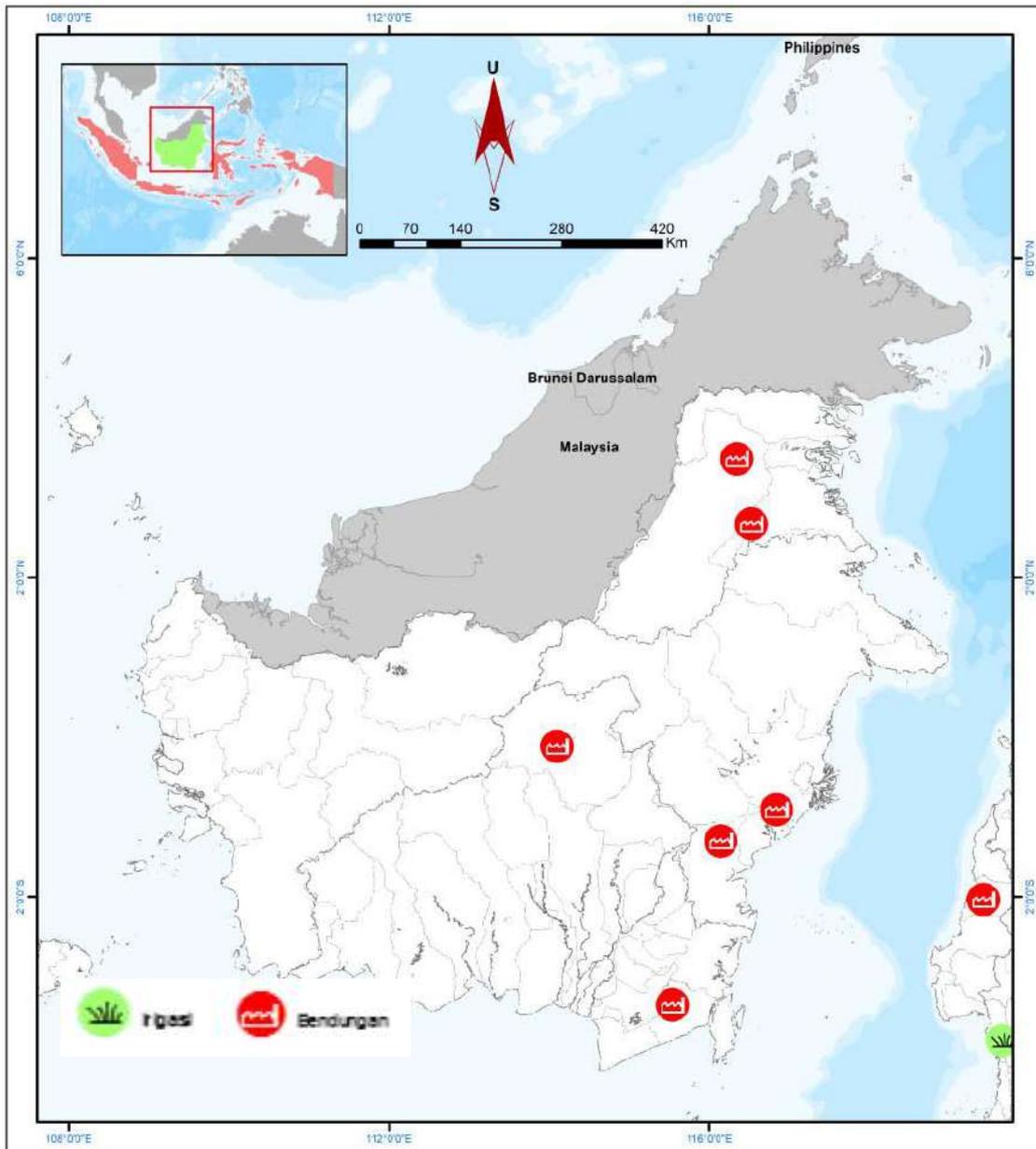
Gambar 4.2 Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Kalimantan

Sumber: RPJMN 2020-2024



Gambar 4.3 Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Kalimantan

Sumber: RPJMN 2020-2024



Gambar 4.4 Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah di Kalimantan
Sumber: RPJMN 2020-2024

Sementara berdasarkan arahan gubernur Provinsi Kalimantan Utara dalam Rapat Koordinasi Gubernur, disampaikan beberapa isu strategis dalam pembangunan secara umum di Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas SDM dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai



2. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan
3. Masih terkonsentrasinya penduduk di pusat pertumbuhan ekonomi
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan lahan
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pertanian, perikanan dan kelautan
6. Rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global
7. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dan pendidikan
8. Belum terpenuhinya kebutuhan energi dan air baku
9. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan transportasi karena belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana transportasi
10. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dan tata kelola air baku
11. Masih rendahnya ketersediaan jaringan listrik
12. Terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan komunikasi dan informatika

Peningkatan kualitas SDM merupakan modal yang sangat penting untuk akselerasi pembangunan daerah di segala bidang karena Kabupaten Bulungan telah memasuki era bonus demografi (Tabel 4.2). Keberhasilan pada sektor ini akan berdampak positif pada empat isu-isu lainnya, tetapi jika sebaliknya, terjadi kegagalan akan menimbulkan dampak negatif, dan secara nasional akan mendukung Agenda 1, 3, 4, 6, dan 7. Menonjolnya isu peningkatan kualitas SDM ini dapat dilihat pada gambaran dan dinamika demografi Kabupaten Bulungan tahun 2019 (Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2020

Kecamatan dan Kabupaten	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%/Tahun)	Ratio Jenis Kelamin L/P
1. Bunyu	11.495	8.22	57.96	-0.98	113.7
2. Peso	4.033	2.89	1.28	-0.49	115.7
3. Peso Hilir	3.832	2.74	2.34	-0.03	118.2
4. Sekatak	8.928	6.39	4.48	0.78	110.2
5. Tanjung Palas	16.829	12.04	9.59	1.73	109.9
6. Tanjung Palas Barat	6.440	4.61	6.05	0.96	120.9
7. Tanjung Palas Tengah	10.812	7.74	17.30	2.79	111.1
8. Tanjung Palas Timur	14.527	10.40	11.37	7.89	118.1
9. Tanjung Palas Utara	10.405	7.45	12.90	0.82	110.3
10. Tanjung Selor	52.432	37.52	77.36	3.57	109.7
Total Kab. Bulungan	139.733	100.00	10.60	2.59	112.0

Sumber: BPS, Kabupaten Bulungan 2021

Berdasarkan gambaran dan dinamika demografi pada Tabel 4.2 tersebut di atas diketahui bahwa kondisi Kabupaten Bulungan kurang/tidak ideal. Sebab ada wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang rendah (<10 jiwa/km²), dan pertumbuhan penduduknya justru negatif atau rendah, yaitu Kecamatan Peso, Peso Hilir, dan Bunyu.

Kondisi ini diperkirakan mempunyai kaitan erat dengan terbatasnya penyediaan prasarana dasar, khususnya prasarana jaringan jalan dan akses listrik. Pada sisi lain, ada wilayah kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, hal ini berkaitan dengan posisi kecamatan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja. Secara khusus, untuk Kecamatan Bunyu pertumbuhan penduduknya yang negatif, kondisi tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh adanya pemutusan hubungan kerja dari beberapa perusahaan yang beroperasi di kecamatan tersebut. Perpindahan penduduk di



daerah ini juga dapat didorong oleh peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas.

Pembangunan daerah di Kabupaten Bulungan tentunya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, yang secara berkesinambungan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah yang disertai dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bulungan. Agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini menjadi hambatan dan kendala dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bulungan yang lebih baik bagi semua. Permasalahan pembangunan terjadi karena adanya GAP antara kinerja pembangunan saat ini dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Bulungan dalam 5 (lima) tahun terakhir, berdasarkan data-data statistik daerah, dan berdasarkan pemenuhan aspek kinerja pembangunan daerah, didapat beberapa permasalahan pokok yang sampai saat ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam upaya meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan akhir RPJPD Kabupaten Bulungan, beberapa permasalahan yang ada, antara lain :

1. Perlunya dukungan infrastruktur wilayah

Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur wilayah mempunyai peranan sangat penting terutama dalam melayani pergerakan orang, barang dan jasa, serta menjalankan roda ekonomi daerah. Namun demikian, pendanaan yang terbatas merupakan kendala utama dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang berdampak pada tidak optimalnya kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan pendorong utama bagi pembangunan daerah dalam memajukan kemampuan dan daya saing masyarakat. Semakin baik kualitas SDM semakin besar pula peluang untuk dapat berkembang dan berinovasi. Peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan implementasi hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan daerah Bulungan. Belum



meratanya kualitas SDM dapat mengurangi kemajuan daerah, terlebih dalam era globalisasi baik persaingan dalam dunia kerja maupun kegiatan bisnis dibutuhkan SDM yang unggul, namun bila kualitasnya rendah, maka peluang untuk bersaing menjadi lemah bahkan akan terpinggirkan oleh tenaga kerja dari daerah lain maupun negara tetangga.

3. PAD yang belum optimal

Perlu dilakukan penggalan dan peningkatan sumber-sumber PAD yang saat ini baru mencapai sekitar 5% dari APBD, sehingga sebagian besar APBD daerah ini sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, APBN dan APBD provinsi. Dengan tetap memperjuangkan sumber pendanaan yang lebih besar dari APBN dan APBD Provinsi untuk pembangunan daerah, selain itu perlu adanya upaya yakni dengan memaksimalkan BUMD yang telah ada dengan menambah penyertaan modal maupun dengan melakukan pembentukan BUMD-BUMD yang dipandang dapat meningkatkan PAD baik BUMD yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi (migas), ataupun sector-sector yang lainnya.

4. Meningkatkan kebutuhan energi

Dinamika pembangunan dan aktivitas masyarakat belum didukung oleh penyediaan energi listrik yang memadai. Kapasitas terpasang hanya sekitar 6,00 MW dengan beban puncak 5,70 MW yang dimiliki PLN, sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saat ini.

5. Angka kemiskinan

Tugas berat dan permasalahan pembangunan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan terjadi bukan disebabkan kurangnya sumber daya alam yang ada, namun lebih kepada pola perilaku dan budaya kehidupan yang bersahaja. Kegiatan masyarakat yang bersifat ekstraktif (mengambil tanpa perlakuan) lebih dominan ketimbang yang bersifat budi daya.

6. Kualitas lingkungan hidup

Dampak pembangunan yang selama ini kurang atau belum dapat dikelola dengan baik telah banyak menimbulkan permasalahan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup, antara lain lahan kritis telah mencapai 46.815,51 Ha, kerusakan hutan *mangrove* dan resiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batubara dan pembangunan perkebunan kelapa sawit meningkat.

7. Penurunan kontribusi sektor pertanian

Salah satu tantangan terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan (berdaulat pangan) adalah menjaga kestabilan dan meningkatkan produksi pertaniannya terutama pada subsektor



tanaman pangan. Suatu daerah dikatakan berdaulat pangan tecermin dari kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerahnya. Meskipun secara umum sektor pertanian Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan peran dalam kontribusi ekonomi daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020, namun jika melihat 4 tahun ke belakang, kontribusinya masih fluktuatif, bahkan di tahun 2017 kontribusi sektor pertanian lebih besar dibandingkan kontribusi pada tahun 2020. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kontribusi sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan, yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian, belum optimalnya pengembangan produksi pertanian berbasis potensi lokal, dan masih minimnya fasilitasi pemerintah untuk pengembangan industri hulu - hilir sektor pertanian guna mengolah komoditas tanaman pangan daerah.

4.2. Isu Strategis

Hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan diperoleh masukan yang sangat menarik, yaitu:

- 1) Isu utama pembangunan lima tahun mendatang untuk Kabupaten Bulungan dan seluruh daerah di Indonesia adalah Dampak Pandemi Covid-19 (Keppres 9 Tahun 2020);
- 2) Ditetapkannya Tanjung Selor sebagai Kota Baru (Perpres 18 Tahun 2020).

Kedua isu tersebut dengan berbagai konsekuensinya akan menjadi faktor pengendali kegiatan pembangunan di Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2024. Sehingga penjabaran isu-isu strategis yang diarahkan oleh RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bulungan dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 harus selalu mempertimbangan dampak kedua isu tersebut di atas (Covid-19 dan penetapan Kota Baru Tanjung Selor).

4.2.1. Pengembangan SDM

Peningkatan kualitas SDM merupakan materi dalam isu pengembangan SDM, karena sesuai dengan status Kabupaten Bulungan yang telah memasuki era bonus demografi, maka peningkatan kualitas SDM harus mendapat perhatian agar SDM yang tersedia benar-benar menjadi sumber daya pembangunan untuk mereduksi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM baik melalui pendidikan formal, informal dan nonformal, dan khusus untuk angkatan kerja yang putus sekolah perlu dikembangkan pelatihan vokasi melalui kegiatan BLK yang sesuai dengan kebutuhan dan peluang kerja yang tersedia.



Selain peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan juga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas SDM, sebab evaluasi capaian kinerja pembangunan diketahui bahwa upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya balita masih sangat perlu ditingkatkan.

4.2.2. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Bulungan masih menghadapi kendala isolasi wilayah. Adanya beberapa wilayah yang terisolir (dari prasaranan perhubungan darat) menyebabkan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut menjadi terhambat.

Pengembangan ekonomi wilayah selain membuka isolasi wilayah juga harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di masing-masing wilayah tersebut, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam pemilihan komoditi harus mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kondisi sosial kultural masyarakat, dan tentunya peluang pasar. Pengembangan produksi pangan secara umum perlu dilakukan di semua wilayah kecamatan, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Sedangkan untuk daerah yang potensial untuk pengembangan produksi pangan dalam skala besar perlu didorong menjadi lumbung pangan untuk mewujudkan *rice food estate* di Kabupaten Bulungan.

4.2.3. Prasarana Dasar

Pengembangan dan peningkatan prasarana dasar yang menjadi isu utama yang selalu dimunculkan dalam diskusi dengan tokoh masyarakat adalah penyediaan listrik, air bersih, dan prasarana jalan. Khususnya untuk kecamatan yang masih banyak memiliki wilayah terisolir, ketiga prasarana dasar tersebut yang sangat diharapkan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM (baik aspek pendidikan maupun kesehatan) dan percepatan kegiatan pembangunan di segala bidang, sehingga kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat diminimalisir.

4.2.4. Kebijakan Publik Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum merupakan indikator pembangunan yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Indikator yang digunakan dapat berupa SPM (Standar Pelayanan Minimal), SPP (Standar Pelayanan Prima), dan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). Implementasi pelayanan tersebut dapat dipublikasikan oleh setiap OPD kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam bentuk POS (Prosedur Operasional Standar).



4.2.5. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Implementasi peraturan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten akan menjamin pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sebab setiap pelanggaran dan penyimpangan dari peraturan tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan, dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan umumnya memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Tugas berat pada isu lingkungan di Kabupaten Bulungan adalah pada pengawasan dan penegakan peraturan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha. Kondisi demikian harus menjadi perhatian serius pada periode pembangunan mendatang, agar dampak kerusakan lingkungan dapat dikendalikan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

4.3. Program Prioritas Bupati 2021-2026

Untuk memberikan arahan pasti terkait dengan tahapan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan atau pada masa jabatan Bupati Bulungan 2021-2026, maka Bupati menetapkan arahan program prioritas yang menjadi rencana kunci dalam pembangunan jangka menengah ini. Program Prioritas Bupati yang dicanangkan untuk pembangunan jangka menengah 2021-2026, antara lain:

1. Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)

Program Mandau Tani ini adalah integrasi program pertanian dalam artian luas untuk mewujudkan kabupaten Bulungan berdaulat pangan berbasis kearifan lokal. Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan terpadu hulu-hilir pada aspek kelembagaan. Tujuan yang ditetapkan dalam prioritas pertama ini antara lain:

- Mewujudkan misi pertama, dan penguatan untuk misi keempat, dan
- Memastikan integrasi antar-SKPD teknis dapat berjalan dengan maksimal termasuk terkait koordinasi dengan stakeholder lain yang bekerjasama

2. Satu Desa Satu Produksi

Program ini dilakukan dengan mengupayakan setiap desa memiliki produk unggulan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pengembangan pangan lokal sesuai dengan potensi dan klasterisasi wilayah. Produk merupakan hasil integrasi hulu-hilir. Sebagai contoh dimulai dari hasil komoditi pangan sebagai hulu hingga pengolahan produk UMKM sebagai hilir. Tujuan yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan ini antara lain:



- Meningkatkan industri rumah tangga/UMKM yang memproduksi aneka ragam pangan dan olahan lokal sebagai sumber penopang perekonomian masyarakat, dan
- Penyerapan hasil produksi pertanian dalam arti luas, serta meningkatkan nilai jual produk hasil pertanian

3. Jaminan Hasil Produksi Pertanian

Program ini memiliki deskripsi bahwa jaminan pembelian produk hasil produksi pertanian yang sejalan dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal. Tujuan yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan ini antara lain:

- Memberikan kepastian pembelian terhadap hasil produksi, sehingga upaya memperoleh produk unggulan berbasis potensi wilayah dapat terpenuhi,
- Menjaga kontinuitas produksi, dan
- Meningkatkan permintaan masyarakat terhadap hasil produksi pertanian lokal melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, yang meliputi peningkatan pengetahuan, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

4. Beasiswa Vokasi Berbasis Potensi Wilayah

Program ini dilakukan dengan pemberian beasiswa Pendidikan vokasi untuk peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Sumber pendanaan beasiswa tidak bergantung pada APBD namun lebih mengutamakan program-program pendanaan non-APBD. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program prioritas ini antara lain:

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM desa/wilayah, dan
- Meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Bulungan

5. Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat

Program ini merupakan program untuk pelatihan SDM (petani, nelayan, pelaku usaha UMKM, tenaga kerja) secara teknis dengan memanfaatkan konsep kerjasama *Pentahelix*. Tujuan yang diharapkan dari program prioritas ini adalah:

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis SDM sesuai bidang usaha/kerja, dan
- Meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Bulungan secara teknis sesuai bidang keahlian



6. Benuanta religi

Program prioritas ini adalah program pemberian insentif pada guru mengaji, guru sekolah minggu, dll. Serta *fardhu kifayah* dengan melembagakan/memberikan wadah berbadan hukum sebagai dasar hibah kemudian peningkatan kualitas dan kapasitas serta peran rumah ibadah. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program prioritas ini adalah menunjang pembentukan SDM berkarakter di luar sektor formal pendidikan yang religius.

7. Mantap Pelayanan Dasar

Program prioritas mantap pelayanan dasar ini dilakukan dengan pemantapan infrastruktur penguatan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat. Penguatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan, pemantapan ketersediaan listrik, dan air bersih. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program prioritas ini, antara lain adalah memberikan pelayanan infrastruktur dasar yang berkualitas kepada masyarakat.

8. Desa Pintar Desa Digital

Program prioritas Desa Pintar Desa digital ini adalah program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet untuk pengembangan potensi desa, serta percepatan akses dan layanan informasi, sehingga dapat memperkuat pertumbuhan pada sektor ekonomi kreatif. Tujuan yang diharapkan dari program prioritas ini antara lain:

- Meningkatkan daya saing desa,
- Meningkatkan konektivitas khususnya akses informasi dan pemasaran, dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan Desa

9. Bulungan Reaksi Cepat

Program Bulungan Reaksi Cepat ini adalah program layanan yang bertujuan memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat mendesak, di antaranya masalah kesehatan, masalah kemanusiaan, hingga masalah kedaruratan lainnya yang terkait dengan pelayanan publik. Tujuan dari pelaksanaan program prioritas ini antara lain:

- Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun penyampaian permasalahan yang bersifat darurat, dan
- Menghadirkan negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bulungan lebih dekat dan cepat tanggap terhadap permasalahan masyarakat

10. Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)

Program Kredit Mesra ini adalah program pengentasan kemiskinan dengan memperkuat UMKM dengan memberikan keringanan dalam proses administrasi



terkait dengan UMKM yang lebih sederhana. Tujuan dari program prioritas ini, antara lain:

- Meningkatkan perekonomian masyarakat, dan
- Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru yang terintegrasi dengan visi dan misi

11. Mitra Bulungan Berdaulat

Program prioritas ini adalah program penerapan konsep *pentahelix* yang melibatkan birokrasi, komunitas masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, serta media dalam mewujudkan visi Bulungan Berdaulat Pangan berbasis Kearifan Lokal. Mitra Bulungan Berdaulat dapat berperan sebagai sumber pendanaan dalam program-program pemberdayaan masyarakat, maupun berperan sebagai pelaksana terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan. Tujuan dari program prioritas ini antara lain:

- Meningkatkan perekonomian masyarakat,
- Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru yang terintegrasi dengan upaya mewujudkan bulungan berdaulat pangan berbasis kearifan lokal, dan
- Menjadi sumber inovasi pembiayaan untuk pembangunan Kabupaten Bulungan

12. Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal

Program prioritas ini adalah program pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan dan mempertahankan fungsi ekologi guna menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan dari program prioritas ini antara lain:

- Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang ramah lingkungan,
- Mempertahankan fungsi ekologi guna kelestarian lingkungan hidup, dan
- Menumbuhkan destinasi wisata yang dapat menjadi penciri Kabupaten Bulungan

13. TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi)

Program TAKE ini adalah program yang menjadi bagian dari ADD yang merupakan manifestasi dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melestarikan lingkungan hidup. Penetapan indikator DaPorMasBerNer (Alokasi Dasar, Alokasi Proporsional, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Berbasis Kinerja). Tujuan dari program prioritas ini adalah;



- Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup, dan hutan kemasyarakatan antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan Pemerintahan Desa , dan
- Mempertahankan fungsi ekologi sebagai bentuk pelestarian lingkungan hidup

14. Desa Inovatif

Program Desa Inovatif ini dilaksanakan melalui pemberian insentif pada desa yang memiliki program inovatif dan strategis dalam upaya mendukung perwujudan visi pembangunan Kabupaten Bulungan. Tujuan dari program prioritas ini antara lain adalah untuk meningkatkan sinergi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan Pemerintah Desa.

15. Mal Pelayanan Publik

Program Prioritas Mal Pelayanan Publik ini merupakan perwujudan pelayanan satu pintu untuk seluruh jenis produk layanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan. Tujuan dari program prioritas ini adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.

4.4. Isu Strategis Pendekatan Pembangunan Secara Spasial

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bulungan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RTRW Provinsi Kalimantan Utara dan RTRW Kabupaten Bulungan, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola, struktur tata ruang, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang



untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

A. Isu Strategis Spasial Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Utara

Berikut rangkuman rencana struktur, pola, dan kawasan strategis RTRW Provinsi Kalimantan Utara yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan.

Tabel 4.3 Arahan Sistem Perkotaan RTRW Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Bulungan

NO	LOKASI	SISTEM KOTA	FUNGSI PELAYANAN
1	Tanjung Selor	PKW	<ul style="list-style-type: none">• pusat pemerintahan provinsi;• simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;• pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;• pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil• perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;• pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;• pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan; dan• pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
2	Salim Batu	PKL	<ul style="list-style-type: none">• pusat pemerintahan kecamatan;• pusat perdagangan dan jasa skala lokal;• pusat industri rumah tangga dan kerajinan; dan• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
3	Bunyu	PKL	<ul style="list-style-type: none">• pusat pemerintahan kecamatan;• pusat perdagangan dan jasa skala lokal;• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;• pusat pertambangan batubara, minyak bumi dan gas alam) sub wilayah Bunyu; dan• pusat kegiatan penunjang pariwisata.



NO	LOKASI	SISTEM KOTA	FUNGSI PELAYANAN
4	Long Bia	PKL	<ul style="list-style-type: none">• pusat pemerintahan kecamatan;• pusat perdagangan dan jasa skala lokal;• pusat industri rumah tangga dan kerajinan; dan• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
5	Karang Agung	PKL	<ul style="list-style-type: none">• pusat pemerintahan kecamatan;• pusat perdagangan dan jasa skala lokal;• pusat industri pengolahan pertanian, perkebunan, dan pertambangan ramah lingkungan;• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan• pusat kegiatan pertanian dan perkebunan.
6	Sekatak Buji	PKL	<ul style="list-style-type: none">• pusat perdagangan dan jasa skala lokal; dan• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
7	Tanah Kuning	PKL	<ul style="list-style-type: none">• pusat pemerintahan kecamatan;• pusat perdagangan dan jasa skala lokal;• pusat industri pengolahan hasil perikanan budi daya dan perikanan tangkap;• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan• pusat kegiatan pertanian (agropolitan dan agroindustri).

Sumber: Hasil analisis, 2021 dan RTRW Prov Kalimantan Utara 2017-2037

Tabel 4.4 Arahan Sistem Jaringan Prasarana Utama RTRW Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Bulungan

NO	RENCANA JARINGAN PRASARANA	LOKASI
1.	Transportasi Darat	
	Jaringan jalan kolektor primer 1 (KP-1)	<ul style="list-style-type: none">• ruas jalan Batas Bulungan - Tanjung Selor• ruas jalan Tanjung Selor - Simpang 3 Tanjung Palas;• ruas jalan simpang 3 Tanjung Palas – Sekatak Buji;• ruas jalan di Kota Tanjung Selor, meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. ruas jalan Jelarai;2. ruas jalan Sengkawit;3. ruas jalan Jendral Sudirman dan jalan Katamso;4. ruas jalan Sutoyo;5. ruas jalan Panjaitan;6. ruas jalan MT. Haryono;7. ruas jalan Skip I;



NO	RENCANA JARINGAN PRASARANA	LOKASI
		8. ruas jalan Kolonel Sutadji (Jl. Skip II); dan 9. ruas jalan Agatis;
	Jaringan jalan kolektor primer 2 (KP-2)	ruas jalan Ulin – Bandara Tanjung Harapan
	Jaringan jalan kolektor primer 3 (KP-3)	<ul style="list-style-type: none">• ruas jalan Selimau I – Selimau III (Tanjung Selor);• ruas jalan Manunggal (Tanjung Selor);• ruas jalan Jeruk (Tanjung Selor);• ruas jalan Durian (Tanjung Selor);• ruas jalan Semangka (Tanjung Selor);• ruas jalan Pahlawan (Tanjung Selor);• ruas jalan Cendana (Tanjung Selor);• ruas jalan Padaelo (Tanjung Selor)
	Jaringan jalan strategis provinsi	<ul style="list-style-type: none">• ruas jalan Outer Ring Road Tanjung Selor;• ruas jalan Trans Kalimantan (Sp. 3 Tanah Kuning – Tanah Kuning);• ruas jalan Tanah Kuning - Mangkupadi;• ruas jalan Kampung Baru – Karang Tigau – Batas Bulungan Berau;• ruas jalan ruas jalan Koridor Bulungan Tarakan : Sekatak Buji – Liagu;• ruas jalan Koridor Bulungan Tarakan : Ancam – Liagu- Pulau Sadau; ruas jalan Bebas Hambatan Tanjung Selor – Tanjung Redeb;• ruas jalan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Kabupaten Bulungan; dan• ruas jalan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi di Tanjung Selor.• ruas jalan Long Peso - Long Pujungan• ruas jalan Tg. Selor - Buluh Perindu – Gunung Seriang;• ruas jalan Tg. Rumbia (Tg. Selor) – Gunung Seriang; dan• ruas jalan Batas Bulungan - Tg. Selor Menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur
	Jembatan	jembatan Bulungan – Tarakan;
	terminal penumpang tipe A	terminal Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
	Jaringan jalur kereta api umum	<ul style="list-style-type: none">• jaringan jalur kereta api nasional, terdiri atas: Tanjung Redeb



NO	RENCANA JARINGAN PRASARANA	LOKASI
		(Provinsi Kalimantan Timur) – Tanjung Selor –Tana Tidung – Malinau – Seimanggaris. <ul style="list-style-type: none">• jaringan jalur kereta api provinsi, terdiri atas: Tanjung Selor – Mangkupadi dan Tanjung Selor – Long Bia – Long Loreh
	Stasiun Kereta Api	Stasiun Sekatak Buji, Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur, dan Long Bia
	Pelabuhan sungai	pelabuhan Tanjung Selor (Pesawan), Ancam, Sekatak, dan Bunyu
	Pelabuhan penyeberangan	pelabuhan penyeberangan Kayan II, pelabuhan penyeberangan Bunyu, dan pelabuhan penyeberangan Ancam
2.	Transportasi Laut	
	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">▪ pelabuhan Tanjung Selor (Pesawan) di Kabupaten Bulungan;▪ pelabuhan Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan;▪ pelabuhan Pindada (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) di Kabupaten Bulungan;
	Pelabuhan pengumpan regional	pelabuhan Ancam di Kabupaten Bulungan;
	Pelabuhan Pengumpan Lokal	pelabuhan Sekatak di Kabupaten Bulungan;
	Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Pindada• Pos Angkatan Laut (POSAL) Sabanar Lama, POSAL Tanah Kuning
	Pelabuhan untuk kegiatan perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bunyu• Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Selor• Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Palas Timur
	Alur Pelayaran Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Tanjung Selor - Malinau Kota;• Malinau Kota – Tideng Pale – Tarakan – Tanjung Selor – Tanah Kuning/Mangkupadi – Tanjung Batu (Kabupaten Berau); dan• Tol Laut Perintis (Surabaya – Tanjung Selor – Tideng Pale – Malinau – Nunukan – Sebatik – Tarakan).
3.	Transportasi Udara	
	Bandar Udara Pengumpul skala Layanan sekunder	Bandar Udara Tanjung Harapan di Kabupaten Bulungan



NO	RENCANA JARINGAN PRASARANA	LOKASI
	Bandar Udara Pengumpan	Bandar Udara Tanjung Buyu di Kabupaten Bulungan;
	Bandar Udara Khusus Penanganan Bencana	Bandar Udara Tanjung Harapan Bulungan
	Bandar Udara Perintis	<ul style="list-style-type: none"> • bandar udara perintis Keburau di Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan; • bandar udara perintis Long Bia di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan; • bandar udara perintis Bunyu di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;

Sumber: Hasil analisis, 2021 dan RTRW Prov Kalimantan Utara 2017-2037

Tabel 4.5 Arahan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya RTRW Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Bulungan

NO	RENCANA JARINGAN PRASARANA	LOKASI
1.	Sistem Jaringan Energi	
	PLTU	1. PLTU Sungai Buaya Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan; 2. PLTU APUNG Kawasan Pertambangan di Kabupaten Bulungan;
	PLTD	PLTD Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan
	PLTA	PLTA Peso (Sungai Kayan) di Kabupaten Bulungan;
	PLTG	PLTG Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan
	PLTMG	PLTMG Gunung Seriang di Kabupaten Bulungan
	Gardu Induk	a. Gardu Induk (GI) Bunyu di Kabupaten Bulungan; b. Gardu Induk (GI) Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan; c. Gardu Induk (GI) Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan; d. Gardu Induk (GI) Peso di Kabupaten Bulungan; e. Gardu Induk (GI) Tanjung Palas Utara di Kabupaten Bulungan.
	Jaringan transmisi tenaga listrik	a. Tanjung Redeb – Tanjung Selor; b. Tarakan – Sekatak - Tanjung Selor; c. Tanjung Selor – Tideng Pale; d. PLTA Peso - GI Tanjung Selor - GI Tanjung Palas Timur (KIPI Mangkupadi-Tanah Kuning); e. SUTT Tanjung Palas Timur ke kecamatan Tanjung Selor;



NO	RENCANA JARINGAN PRASARANA	LOKASI
	Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi	jaringan pipa gas bumi nasional (City Gas): Bunyu, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur (Kabupaten Bulungan);
	Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Bulungan,• Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), PLTS komunal maupun PLTS SHS (unit rumah tangga) yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Bulungan,• Pembangkit listrik Tenaga Biodiesel (PLTBio)• Pembangkit listrik Tenaga Energi Biomasa
2.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sumber air berupa air tanah berada pada CAT berupa CAT Tanjung Selor mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bulungan, sebagian wilayah Kabupaten Nunukan, sebagian wilayah Kabupaten Malinau, dan sebagian wilayah Kabupaten Tana Tidung
	Sistem jaringan irigasi	DI kewenangan Nasional meliputi: 1. DIR Desa Tanjung Buka di Kabupaten Bulungan; 2. DIR Tanjung Buyu SP3 di Kabupaten Bulungan; 3. DIR Tanjung Buka SP5 SP6 di Kabupaten Bulungan; 4. DIR Tanjung Buka SP8 SP9 di Kabupaten Bulungan 5. DIR Terusan Pimping di Kabupaten Bulungan; 6. DIR Sepunggur di Kabupaten Bulungan; dan 7. DIR Salim Batu Hilir di Kabupaten Bulungan. b. DI kewenangan Provinsi meliputi: 1. DIR Salim Batu Hulu di Kabupaten Bulungan;
	Bendungan	Bendungan Keburau, Bendungan Peso, Bendungan Pangean, Bendungan Long Meliu dan Bendungan Kayanak di Kabupaten Bulungan
	Embung	Embung Bunyu di Kabupaten Bulungan;



NO	RENCANA JARINGAN PRASARANA	LOKASI
	Rencana sistem bangunan pengaman sungai, pantai, embung, mata air, waduk, bendungan, kanal dan penampung air lainnya	Bangunan pengaman di Kabupaten Bulungan;
3.	Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan	
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)	IPA Sekatak, Gunung Seriang dan Sabanar Lama di Kabupaten Bulungan
	Tempat pemrosesan Akhir (TPA)	a. TPA Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan; b. TPA Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan.

Sumber: Hasil analisis, 2021 dan RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037

Arahan rencana pola ruang Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang pada Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037. Arahan rencana pola ruang Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi hutan. Arahan pola ruang Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Arahan Rencana Kawasan Strategis RTRW Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Bulungan

NO.	KAWASAN STRATEGIS	FUNGSI KAWASAN	LOKASI
1	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya	kawasan <i>food estate</i> dan <i>rice estate</i>	Kabupaten Bulungan
		kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Mangkupadi-Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur	Kabupaten Bulungan
		koridor perkotaan Tarakan-Tanjung Selor	Tanjung Selor
		kawasan <i>technopark</i>	Kabupaten Bulungan
		Warisan Budaya Kesultanan Bulungan dan Kawasan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan
2	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Delta Sungai Kayan	Kabupaten Bulungan
		Koridor Sungai Kayan	Kabupaten Bulungan
		Kawasan konservasi mangrove	Kabupaten Bulungan
3	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi	PLTA Peso	Kabupaten Bulungan



Sumber: Hasil analisis, 2021 dan RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037

B. Isu Strategis Spasial Berdasarkan RTRW Kabupaten Bulungan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 disampaikan beberapa kebijakan dalam pengembangan wilayah daerah Kabupaten Bulungan, yang antara lain terdiri dari:

- a. pengembangan pusat pemerintahan yang modern yang memfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi kabupaten dan sumber penghidupan masyarakat Daerah;
- c. peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan Daerah yang berdaya saing; dan
- d. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam di Daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan kebijakan pengembangan daerah yang ditetapkan di atas, maka selanjutnya ditetapkan strategi penataan ruang wilayah untuk masing-masing kebijakan pengembangan daerah.

Strategi untuk pengembangan daerah pertama adalah diarahkan untuk pengembangan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pemerintahan baik kabupaten maupun provinsi yang memfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Strategi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 untuk pengembangan pusat pemerintahan yang modern Kabupaten Bulungan antara lain:

- a. membangun dan mengembangkan Kawasan pusat pemerintahan yang didukung dengan prasarana dan sarana penunjang pelayanan administrasi yang terpadu dan terintegrasi;
- b. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana pelayanan umum dan pelayanan sosial pada pusat pelayanan kegiatan di perkotaan dan perdesaan; dan
- c. mengembangkan pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya sebagai penunjang kegiatan masyarakat.

Strategi untuk pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan sumber



daya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat di daerah, terdiri atas:

- a. membangun dan mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di perkotaan dan di luar perkotaan di daerah demi pemerataan sumber penghidupan ekonomi penduduk;
- b. mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan kawasan industri sebagai fasilitas pengelolaan hasil produksi sumber daya alam hutan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
- c. meningkatkan pengelolaan hasil hutan yang bernilai ekonomi;
- d. membangun Kawasan Agropolitan pada Kawasan pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antarwilayah yang didukung dengan infrastruktur pertanian dan distribusi logistik yang baik;
- e. memfasilitasi pengembangan *food estate* sebagai lahan produksi pangan Daerah dan tingkat regional; dan
- f. memfasilitasi pengembangan industri hilir sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan dan sektor pertambangan guna mengolah komoditas daerah

Strategi untuk peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing, terdiri atas:

- a. meningkatkan aksesibilitas jaringan yang menghubungkan ibu kota daerah dengan seluruh wilayah kecamatan;
- b. meningkatkan dan membangun jaringan Jalan yang memberikan akses pada kawasan strategis dan kawasan sentra produksi;
- c. meningkatkan sarana transportasi perairan darat sebagai alternatif transportasi darat;
- d. membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung pada kawasan Strategis dan sentra produksi;
- e. membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan;
- f. membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian guna mendukung kegiatan pertanian, rencana agropolitan, dan pengembangan *food estate* serta infrastruktur sumber daya air lainnya dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai kebutuhan dan perlindungan terhadap daya rusak air;
- g. menyediakan dan meningkatkan infrastruktur kegiatan perikanan dan aksesibilitasnya ke sentra produksi perikanan; dan



- h. mengembangkan jaringan prasarana energi, jaringan prasarana telekomunikasi, dan jaringan prasarana pendukung permukiman secara merata untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kegiatan penduduk.

Strategi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, terdiri atas:

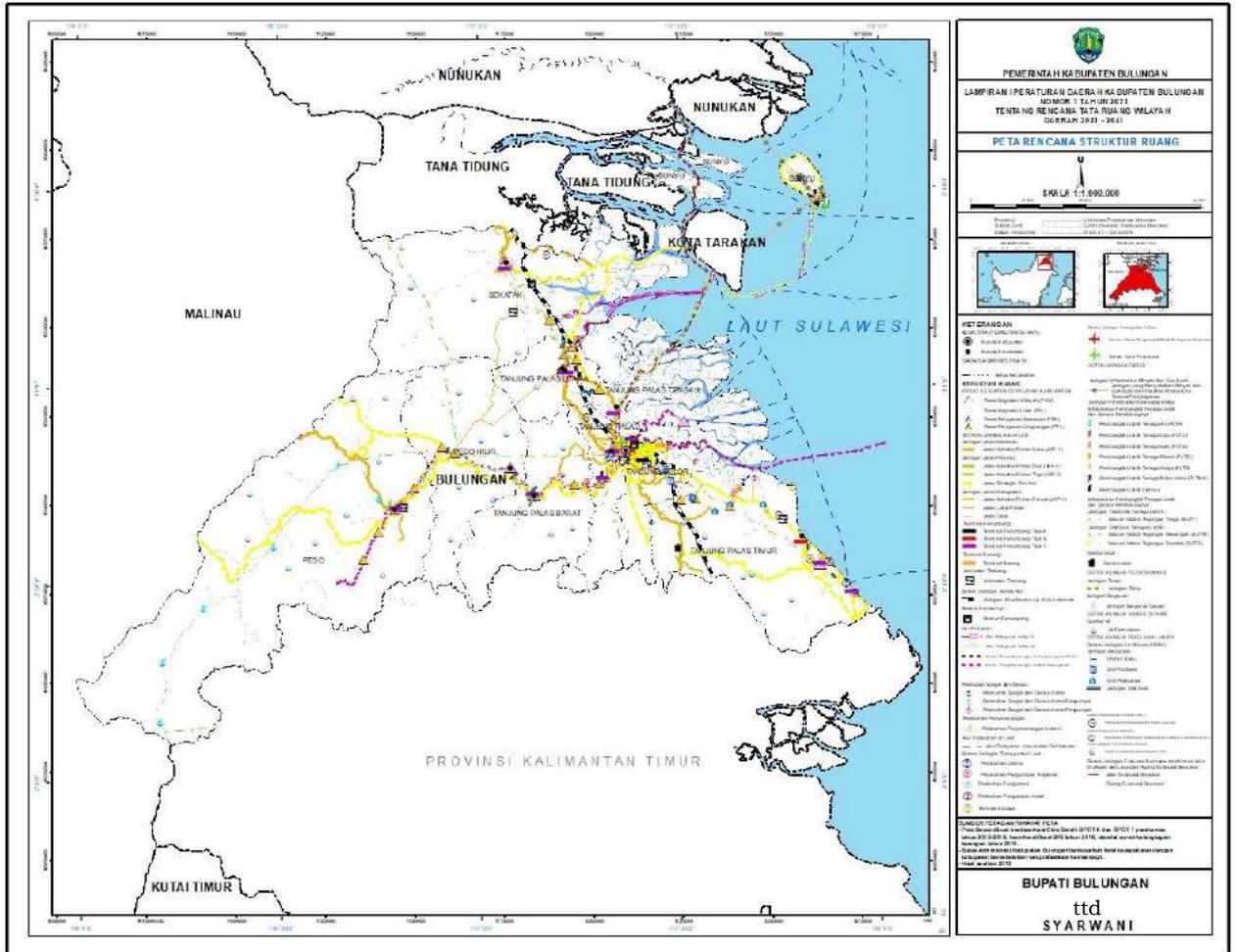
- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian kawasan hutan budi daya;
- b. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan hutan sebagai kawasan konservasi dan pusat penelitian dan pengembangan ekosistem hutan;
- c. memfasilitasi keberadaan hutan adat dan perhutanan sosial bagi kegiatan masyarakat di daerah;
- d. melestarikan dan memanfaatkan kawasan hutan mangrove;
- e. merencanakan dan mengembangkan kawasan hutan sebagai fungsi ekologis di perkotaan sebagai bagian dari RTH;
- f. memenuhi kebutuhan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen), dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. menjaga keberadaan pertanian pangan;
- h. melindungi ekosistem perairan pada kawasan sumber daya perikanan agar terhindar dari degradasi dan penurunan produktivitas;
- i. merevitalisasi ekosistem perairan pada kawasan sumber daya perikanan yang sudah terdegradasi;
- j. mengembangkan wisata minat khusus pada aspek lingkungan hidup dan bahari;
- k. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata;
- l. mengembangkan pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dengan berpedoman pada prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- m. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya;
- n. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata; dan
- o. mengembangkan prasarana dan sarana pada obyek daya tarik wisata

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bulungan dibagi atas sistem pusat kegiatan atau sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) :
 - PKW Perkotaan Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), terdiri dari :



- PKL Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - PKL Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PKL Bunyu Tengah di Kecamatan Bunyu;
 - PKL Long Bia di Kecamatan Peso; dan
 - PKL Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri dari :
- PPK Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - PPK Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPK Long Tunggu di Kecamatan Peso Hilir;
 - PPK Tanjung Palas Hilir di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - PPK Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri dari :
- PPL Long Buang di Kecamatan Peso;
 - PPL Long Lian di Kecamatan Peso;
 - PPL Long Peso di Kecamatan Peso;
 - PPL Lepak Aru di Kecamatan Peso;
 - PPL Naha Aya di Kecamatan Peso Hilir;
 - PPL Long Telenjau di Kecamatan Peso Hilir;
 - PPL Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas;
 - PPL Antutan di Kecamatan Tanjung Palas;
 - PPL Mara Satu di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - PPL Tanjung Selor Timur di Kecamatan Tanjung Selor;
 - PPL Tanjung Agung di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPL Wono Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPL Pura Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPL Silva Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - PPL Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - PPL Ruhui Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - PPL Ardi Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - PPL Sekatak Bengara di Kecamatan Sekatak; dan
 - PPL Bunyu Timur di Kecamatan Bunyu



Gambar 4.5 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bulungan

Sumber : RTRW Kab.Bulungan 2021-2041

Terkait dengan arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041, ditetapkan terbagi atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya.

Untuk Kawasan lindung terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, seluas kurang lebih 212.755 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar, terdiri atas :
 - Kawasan hutan lindung, seluas kurang lebih 206.961 (dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Tanjung Palas Barat



- Kawasan Lindung Gambut, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Tengah
- Kawasan resapan air, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Sekatak

b. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat, seluas kurang lebih 33.721 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar, terdiri atas :

- Sempadan Pantai, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur
- Sempadan Sungai, terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai yang tersebar pada Kawasan Perkotaan dan perdesaan di seluruh Daerah
- Kawasan sekitar danau atau waduk, terdapat di Kecamatan Peso dan Kecamatan Bunyu

c. Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi ditetapkan seluas kurang lebih 4.986 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam) hektar, terdiri atas:

- Kawasan cagar alam geologi, terdiri dari : Kawasan keunikan batuan dan fosil, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat; dan Kawasan keunikan bentang alam, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, berupa sempadan mata air, terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Peso

d. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana, seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh dua) hektar terdiri dari:

- Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan/atau longsor, di Kecamatan Sekatak;



- Kawasan rawan banjir, di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Peso, dan Kecamatan Peso Hilir; dan
- Kawasan rawan tsunami dan/atau abrasi, di sepanjang Kawasan pesisir Kabupaten Bulungan

e. Kawasan ekosistem *mangrove*.

Kawasan ekosistem *mangrove* ditetapkan seluas kurang lebih 14.102 (empat belas ribu seratus dua) hektar terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Sedangkan untuk Kawasan budi daya, ditetapkan 9 (Sembilan) tipologi kawasan yang dikembangkan di Kabupaten Bulungan, antara lain:

a. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 adalah seluas kurang lebih 742.769 hektar, terdiri atas:

- Kawasan hutan produksi terbatas;
Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 461.196 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam) hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur
- Kawasan hutan produksi tetap
Kawasan hutan produksi tetap, seluas kurang lebih 275.976 hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Bunyu
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, seluas kurang lebih 5.597 (lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Sekatak

b. Kawasan perkebunan rakyat

Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Selor



c. Kawasan pertanian

Kawasan pertanian seluas kurang lebih 244.856 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar, terdiri atas:

- Kawasan tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu
- Kawasan hortikultura, terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan Kecamatan Tanjung Palas
- Kawasan perkebunan, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu

d. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan, seluas kurang lebih 40.361 (empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu) hektar, terdiri atas:

- Kawasan perikanan tangkap, Kawasan perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana penunjang perikanan terdiri atas:
 - (1) tempat pelelangan ikan, terdiri atas:
 - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Selor;
 - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bunyu; dan
 - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanah Kuning.
 - (2) sarana dan prasarana perikanan, terdiri atas:
 - Balai Benih Ikan (BBI) Bunyu;
 - Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Selor;
 - *cold storage* di Kecamatan Tanjung Selor; dan
 - Balai Benih Udang di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- Kawasan perikanan budi daya, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas.

Kawasan perikanan budi daya lainnya pada perairan umum dalam bentuk sungai dan kolam air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan



e. Kawasan pertambangan dan energi;

Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 10.655 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima) hektar, terdiri atas:

- Kawasan pertambangan mineral, berupa pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bunyu
- Kawasan pertambangan batubara, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Tanjung Selor
- Kawasan peruntukan pertambangan batuan, tersebar di seluruh Kecamatan
- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdapat di Kecamatan Bunyu

f. Kawasan industri

Kawasan industri, seluas kurang lebih 11.549 (sebelas ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar, terdiri atas:

- Kawasan industri, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu, dan Kecamatan Tanjung Selor
- sentra industri kecil dan menengah, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Sentra industri kecil dan menengah dan industri kecil menengah lainnya dapat dikembangkan pada setiap kecamatan dengan bidang usaha komoditas kerajinan rakyat yang dikelola dengan kearifan lokal

g. Kawasan pariwisata;

Kawasan pariwisata, seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar terdiri atas:

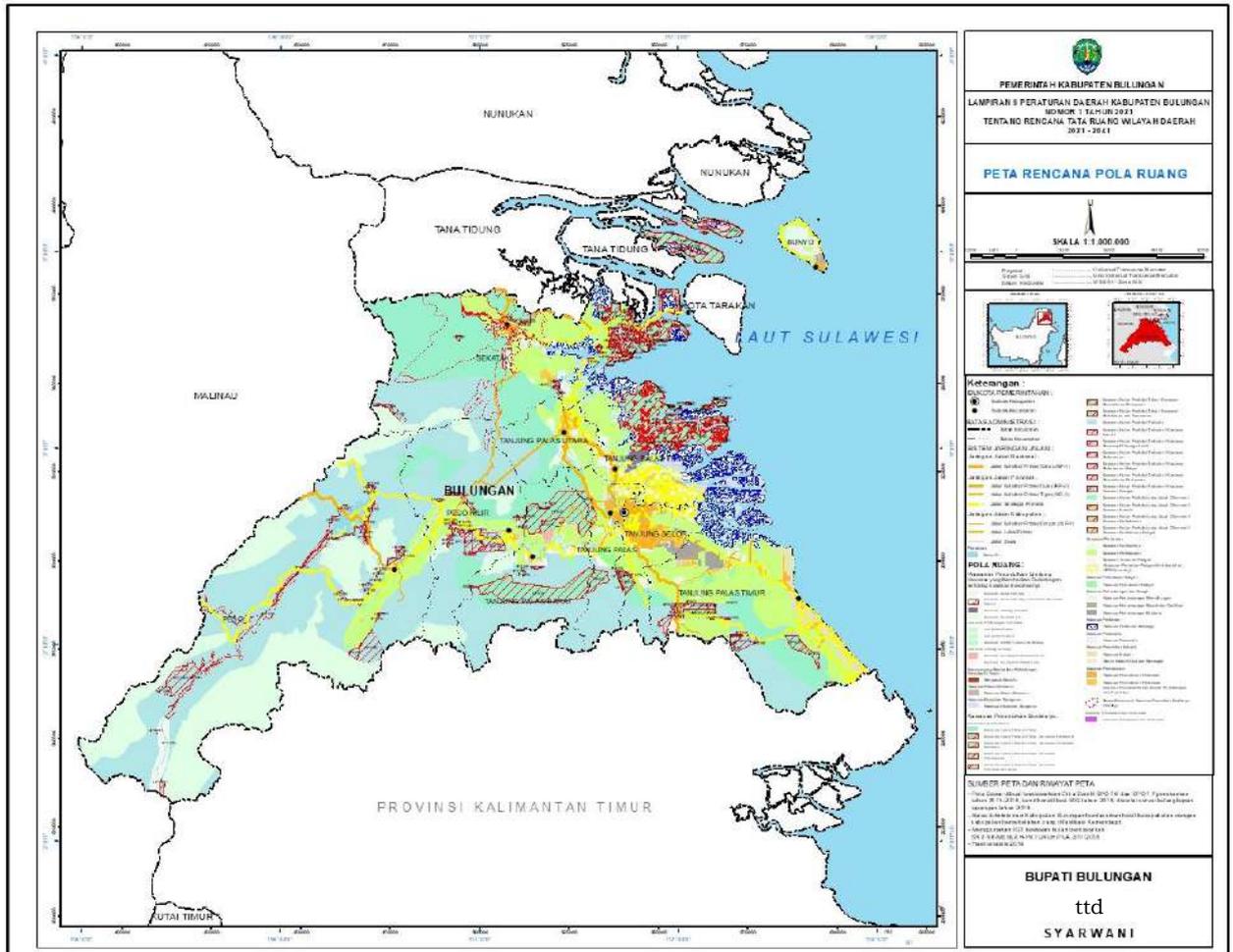
- Kawasan pariwisata alam, terdiri atas :
 - (1) Kawasan wisata pantai, di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Bunyu; dan
 - (2) Kawasan Kawasan wisata sungai, pada:
 - Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso;
 - Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso Hilir;
 - Kawasan wisata Giram Km.4 di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - Kawasan wisata Giram Bekiak di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - Kawasan wisata Air Terjun Km.18 dan Km.12 di Kecamatan Tanjung Selor;
 - Kawasan wisata Air Terjun Ramban di Kecamatan Sekatak;
 - Kawasan wisata Air Terjun Anang Dachlan di Kecamatan Peso Hilir;



- Kawasan wisata Air Terjun Km. 36 di Kecamatan Tanjung Selor;
 - Kawasan wisata Air Terjun Sulok di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - Kawasan wisata alam Batu Tumpuk Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - Kawasan water sport Km.16 di Kecamatan Tanjung Selor; dan
 - Kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso
- Kawasan pariwisata budaya, terdiri atas :
- (1) Kawasan wisata miniatur etnis budaya di Kecamatan Tanjung Palas;
 - (2) Kawasan wisata rumah adat di Kecamatan Tanjung Selor;
 - (3) Kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas;
 - (4) Kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas;
 - (5) Kawasan wisata Makam Syaid Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - (6) Kawasan wisata Makam Syaid Achmad Maghribi di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - (7) Kawasan wisata Makam Datu Adil di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - (8) Kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - (9) Kawasan wisata Makam Makan Orang Kayan Kuno di Kecamatan Peso;
 - (10) Kawasan wisata Makam Keramat Syaid Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
 - (11) Kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas
- h. Kawasan permukiman
- Kawasan permukiman, seluas kurang lebih 35.246 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) hektar, terdiri atas:
- Kawasan permukiman perkotaan, terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 - Kawasan permukiman perdesaan, tersebar di seluruh kecamatan
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan.
- Kawasan pertahanan dan keamanan, seluas kurang lebih 31 hektar antara lain terdiri dari :



- Kawasan Brigadir Infantri (BRIGIF) 24/BC Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Markas Brigadir Infantri (MABRIGIF) 24/ Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Kompi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Pindada di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- Kawasan Pos Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- Kawasan Kompi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Markas Komando Distrik Militer (MAKODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;
- Pos TNI AL Bunyu, POSAL Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu;
- Pos TNI AL Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor; dan
- Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah Daerah.



Gambar 4.6 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bulungan

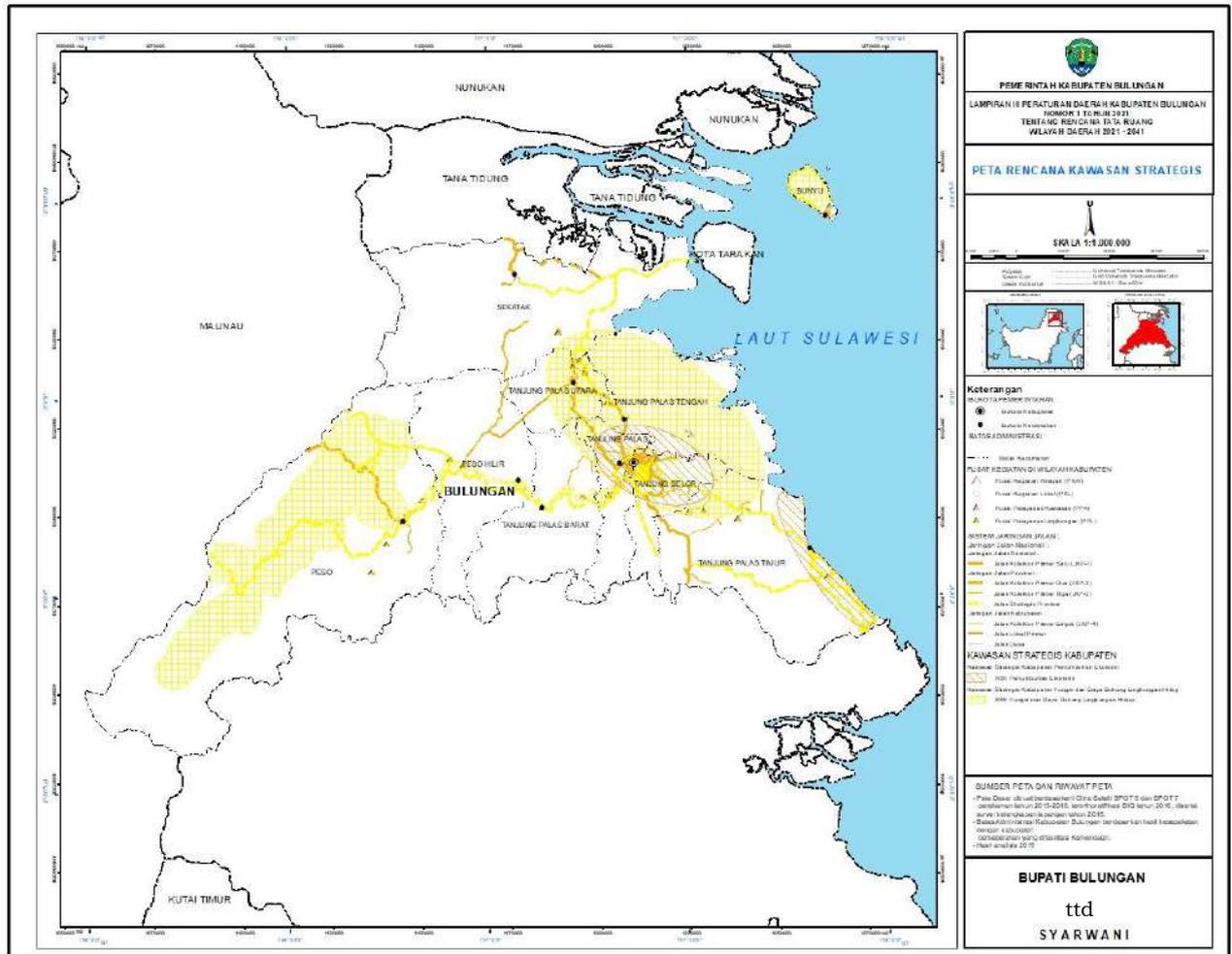
Sumber : RTRW Kab.Bulungan 2021-2041

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041, ditetapkan kawasan strategis pada wilayah daerah kabupaten, terdiri dari :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, berupa:
 - Kawasan pertanian tanaman pangan terpadu *food estate and rice estate* di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas;
 - Kawasan Perkotaan Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - Kawasan Perkotaan Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa:
 - Kawasan hulu Sungai Kayan pada Pembangkit Tenaga Listrik (PLTA) Peso dan Kawasan Delta Kayan sebagai satu kesatuan hulu hilir untuk konservasi sumber daya air dan ekosistem; dan



- Kawasan sekitar Hutan Lindung Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu.



Gambar 4.7 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bulungan

Sumber : RTRW Kab.Bulungan 2021-2041

4.5. Hasil Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Penyusunan RPJMD juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan program pembangunan yang berkaitan dengan aspek pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan. Permasalahan dan isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan hasil analisis ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026, dihasilkan 3 (tiga) kelompok data. Kelompok pertama adalah indikator TPB yang telah tercapai (A), kedua ialah indikator TPB yang belum tercapai (B dan C) dan terakhir adalah indikator TPB yang belum tersedia datanya (D). Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kabupaten Bulungan mempertimbangkan indikator TPB belum



tercapai. Indikator yang belum memiliki data maka perlu adanya pengelolaan data yang memungkinkan agar dapat diukur capaiannya. Sedangkan untuk indikator TPB yang telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerjanya agar tidak turun. Berikut indikator TPB yang tidak tercapai dalam empat pilar pembangunan, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola.

A. Indikator yang Belum Tercapai pada Pilar Sosial

Terdapat 25 indikator TPB yang belum tercapai (kategori B dan C) pada pilar sosial yang terbagai dalam Tujuan 1, 2, 3, dan 4. Adapun 25 indikator tersebut mencakup permasalahan kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan yang secara lebih rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Indikator TPB Yang Belum Tercapai Pada Pilar Sosial

TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	Dinas Sosial
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial
	1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Dinas Sosial
	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Dinas Sosial
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Sosial
	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Dinas Sosial



TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian
	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Dinas Pertanian
	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan (IAHP)	Dinas Pertanian
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan
	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinas Kesehatan
	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Dinas Kesehatan
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026

B. Indikator TPB yang Belum Tercapai pada Pilar Ekonomi

Indikator TPB yang termasuk dalam kelompok pilar ekonomi ialah indikator pada tujuan 7, 9, 10, dan 17. Indikator belum tercapai pada pilar ekonomi berjumlah 8 indikator. Indikator tersebut antara lain terkait pendapatan daerah dan kesenjangan sehingga indikator tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Secara lebih rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8 Indikator TPB Yang Belum Tercapai Pada Pilar Ekonomi

TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum



TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Dinas Perhubungan
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinas Sosial
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Sosial
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026

C. Indikator TPB yang Belum Tercapai pada Pilar Lingkungan

Indikator TPB yang termasuk dalam kelompok pilar lingkungan ialah indikator pada tujuan 6, 11, 12 dan 13. Adapun indikator yang tidak tercapai pada pilar lingkungan berjumlah 17 indikator. Permasalahan sanitasi layak sumber air minum, tutupan lahan, bencana menjadi fokus permasalahan dari indikator yang belum tercapai tersebut sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Secara lebih rinci, indikator belum tercapai pada pilar lingkungan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Indikator TPB Yang Belum Tercapai Pada Pilar Lingkungan

TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPRKP



TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas PUPRKP
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPRKP
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Dinas Lingkungan Hidup
	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum
	11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup
	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Dinas Lingkungan Hidup



TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026

D. Indikator TPB yang Belum Tercapai pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

Jumlah indikator yang tidak tercapai pada pilar tata kelola dan kelembagaan sebanyak 10 indikator yang secara keseluruhan terdapat pada tujuan 16. Adapun 10 indikator yang termasuk dalam kriteria belum tercapai disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Indikator TPB yang Belum Tercapai pada Pilar Hukum & Tata Kelola Kelembagaan

TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Bagian Hukum Dan HAM
	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Bagian Hukum Dan HAM
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Bagian Hukum Dan HAM
	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah



TPB	No. Indikator	Indikator	OPD Pelaksana
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026

Perumusan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bulungan tahun 2021-2026 diperoleh dengan mengelompokkan indikator-indikator yang belum tercapai ke dalam satu tema besar. Berdasarkan telaah yang dilakukan dalam Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 dihasilkan 5 isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bulungan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM
2. Pengembangan Ekonomi Wilayah
3. Prasarana Dasar
4. Kebijakan Publik Pemerintah dan Penegakan Hukum
5. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Di samping itu, skenario rekomendasi penyempurnaan KRP merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan, baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Bulungan, indikator kinerja daerah, maupun indikator urusan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bulungan 2021 – 2026. Berdasarkan perumusan skenario sebelumnya terhadap kondisi lingkungan hidup dan analisis capaian



indikator TPB yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan, belum/tidak ada data serta capaian yang harus diperhatikan sampai dengan tahun 2030, maka secara umum rekomendasi berdasarkan kondisi lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung) serta analisis capaian TPB. RPJMD Kabupaten Bulungan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Visi dan misi memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.
- b) Arah kebijakan, strategi, dan program agar memperhatikan kajian pengaruh yang berdampak negatif terhadap isu strategis yang muncul untuk Kabupaten Bulungan.
- c) Perlu komitmen dari pemerintah Kabupaten Bulungan untuk memperhatikan hasil KLHS RPJMD sebagai instrumen yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program.
- d) Dalam mengimplementasikan KLHS RPJMD sebagai instrumen perlu memperhatikan karakteristik wilayah kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
- e) Karakteristik wilayah yang harus mendapat perhatian adalah terkait dengan isu strategis.

Berdasarkan hasil rekomendasi kajian KLHS tersebut di atas, penyusunan RPJMD ini telah mengakomodir dan mengikuti kaidah-kaidah hasil rekomendasi yang disampaikan, antara lain dalam penyesuaian sasaran, arahan kebijakan, indikasi program, dan indikasi anggaran yang dibahas dalam Bab 5 dan Bab 6 RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026 ini.

4.6. Kesimpulan Rumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Bulungan

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan yang dibahas pada bagian sebelumnya antara lain isu strategis pembangunan Kabupaten Bulungan dalam kaitannya dengan RPJP, kaitannya dengan kondisi daerah, kaitannya dengan program prioritas pembangunan jangka menengah yang ditetapkan Bupati, serta kaitannya dengan arahan isu strategis lainnya, maka dapat disimpulkan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulungan pada tahun 2021-2026 antara lain adalah :

- A. Bidang Infrastruktur, antara lain terdiri dari :
 1. Isu strategis terkait pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
 2. Isu strategis terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan
 3. Isu strategis terkait pengembangan Kawasan kota baru mandiri



4. Isu strategis terkait ketersediaan dan distribusi air bersih
 5. Isu strategis terkait konektivitas dan aksesibilitas antardaerah
 6. Isu strategis terkait ketersediaan energi listrik
- B. Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, antara lain terdiri dari :
1. Isu strategis terkait implementasi *Sustainable Development Goal* (SDG's)
 2. Isu strategis terkait pengangguran dan kemiskinan
 3. Isu strategis terkait pengembangan kawasan pertanian terintegrasi
 4. Isu strategis terkait dengan perkembangan era industri 4.0
 5. Isu strategis terkait dengan pengembangan kualitas SDM
- C. Ekonomi dan Lingkungan, antara lain terdiri dari :
1. Isu strategis terkait dengan pengembangan dan pertumbuhan industri yang terintegrasi
 2. Isu strategis terkait dengan kualitas lingkungan hidup
- D. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain terdiri dari :
1. Isu strategis terkait dengan penguatan kebudayaan lokal sebagai identitas daerah
 2. Isu strategis terkait dengan daya saing sektor pariwisata
- E. Reformasi Birokrasi, dan Keuangan Daerah, antara lain terdiri dari :
1. Isu strategis terkait dengan pemenuhan indeks reformasi birokrasi
 2. Isu strategis terkait dengan upaya mempertahankan opini BPK yaitu WTP
 3. Isu strategis terkait dengan optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi BUMD dan pendirian BUMD serta rencana penyertaan modal.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan tahun 2021-2026 ini acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan tahun 2021-2026 ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional, dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda, menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan.

5.1. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulungan

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku-kepentingan (stakeholders) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Bulungan yang maju disegala aspek kehidupan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian sebagai tujuan akhir. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 tahap keempat yang memiliki arah kebijakan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian yang unggul dalam bidang agroindustri dan didukung oleh kualitas SDM yang tangguh, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat secara luas, pelayanan dasar berjalan optimal, pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien, penegakan hukum, dan ramah lingkungan. Perumusan Visi untuk RPJMD 2021-2026 selain mengacu kepada RPJPD Kabupaten Bulungan 2005-2026, juga memperhatikan visi yang tertera pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.



Tabel 5.1

Visi RPJPD Kabupaten Bulungan, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara; RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Visi RPJPD		Visi RPJM	
Kabupaten Bulungan	Provinsi Kalimantan Utara	Nasional	Provinsi Kalimantan Utara
Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian yang unggul dalam bidang agroindustri serta didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh	Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara sebagai Wilayah Perbatasan Menjadi Beranda Terdepan NKRI yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Adil, dan Beradab	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera

Visi pembangunan Kabupaten Bulungan sangat penting untuk dijadikan sebagai visi Bersama seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Bulungan, berdasarkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Bulungan dan tantangan pembangunan yang akan dihadapi pada beberapa tahun kedepan, dan mengacu kepada visi jangka Panjang Kabupaten Bulungan, serta janji pasangan calon Bupati dan Wakil bupati terpilih pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah secara serentak, maka visi Kabupaten Bulungan 2021-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA”

Visi diatas mengandung makna secara filosofis antara lain sebagai berikut:

- **BERDAULAT PANGAN**, bermakna Kabupaten Bulungan akan memenuhi hak atas pangan secara mandiri yang berkualitas dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan lebih menekankan pada pertanian berbasis keluarga dan berdasarkan pada prinsip solidaritas.



Melalui kedaulatan pangan tercapai kesejahteraan ekonomi diukur dengan ketahanan pangan yang mantap, penyediaan energi, pemenuhan kebutuhan dasar, semakin rendahnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang mantap, serta terjaganya kualitas lingkungan hidup.

- **MAJU**, bermakna Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi fisik dan non fisik yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama yang sinergis dan kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Kemajuan masyarakat dicirikan dengan kemampuan SDM yang cerdas, terampil, sehat, dan berdaya saing dalam pengelolaan SDA serta didukung dengan sistem Pemerintahan yang baik dan professional
- **SEJAHTERA**, bermakna kondisi masyarakat Kabupaten Bulungan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.

5.2. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulungan

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai arahan utama dalam pembangunan Kabupaten Bulungan dalam Jangka Menengah 2021-2026, ditetapkan 5 (lima) misi untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan oleh Bupati antara lain :

Misi 1: Mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis kearifan lokal.

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan nantinya akan dirumuskan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan melalui rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut.



I. Tujuan

Tujuan dari Misi 1 antara lain:

1. Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian Dalam Arti Luas
2. Mewujudkan kemandirian Pangan

II. Sasaran

Sedangkan sasaran berdasarkan tujuan yang dirumuskan untuk pencapaian misi 1 ini antara lain:

Sasaran Misi 1 berdasarkan tujuan 1:

1. Mewujudkan Peningkatan Produktifitas Pertanian
2. Meningkatkan kesejahteraan petani

Sasaran Misi 1 berdasarkan tujuan 2:

1. Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing.

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan nantinya akan dirumuskan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan melalui rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

I. Tujuan

Tujuan dari Misi 2 antara lain:

1. Mewujudkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing

II. Sasaran

Sedangkan sasaran berdasarkan tujuan yang dirumuskan untuk pencapaian misi 2 ini antara lain:

Sasaran Misi 2 berdasarkan tujuan :

- 1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan
- 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 1.3 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
- 1.4 Meningkatnya kesetaraan Gender
- 1.5 Meningkatnya daya saing daerah



Misi 3: Memantapkan infrastruktur sebagai pendukung utama pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan nantinya akan dirumuskan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan melalui rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

I. Tujuan

Tujuan dari Misi 3 antara lain:

1. Meningkatnya Pemerataan Ekonomi

II. Sasaran

Sedangkan sasaran berdasarkan tujuan yang dirumuskan untuk pencapaian misi 3 ini antara lain:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi
2. Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak
3. Terciptanya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
4. Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja
5. Meningkatnya pendapatan daerah
6. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
7. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal

Misi 4: Memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan.

Dalam rangka pencapaian misi 4, beberapa program dan kegiatan nantinya akan dirumuskan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan melalui rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

I. Tujuan

Tujuan dari Misi 4 antara lain:

1. Terwujudnya Masyarakat yang Tertib dan Aman
2. Menjaga kualitas lingkungan hidup
3. Menurunnya ketimpangan pendapatan



II. Sasaran

Sedangkan sasaran berdasarkan tujuan yang dirumuskan untuk pencapaian misi 4 ini antara lain:

Sasaran berdasarkan tujuan 1 Misi 4

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat

Sasaran berdasarkan tujuan 2 Misi 4

1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

Sasaran berdasarkan tujuan 3 Misi 4

1. Menurunnya kemiskinan
2. Meningkatnya kemandirian desa

Misi 5: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan.

Dalam rangka pencapaian misi 5, beberapa program dan kegiatan nantinya akan dirumuskan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan melalui rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

I. Tujuan

Tujuan dari Misi 5 antara lain:

1. Terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Pelayanan Publik

II. Sasaran

Sedangkan sasaran berdasarkan tujuan yang dirumuskan untuk pencapaian misi 1 ini antara lain:

Sasaran berdasarkan tujuan 1 Misi 5

1. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien

Sasaran berdasarkan tujuan 2 Misi 5

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat



5.3. Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulungan

Pada bagian ini dibahas mengenai keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bulungan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, yang disampaikan dalam Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 berikut,

Tabel 5.2. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Bulungan dengan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Visi RPJMD Kabupaten Bulungan	Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara
Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju, dan Sejahtera	Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera

Tabel 5.3. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Bulungan dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Misi RPJMD Kabupaten Bulungan	Misi RPJMD Provinsi Kaltara
Misi 1: Mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal	Misi 9: Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui pengembangan produk lokal masing-masing kabupaten/kota
Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing	Misi 3: Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan pendidikan wajib belajar 16 tahun dan berwawasan kebangsaan
Misi 3: Memantapkan infrastruktur sebagai pendorong utama pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat	Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antara wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industry, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota Misi 7: Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM Misi 8: Meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal serta nasional Misi 10: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan peroduktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan



<p>Misi 4: Memajukan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan</p>	<p>Misi 4: Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>Misi 6: Mewujudkan ketahanan energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah</p> <p>Misi 11: Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat kebinnekaan di Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>Misi 12: Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan</p>
<p>Misi 5: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan</p>	<p>Misi 1: Mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik</p> <p>Misi 2: Mewujudkan sistem pemerintahan provinsi yang ditopang oleh tata kelola pemerintah kabupaten/kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran berbasis kinerja</p> <p>Misi 13: Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap tahun</p> <p>Misi 14: Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta beberapa DOB yang telah diusulkan, yaitu: Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan</p>

5.4. Kaitan antara Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam Jangka Menengah dengan Sasaran RPJMD

Program Prioritas Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan merupakan program unggulan Bupati Tahun 2021-2026 yang merupakan janji kampanye Bupati untuk dilaksanakan pada tahapan jangka menengah ini. Program prioritas ini salah satu arah kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bulungan pada tahun 2021-2026. Program prioritas 2021-2026 antara lain meliputi:



1. Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian), dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 1 sebagai turunan dari Misi 1, Tujuan 1, yaitu Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian
 - b. Sasaran 2 sebagai turunan dari Misi 1, Tujuan 1, yaitu Meningkatnya kesejahteraan petani
 - c. Sasaran 1 sebagai turunan dari Misi 1, Tujuan 2, yaitu Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan
2. Satu Desa Satu Produksi, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 1, sebagai turunan dari Misi 4, Tujuan 3, yaitu Meningkatnya kemandirian desa
 - b. Sasaran 1 sebagai turunan dari Misi 1, Tujuan 1, yaitu Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian
3. Jaminan Hasil Produksi Pertanian, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 1 sebagai turunan dari Misi 1, Tujuan 1, yaitu Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian
 - b. Sasaran 1 sebagai turunan dari Misi 1, Tujuan 2, yaitu Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan
4. Beasiswa Vokasi berbasis Potensi Wilayah, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 3 sebagai turunan dari Misi 2, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
 - b. Sasaran 4 sebagai turunan dari misi 3, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja
5. Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 1 sebagai turunan dari Misi 2, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
 - b. Sasaran 4 sebagai turunan dari misi 3, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja
6. Benuanta Religi, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 1, sebagai turunan Misi 5, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan efisien.



7. Mantap Pelayanan Dasar, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 1, sebagai turunan Misi 3, dan Tujuan 1, yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi
 - b. Sasaran 2, sebagai turunan Misi 3, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya pengelolaan Kawasan permukiman layak
 - c. Sasaran 3, sebagai turunan Misi 3, dan Tujuan 1, yaitu Terciptanya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
 - d. Sasaran 1, sebagai turunan dari Misi 2, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
8. Desa Pintar Desa Digital, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 2, sebagai turunan Misi 4, Tujuan 3, yaitu Meningkatnya kemandirian desa
9. Bulungan Reaksi Cepat, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 1, sebagai turunan dari Misi 2, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
10. Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera), dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 4 sebagai turunan dari misi 3, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja
11. Mitra Bulungan Berdaulat, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 1, sebagai turunan Misi 5, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan efisien, dimana fokus dalam program prioritas ini adalah pemenuhan indikator kinerja program yaitu Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR dan persentase program pembangunan daerah yang didanai melalui skema KPBU
12. Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
 - a. Sasaran 2, sebagai turunan Misi 4, Tujuan 3, yaitu Meningkatnya kemandirian desa
 - b. Sasaran 7, sebagai turunan Misi 3, Tujuan 1, yaitu Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal



13. TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi), dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
- Sasaran 1, sebagai turunan Misi 4, dan Tujuan 2, yaitu Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

Dalam penerapan program prioritas ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga melakukan keberpihakan terhadap lingkungan hidup dalam hal prioritas program dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan turunannya yang berbasis ekologi ini.

14. Desa Inovatif, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :
- Sasaran 2, sebagai turunan Misi 4, Tujuan 3, yaitu Meningkatnya kemandirian desa

Program prioritas desa inovatif ini nantinya menjadi salah satu penyokong bagi peningkatan indeks inovasi daerah Kabupaten Bulungan.

15. Mal Pelayanan Publik, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran RPJMD 2021-2026 yang terkait antara lain :

- Sasaran 1, sebagai turunan Misi 5, dan Tujuan 1, yaitu Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan efisien
- Sasaran 1, sebagai turunan Misi 5, dan Tujuan 2, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam implementasi program prioritas ini nantinya dikembangkan dengan melakukan pembangunan mal pelayanan publik dimana seluruh layanan publik baik untuk individu, kelompok, maupun perusahaan dapat dilayani dalam satu pintu, serta beberapa layanan yang memungkinkan dikembangkan dengan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi layanan publik.

Dalam rangka pelaksanaan program-program unggulan tersebut, maka dipetakan dan diselaraskan dengan program-program perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dan dapat dilihat pada table 5.4.



Tabel 5.4. Pemetaan dan Penyelarasan 15 Program Strategis Kepala Daerah Dengan Program Perangkat Daerah

No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
1	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Integrasi program pertanian dalam artian luas untuk mewujudkan kabupaten Bulungan berdaulat pangan berbasis kearifan lokal. Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan terpadu hulu-hilir pada aspek kelembagaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Visi, Misi-1, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Memastikan integrasi antar-SKPD teknis dapat berjalan dengan maksimal termasuk terkait koordinasi dengan stakeholder lain yang bekerjasama	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Visi, Misi-1, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Pertanian
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Visi, Misi-1, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Pertanian
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Visi, Misi-1, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Visi, Misi-1, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Visi, Misi-1, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Visi, Misi-1, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Perikanan
			Program Pengembangan UMKM	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Disperindagkop
			Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Disperindagkop
2	Satu Desa Satu Produksi	Mengupayakan setiap desa memiliki produk unggulan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pengembangan pangan lokal sesuai dengan potensi dan klasterisasi wilayah. Produk merupakan hasil integrasi hulu-hilir. Sebagai contoh dimulai dari hasil komoditi pangan sebagai hulu hingga pengolahan produk UMKM sebagai hilir	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-2	Kecamatan



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
		Meningkatkan industri rumah tangga/UMKM yang memproduksi aneka ragam pangan dan olahan lokal sebagai sumber penopang perekonomian masyarakat	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-2	DPMD
		Penyerapan hasil produksi pertanian dalam arti luas, serta meningkatkan nilai jual produk hasil pertanian	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-2	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-2	Disnakertrans
3	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Jaminan pembelian produk hasil produksi pertanian yang sejalan dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal.	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Visi, Misi-1, Tujuan-1, Sasaran-1	
		Memberikan kepastian pembelian terhadap hasil produksi, sehingga upaya memperoleh produk unggulan berbasis potensi wilayah dapat terpenuhi	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Visi, Misi-1, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Perikanan
		Menjaga kontinuitas produksi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Visi, Misi-1, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan permintaan masyarakat terhadap hasil produksi pertanian lokal melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, yang meliputi peningkatan pengetahuan, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Visi, Misi-1, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Visi, Misi-1, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Ketahanan Pangan



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Visi, Misi-1, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Disperindagkop
			Program Perencanaan dan pembangunan industri	Visi, Misi-1, Tujuan-2, Sasaran-1	Disperindagkop
4	Beasiswa Vokasi Berbasis Potensi Wilayah	Pemberian beasiswa Pendidikan vokasi untuk peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Sumber pendanaan beasiswa tidak bergantung pada APBD namun lebih mengutamakan program-program pendanaan non-APBD	Program Pengelolaan Pendidikan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM desa/wilayah			
		Meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Bulungan			
5	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Program untuk pelatihan SDM (petani, nelayan, pelaku usaha UMKM, tenaga kerja) secara teknis dengan memanfaatkan konsep kerjasama Pentahelix	Program Pengembangan Kurikulum	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis SDM sesuai bidang usaha/kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Bulungan secara teknis sesuai bidang keahlian	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Kesehatan
			Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Disperindagkop



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Disperindagkop
			Program Pengembangan UMKM	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Disperindagkop
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Visi, Misi-5, Tujuan-1, Sasaran-1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-4	DP3AP2KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-4	DP3AP2KB
			Program Pemberdayaan Sosial	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-1	Dinas Sosial
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas PU
6	Benuanta religi	Program pemberian insentif pada guru mengaji, guru sekolah minggu, dll. Serta fardhu kifayah dengan melembagakan/memberikan wadah berbadan hukum sebagai dasar hibah kemudian peningkatan kualitas dan kapasitas serta peran rumah ibadah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Visi, Misi-5, Tujuan-1, Sasaran-1	Setda (Bagian Kesra)
		menunjang pembentukan SDM berkarakter di luar sektor formal pendidikan yang religius			



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
7	Mantap Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur penguatan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat. Penguatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan, pemantapan ketersediaan listrik, dan air bersih	Program Pengelolaan Pendidikan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		memberikan pelayanan infrastruktur dasar yang berkualitas kepada masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Kesehatan
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-5	Bappeda dan Litbang
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-5	BP2RD
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		RSUD
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan n Jalan	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Permukiman	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			Program Kawasan Permukiman	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Disperindagkop
			Program Pengelolaan Persampahan	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Visi, Misi-5, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Visi, Misi-5, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Visi, Misi-5, Tujuan-2, Sasaran-1	Kecamatan
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-4	DP3AP2KB
			Program Perlindungan Perempuan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-4	DP3AP2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-2	DP3AP2KB



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
8	Desa Pintar Desa Digital	Program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet untuk pengembangan potensi desa, serta percepatan akses dan layanan informasi, sehingga dapat memperkuat pertumbuhan pada sektor ekonomi kreatif.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Visi, Misi-5, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Kominfo
		Meningkatkan daya saing desa	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-5	Bappeda dan Litbang
		Meningkatkan konektivitas khususnya akses informasi dan pemasaran	Program Pengembangan UMKM	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Dinas UKM dan Perindagkop
		Meningkatkan kualitas pelayanan Desa	Program Penataan Desa	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-2	DPMD
			Program Pendaftaran Penduduk	Visi, Misi-5, Tujuan-2, Sasaran-1	Disdukcapil
			Program Pencatatan Sipil	Visi, Misi-5, Tujuan-2, Sasaran-1	Disdukcapil
9	Bulungan Reaksi Cepat	program layanan yang bertujuan memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat mendesak, di antaranya masalah kesehatan, masalah kemanusiaan, hingga masalah kedaruratan lainnya yang terkait dengan pelayanan publik	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Visi, Misi-4, Tujuan-1, Sasaran-1	Satpol PP dan PMK
		Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun penyampaian permasalahan yang bersifat darurat	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-4	DP3AP2KB
		Menghadirkan negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bulungan lebih dekat dan cepat tanggap terhadap permasalahan masyarakat	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-4	DP3AP2KB



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
			Program Perlindungan Perempuan	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-4	DP3AP2KB
			Program Penanggulangan Bencana	Visi, Misi-4, Tujuan-1, Sasaran-1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-2	Dinas Kesehatan
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Visi, Misi-4, Tujuan-1, Sasaran-1	Satpol PP dan PMK
			Program Penanganan Bencana	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-1	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-1	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-1	Dinas Sosial
			Program Penyelenggaraan Jalan	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)	Program pengentasan kemiskinan dengan memperkuat UMKM dengan memberikan keringan dalam proses administrasi terkait dengan UMKM yang lebih sederhana	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-4	Dinas UKM dan Perindagkop
		Meningkatkan perekonomian masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-1	Dinas Sosial
		Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru yang terintegrasi dengan visi dan misi			



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
11	Mitra Bulungan Berdaulat	Program penerapan konsep pentahelix yang melibatkan birokrasi, komunitas masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, serta media dalam mewujudkan visi Bulungan Berdaulat Pangan berbasis Kearifan Lokal	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Visi, Misi-5, Tujuan-1, Sasaran-1	Bappeda dan Litbang
		Mitra Bulungan Berdaulat dapat berperan sebagai sumber pendanaan dalam program-program pemberdayaan masyarakat, maupun berperan sebagai pelaksana terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Visi, Misi-2, Tujuan-1, Sasaran-5	Bappeda dan Litbang
		Meningkatkan perekonomian masyarakat			
		Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru yang terintegrasi dengan upaya mewujudkan bulungan berdaulat pangan berbasis kearifan lokal			
		Menjadi sumber inovasi pembiayaan untuk pembangunan Kabupaten Bulungan			
12	Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal	program pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan dan mempertahankan fungsi ekologi guna menjaga kelestarian lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-3	Dinas PU PR
		Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang ramah lingkungan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Mempertahankan fungsi ekologi guna kelestarian lingkungan hidup	Program Pemasaran Pariwisata	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Menumbuhkan destinasi wisata yang dapat menjadi penciri Kabupaten Bulungan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
			Program Pengembangan Kebudayaan	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi)	program yang menjadi bagian dari ADD yang merupakan manifestasi dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melestarikan lingkungan hidup. Penetapan indikator DaPorMasBerNer (Alokasi Dasar, Alokasi Proporsional, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Berbasis Kinerja)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup
		Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup, dan hutan kemasayakatan antara Pemeirntah Kabupaten Bulungan dengan Pemerintahan Desa	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup
		Mempertahankan fungsi ekologi sebagai bentuk pelestarian lingkungan hidup	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-2	Dinas PMD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Visi, Misi-5, Tujuan-1, Sasaran-1	BPKAD
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup



No	Program Strategis	Deskripsi	Program Sesuai Permendagri	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Utama
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang Terkait Dengan PPLH	Visi, Misi-4, Tujuan-2, Sasaran-1	
14	Desa Inovatif	Pemberian insentif pada desa yang memiliki program inovatif dan strategis dalam upaya mendukung perwujudan visi pembangunan Kabupaten Bulungan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan sinergi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan Pemerintah Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Visi, Misi-4, Tujuan-3, Sasaran-2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
15	Mal Pelayanan Publik	Perwujudan pelayanan satu pintu untuk seluruh jenis produk layanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan	Program Pendaftaran Penduduk	Visi, Misi-5, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Visi, Misi-5, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Visi, Misi-5, Tujuan-2, Sasaran-1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Visi, Misi-3, Tujuan-1, Sasaran-6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



5.5. Penanganan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Program Prioritas

Pemerintah Kabupaten Bulungan mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi daerah. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Demikian juga masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan peraturan untuk pemulihan ekonomi yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Lima tahun ke depan telah ditetapkan lima belas program prioritas yang di dalamnya secara substansi bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah yang dapat berimbas secara nasional. Di antaranya program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bulungan yang terkait langsung dalam program pemulihan ekonomi nasional adalah Mandau Tani, Satu Desa Satu Produk, Mandiri dan Terampil Bulungan Berdaulat,

Penguatan dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 melalui program prioritas Bupati sebagai berikut :

1. Penguatan petani melalui bantuan sarana produksi pertanian
2. Penguatan Produksi Petani, melalui jaminan hasil produksi pertanian.
3. Pengembangan potensi desa untuk menciptakan satu produk unggulan.
4. Pelatihan tenaga kerja untuk pengolahan berbasis sumber daya alam
5. Bantuan sarana produksi bagi UMKM.
6. Gerakan Beli Produk Lokal.
7. Jaringan Kemitraan Pemasaran dengan swalayan, perusahaan dan konsumen lainnya.
8. Pemberian fasilitasi kemudahan Pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Program prioritas Bulungan Reaksi Cepat melalui Penguatan Sistem Kesehatan dan Penanganan Pandemi Covid-19, sebagai berikut :

1. Vaksinasi Covid-19 gratis.
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.



3. Jaminan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4. Membudayakan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui Program GERMAS.
5. Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah.
6. Jaringan Pengaman Sosial Pasca Pandemi Covid-19, melalui Bantuan Sembako berbasis data terpadu.



Tabel 5.5. Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bulungan

Visi : "Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju, dan Sejahtera"

Kode	Uraian Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
		Uraian	Satuan	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1	Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang Berbasis Kearifan Lokal									
M-1.T.1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	2.865.138	3.151.651	3.466.816	3.813.498	4.194.848	4.614.333	4.614.333
M-1.T.1.S1	Mewujudkan Peningkatan Produktifitas Pertanian	Peningkatan Produktifitas Pertanian	%	5,30	5,59	5,88	6,17	6,46	6,75	6,75
M-1.T.1.S2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Angka	102	105	108	110	113	115	115
M-1.T.2	Mewujudkan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,50	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
M-1.T.2.S1	Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	77,78	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
		Stok Cadangan Pangan	Kilogram	n/a	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Misi 2	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing									
M-2.T.1	Mewujudkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,10	71,48	71,86	72,24	72,62	73,00	73,00
M-2.T.1.S1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pengetahuan	Angka	0,66	0,67	0,67	0,68	0,68	0,69	0,69
M-2.T.1.S2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Indeks Kesehatan	Angka	0,81	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85
M-2.T.1.S3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	15	15	15	15	15	15	15
M-2.T.1.S4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Angka	85,10	85,48	85,86	86,24	86,62	87,00	87,00
M-2.T.1.S5	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,69	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,20
		Indeks Inovasi Daerah	Klaster	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif



Kode	Uraian Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
		Uraian	Satuan	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 3	Memantapkan Infrastruktur Sebagai Pendukung Utama Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Pelayanan Dasar Masyarakat									
M-3.T.1	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,67	4,82	5,10	5,25	5,32	5,48	5,48
M-3.T.1.S1	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	%	51,45	53,57	56,19	59,80	62,94	65,46	65,46
M-3.T.1.S2	Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak	Persentase kawasan permukiman yang layak	%	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41
M-3.T.1.S3	Terciptanya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase realisasi rencana struktur ruang	%	95,00	95,00	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00
		Persentase realisasi rencana pola ruang	%	95,00	95,00	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00
M-3.T.1.S4	Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45	4,28	4,11	3,96	3,77	3,61	3,61
M-3.T.1.S5	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan PAD	%	11,54	11,70	12,00	12,25	12,50	12,80	12,80
M-3.T.1.S6	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi investasi di daerah	Trilyun Rupiah	1,50	1,70	2,00	2,30	3,00	3,50	3,50
M-3.T.1.S7	Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	32.682	33.387	34.108	34.845	35.597	36.366	36.366
		Persentase objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Bulungan yang dilestarikan	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Misi 4	Memajukan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang Ramah Lingkungan									
M-4.T.1	Terwujudnya Masyarakat yang Tertib dan Aman	Angka Kriminalitas	Angka	194	172	150	168	106	84	84
M-4.T.1.S1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	194	172	150	168	106	84	84
M-4.T.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76.34 (Baik)	76.35 (Baik)	76.36 (Baik)	76.37 (Baik)	76.37 (Baik)	76.37 (Baik)	76.37 (Baik)
M-4.T.2.S1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	85,04 (Baik)	85,04 (Baik)	85,04 (Baik)	87,35 (Baik)	87,35 (Baik)	87,35 (Baik)	87,35 (Baik)
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	50 (Sedang)	54,92 (Sedang)	55,02 (Sedang)	55,12 (Sedang)	55,12 (Sedang)	55,12 (Sedang)	55,12 (Sedang)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	96,08 (Sangat Baik)						



Kode	Uraian Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
		Uraian	Satuan	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
M-4.T.3	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,290	0,290	0,289	0,288	0,287	0,286	0,286
M-4.T.3.S1	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	9,02	8,60	8,20	7,80	7,40	7,00	7,00
M-4.T.3.S2	Meningkatnya kemandirian desa	Status Desa	Status	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju	Mandiri	Mandiri
Misi 5	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keuangan Daerah yang Sehat, dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan untuk Mendorong Pembangunan Kabupaten Bulungan									
M-5.T.1	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
M-5.T.1.S1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	B	B	BB	BB	BB
		Nilai / Predikat SAKIP	Predikat	B	B	BB	BB	BB	A	A
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Indeks Manajemen Resiko	Indeks	n/a	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
		Level Maturitas SPIP	Level	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Indeks	n/a	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	n/a	B	B	B	A	A	A
M-5.T.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n/a	2,20	2,50	2,80	3,00	3,50	3,50
M-5.T.2.S1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00



BAB VI

Strategi, Arah Kebijakan, Indikasi Program dan Pendanaan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya **manajemen strategis** yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan **untuk mencapai visi dan misi** kepala daerah melalui **pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada**. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, **strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah**.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang **difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran** pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

6.1 Capaian dan Rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Bulungan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dikenal juga sebagai agenda 2030, berlaku hingga tahun 2030, TPB/SDGs memuat 17 Tujuan 169 Target dan 240.

Indikator sebagai agenda SDGs Global dan disepakati berlaku per 1 Januari 2016 atau pasca berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs), agenda pembangunan TPB menjadi lebih komprehensif, inklusif, dengan target yang lebih



progresif dan memuat cara-cara pelaksanaan. Pada dokumen ini, penilaian capaian indikator TPB dilakukan guna mengidentifikasi isu strategis yang akan menjadi fokus utama pada saat penyusunan alternatif dan rekomendasi skenario dengan upaya tambahan.

TPB secara kebijakan ada pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Prepres ini akan dilakukan pengkajian pada pembuatan KLHS RPJMD dengan menganalisis pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Kemudian membuat rumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.

Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD yaitu sampai dengan tahun 2026 dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan sebagaimana dimaksud diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

6.1.1 Gambaran Keuangan dalam Pencapaian Indikator TPB

6.1.1.1 Rencana Aksi Daerah TPB Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan telah melakukan penyusunan rencana aksi daerah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Tahun 2018 -2021 dengan laporan final dikeluarkan pada bulan September 2017 bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan (PSEKP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jika merujuk pada Peraturan Presiden RI No.59 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017 maka kemungkinan besar RAN TPB Kabupaten Bulungan ini sudah merujuk aturan tersebut. Berdasarkan Analisis yang dilakukan maka kriteria pembangunan yang paling besar adalah Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Kemitraan seperti pada grafik di bawah ini:



Grafik 6.1 Prioritas Pembangunan berdasarkan Pilar TPB dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2021-2026

Sedangkan untuk isu sosial memprioritaskan pada kesehatan dan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, pendidikan bermutu, mengakhiri kelaparan dan kesetaraan gender. Secara lebih sederhana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 6.2 Prioritas Pembangunan Sosial dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2021-2026

Prioritas pembangunan sosial disimpulkan bahwa tujuan 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang paling mendapat prioritas dalam pembangunan

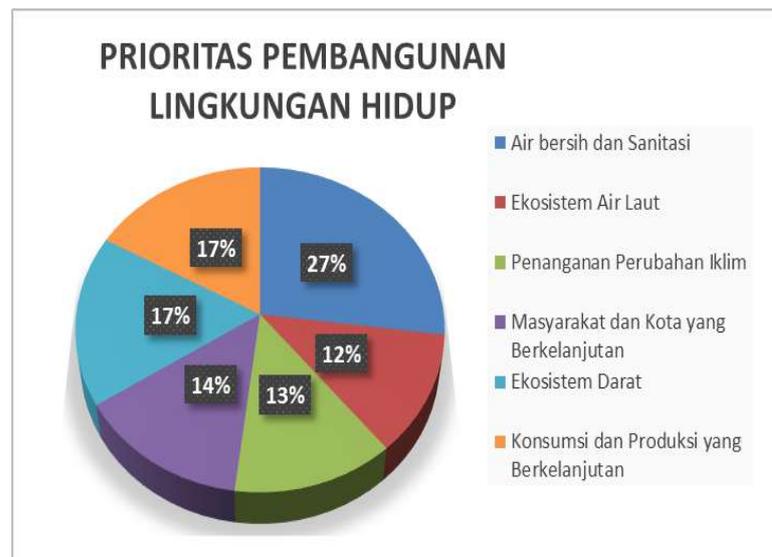


ekonomi daerah Kabupaten Bulungan. Adapun secara ringkas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 6.3 Prioritas Pembangunan Ekonomi dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2021-2026

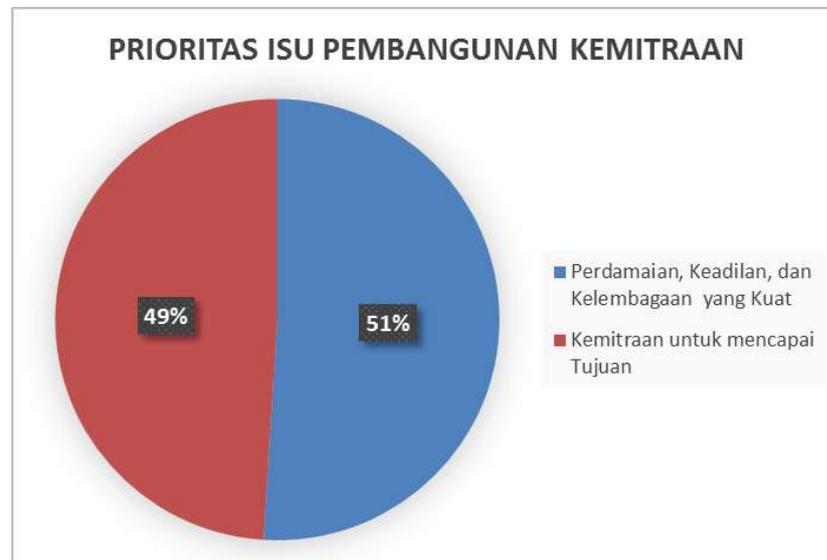
Tujuan 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi yang paling mendapat prioritas dalam pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Bulungan. Secara ringkas prioritas isu lingkungan hidup dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 6.4 Prioritas Pembangunan Lingkungan Hidup dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2021-2026

Prioritas pembangunan untuk isu kemitraan yaitu tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat. Secara lebih ringkas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 6.5 Prioritas Pembangunan Kemitraan dalam RAD TPB Kabupaten Bulungan

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2021-2026

Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan pembagian kerja kepada masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Bulungan. Pembagian kerja ditanggung jawab oleh satu OPD dengan beberapa OPD lainnya sebagai pendukung. Berikut di bawah ini tabel sinergis antar OPD dalam pencapaian TPB.

Tabel 6.1 Sinergitas Perangkat Daerah dalam Pencapaian TPB

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Instansi Pelaksana Program/Kegiatan
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun	Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DP3A2KB, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, BPBD



No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Instansi Pelaksana Program/Kegiatan
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU dan PR, DP3A2KB, Badan Lingkungan Hidup, BPBD
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DP3A2KB, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU dan PR, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP3A2KB, Dinas Sosial
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	DP3A2KB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesbangpol, Dinas Kesehatan
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Dinas PU dan PR, DP3A2KB, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Dinas PU dan PR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pdan PR, DP3A2KB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, BPBD,



No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Instansi Pelaksana Program/Kegiatan
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPT
9.	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	Dinas PU dan PR, Disperindagkop UKM, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Badan Pemberdayaan masyarakat Desa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10.	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan masyarakat Desa, Disperindagkop UKM, DP3A2KB, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11.	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Dinas PU dan PR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Disnakertrans, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, BPBD, DP3A2KB, Badan Lingkungan Hidup
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU dan PR, Badan Lingkungan Hidup, BPBD
13.	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Badan Lingkungan Hidup, BPBD
14.	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	Dinas Perikanan, Badan Lingkungan Hidup
15.	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan	Dinas Perikanan, Badan Lingkungan Hidup



No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Instansi Pelaksana Program/Kegiatan
	degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	
16.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	DP3A2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Kesbangpol, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Seluruh Perangkat Daerah didukung oleh BPS, Perbankan (Bank Umum, Bank Komersial dan Bank Indonesia), Pengusaha, Filantropi, dan Akademisi

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2021-2026

6.1.2 Keuangan Daerah

Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dengan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : Gambaran mengenai perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 5 tahun (2014-2018) dapat dilihat pada Tabel 2. Analisis terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

1. Total pendapatan cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 8%. Penurunan ini adanya kecenderungan penurunan transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi;
2. Pendapatan asli daerah (PAD) cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 2%. Semua unsur PAD menunjukkan trend menurun, kecuali pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan secara signifikan, walaupun masih belum mampu menjadikan PAD total meningkat;
3. Pendapatan transfer cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 9%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam) secara signifikan.



Di sisi lain, walaupun adanya kenaikan unsur Dana Perimbangan seperti: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, tetapi tidak dapat menjadikan total transfer meningkat. Selain itu, transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan juga cenderung menurun, sehingga memperbesar penurunan transfer secara total;

4. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Dana Hibah cenderung statis;
5. Total Belanja cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 12%. Penurunan ini karena Belanja Tidak Langsung turun rata-rata sebesar 4% dan Belanja Langsung turun rata-rata 18%. Penurunan Belanja Tidak Langsung didominasi oleh penurunan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, walaupun adanya kenaikan secara signifikan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa. Penurunan Belanja Langsung didominasi oleh penurunan Belanja Modal, selain penurunan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.
6. Defisit Anggaran (Pendapatan dikurangi Belanja) cenderung menurun rata-rata 40%. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya kekurangan Pendapatan untuk menutupi Belanja.
7. Dari sisi Pembiayaan, Pembiayaan Neto setiap tahun menurun, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cenderung menurun. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya penggunaan anggaran pembangunan.

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulungan

6.2.1. Perumusan Strategi Kebijakan

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulungan ini yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kabupaten Bulungan. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi



kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Bulungan harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity (WO)* yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Bulungan menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi *WO* merupakan alternative strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu.

semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*). Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulungan disajikan pada Tabel 6.2.



Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Bulungan 2021-2026

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Kedaulatan pangan yang berbasis kearifan lokal		
Tujuan 1: Meningkatnya daya saing sektor pertanian dalam arti luas	1.1 Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian	1. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dengan kualitas prima melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian berbasis kearifan dan potensi lokal 2. Meningkatkan produktifitas perkebunan melalui intensifikasi dan diversifikasi perkebunan berbasis kearifan dan potensi lokal
	1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani	3. Pengembangan pertanian untuk meningkatkan pengelolaan potensi pertanian secara optimal dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, pendapatan, dan kesejahteraan
		4. Meningkatkan produksi dan produktifitas pengolahan pertanian
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian pangan	1.3 Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan	5. Mengembangkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga keamanan serta ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan akses pangan serta distribusi pangan yang terintegrasi baik untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun eksternal
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing		
Tujuan 1: Mewujudkan kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berdaya Saing	2.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1. Mempercepat pemerataan Pendidikan dasar Wajib 9 tahun
	2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan secara partisipatif dan preventif serta peningkatan dalam penyehatan lingkungan 3. Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, profesional, dan handal 4. Meningkatkan layanan fasilitas



VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit
	2.3 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	5. Meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan
	2.4 Meningkatnya kesetaraan Gender	6. Meningkatkan peran perempuan dalam Pemerintahan dan Sektor Swasta
	2.5 Meningkatnya daya saing daerah	7. Meningkatkan kegiatan inovasi daerah
Misi 3 : Memantapkan infrastruktur sebagai pendukung utama pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat		
Tujuan 1: Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	3.1 Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi	1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dalam menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah
	3.2 Meningkatnya pengelolaan Kawasan permukiman layak	2. Mendorong upaya pemenuhan kebutuhan permukiman masyarakat dengan penyediaan infrastruktur pendukungnya yang layak
	3.3 Terciptanya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	3. Menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
	3.4. Meningkatnya peluang kerja dan lapangan pekerjaan	4. Menumbuh kembangkan kreativitas dan Inovasi masyarakat
	3.5 Meningkatnya pendapatan daerah	5. Optimalisasi pendapatan asli daerah dari berbagai sumber, baik dari sumber daya alam pertambangan mineral dan gas maupun dari sumber yang lainnya
	3.6 Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	6. Mewujudkan peningkatan nilai investasi untuk pembangunan daerah
	3.7 Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	7. Meningkatkan pengembangan pariwisata daerah yang berbasis eco-tourism



VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 4 : Memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang ramah lingkungan		
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman	4.1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat	1. Meningkatkan keberdayaan dan kepedulian masyarakat dalam perilaku hidup saling menghormati 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan
Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4.2 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3. Meningkatkan kuantitas dan akses masyarakat terhadap ketersediaan hutan kota 4. Menurunkan tingkat deforestasi hutan serta penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan hutan
Tujuan 3: Menurunnya ketimpangan pendapatan	4.3 Menurunnya kemiskinan	5. Mempercepat penanggulangan kemiskinan
	4.4 Meningkatkan kemandirian desa	6. Meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan sektor produksi unggulan desa
Misi 5 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan		
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel	5.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien	1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam semua tingkat Pemerintahan
Tujuan 2: Meningkatkan pelayanan publik	5.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	2. Peningkatan aksesibilitas pelayanan berbasis teknologi



6.2.2. Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bulungan dalam 5 (lima) tahun kedepan dijalankan berdasarkan capaian tahunan dengan tema pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai arahan bagi penyusunan dokumen RPJMD 2021-2026 ini. Tema tahunan pembangunan merupakan penekanan fokus perhatian berupa kebijakan/rencana/program pembangunan tiap tahunnya yang ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap pencapaian visi dan misi dengan tetap memperhatikan keterpaduan pembangunan multisektor.

Pentahapan Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1) Tema Pembangunan Tahun 2021

Tahun 2021 sebagai tahun masa transisi pertama dalam masa pemerintahan Kabupaten Bulungan sehingga diperlukan konsolidasi kebijakan pembangunan secara hirarkis baik vertikal dengan Provinsi Kalimantan Utara dan horizontal dalam Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka menjamin sinergisitas pelaksanaan pembangunan, kemudian re-orientasi dan re-strukturisasi infrastruktur pelaksanaan pembangunan diarahkan pada penguatan dan penyiapan untuk mewujudkan pelaksanaan serangkaian program prioritas pembangunan yang direncanakan, terutama dalam kerangka pencapaian “Bulungan Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera”. Dengan demikian tema/fokus pembangunan pada tahun 2021 adalah **“Konsolidasi kebijakan pembangunan daerah untuk reorientasi serta restrukturisasi strategi dalam rangka persiapan dan penguatan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bulungan berdaulat pangan, maju, dan sejahtera”**. Keadaan ini sekaligus menjadi penghantar untuk memasuki tema pembangunan tahun berikutnya.

2) Tema Pembangunan Tahun 2022

Tahun 2022 diarahkan pada *Good Governance* dalam rangka menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, keadaan ini sekaligus menjadi langkah awal dalam mendukung pencapaian Misi ke-5 yaitu “Memperkuat **tata kelola pemerintahan** yang baik, **keuangan daerah** yang sehat, dan **inovasi pembiayaan pembangunan** untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Bulungan”. Dengan demikian tema/fokus pembangunan pada tahun 2022 adalah **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Mendorong Iklim Pembiayaan Pembangunan Inovatif Sebagai Pondasi Menuju Kedaulatan Pangan Kabupaten Bulungan”** sehingga mampu mendukung serangkaian program pembangunan yang telah direncanakan secara berkesinambungan dengan muara Kedaulatan Pangan.



3) Tema Pembangunan Tahun 2023

Tahun 2023 diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas, untuk itu perbaikan pada aspek infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan terampil dan menjadi aset daerah yang berimplikasi pada daya saing, dalam perwujudannya meliputi aspek Pendidikan baik secara formal maupun non-formal, aspek Kesehatan masyarakat dan mendorong partisipasi kolaborasi serta elaborasi secara aktif seluruh elemen yang terkait dan sinergis. Dengan demikian tema/fokus pembangunan Tahun 2023 adalah “ **Peningkatan kualitas SDM Unggul Sebagai Penggerak Pembangunan Kedaulatan Pangan**”. Keadaan ini sejalan dengan pencapaian Misi ke-2 yaitu “**Meningkatkan kualitas SDM** yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing”.

4) Tema Pembangunan Tahun 2024

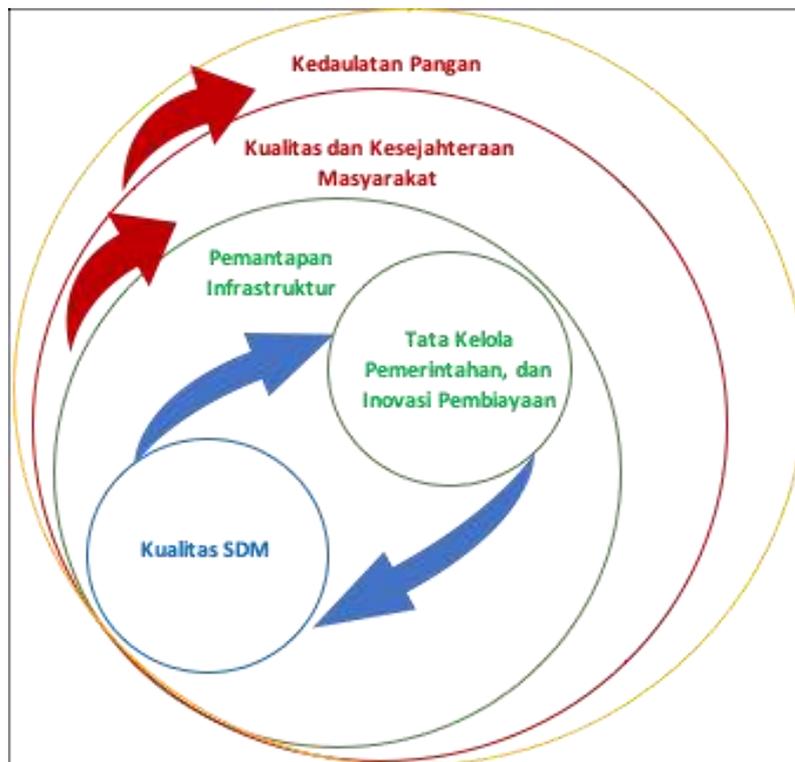
Tema/fokus Pembangunan Tahun 2024 diarahkan pada “**Pemantapan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi berbasis digital sebagai katalisator kedaulatan pangan Kabupaten Bulungan**”. Pada tahap ini konektivitas antar wilayah diakomodasi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian melalui pemanfaatan aset SDM yang telah di inisiasi pada tahun sebelumnya selanjutnya akan menjadi modal dalam rangka Penguatan kewirausahaan dan inkubasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kopertasi yang memanfaatkan teknologi digital. Keadaan ini sejalan untuk pencapaian Misi ke-3 yaitu “Memantapkan **infrastruktur** sebagai pendorong utama **pengembangan ekonomi** rakyat dan **pelayanan dasar** masyarakat”.

5) Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema/fokus Pembangunan pada Tahun 2025 adalah “**Peningkatan dan pemantapan potensi unggulan wilayah dengan pemanfaatan ekonomi digital**”, melalui perbaikan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah mendorong intensitas arus pergerakan orang, barang dan jasa yang berimplikasi pada pembangunan ekonomi, maka prospek tersebut menjadi keunggulan daerah melalui peningkatan upaya produktif pada Pemanfaatan dan Pengolahan sumber daya alam yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Tema ini juga meliputi aspek energi baru terbarukan (EBT) melalui orientasi pembangunan yang ramah lingkungan. Pada tahapan ini merupakan perwujudan untuk pencapaian Misi ke-4 yaitu “**Memajukan kualitas dan kesejahteraan masyarakat** melalui pemanfaatan **sumber daya alam** yang ramah lingkungan”.

6) Tema Pembangunan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun akhir dalam masa pelaksanaan program pembangunan 5 tahun, dengan demikian Tema/fokus Pembangunan pada Tahun 2026 adalah “**Perwujudan kedaulatan pangan, maju, dan sejahtera**”. Pada tahapan ini perwujudan capaian sudah tercipta ketahanan pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri serta menjadi peyangga bagi Ibu Kota Negara. keadaan ini sekaligus menjadi pencapaian untuk Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan **kedaulatan pangan** berbasiskan kearifan lokal”,



Gambar 6.1 Proses Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kabupten Bulungan 2021-2026

Tabel 6.3 Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Tahun	Implementasi Misi	Arah Kebijakan Tahunan	Tema Tahunan
2022	MISI 5: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Bulungan	Menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan	Penguatan tata kelola pemerintahan untuk inovasi pembangunan sebagai pondasi kedaulatan pangan Kabupaten Bulungan
2023	MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas SDM menjadi tenaga kerja yang terampil, ahli, dan professional	Peningkatan kualitas SDM unggul sebagai penggerak kedaulatan pangan Kabupaten Bulungan
2024	MISI 3: Memantapkan infrastruktur sebagai pendorong utama pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi baru Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kopertasi yang memanfaatkan teknologi digital	Pemantapan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi berbasis digital sebagai katalisator kedaulatan pangan kabupaten Bulungan



2025	MISI 4: Memajukan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan	Pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat melalui peningkatan energi batu terbarukan	Peningkatan dan pemantapan potensi unggulan wilayah dengan pemanfaatan ekonomi digital
2026	Misi 1: Mewujudkan kedaulatan pangan berbasiskan kearifan lokal	Menciptakan ketahanan pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri serta menjadi peyangga bagi Ibu Kota Negara	Perwujudan kedaulatan pangan, maju, dan sejahtera

**Tabel 6.4**Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Bulungan

Tahun 2022	Tahun-2023	Tahun-2024	Tahun-2025	Tahun-2026
<p>Terkait Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1</p> <p>a. Menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan</p> <p>b. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan</p> <p>c. Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja</p> <p>d. Memperkuat basis data dan informasi sebagai landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang handal dan berkualitas</p>	<p>Terkait Misi 2, Tujuan 1</p> <p>a. Peningkatan kualitas pendidikan dan berdaya saing serta mendorong penguatan muatan lokal sebagai salah satu media Pendidikan karakter, entrepreneurship, dan keahlian yang berbasis potensi sektor ekonomi lokal</p> <p>b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dasar</p> <p>c. Pengembangan Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal</p> <p>d. Penguatan karakter, kreatifitas, inovasi, pengembangan diri, dan prestasi untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi</p>	<p>Terkait Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1</p> <p>a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat dna pusat pertumbuhan ekonomi baru</p> <p>b. Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap hingga akses tingkat pedesaan guna menunjang aktifitas perekonomian masyarakat</p> <p>c. Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat melalui peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)</p> <p>Terkait Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 2</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat</p>	<p>Terkait Misi 4, Tujuan 2, Sasaran 1</p> <p>a. Meningkatkan law enforcement terhadap pelanggaran pemanfaatan lingkungan</p> <p>b. Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan pentingnya pelestarian lingkungan hidup</p> <p>c. Melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan Kawasan RTH dan Hutan Kota dari potensi perusakan atau pengurangan luasan</p> <p>d. Mengembangkan hutan kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat namun tetap terjaga kelestariannya</p> <p>e. Mengembangkan kolaborasi layanan</p>	<p>Terkait Misi 1, tujuan 1, Sasaran 1</p> <p>a. Mendorong pemanfaatan mekanisasi peralatan pertanian dalam usaha pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi dalam pertanian dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian</p> <p>c. Mengembangkan sarana dan prasarana perikanan</p> <p>d. Mengembangkan jaringan pemasaran hasil produksi perikanan</p> <p>e. Mendorong pemanfaatan teknologi pertanian perkebunan dalam meningkatkan produktifitas perkebunan</p>



Tahun 2022	Tahun-2023	Tahun-2024	Tahun-2025	Tahun-2026
<p>e. Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah</p> <p>f. Penyempurnaan sistem manajemen Pemerintahan dan Pelaporan Kinerja</p> <p>g. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien</p> <p>h. Penguatan kapasitas aparatur agar mampu melakukan inovasi dalam tugas dan fungsinya</p> <p>i. Mewujudkan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional, ramah, dan cerdas.</p> <p>Terkait Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 5</p> <p>a. Pembentukan BUMD Pertambangan Mineral dan Gas</p> <p>b. Kerjasama pengembangan investasi daerah dalam bidang pertambangan</p>	<p>e. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan</p> <p>f. Peningkatan peran serta sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Bulungan</p> <p>g. Peningkatan beasiswa vokasi yang bersumber dari APBD dan non-APBD</p> <p>h. Peningkatan keterlibatan pemuda dalam pelestarian seni dan budaya</p> <p>i. Peningkatan kompetensi pendidik non-formal keagamaan</p> <p>Terkait Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 2</p> <p>a. Membangun kemitraan dengan kelompok swadaya masyarakat di bidang kesehatan masyarakat</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan dan penyuluhan</p>	<p>khususnya ekonomi menengah kebawah</p> <p>b. Penyediaan infrastruktur pendukung permukiman yang layak dan berkualitas, antara lain pemenuhan penyediaan air bersih dan sanitasi</p> <p>Terkait Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 3</p> <p>a. Menjamin ketersediaan dokumen/instrument rencana tata ruang sesuai ketentuan</p> <p>b. Menyelaraskan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang</p> <p>c. Pembangunan yang selalu taat aturan pemanfaatan ruang dan syarat perijinan</p>	<p>peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui pemanfaatan hutan kota untuk kegiatan olahraga</p> <p>f. Mengembangkan RTH di Kawasan perkotaan Tanjung Selor</p> <p>g. Mengembangkan Kawasan hutan kota yang dapat diakses serta dimanfaatkan masyarakat</p> <p>Terkait Misi 4, Tujuan 3, Sasaran 1</p> <p>a. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat desa melalui program pendampingan oleh fasilitator ataupun akademisi</p> <p>Terkait Misi 4, Tujuan 3, Sasaran 2</p> <p>b. Mengembangkan program satu desa satu produksi</p> <p>c. Peningkatan swadaya masyarakat dalam</p>	<p>f. Peningkatan sarana perkebunan yang layak dan memadai</p> <p>g. Peningkatan penelitian dan pengembangan dalam teknologi perkebunan</p> <p>Terkait Misi 1, tujuan 1, Sasaran 2</p> <p>a. Peningkatan kompetensi petani melalui pendampingan bagi petani terutama dalam menyerap perkembangan teknologi pertanian terbaru</p> <p>b. Mendorong petani untuk dapat dan mampu mengembangkan usaha pertanian</p> <p>c. Meningkatkan kemandirian dan produktifitas usaha bidang pertanian</p> <p>Terkait Misi 1, Tujuan 2, Sasaran 1</p> <p>a. Menciptakan ketahanan pangan daerah selain untuk memenuhi kebutuhan pangan</p>



Tahun 2022	Tahun-2023	Tahun-2024	Tahun-2025	Tahun-2026
<p>mineral dan migas</p> <p>c. Pendataan potensi pendapatan asli daerah</p> <p>d. Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah</p>	<p>tentang kesehatan masyarakat hingga perangkat Pemerintahan dengan hirarki terkecil dan juga hingga level keluarga</p> <p>c. Mendorong tumbuh kembangnya upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dna peningkatan upaya penyehatan lingkungan</p> <p><i>Terkait Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 3</i></p> <p>a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan melalui kemandirian dalam kegiatan peningkatan kebugaran melalui olahraga</p> <p>b. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau</p> <p>c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas</p>		<p>pembangunan desa secara menyeluruh</p>	<p>secara mandiri juga menjadi penyangga bagi kebutuhan Ibu Kota Negara</p> <p>b. Peningkatan produksi tanaman pangan, pemasaran, serta penerapan teknologi</p> <p>c. Pemantanan dan kemandirian pangan</p>



Tahun 2022	Tahun-2023	Tahun-2024	Tahun-2025	Tahun-2026
	<p>olahraga prestasi secara berkelanjutan</p> <p>d. Penanganan permasalahan sosial anak secara terpadu untuk menurunkan angka permasalahan</p> <p>e. Peningkatan layanan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial anak</p> <p>f. Peningkatan prestasi pemuda baik internal maupun eksternal</p> <p>g. Penurunan angka keterlibatan pemuda dalam penyalahgunaan narkoba</p> <p>Terkait Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 4</p> <p>a. Meningkatkan Peran wanita dalam pembangunan daerah baik secara strukturan dan fungsional dalam kelembagaan Pemerintahan maupun dalam bidang lainnya yang mendukung pembangunan</p>			



Tahun 2022	Tahun-2023	Tahun-2024	Tahun-2025	Tahun-2026
	Terkait Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 5 a. Pengembangan inovasi daerah dalam rangka peningkatan skor dan peringkat inovasi daerah Kabupaten Bulungan			
Terkait Misi 5, Tujuan 2, Sasaran 1 a. Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik b. Mengembangkan pelayanan terhadap publik dengan membangun sistem online dan mal bagi pelayanan publik Penguatan sistem pengendalian internal Pemerintahan	Terkait Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1 a. Meningkatkan Sinergitas dengan Forkompinda dalam membangun stabilitas keamanan daerah b. Meningkatkan peranan aparaturnya dalam menjamin ketentraman dan ketertiban di masyarakat		Terkait Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 7 a. Mengembangkan destinasi wisata unggulan baru yang berbasis budaya b. Meningkatkan promosi pariwisata hingga tingkat nasional	
	Terkait Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 4 a. Peningkatan kualitas SDM menjadi tenaga kerja yang terampil, ahli dan profesional b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas serta			



Tahun 2022	Tahun-2023	Tahun-2024	Tahun-2025	Tahun-2026
	<p>keterampilan angkatan kerja di Kabupaten Bulungan yang berbasis kebutuhan sektor usaha</p> <p>c. Mengembangkan keahlian angkatan kerja yang berbasis teknologi digital Mengembangkan inkubator bisnis daerah</p> <p>Terkait Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 6</p> <p>a. Penguatan investasi melalui promosi kegiatan yang layak secara ekonomi dan finansial</p> <p>b. Deregulasi dan debirokratisasi bagi investasi daerah</p> <p>c. Pengarahan investasi yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal</p>			

Sumber : Hasil Perumusan, 2021



6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bulungan dalam Jangka Menengah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Bupati terpilih Kabupaten Bulungan dilantik dan mulai menjabat pada tahun anggaran berjalan 2021, oleh karena itu meskipun program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun anggaran namun capaian awal kinerja ditetapkan pada tahun 2022 dengan kegiatan prioritas dicanangkan mulai diselaraskan dengan tahun anggaran 2021, dan diselesaikan sampai dengan Tahun 2026, sehingga RPJMD ini menjadi RPJMD untuk tahun 2021 hingga 2026. Program Pembangunan disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Bulungan juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Strategi Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bulungan dirumuskan dalam bagian ini yang dijabarkan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Adapun keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, beserta program dalam RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 6.5. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bulungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Misi 1 : Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang Berbasis Kearifan Lokal																	
	Tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	2.865.138	3.151.651	28.650,00	3.466.816	30.570,00	3.813.498	32.789,00	4.194.848	37.375,00	4.614.333	36.400,00	4.614.333	165.784,00	
	Sasaran 1 : Mewujudkan Peningkatan Produktifitas Pertanian	Peningkatan Produktifitas Pertanian	%	5,30	5,59	27.220,00	5,88	29.120,00	6,17	31.297,00	6,46	35.860,00	6,75	34.870,00	6,75	158.367,00	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	13,52	15,00	11.380,00	15,79	12.170,00	16,50	13.319,00	20,75	17.146,00	21,75	15.370,00	21,75	69.385,00	DPU & PR
		Prosentase peningkatan luas daerah terlindungi dari banjir dan genangan	%	90,00	95,00		95,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menggunakan alsintan	%	65,00	70,00	6.380,00	75,00	7.260,00	80,00	7.968,00	85,00	8.471,00	90,00	9.010,00	90,00	39.089,00	Dinas Pertanian
		Tersedianya akses jalan untuk mendukung produktivitas pertanian	%	65,00	70,00		72,00		75,00		83,00		85,00		85,00		
		Persentase peningkatan Areal Tanaman Perkebunan	%	65,00	67,00		70,00		72,00		75,00		78,00		78,00		
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan angka kematian ternak	%	80,00	85,00	260,00	90,00	260,00	95,00	269,00	100,00	273,00	100,00	280,00	100,00	1.342,00	Dinas Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kelompok tani dalam penanggulangan hama terpadu	%	70,00	75,00	300,00	80,00	310,00	82,00	318,00	85,00	323,00	88,00	330,00	88,00	1.581,00	Dinas Pertanian
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7.151,44	7.509,01	6.300,00	8.259,91	6.410,00	9.498,89	6.583,00	11.398,67	6.681,00	14.248,34	6.780,00	14.248,34	32.754,00	Dinas Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.180,48	5.439,50	2.160,00	5.983,45	2.270,00	6.880,97	2.383,00	8.257,17	2.502,00	10.321,46	2.630,00	10.321,46	11.945,00	Dinas Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan Perikanan	Ton	143,60	146,47	440,00	149,34	440,00	152,21	457,00	155,09	464,00	157,96	470,00	157,96	2.271,00	Dinas Perikanan
		Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ tahun	64,67	64,80		64,83		64,96		65,09		65,22		65,22		



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Sasaran 2 : Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Angka	102,00	105,00	1.430,00	108,00	1.450,00	110,00	1.492,00	113,00	1.515,00	115,00	1.530,00	115,00	7.417,00	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan bibit unggul dan pupuk pertanian	%	50,00	65,00	750,00	75,00	760,00	80,00	780,00	85,00	792,00	90,00	800,00	90,00	3.882,00	Dinas Pertanian
		Persentase kelompok tani yang menggunakan bibit unggul dan pupuk yang benar	%	80,00	85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase populasi Ternak	%	45,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani mandiri	%	75,00	78,00	680,00	80,00	690,00	83,00	712,00	85,00	723,00	90,00	730,00	90,00	3.535,00	Dinas Pertanian
	Tujuan 2 : Mewujudkan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,50	86,00	1.310,00	87,00	1.340,00	88,00	1.377,00	89,00	1.398,00	90,00	1.420,00	90,00	6.845,00	
	Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	77,78	80,00	1.310,00	85,00	1.340,00	85,00	1.377,00	90,00	1.398,00	90,00	1.420,00	90,00	6.845,00	
		Stok Cadangan Pangan	Kilogram	n/a	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,50	86,00	150,00	87,00	150,00	88,00	154,00	89,00	157,00	90,00	160,00	90,00	771,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Angka	76,22	80,00		82,00		84,00		85,00		87,00		87,00		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan Konsumsi (PHH)	Angka	77,78	80,00	540,00	85,00	550,00	85,00	562,00	90,00	570,00	90,00	580,00	90,00	2.802,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Konsumsi energi	Kkal/kapita/hari	1.862,00	2.000,00		2.000,00		2.100,00		2.100,00		2.200,00		2.200,00		
		Konsumsi protein	Gr/kapita/hari	71,09	74,00		75,00		77,00		79,00		80,00		80,00		
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Laju pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	3,32	3,38	140,00	3,42	150,00	3,45	151,00	3,45	154,00	3,50	160,00	3,50	755,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi masyarakat	%	100,00	100,00	80,00	100,00	80,00	100,00	86,00	100,00	87,00	100,00	90,00	100,00	423,00	Dinas Ketahanan Pangan
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perusahaan besar swasta dan petani swadaya terhadap pengelolaan/usaha perkebunan	%	65,00	70,00	120,00	73,00	130,00	75,00	130,00	80,00	132,00	85,00	130,00	85,00	642,00	Dinas Pertanian



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	5,00	5,00	270,00	5,00	270,00	7,00	281,00	7,00	285,00	10,00	290,00	10,00	1.396,00	Disperindagkop & UKM
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pertumbuhan IKM	%	5,00	5,00	10,00	5,00	10,00	7,00	13,00	7,00	13,00	10,00	10,00	10,00	56,00	Disperindagkop & UKM
JUMLAH BELANJA MISI 1						29.960,00	31.910,00	34.166,00	38.773,00	37.820,00	172.629,00						
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing																	
	Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,10	71,48	322.090,00	71,86	335.925,00	72,24	351.918,00	72,62	366.213,00	73,00	383.180,00	73,00	1.759.326,00	
	Sasaran 1 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pengetahuan	Angka	0,66	0,67	122.040,00	0,67	127.405,00	0,68	133.256,00	0,68	138.739,00	0,69	144.630,00	0,69	666.070,00	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,16	10,00	119.600,00	10,50	124.670,00	11,00	130.233,00	11,50	135.704,00	11,50	141.430,00	11,50	651.637,00	Disdikbud
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,48	13,48		13,49		13,50		13,51		13,52		13,52		
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SD terakreditasi A	%	15,00	17,00	200,00	18,00	235,00	19,00	250,00	20,00	250,00	21,00	250,00	21,00	1.185,00	Disdikbud
		Persentase SMP terakreditasi A	%	12,00	12,00		12,00		13,00		14,00		15,00		15,00		
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi minimal S1	%	32,00	35,00	0,00	38,00	150,00	40,00	200,00	42,00	200,00	45,00	150,00	45,00	700,00	Disdikbud
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Orang/ tahun	5.706,00	7.500,00	740,00	8.500,00	750,00	9.500,00	773,00	10.500,0	785,00	11.500,0	800,00	11.500,00	3.848,00	Disperpus & Arsip
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase hibah bantuan sosial yang tepat sasaran	%	94,00	100,00	1.500,00	100,00	1.600,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	2.000,00	100,00	8.700,00	Sekretariat Daerah
	Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Indeks Kesehatan	Angka	0,81	0,81	197.050,00	0,82	205.470,00	0,83	215.528,00	0,84	224.294,00	0,85	235.320,00	0,85	1.077.662,00	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Serapan belanja BLUD terhadap pendapatan BLUD RSD	%	100,00	100,00	60.000,00	100,00	63.000,00	100,00	67.000,00	100,00	70.000,00	100,00	75.000,00	100,00	335.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	%	85,00	86,00	114.540,00	90,00	119.410,00	93,00	124.745,00	96,00	129.994,00	100,00	135.490,00	100,00	624.179,00	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	%	95,00	96,00		97,00		97,00		97,00		97,00		97,00		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan kompetensi sesuai standar	%	70,00	75,00	16.650,00	80,00	16.950,00	85,00	17.409,00	90,00	17.668,00	100,00	17.930,00	100,00	86.607,00	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tingkat efektivitas pengawasan obat dan makanan	%	60,00	65,00	530,00	70,00	540,00	85,00	553,00	90,00	561,00	100,00	570,00	100,00	2.754,00	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	%	65,00	70,00	810,00	80,00	830,00	85,00	852,00	90,00	865,00	100,00	880,00	100,00	4.237,00	Dinas Kesehatan
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Peserta KB baru terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)	%	43,69	50,00	130,00	65,00	140,00	71,00	140,00	78,00	142,00	84,00	140,00	84,00	692,00	DP3AP2 & KB
		Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	%	9,25	15,00		35,00		48,00		59,00		75,00		75,00		
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Balai yang Dibangun	%	30,00	40,00	4.310,00	48,00	4.520,00	59,00	4.748,00	66,00	4.982,00	74,00	5.230,00	74,00	23.790,00	DP3AP2 & KB
		Persentase Peserta MKJP	%	59,52	65,00		75,00		80,00		87,00		90,00		90,00		
		Persentase Toga, Toma dan Pengelola KB yang mendapatkan pelayanan KIE	%	0,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		
		Persentase Masyarakat yang mendapatkan promosi dan KIE	%	0,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		
		Persentase Capaian Data Keluarga yang Valid	%	0,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB Aktif	%	70,04	65,00	80,00	74,00	80,00	86,00	81,00	90,00	82,00	95,00	80,00	95,00	403,00	DP3AP2 & KB
	Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	15,00	15,00	1.790,00	15,00	1.820,00	15,00	1.868,00	15,00	1.895,00	15,00	1.930,00	15,00	9.303,00	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	45,00	45,00	360,00	46,00	370,00	46,00	377,00	50,00	382,00	50,00	390,00	50,00	1.879,00	Dispora & Par
		Jumlah pemuda berprestasi	Pemuda	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	%	35,00	35,00	1.430,00	36,00	1.450,00	36,00	1.491,00	38,00	1.513,00	38,00	1.540,00	38,00	7.424,00	Dispora & Par
		Jumlah atlet berprestasi	Atlit	8,00	8,00		9,00		9,00		10,00		10,00		10,00		
	Sasaran 4 : Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Angka	85,10	85,48	390,00	85,86	390,00	86,24	404,00	86,62	410,00	87,00	410,00	87,00	2.004,00	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi penguatan pengarusutamaan gender	%	0,00	10,00	110,00	30,00	110,00	45,00	112,00	60,00	113,00	87,00	110,00	87,00	555,00	DP3AP2 & KB
		Persentase Kecamatan yang Mendapat Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	%	30,00	45,00		55,00		65,00		70,00		83,00		83,00		
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase keluarga yang mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	0,00	10,00	30,00	30,00	30,00	50,00	35,00	61,00	35,00	75,00	40,00	75,00	170,00	DP3AP2 & KB
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan Pra Keluarga Sejahtera (KS) dan Keluarga Sejahtera (KS) yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	%	0,38	0,45	80,00	0,50	80,00	0,55	82,00	0,75	84,00	0,80	80,00	0,80	406,00	DP3AP2 & KB
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan / Desa Layak Anak	%	22,00	30,00	170,00	43,00	170,00	55,00	175,00	60,00	178,00	75,00	180,00	75,00	873,00	DP3AP2 & KB
		Persentase Keluarga Bermasalah yang Tertangani melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	60,00	65,00		70,00		70,00		85,00		89,00		89,00		
		Persentase forum anak tingkat kelurahan/desa	%	49,00	60,00		67,00		67,00		67,00		73,00		73,00		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Sasaran 5 : Meningkatkan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,69	2,80	820,00	2,90	840,00	3,00	862,00	3,10	875,00	3,20	890,00	3,20	4.287,00	
		Indeks Inovasi Daerah	Klaster	Inovatif	Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen litbang dengan kebutuhan perencanaan	%	80,00	85,00	820,00	87,00	840,00	90,00	862,00	90,00	875,00	95,00	890,00	95,00	4.287,00	Bappeda & Litbang
JUMLAH BELANJA MISI 2						322.090,00		335.925,00		351.918,00		366.213,00		383.180,00		1.759.326,00	
Misi 3 : Memantapkan Infrastruktur Sebagai Pendukung Utama Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Pelayanan Dasar Masyarakat																	
	Tujuan 1 : Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,67	4,82	98.255,00	5,10	110.380,00	5,25	113.313,00	5,32	117.224,00	5,48	121.370,00	5,48	560.542,00	
	Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	%	51,45	53,57	52.040,00	56,19	61.930,00	59,80	62.566,00	62,94	66.619,00	65,46	69.070,00	65,46	312.225,00	
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Perkotaan yang dalam kondisi baik	%	54,00	55,00	4.790,00	60,00	4.880,00	65,00	5.007,00	70,00	5.081,00	75,00	5.160,00	75,00	24.918,00	DPU & PR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase peningkatan panjang jalan yang dalam kondisi Mantap	%	68,67	70,00	45.740,00	72,50	55.510,00	75,00	55.971,00	80,00	59.928,00	82,50	62.270,00	82,50	279.419,00	DPU & PR
		Presentase peningkatan jembatan yang dalam kondisi Mantap	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	%	95,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	280,00	DPU & PR
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Menurunnya Kecelakaan Berlalu Lintas	%	90,00	95,00	460,00	100,00	470,00	100,00	483,00	100,00	490,00	100,00	500,00	100,00	2.403,00	Dinas Perhubungan
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Menurunnya tingkat kecelakaan laik berlayar	%	90,00	95,00	1.000,00	85,00	1.020,00	100,00	1.045,00	100,00	1.060,00	100,00	1.080,00	100,00	5.205,00	Dinas Perhubungan



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak	Persentase kawasan permukiman yang layak	%	99,41	99,41	36.420,00	99,41	38.610,00	99,41	40.490,00	99,41	40.357,00	99,41	41.750,00	99,41	197.627,00	
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jaringan air bersih yang kondisi baik dan berfungsi	%	75,00	77,14	13.400,00	79,38	14.930,00	81,53	15.983,00	83,29	15.178,00	84,54	15.880,00	84,54	75.371,00	DPU & PR
		persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak	%	92,06	93,00		94,00		94,50		95,00		96,00		96,00		
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak	%	75,00	80,00	3.750,00	82,00	3.940,00	85,00	4.132,00	88,00	4.339,00	90,00	4.560,00	90,00	20.721,00	DPU & PR
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan desa yang terhubung ke pusat kecamatan	%	90,00	93,00	4.160,00	94,00	4.370,00	94,50	4.591,00	95,00	4.821,00	96,00	5.060,00	96,00	23.002,00	DPU & PR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten	%	2,58	5,00	140,00	10,00	140,00	12,00	147,00	15,00	149,00	20,00	150,00	20,00	726,00	DPU & PR
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase pembangunan Jalan Lingkungan yang dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	14.500,00	82,00	14.760,00	84,00	15.153,00	85,00	15.379,00	86,00	15.610,00	86,00	75.402,00	DPU & PR
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Porsentase ketersediaan Rumah Layak Huni	%	90,00	100,00	160,00	100,00	160,00	100,00	165,00	100,00	167,00	100,00	170,00	100,00	822,00	Dispera & KP
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Porsentase Luas Kawasan Kumuh	%	80,00	100,00	110,00	100,00	110,00	100,00	111,00	100,00	113,00	100,00	110,00	100,00	554,00	Dispera & KP
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh	%	N/A	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	208,00	100,00	211,00	100,00	210,00	100,00	1.029,00	Dispera & KP
	Sasaran 3 : Terciptanya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase realisasi rencana struktur ruang	%	95,00	95,00	1.600,00	98,00	1.630,00	98,00	1.669,00	99,00	1.694,00	100,00	1.720,00	100,00	8.313,00	
		Persentase realisasi rencana pola ruang	%	95,00	95,00		98,00		98,00		99,00		100,00		100,00		
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Perencanaan Tata Ruang Daerah	%	100,00	100,00	1.600,00	100,00	1.630,00	100,00	1.669,00	100,00	1.694,00	100,00	1.720,00	100,00	8.313,00	DPU & PR
		Presentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sasaran 4 : Meningkatkan peluang kerja dan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45	4,28	3.315,00	4,11	3.220,00	3,96	3.474,00	3,77	3.362,00	3,61	3.560,00	3,61	16.931,00	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya penyusunan laporan rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	145,00	100,00	0,00	100,00	160,00	100,00	0,00	100,00	150,00	100,00	455,00	Distranaker
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terampil dan bersertifikat	%	100,00	100,00	210,00	100,00	220,00	100,00	222,00	100,00	225,00	100,00	230,00	100,00	1.107,00	Distranaker
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	%	77,90	77,90	100,00	78,00	110,00	78,50	109,00	79,00	110,00	80,00	110,00	80,00	539,00	Distranaker
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang menerapkan UMK	%	80,00	80,00	320,00	83,00	320,00	85,00	331,00	89,00	336,00	92,00	340,00	92,00	1.647,00	Distranaker
		Persentase kasus perselisihan yg terselesaikan	%	95,00	95,00		95,00		96,00		96,00		98,00		98,00		
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi KSP / USP yang sehat	%	10,00	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	25,00	12,00	25,00	12,00	30,00	12,00	120,00	Disperindagkop & UKM
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang bersertifikat	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	8,00	15,00	8,00	15,00	10,00	15,00	46,00	Disperindagkop & UKM
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	10,00	10,00	280,00	12,00	280,00	15,00	291,00	15,00	295,00	20,00	300,00	20,00	1.446,00	Disperindagkop & UKM
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	10,00	10,00	400,00	12,00	410,00	15,00	420,00	15,00	426,00	20,00	430,00	20,00	2.086,00	Disperindagkop & UKM
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase persebaran pedagang	%	5,00	5,00	1.550,00	6,00	1.570,00	7,00	1.615,00	7,00	1.639,00	10,00	1.660,00	10,00	8.034,00	Disperindagkop & UKM
		Persentase Sarana dan prasarana pasar yang direvitalisasi	%	90,00	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kenaikan harga barang pokok dan barang penting	%	10,00	10,00	200,00	10,00	200,00	12,00	208,00	12,00	211,00	15,00	210,00	15,00	1.029,00	Disperindagkop & UKM
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan metreologi legal	%	10,00	10,00	80,00	10,00	80,00	12,00	85,00	12,00	87,00	15,00	90,00	15,00	422,00	Disperindagkop & UKM



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sasaran 5 : Meningkatkan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan PAD	%	11,54	11,70	3.120,00	12,00	3.180,00	12,25	3.265,00	12,50	3.314,00	12,80	3.360,00	12,80	16.239,00	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase administrasi pengelolaan asset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80,00	90,00	1.420,00	90,00	1.450,00	95,00	1.484,00	95,00	1.506,00	100,00	1.530,00	100,00	7.390,00	BPKAD
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	%	5,60	6,60	1.700,00	7,60	1.730,00	8,60	1.781,00	9,60	1.808,00	10,60	1.830,00	10,60	8.849,00	Bapenda
	Sasaran 6 : Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi investasi di daerah	Trilyun Rupiah	1,50	1,70	610,00	2,00	620,00	2,30	639,00	3,00	648,00	3,50	660,00	3,50	3.177,00	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor	Investor	5,00	5,00	120,00	5,00	120,00	5,00	123,00	5,00	125,00	5,00	130,00	5,00	618,00	DPM & PTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berinvestasi di Daerah	Investor	5,00	5,00	60,00	5,00	60,00	5,00	65,00	5,00	66,00	5,00	70,00	5,00	321,00	DPM & PTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	%	50,00	55,00	410,00	60,00	420,00	65,00	429,00	70,00	435,00	80,00	440,00	80,00	2.134,00	DPM & PTSP
		Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	%	-40,00	13,00		17,00		15,00		30,00		17,00		17,00		
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase informasi pelayanan yang dipublikasikan	%	95,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	22,00	100,00	22,00	100,00	20,00	100,00	104,00	DPM & PTSP
		Persentase data yang dimanfaatkan	%	95,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Sasaran 7 : Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	32.682	33.387	1.150,00	34.108	1.190,00	34.845	1.210,00	35.597	1.230,00	36.366	1.250,00	36.366	6.030,00	
		Persentase objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Bulungan yang dilestarikan	%	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	%	46,00	46,00	170,00	46,00	180,00	46,00	181,00	46,00	184,00	46,00	190,00	46,00	905,00	Disdikbud
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase 11 objek kemajuan kebudayaan Kabupaten Bulungan	%	100,00	100,00	620,00	100,00	640,00	100,00	653,00	100,00	663,00	100,00	670,00	100,00	3.246,00	Disdikbud
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan sapta pesona	%	15,00	15,00	210,00	20,00	210,00	20,00	215,00	25,00	219,00	25,00	220,00	25,00	1.074,00	Dispora & Par
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan	wisatawan	1.000,00	1.000,00	150,00	1.100,00	160,00	1.120,00	161,00	1.140,00	164,00	1.200,00	170,00	1.200,00	805,00	Dispora & Par
JUMLAH BELANJA MISI 3						98.255,00		110.380,00		113.313,00		117.224,00		121.370,00		560.542,00	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Misi 4 : Memajukan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang Ramah Lingkungan																	
	Tujuan 1 : Terwujudnya Masyarakat yang Tertib dan Aman	Angka Kriminalitas	Angka	194,00	172,00	13.820,00	150,00	14.075,00	168,00	14.462,00	106,00	14.677,00	84,00	14.895,00	84,00	71.929,00	
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dikalangan masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	194,00	172,00	13.820,00	150,00	14.075,00	168,00	14.462,00	106,00	14.677,00	84,00	14.895,00	84,00	71.929,00	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Orang/ 10.000 penduduk	6,45	6,45	6.780,00	6,50	6.900,00	6,60	7.090,00	6,60	7.195,00	6,75	7.300,00	6,75	35.265,00	Satpol PP & Damkar
		Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Orang/ 10.000 penduduk	15,40	15,50		15,60		15,75		15,75		15,80		15,80		
		Cakupan penegakan Perda dan Perbup tertangani (%)	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase laporan kejadian kebencanaan (non-karhutla) yang ditangani*	%	95,00	100,00	3.000,00	100,00	3.060,00	100,00	3.141,00	100,00	3.188,00	100,00	3.240,00	100,00	15.629,00	BPBD
		Persentase laporan kejadian karhutla yang ditangani*	%	90,00	95,00		95,00		96,00		96,00		98,00		98,00		
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik*	%	34,00	40,00	1.690,00	50,00	1.720,00	60,00	1.766,00	70,00	1.793,00	80,00	1.820,00	80,00	8.789,00	Satpol PP & Damkar
		Persentase ketersediaan peralatan penanggulangan kebakaran dan berkondisi baik	%	85,00	90,00		92,00		95,00		97,00		99,00		99,00		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan	Kec	5,00	5,00	120,00	5,00	120,00	5,00	121,00	5,00	123,00	5,00	120,00	5,00	604,00	Kesbangpol
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase tingkat kualitas partai politik dan budaya politik	%	80,00	80,00	750,00	85,00	760,00	87,00	785,00	90,00	797,00	100,00	810,00	100,00	3.902,00	Kesbangpol
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase ormas yang terdaftar dan pembinaannya	%	80,00	80,00	30,00	82,00	35,00	85,00	40,00	90,00	40,00	100,00	45,00	100,00	190,00	Kesbangpol



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Presentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	87,00	87,00	410,00	90,00	420,00	93,00	431,00	96,00	437,00	98,00	440,00	98,00	2.138,00	Kesbangpol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase mediasi/fasilitasi yang ditangani	%	80,00	80,00	1.040,00	85,00	1.060,00	87,00	1.088,00	90,00	1.104,00	100,00	1.120,00	100,00	5.412,00	Kesbangpol
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76.34 (Baik)	76.35 (Baik)	25.360,00	76.36 (Baik)	25.850,00	76.37 (Baik)	26.574,00	76.37 (Baik)	26.980,00	76.37 (Baik)	27.365,00	76.37 (Baik)	132.129,00	
	Sasaran 1 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	85,04 (Baik)	85,04 (Baik)	25.360,00	85,04 (Baik)	25.850,00	87,35 (Baik)	26.574,00	87,35 (Baik)	26.980,00	87,35 (Baik)	27.365,00	87,35 (Baik)	132.129,00	
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	50 (Sedang)	54,92 (Sedang)		55,02 (Sedang)		55,12 (Sedang)		55,12 (Sedang)		55,12 (Sedang)		55,12 (Sedang)		
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	96,08 (Sangat Baik)	96,08 (Sangat Baik)		96,08 (Sangat Baik)		96,08 (Sangat Baik)		96,08 (Sangat Baik)		96,08 (Sangat Baik)		96,08 (Sangat Baik)		
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman dan perumahan yang mendapatkan fasilitas PSU	%	100,00	100,00	5.220,00	100,00	5.320,00	100,00	5.460,00	100,00	5.541,00	100,00	5.620,00	100,00	27.161,00	Dispera & KP
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	dokumen	0,00	2,00	460,00	2,00	470,00	2,00	484,00	2,00	491,00	2,00	500,00	1.915,00	2.405,00	DLH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	%	75,00	87,50	360,00	87,50	360,00	87,50	371,00	87,50	377,00	87,50	380,00	87,50	1.848,00	DLH
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase tutupan lahan kritis pada daerah aliran sungai (DAS)	%	34,00	47,00	4.120,00	60,00	4.190,00	65,00	4.307,00	70,00	4.371,00	75,00	4.440,00	75,00	21.428,00	DLH
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan Limbah B3	%	60,00	70,00	60,00	75,00	60,00	80,00	67,00	82,00	68,00	85,00	70,00	85,00	325,00	DLH



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan PPLH	%	42,86	55,00	110,00	60,00	110,00	65,00	117,00	70,00	119,00	75,00	120,00	75,00	576,00	DLH
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten	%	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	40,00	65,00	50,00	75,00	50,00	75,00	50,00	265,00	DLH
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penghargaan lingkungan Hidup	Penghargaan	2,00	2,00	110,00	2,00	110,00	2,00	111,00	2,00	113,00	2,00	110,00	456,00	554,00	DLH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	30,00	100,00	30,00	100,00	34,00	100,00	34,00	100,00	30,00	100,00	158,00	DLH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	78,74	80,00	11.280,00	82,00	11.480,00	84,00	11.790,00	86,00	11.966,00	88,00	12.140,00	88,00	58.656,00	DLH
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Prosentase keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan	%	50,00	50,00	3.610,00	54,00	3.670,00	55,00	3.768,00	57,00	3.825,00	58,00	3.880,00	60,00	18.753,00	DPU & PR
Tujuan 3 : Menurunnya ketimpangan pendapatan		Indeks Gini	Indeks	0,290	0,290	192.076,77	0,289	200.152,55	0,288	209.419,54	0,287	217.178,32	0,286	225.572,99	0,286	1.044.400,17	
Sasaran 1 : Menurunnya kemiskinan		Persentase penduduk miskin	%	9,02	8,60	2.450,00	8,20	2.490,00	7,80	2.558,00	7,40	2.596,00	7,00	2.650,00	7,00	12.744,00	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (Lansia, Paca, Anak Terlantar, PRSE dan eks Penyandang Penyakit Sosial)	%	7,70	7,70	1.070,00	7,70	1.090,00	7,70	1.124,00	7,70	1.140,00	7,70	1.160,00	7,70	5.584,00	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang mandiri	%	1,30	1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		
		Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif	PSKS	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (Lansia, Paca, Anak Terlantar, PRSE dan eks Penyandang Penyakit Sosial dll)	%	7,70	7,70	530,00	7,70	540,00	7,70	549,00	7,70	558,00	7,70	570,00	7,70	2.747,00	Dinas Sosial	
		Persentase data PMKS yang ter up to date (tervalidasi)	%	11,50	11,50		11,50		11,50		11,50		11,50		11,50			11,50
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang menerima bantuan beras sejahtera (Rastra) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	%	15,30	15,30	660,00	15,30	670,00	15,30	686,00	15,30	696,00	15,30	710,00	15,30	3.422,00	Dinas Sosial	
		Persentase keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	%	9,40	9,40		9,40		9,40		9,40		9,40		9,40			9,40
		Persentase warga yang memperoleh bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00			50,00
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Barang persediaan logistik penanggulangan bencana dalam kondisi kesiapsiagaan (bulan)	bulan	12,00	12,00	130,00	12,00	130,00	12,00	132,00	12,00	134,00	12,00	140,00	12,00	666,00	Dinas Sosial	
		Cakupan warga korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00
		Cakupan warga masyarakat yang terlatih dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	TMP	1,00	1,00	60,00	1,00	60,00	1,00	67,00	1,00	68,00	1,00	70,00	1,00	325,00	Dinas Sosial	



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Sasaran 2 : Meningkatkan kemandirian desa	Status Desa	Status	Tertinggal	Berkembang	189.626,77	Berkembang	197.662,55	Berkembang	206.861,54	Maju	214.582,32	Mandiri	222.922,99	Mandiri	1.031.656,17	
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	94,00	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	469,00	DPMD
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	%	100,00	100,00	2.830,00	100,00	2.880,00	100,00	2.958,00	100,00	3.002,00	100,00	3.050,00	100,00	14.720,00	DPMD
		Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	%	90,00	95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	%	90,00	95,00	1.050,00	100,00	1.070,00	100,00	1.098,00	100,00	1.114,00	100,00	1.130,00	100,00	5.462,00	DPMD
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yg aktif	%	80,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Legalitas Tanah di Kawasan Transmigrasi	%	87,00	87,00	15,00	90,00	0,00	90,00	25,00	95,00	0,00	95,00	30,00	95,00	70,00	Distranaker
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyiapan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%	97,00	97,00	260,00	97,00	260,00	98,00	269,00	98,00	273,00	98,00	280,00	98,00	1.342,00	Distranaker
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Penguatan SDM Transmigran	%	95,00	95,00	210,00	95,00	210,00	95,00	215,00	95,00	218,00	95,00	220,00	95,00	1.073,00	Distranaker
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja transfer ke desa pada APBD	%	12,91	12,95	175.631,77	12,97	183.442,55	13,00	192.234,54	13,00	199.764,32	13,00	207.842,99	13,00	958.916,17	BPKAD
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	%	75,00	80,00	9.540,00	80,00	9.710,00	85,00	9.968,00	85,00	10.116,00	90,00	10.270,00	90,00	49.604,00	10 Kecamatan
		Jumlah Produksi Unggulan Desa*	Produk per Desa	-	0,20		0,40		0,60		0,80		1,00		1,00		
JUMLAH BELANJA MISI 4						231.256,77	240.077,55		250.455,54	258.835,32	267.832,99	1.248.458,17					



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Misi 5 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keuangan Daerah yang Sehat, dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan untuk Mendorong Pembangunan Kabupaten Bulungan																	
	Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	636.000,44	B	652.513,60	B	687.940,33	BB	697.147,34	BB	704.272,34	BB	3.377.874,05	
	Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	636.000,44	B	652.513,60	B	687.940,33	BB	697.147,34	BB	704.272,34	BB	3.377.874,05	
		Nilai / Predikat SAKIP	Predikat	B	B		BB		BB		BB		A		A		
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
		Indeks Manajemen Resiko	Indeks	n/a	1,00		1,00		1,00		2,00		3,00		3,00		
		Level Maturitas SPIP	Level	n/a	2,00		2,00		2,00		2,00		3,00		3,00		
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Indeks	n/a	1,00		1,00		1,00		2,00		3,00		3,00		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	n/a	B		B		B		A		A		A		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	571.455,44	97,00	587.510,60	98,00	596.993,33	100,00	630.669,34	100,00	637.441,34	100,00	3.024.070,05	Seluruh OPD
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
		Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B		B		BB		BB		BB		BB		
		Prosentase Kepatuhan Wajib Laporan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		Uraian	Satuan		Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah PD yang memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau /wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK dan WBBM)	OPD	0,00	1,00		2,00		2,00		3,00		3,00		3,00		
		Persentase PD yang nilai SAKIP Minimal B	%	56,41	69,23		74,36		79,49		84,62		89,74		89,74		
		Persentase kematangan Organisasi Perangkat Daerah	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Presentase Perangkat Daerah yang efisien dan proporsional	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap penerapan standar pelayanan	%	85,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Presentase Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan	%	90,00	95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	%	100,00	100,00	1.280,00	100,00	1.310,00	100,00	1.343,00	100,00	1.363,00	100,00	1.380,00	100,00	6.676,00	Diskominfo
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE Kabupaten Bulungan	%	2,10	2,50	290,00	3,00	300,00	3,50	303,00	3,50	308,00	4,00	310,00	4,30	1.511,00	Diskominfo
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	20,00	40,00	250,00	55,00	300,00	70,00	300,00	85,00	350,00	100,00	350,00	100,00	1.550,00	Diskominfo
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku	OPD	7,00	7,00	280,00	7,00	280,00	7,00	288,00	7,00	292,00	7,00	300,00	7,00	1.440,00	Disperpus & Arsip
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan	%	4,00	5,00	30,00	5,00	30,00	5,00	35,00	5,00	36,00	5,00	40,00	5,00	171,00	Disperpus & Arsip



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase hibah bantuan sosial yang tepat sasaran	%	94,00	100,00	18.750,00	100,00	19.020,00	100,00	44.371,00	100,00	19.686,00	100,00	19.810,00	100,00	121.637,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Perundang-Undangan yang harmonis	%	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		95,00		95,00		
		Nilai LPPD	Angka	85,00	90,00		95,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat	%	10,00	30,00		50,00		70,00		90,00		100,00		100,00		
		Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	75,00	95,00		95,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dan transparan	%	90,00	100,00	5.060,00	100,00	5.150,00	100,00	5.294,00	100,00	5.373,00	100,00	5.450,00	100,00	26.327,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Perkebunan Skala Besar dan menengah yang menerapkan plasma sesuai aturan	%	50,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		
		Persentase potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan	%	30,00	30,00		45,00		55,00		65,00		80,00		80,00		
		Laju Inflasi Barang & Jasa	Angka	2,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
		Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan profesional	%	75,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
		Persentase PD yang memiliki anggaran efektif dan efisien	%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan yang akuntabel	%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Perda yang dihasilkan per tahun	buah	12,00	14,00	13.420,00	15,00	13.660,00	15,00	14.023,00	14,00	14.232,00	14,00	14.440,00	72,00	69.775,00	Sekretariat DPRD
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan kebutuhan data perencanaan	%	90,00	95,00	3.710,00	100,00	3.770,00	100,00	3.876,00	100,00	3.934,00	100,00	3.990,00	100,00	19.280,00	Bappeda & Litbang



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan sektoral dan evaluasinya	%	75,00	80,00	1.650,00	85,00	1.680,00	87,00	1.724,00	90,00	1.749,00	100,00	1.780,00	100,00	8.583,00	Bappeda & Litbang	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian serapan realisasi belanja daerah	%	96,35	96,40	11.665,00	96,45	11.203,00	96,50	10.865,00	96,50	10.504,00	96,50	10.191,00	96,50	54.428,00	BPKAD	
		Persentase belanja pegawai terhadap APBD	%	57,58	38,00		36,00		34,00		33,00		30,00		30,00			30,00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	70,00	71,00	2.480,00	71,00	2.520,00	72,00	2.593,00	72,00	2.631,00	73,00	2.670,00	73,00	12.894,00	BK & PSDM	
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kualifikasi jabatan	%	75,00	75,00		80,00		80,00		85,00		85,00		85,00			85,00
		Persentase ASN yang nilai SKP nya baik	%	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00			90,00
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Angka	80,00	80,00		80,00		83,00		83,00		83,00		85,00			85,00
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Dasar CPNS	%	85,00	85,00	690,00	90,00	700,00	90,00	718,00	95,00	729,00	100,00	740,00	100,00	3.577,00	BK & PSDM	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Internal dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90,00	95,00	3.220,00	98,00	3.280,00	100,00	3.364,00	100,00	3.414,00	100,00	3.470,00	100,00	16.748,00	Inspektorat	
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat dan/atau kasus-kasus yang menjadi sorotan publik	%	N/A	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00			100,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta	Target
1	2	3	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase capaian pelaksanaan Indikator kinerja Kunci (IKK) outcome Urusan Penyelenggaraan Pemerintah	%	N/A	85,00		85,00		90,00		95,00		95,00		95,00			
		Indeks Manajemen Risiko (MR) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP	Indeks	N/A	1,00		1,00		2,00		2,00		3,00		3,00			
		Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bulungan Berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP	angka	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		3,00		3,00			
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah di tindaklanjuti	%	53,54	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00			
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang telah di tindaklanjuti	%	83,12	85,00		88,00		90,00		95,00		95,00		95,00			
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase capaian Pencegahan Korupsi Berdasarkan Aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK-RI	%	67,34	70,00	1.770,00	75,00	1.800,00	80,00	1.850,00	85,00	1.877,00	85,00	1.910,00	85,00	9.207,00	Inspektorat	
		Indeks Efektivitas Pencegahan korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP	Indeks	N/A	1,00		1,00		2,00		3,00		3,00		3,00			
		Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Bulungan	Indeks	80,27	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		nilai rata-rata Area Perubahan Penguatan Pengawasan dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRE)	angka	3,80	4,00		4,25		4,50		4,75		5,00		5,00		
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bulungan untuk Komponen Evaluasi Internal	angka	5,95	6,00		6,25		6,50		6,75		7,00		7,00		
	Tujuan 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n/a	2,20	6.770,00	2,50	6.900,00	2,80	7.081,00	3,00	7.186,00	3,50	7.300,00	3,50	35.237,00	
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,00	3,20	6.770,00	3,40	6.900,00	3,60	7.081,00	3,80	7.186,00	4,00	7.300,00	4,00	35.237,00	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Kartu Keluarga yang diterbitkan	KK	13.856,0	14.200,0	580,00	15.000,0	590,00	15.500,0	609,00	16.000,0	618,00	16.500,0	630,00	79.597,0	3.027,00	Disduk & Capil
		KTP-el yang diterbitkan	KTP	21.412,0	21.500,0		22.000,0		22.500,0		23.000,0		23.500,0		112.500,0		
		KIA yang diterbitkan	KIA	5.640,0	6.500,0		7.000,0		7.500,0		8.000,0		8.500,0		37.500,0		
		berkas permohonan pindah yang diterbitkan	SKP WNI	3.274,0	3.350,0		3.500,0		3.600,0		3.700,0		3.800,0		17.950,0		
		Berkas permohonan kedatangan yang diproses	SKD WNI	4.865,0	4.900,0		5.000,0		5.100,0		5.200,0		5.300,0		25.500,0		
		Pelayanan keliling (Jemput bola) pendaftaran penduduk	Des/Kel	16,00	16,00		20,00		20,00		20,00		20,00		96,00		
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	86.166,0	4.000,00	380,00	4.000,00	390,00	4.000,00	396,00	4.000,00	402,00	4.000,00	410,00	107.734,0	1.978,00	Disduk & Capil
		Jumlah kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	46.507,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		47.007,0		
		Jumlah kepemilikan Akta Perkawinan	pasangan	12.011,0	400,00		400,00		400,00		400,00		400,00		14.011,0		
		Jumlah kepemilikan Akta Perceraian	pasangan	79,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		129,00		
		Jumlah kepemilikan Akta Pengakuan	Jiwa	324,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		474,00		
		Jumlah kepemilikan Akta Pengesahan	Jiwa	631,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		781,00		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
		Uraian	Satuan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan	Puskesmas	10,00	10,00	790,00	0,00	810,00	0,00	828,00	0,00	840,00	0,00	850,00	10,00	4.118,00	Disduk & Capil						
			KUA	10,00	10,00													0,00	0,00	0,00	10,00		
		Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dilakukan	OPD	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	15,00										
			Fasilitasi pemanfaatan aplikasi IKM	Berkas	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	600,00												
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Verifikasi dan Validasi data kependudukan	Keg/ Berkas	1.000,00	1.200,00	10,00	1.500,00	10,00	1.700,00	11,00	1.900,00	11,00	2.100,00	10,00	8.442,00	52,00	Disduk & Capil						
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian waktu penyelesaian perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan	%	94,00	96,00	2.870,00	98,00	2.920,00	99,00	2.995,00	100,00	3.040,00	100,00	3.090,00	100,00	14.915,00	DPM & PTSP						
			Persentase jenis layanan publik yang disediakan pada Mal Pelayanan Publik	%	0,00													70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik (IKM)	%	3,40													3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	3,90
			Persentase jenis layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi	%	69,50													73,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	90,00	92,00	2.140,00	95,00	2.180,00	95,00	2.242,00	96,00	2.275,00	96,00	2.310,00	96,00	11.147,00	10 Kecamatan						
JUMLAH BELANJA MISI 5							642.770,44	659.413,60		695.021,33	704.333,34	711.572,34		3.413.111,05									
TOTAL BELANJA							1.324.332,21	1.377.706,15		1.444.873,87	1.485.378,66	1.521.775,33		7.154.066,22									



BAB VII

Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha,
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah
6. Memperhatikan kualitas lingkungan hidup dalam setiap perencanaan dan proses pembangunan
7. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Bulungan untuk periode Tahun 2021 sampai dengan 2026 berjumlah 120 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Bulungan disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel 7.1. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Secara umum kerangka pendanaan pembangunan 2021-2026 disampaikan dalam tabel 7.1, dan indikasi program dan anggaran disampaikan dalam tabel 7.2.



Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 Kabupaten Bulungan

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi (Rp.)				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	474.909.160.000,00	503.066.720.000,00	538.107.490.000,00	549.680.620.000,00	550.367.230.000,00
5	BELANJA	1.324.332.210.000,00	1.377.706.150.000,00	1.444.873.870.000,00	1.485.378.660.000,00	1.521.775.330.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	877.199.640.000,00	894.234.380.000,00	939.126.440.000,00	934.478.850.000,00	957.567.790.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	550.293.130.000,00	569.553.390.000,00	589.487.760.000,00	610.119.830.000,00	631.474.030.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.788.320.000,00	288.870.440.000,00	283.121.920.000,00	287.121.920.000,00	288.121.920.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	34.618.190.000,00	35.310.550.000,00	66.016.760.000,00	36.737.100.000,00	37.471.840.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5,2	BELANJA MODAL	265.875.800.000,00	294.966.220.000,00	308.956.890.000,00	347.034.490.000,00	352.673.550.000,00
5.2.00	Belanja Modal (Tanah, Peralatan & Mesin, Gedung & Bangunan, Jalan, Jaringan & Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya	265.875.800.000,00	294.966.220.000,00	308.956.890.000,00	347.034.490.000,00	352.673.550.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.625.000.000,00	5.063.000.000,00	4.556.000.000,00	4.101.000.000,00	3.691.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.625.000.000,00	5.063.000.000,00	4.556.000.000,00	4.101.000.000,00	3.691.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	175.631.770.000,00	183.442.550.000,00	192.234.540.000,00	199.764.320.000,00	207.842.990.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.255.850.000,00	5.471.760.000,00	5.696.590.000,00	5.930.710.000,00	6.174.500.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.375.920.000,00	177.970.790.000,00	186.537.950.000,00	193.833.610.000,00	201.668.490.000,00



Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	Uraian	Satuan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					760.719,00		792.529,00		817.029,00		862.129,00		887.664,00		4.120.070,00	
1.01	BIDANG PENDIDIKAN					330.644,00		339.575,00		349.483,00		371.319,00		383.886,00		1.774.907,00	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	210.844,00	97,00	214.520,00	98,00	218.800,00	100,00	235.165,00	100,00	242.056,00	100,00	1.121.385,00	Disdikbud
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,16	10,00	119.600,00	10,50	124.670,00	11,00	130.233,00	11,50	135.704,00	11,50	141.430,00	11,50	651.637,00	Disdikbud
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,48	13,48		13,49		13,50		13,51		13,52		13,52		
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SD terakreditasi A	%	15,00	17,00	200,00	18,00	235,00	19,00	250,00	20,00	250,00	21,00	250,00	21,00	1.185,00	Disdikbud
		Persentase SMP terakreditasi A	%	12,00	12,00		12,00		13,00		14,00		15,00		15,00		
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi minimal S1	%	32,00	35,00	0,00	38,00	150,00	40,00	200,00	42,00	200,00	45,00	150,00	45,00	700,00	Disdikbud
1.02	BIDANG KESEHATAN					278.466,00		287.314,00		296.883,00		311.245,00		320.956,00		1.494.864,00	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	145.936,00	97,00	149.584,00	98,00	153.324,00	100,00	162.157,00	100,00	166.086,00	100,00	777.087,00	Dinas Kesehatan
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
		Serapan belanja BLUD terhadap pendapatan BLUD RSD	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	%	85,00	86,00	114.540,00	90,00	119.410,00	93,00	124.745,00	96,00	129.994,00	100,00	135.490,00	100,00	624.179,00	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	%	95,00	96,00		97,00		97,00		97,00		97,00		97,00		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan kompetensi sesuai standar	%	70,00	75,00	16.650,00	80,00	16.950,00	85,00	17.409,00	90,00	17.668,00	100,00	17.930,00	100,00	86.607,00	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tingkat efektivitas pengawasan obat dan makanan	%	60,00	65,00	530,00	70,00	540,00	85,00	553,00	90,00	561,00	100,00	570,00	100,00	2.754,00	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	%	65,00	70,00	810,00	80,00	830,00	85,00	852,00	90,00	865,00	100,00	880,00	100,00	4.237,00	Dinas Kesehatan
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					107.773,00		120.849,00		124.713,00		132.673,00		134.961,00		620.969,00	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	8.263,00	97,00	8.469,00	98,00	8.681,00	100,00	8.898,00	100,00	9.121,00	100,00	43.432,00	DPU & PR
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		Uraian	Satuan		Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	13,52	15,00	11.380,00	15,79	12.170,00	16,50	13.319,00	20,75	17.146,00	21,75	15.370,00	21,75	69.385,00	DPU & PR
		Prosentase peningkatan luas daerah terlindungi dari banjir dan genangan	%	90,00	95,00		95,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jaringan air bersih yang kondisi baik dan berfungsi	%	75,00	77,14	13.400,00	79,38	14.930,00	81,53	15.983,00	83,29	15.178,00	84,54	15.880,00	84,54	75.371,00	DPU & PR
		persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak	%	92,06	93,00		94,00		94,50		95,00		96,00		96,00		
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak	%	75,00	80,00	3.750,00	82,00	3.940,00	85,00	4.132,00	88,00	4.339,00	90,00	4.560,00	90,00	20.721,00	DPU & PR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Perkotaan yang dalam kondisi baik	%	54,00	55,00	4.790,00	60,00	4.880,00	65,00	5.007,00	70,00	5.081,00	75,00	5.160,00	75,00	24.918,00	DPU & PR
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan desa yang terhubung ke pusat kecamatan	%	90,00	93,00	4.160,00	94,00	4.370,00	94,50	4.591,00	95,00	4.821,00	96,00	5.060,00	96,00	23.002,00	DPU & PR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten	%	2,58	5,00	140,00	10,00	140,00	12,00	147,00	15,00	149,00	20,00	150,00	20,00	726,00	DPU & PR
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase pembangunan Jalan Lingkungan yang dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	14.500,00	82,00	14.760,00	84,00	15.153,00	85,00	15.379,00	86,00	15.610,00	86,00	75.402,00	DPU & PR



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase peningkatan panjang jalan yang dalam kondisi Mantap	%	68,67	70,00	45.740,00	72,50	55.510,00	75,00	55.971,00	80,00	59.928,00	82,50	62.270,00	82,50	279.419,00	DPU & PR
		Presentase peningkatan jembatan yang dalam kondisi Mantap	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	%	95,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	280,00	DPU & PR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Perencanaan Tata Ruang Daerah	%	100,00	100,00	1.600,00	100,00	1.630,00	100,00	1.669,00	100,00	1.694,00	100,00	1.720,00	100,00	8.313,00	DPU & PR
		Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.405,00		10.623,00		10.897,00		11.109,00		11.314,00		54.348,00	
1.04.01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	4.715,00	97,00	4.833,00	98,00	4.953,00	100,00	5.077,00	100,00	5.204,00	100,00	24.782,00	Dispera & KP
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Porsentase ketersediaan Rumah Layak Huni	%	90,00	100,00	160,00	100,00	160,00	100,00	165,00	100,00	167,00	100,00	170,00	100,00	822,00	Dispera & KP
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Porsentase Luas Kawasan Kumuh	%	80,00	100,00	110,00	100,00	110,00	100,00	111,00	100,00	113,00	100,00	110,00	100,00	554,00	Dispera & KP
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh	%	N/A	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	208,00	100,00	211,00	100,00	210,00	100,00	1.029,00	Dispera & KP



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman dan perumahan yang mendapatkan fasilitas PSU	%	100,00	100,00	5.220,00	100,00	5.320,00	100,00	5.460,00	100,00	5.541,00	100,00	5.620,00	100,00	27.161,00	Dispera & KP
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					26.650,00		27.239,00		27.945,00		28.523,00		29.116,00		139.473,00	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	15.180,00	97,00	15.559,00	98,00	15.948,00	100,00	16.347,00	100,00	16.756,00	100,00	79.790,00	Satpol PP & Damkar dan BPBD
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Orang/10.000 penduduk	6,45	6,45	6.780,00	6,50	6.900,00	6,60	7.090,00	6,60	7.195,00	6,75	7.300,00	6,75	35.265,00	Satpol PP & Damkar
		Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Orang/10.000 penduduk	15,40	15,50		15,60		15,75		15,75		15,80		15,80		
		Cakupan penegakan Perda dan Perbup tertangani (%)	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase laporan kejadian kebencanaan (non-karhutla) yang ditangani*	%	95,00	100,00	3.000,00	100,00	3.060,00	100,00	3.141,00	100,00	3.188,00	100,00	3.240,00	100,00	15.629,00	BPBD
		Persentase laporan kejadian karhutla yang ditangani*	%	90,00	95,00		95,00		96,00		96,00		98,00		98,00		
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik*	%	34,00	40,00	1.690,00	50,00	1.720,00	60,00	1.766,00	70,00	1.793,00	80,00	1.820,00	80,00	8.789,00	Satpol PP & Damkar



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase ketersediaan peralatan penanggulangan kebakaran dan berkondisi baik	%	85,00	90,00		92,00		95,00		97,00		99,00		99,00			
1.06	BIDANG SOSIAL					6.781,00		6.929,00		7.108,00		7.260,00		7.431,00		35.509,00		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	4.331,00	97,00	4.439,00	98,00	4.550,00	100,00	4.664,00	100,00	4.781,00	100,00	22.765,00	Dinas Sosial	
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00			
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00			
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00			
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (Lansia, Paca, Anak Terlantar, PRSE dan eks Penyandang Penyakit Sosial)	%	7,70	7,70	1.070,00	7,70	1.090,00	7,70	1.124,00	7,70	1.140,00	7,70	1.160,00	7,70	5.584,00	Dinas Sosial	
		Persentase PMKS yang mandiri	%	1,30	1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30			
		Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif	PSKS	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (Lansia, Paca, Anak Terlantar, PRSE dan eks Penyandang Penyakit Sosial dll)	%	7,70	7,70	530,00	7,70	540,00	7,70	549,00	7,70	558,00	7,70	570,00	7,70	2.747,00	Dinas Sosial	
		Persentase data PMKS yang ter up to date (tervalidasi)	%	11,50	11,50		11,50		11,50		11,50		11,50		11,50			



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang menerima bantuan beras sejahtera (Rastra) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	%	15,30	15,30	660,00	15,30	670,00	15,30	686,00	15,30	696,00	15,30	710,00	15,30	3.422,00	Dinas Sosial	
		Persentase keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	%	9,40	9,40		9,40		9,40		9,40		9,40		9,40			9,40
		Persentase warga yang memperoleh bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00			50,00
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Barang persediaan logistik penanggulangan bencana dalam kondisi kesiapsiagaan (bulan)	bulan	12,00	12,00	130,00	12,00	130,00	12,00	132,00	12,00	134,00	12,00	140,00	12,00	666,00	Dinas Sosial	
		Cakupan warga korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00
		Cakupan warga masyarakat yang terlatih dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terkelola	TMP	1,00	1,00	60,00	1,00	60,00	1,00	67,00	1,00	68,00	1,00	70,00	1,00	325,00	Dinas Sosial	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					97.550,00		99.807,00		102.651,00		104.842,00		107.369,00		512.219,00		
2.07	BIDANG TENAGA KERJA					775,00		650,00		822,00		671,00		830,00		3.748,00		
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya penyusunan laporan rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	145,00	100,00	0,00	100,00	160,00	100,00	0,00	100,00	150,00	100,00	455,00	Distranaker	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terampil dan bersertifikat	%	100,00	100,00	210,00	100,00	220,00	100,00	222,00	100,00	225,00	100,00	230,00	100,00	1.107,00	Distranaker	



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	%	77,90	77,90	100,00	78,00	110,00	78,50	109,00	79,00	110,00	80,00	110,00	80,00	539,00	Distranaker
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang menerapkan UMK	%	80,00	80,00	320,00	83,00	320,00	85,00	331,00	89,00	336,00	92,00	340,00	92,00	1.647,00	Distranaker
		Persentase kasus perse- lisihan yg terselesaikan	%	95,00	95,00		95,00		96,00		96,00		98,00		98,00		
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.860,00		4.972,00		5.100,00		5.223,00		5.344,00		25.499,00	
2.08.01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausaha- an keuangan dan pen- capaian kinerja program yang mendukung pelak- sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	4.470,00	97,00	4.582,00	98,00	4.696,00	100,00	4.813,00	100,00	4.934,00	100,00	23.495,00	DP3AP2 & KB
		Persentase pelanggaran disiplin aparaturn	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi penguatan pengarusutamaan gender	%	0,00	10,00	110,00	30,00	110,00	45,00	112,00	60,00	113,00	87,00	110,00	87,00	555,00	DP3AP2 & KB
		Persentase Kecamatan yang Mendapat Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	%	30,00	45,00		55,00		65,00		70,00		83,00		83,00		
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase keluarga yang mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	0,00	10,00	30,00	30,00	30,00	50,00	35,00	61,00	35,00	75,00	40,00	75,00	170,00	DP3AP2 & KB



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan Pra Keluarga Sejahtera (KS) dan Keluarga Sejahtera (KS) yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	%	0,38	0,45	80,00	0,50	80,00	0,55	82,00	0,75	84,00	0,80	80,00	0,80	406,00	DP3AP2 & KB
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan / Desa Layak Anak	%	22,00	30,00	170,00	43,00	170,00	55,00	175,00	60,00	178,00	75,00	180,00	75,00	873,00	DP3AP2 & KB
		Persentase Keluarga Bermasalah yang Tertangani melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	60,00	65,00		70,00		70,00		85,00		89,00		89,00		
		Persentase forum anak tingkat kelurahan/desa	%	49,00	60,00		67,00		67,00		67,00		73,00		73,00		
2.09	BIDANG PANGAN					4.400,00		4.507,00		4.619,00		4.726,00		4.842,00		23.094,00	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	3.490,00	97,00	3.577,00	98,00	3.666,00	100,00	3.758,00	100,00	3.852,00	100,00	18.343,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,50	86,00	150,00	87,00	150,00	88,00	154,00	89,00	157,00	90,00	160,00	90,00	771,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Angka	76,22	80,00		82,00		84,00		85,00		87,00		87,00		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan Konsumsi (PHH)	Angka	77,78	80,00	540,00	85,00	550,00	85,00	562,00	90,00	570,00	90,00	580,00	90,00	2.802,00	Dinas Ketahanan Pangan



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Konsumsi energi	Kkal/kapita/hari	1.862,00	2.000,00		2.000,00		2.100,00		2.100,00		2.200,00		2.200,00		
		Konsumsi protein	Gr/kapita/hari	71,09	74,00		75,00		77,00		79,00		80,00		80,00		
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Laju pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	3,32	3,38	140,00	3,42	150,00	3,45	151,00	3,45	154,00	3,50	160,00	3,50	755,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi masyarakat	%	100,00	100,00	80,00	100,00	80,00	100,00	86,00	100,00	87,00	100,00	90,00	100,00	423,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					22.325,00		22.800,00		23.435,00		23.855,00		24.262,00		116.677,00	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.795,00	97,00	5.940,00	98,00	6.089,00	100,00	6.241,00	100,00	6.397,00	100,00	30.462,00	DLH
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	dokumen	0,00	2,00	460,00	2,00	470,00	2,00	484,00	2,00	491,00	2,00	500,00	1.915,00	2.405,00	DLH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	%	75,00	87,50	360,00	87,50	360,00	87,50	371,00	87,50	377,00	87,50	380,00	87,50	1.848,00	DLH
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase tutupan lahan kritis pada daerah aliran sungai (DAS)	%	34,00	47,00	4.120,00	60,00	4.190,00	65,00	4.307,00	70,00	4.371,00	75,00	4.440,00	75,00	21.428,00	DLH



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan Limbah B3	%	60,00	70,00	60,00	75,00	60,00	80,00	67,00	82,00	68,00	85,00	70,00	85,00	325,00	DLH
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan PPLH	%	42,86	55,00	110,00	60,00	110,00	65,00	117,00	70,00	119,00	75,00	120,00	75,00	576,00	DLH
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten	%	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	40,00	65,00	50,00	75,00	50,00	75,00	50,00	265,00	DLH
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penghargaan lingkungan Hidup	Penghargaan	2,00	2,00	110,00	2,00	110,00	2,00	111,00	2,00	113,00	2,00	110,00	456,00	554,00	DLH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	30,00	100,00	30,00	100,00	34,00	100,00	34,00	100,00	30,00	100,00	158,00	DLH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	78,74	80,00	11.280,00	82,00	11.480,00	84,00	11.790,00	86,00	11.966,00	88,00	12.140,00	88,00	58.656,00	DLH
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.759,00		7.949,00		8.147,00		8.331,00		8.522,00		40.708,00	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.999,00	97,00	6.149,00	98,00	6.303,00	100,00	6.460,00	100,00	6.622,00	100,00	31.533,00	Disduk & Capil
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		Uraian	Satuan		Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Kartu Keluarga yang diterbitkan	KK	13.856,0	14.200,0	580,00	15.000,0	590,00	15.500,0	609,00	16.000,0	618,00	16.500,0	630,00	79.597,00	3.027,00	Disduk & Capil
		KTP-el yang diterbitkan	KTP	21.412,0	21.500,0		22.000,0		22.500,0		23.000,0		23.500,0		#####		
		KIA yang diterbitkan	KIA	5.640,0	6.500,00		7.000,0		7.500,0		8.000,0		8.500,0		37.500,00		
		berkas permohonan pindah yang diterbitkan	SKP WNI	3.274,0	3.350,00		3.500,0		3.600,0		3.700,0		3.800,0		17.950,00		
		Berkas permohonan kedatangan yang diproses	SKD WNI	4.865,0	4.900,00		5.000,0		5.100,0		5.200,0		5.300,0		25.500,00		
		Pelayanan keliling (Jemput bola) pendaftaran penduduk	Des/Kel	16,00	16,00		20,00		20,00		20,00		20,00		96,00		
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	86.166,0	4.000,00	380,00	4.000,00	390,00	4.000,00	396,00	4.000,00	402,00	4.000,00	410,00	#####	1.978,00	Disduk & Capil
		Jumlah kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	46.507,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		47.007,00		
		Jumlah kepemilikan Akta Perkawinan	pasangan	12.011,0	400,00		400,00		400,00		400,00		400,00		14.011,00		
		Jumlah kepemilikan Akta Perceraian	pasangan	79,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		129,00		
		Jumlah kepemilikan Akta Pengakuan	Jiwa	324,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		474,00		
		Jumlah kepemilikan Akta Pengesahan	Jiwa	631,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		781,00		
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan	Puskesmas	10,00	10,00	790,00	0,00	810,00	0,00	828,00	0,00	840,00	0,00	850,00	10,00	4.118,00	Disduk & Capil
			KUA	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		
			OPD	3,00	3,00		3,00		2,00		2,00		2,00		15,00		
		Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dilakukan	OPD	3,00	3,00		3,00		2,00		2,00		2,00		15,00		
		Fasilitasi pemanfaatan aplikasi IKM	Berkas	60,00	80,00		100,00		120,00		140,00		160,00		600,00		
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Verifikasi dan Validasi data kependudukan	Keg/ Berkas	1.000,00	1.200,00	10,00	1.500,00	10,00	1.700,00	11,00	1.900,00	11,00	2.100,00	10,00	8.442,00	52,00	Disduk & Capil



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					9.294,00		9.498,00		9.744,00		9.945,00		10.157,00		48.638,00	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.324,00	97,00	5.458,00	98,00	5.594,00	100,00	5.734,00	100,00	5.877,00	100,00	27.987,00	DPMD
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	94,00	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	469,00	DPMD
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	%	100,00	100,00	2.830,00	100,00	2.880,00	100,00	2.958,00	100,00	3.002,00	100,00	3.050,00	100,00	14.720,00	DPMD
		Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	%	90,00	95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	%	90,00	95,00	1.050,00	100,00	1.070,00	100,00	1.098,00	100,00	1.114,00	100,00	1.130,00	100,00	5.462,00	DPMD
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yg aktif	%	80,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.520,00		4.740,00		4.969,00		5.206,00		5.450,00		24.885,00	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Peserta KB baru terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)	%	43,69	50,00	130,00	65,00	140,00	71,00	140,00	78,00	142,00	84,00	140,00	84,00	692,00	DP3AP2 & KB
		Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	%	9,25	15,00		35,00		48,00		59,00		75,00		75,00		
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Balai yang Dibangun	%	30,00	40,00	4.310,00	48,00	4.520,00	59,00	4.748,00	66,00	4.982,00	74,00	5.230,00	74,00	23.790,00	DP3AP2 & KB
		Persentase Peserta MKJP	%	59,52	65,00		75,00		80,00		87,00		90,00		90,00		
		Persentase Toga, Toma dan Pengelola KB yang mendapatkan pelayanan KIE	%	0,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		
		Persentase Masyarakat yang mendapatkan promosi dan KIE	%	0,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		
		Persentase Capaian Data Keluarga yang Valid	%	0,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB Aktif	%	70,04	65,00	80,00	74,00	80,00	86,00	81,00	90,00	82,00	95,00	80,00	95,00	403,00	DP3AP2 & KB
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN					7.667,00		7.853,00		8.050,00		8.235,00		8.432,00		40.237,00	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	6.207,00	97,00	6.363,00	98,00	6.522,00	100,00	6.685,00	100,00	6.852,00	100,00	32.629,00	Dinas Perhubungan
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Uraian	Satuan	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Menurunnya Kecelakaan Berlalu Lintas	%	90,00	95,00	460,00	100,00	470,00	100,00	483,00	100,00	490,00	100,00	500,00	100,00	2.403,00	Dinas Perhubungan
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Menurunnya tingkat kecelakaan laik berlayar	%	90,00	95,00	1.000,00	85,00	1.020,00	100,00	1.045,00	100,00	1.060,00	100,00	1.080,00	100,00	5.205,00	Dinas Perhubungan
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.029,00		6.181,00		6.331,00		6.473,00		6.612,00		31.626,00	
2.16.01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	4.459,00	97,00	4.571,00	98,00	4.685,00	100,00	4.802,00	100,00	4.922,00	100,00	23.439,00	Diskominfo & Persandian
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	%	100,00	100,00	1.280,00	100,00	1.310,00	100,00	1.343,00	100,00	1.363,00	100,00	1.380,00	100,00	6.676,00	Diskominfo
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE Kabupaten Bulungan	%	2,10	2,50	290,00	3,00	300,00	3,50	303,00	3,50	308,00	4,00	310,00	4,30	1.511,00	Diskominfo
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.352,00		6.503,00		6.672,00		6.830,00		6.998,00		33.355,00	
2.17.01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.642,00	97,00	5.783,00	98,00	5.928,00	100,00	6.076,00	100,00	6.228,00	100,00	29.657,00	Disperindagkop & UKM
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi KSP / USP yang sehat	%	10,00	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	25,00	12,00	25,00	12,00	30,00	12,00	120,00	Disperindagkop & UKM
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang bersertifikat	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	8,00	15,00	8,00	15,00	10,00	15,00	46,00	Disperindagkop & UKM
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	10,00	10,00	280,00	12,00	280,00	15,00	291,00	15,00	295,00	20,00	300,00	20,00	1.446,00	Disperindagkop & UKM
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	10,00	10,00	400,00	12,00	410,00	15,00	420,00	15,00	426,00	20,00	430,00	20,00	2.086,00	Disperindagkop & UKM
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL					8.686,00		8.876,00		9.104,00		9.294,00		9.496,00		45.456,00	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.206,00	97,00	5.336,00	98,00	5.470,00	100,00	5.606,00	100,00	5.746,00	100,00	27.364,00	DPM & PTSP
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor	Investor	5,00	5,00	120,00	5,00	120,00	5,00	123,00	5,00	125,00	5,00	130,00	5,00	618,00	DPM & PTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berinvestasi di Daerah	Investor	5,00	5,00	60,00	5,00	60,00	5,00	65,00	5,00	66,00	5,00	70,00	5,00	321,00	DPM & PTSP



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian waktu penyelesaian perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan	%	94,00	96,00	2.870,00	98,00	2.920,00	99,00	2.995,00	100,00	3.040,00	100,00	3.090,00	100,00	14.915,00	DPM & PTSP	
		Persentase jenis layanan publik yang disediakan pada Mal Pelayanan Publik	%	0,00	70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		100,00			100,00
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik (IKM)	%	3,40	3,50		3,60		3,70		3,80		3,90		3,90			3,90
		Persentase jenis layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi	%	69,50	73,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00			90,00
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	%	50,00	55,00	410,00	60,00	420,00	65,00	429,00	70,00	435,00	80,00	440,00	80,00	2.134,00	DPM & PTSP	
		Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	%	-40,00	13,00		17,00		15,00		30,00		17,00		17,00			17,00
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase informasi pelayanan yang dipublikasikan	%	95,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	22,00	100,00	22,00	100,00	20,00	100,00	104,00	DPM & PTSP	
		Persentase data yang dimanfaatkan	%	95,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					7.478,00		7.650,00		7.844,00		8.020,00		8.208,00		39.200,00		
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.688,00	97,00	5.830,00	98,00	5.976,00	100,00	6.125,00	100,00	6.278,00	100,00	29.897,00	Dispورا & Par	
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00			1,00
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00			100,00
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00			98,00



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	45,00	45,00	360,00	46,00	370,00	46,00	377,00	50,00	382,00	50,00	390,00	50,00	1.879,00	Dispora & Par
		Jumlah pemuda berprestasi	Pemuda	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	%	35,00	35,00	1.430,00	36,00	1.450,00	36,00	1.491,00	38,00	1.513,00	38,00	1.540,00	38,00	7.424,00	Dispora & Par
		Jumlah atlet berprestasi	Atlit	8,00	8,00		9,00		9,00		10,00		10,00		10,00		
2.21	BIDANG PERSANDIAN					250,00		300,00		300,00		350,00		350,00		1.550,00	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	20,00	40,00	250,00	55,00	300,00	70,00	300,00	85,00	350,00	100,00	350,00	100,00	1.550,00	Diskominfo & Persandian
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN					790,00		820,00		834,00		847,00		860,00		4.151,00	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	%	46,00	46,00	170,00	46,00	180,00	46,00	181,00	46,00	184,00	46,00	190,00	46,00	905,00	Disdikbud
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase 11 objek kemajuan kebudayaan Kabupaten Bulungan	%	100,00	100,00	620,00	100,00	640,00	100,00	653,00	100,00	663,00	100,00	670,00	100,00	3.246,00	Disdikbud
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN					6.055,00		6.198,00		6.357,00		6.508,00		6.666,00		31.784,00	
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.315,00	97,00	5.448,00	98,00	5.584,00	100,00	5.723,00	100,00	5.866,00	100,00	27.936,00	Disperpus & Arsip
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Orang/tahun	5.706,00	7.500,00	740,00	8.500,00	750,00	9.500,00	773,00	10.500,00	785,00	11.500,00	800,00	11.500,00	3.848,00	Disperpus & Arsip



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.24	BIDANG KEARSIPAN					310,00		310,00		323,00		328,00		340,00		1.611,00	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku	OPD	7,00	7,00	280,00	7,00	280,00	7,00	288,00	7,00	292,00	7,00	300,00	7,00	1.440,00	Disperpus & Arsip
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan	%	4,00	5,00	30,00	5,00	30,00	5,00	35,00	5,00	36,00	5,00	40,00	5,00	171,00	Disperpus & Arsip
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					48.192,00		50.012,00		51.919,00		53.395,00		54.973,00		258.491,00	
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					13.940,00		14.286,00		14.719,00		15.075,00		15.444,00		73.464,00	
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.040,00	97,00	5.166,00	98,00	5.296,00	100,00	5.428,00	100,00	5.564,00	100,00	26.494,00	Dinas Perikanan
		Persentase pelanggaran disiplin aparat	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7.151,44	7.509,01	6.300,00	8.259,91	6.410,00	9.498,89	6.583,00	11.398,7	6.681,00	14.248,3	6.780,00	14.248,34	32.754,00	Dinas Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.180,48	5.439,50	2.160,00	5.983,45	2.270,00	6.880,97	2.383,00	8.257,17	2.502,00	10.321,5	2.630,00	10.321,46	11.945,00	Dinas Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan Perikanan	Ton	143,60	146,47	440,00	149,34	440,00	152,21	457,00	155,09	464,00	157,96	470,00	157,96	2.271,00	Dinas Perikanan
		Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ tahun	64,67	64,80		64,83		64,96		65,09		65,22		65,22		
3.26	BIDANG PARIWISATA					360,00		370,00		376,00		383,00		390,00		1.879,00	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan sapta pesona	%	15,00	15,00	210,00	20,00	210,00	20,00	215,00	25,00	219,00	25,00	220,00	25,00	1.074,00	Dispora & Par
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan	wisatawan	1.000,00	1.000,00	150,00	1.100,00	160,00	1.120,00	161,00	1.140,00	164,00	1.200,00	170,00	1.200,00	805,00	Dispora & Par



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27	BIDANG PERTANIAN					22.519,00		23.789,00		24.916,00		25.821,00		26.765,00		123.810,00	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	14.029,00	97,00	14.379,00	98,00	14.739,00	100,00	15.107,00	100,00	15.485,00	100,00	73.739,00	Dinas Pertanian
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan bibit unggul dan pupuk pertanian	%	50,00	65,00	750,00	75,00	760,00	80,00	780,00	85,00	792,00	90,00	800,00	90,00	3.882,00	Dinas Pertanian
		Persentase kelompok tani yang menggunakan bibit unggul dan pupuk yang benar	%	80,00	85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase populasi Ternak	%	45,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menggunakan alsintan	%	65,00	70,00	6.380,00	75,00	7.260,00	80,00	7.968,00	85,00	8.471,00	90,00	9.010,00	90,00	39.089,00	Dinas Pertanian
		Tersedianya akses jalan untuk mendukung produktivitas pertanian	%	65,00	70,00		72,00		75,00		83,00		85,00		85,00		
		Persentase peningkatan Areal Tanaman Perkebunan	%	65,00	67,00		70,00		72,00		75,00		78,00		78,00		
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan angka kematian ternak	%	80,00	85,00	260,00	90,00	260,00	95,00	269,00	100,00	273,00	100,00	280,00	100,00	1.342,00	Dinas Pertanian



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Uraian	Satuan	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kelompok tani dalam penanggulangan hama terpadu	%	70,00	75,00	300,00	80,00	310,00	82,00	318,00	85,00	323,00	88,00	330,00	88,00	1.581,00	Dinas Pertanian
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perusahaan besar swasta dan petani swadaya terhadap pengelolaan/usaha perkebunan	%	65,00	70,00	120,00	73,00	130,00	75,00	130,00	80,00	132,00	85,00	130,00	85,00	642,00	Dinas Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani mandiri	%	75,00	78,00	680,00	80,00	690,00	83,00	712,00	85,00	723,00	90,00	730,00	90,00	3.535,00	Dinas Pertanian
3.28	BIDANG KEHUTANAN					3.610,00		3.670,00		3.768,00		3.825,00		3.880,00		18.753,00	
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan	%	50,00	50,00	3.610,00	54,00	3.670,00	55,00	3.768,00	57,00	3.825,00	58,00	3.880,00	60,00	18.753,00	DPU & PR
3.30	BIDANG PERDAGANGAN					1.830,00		1.850,00		1.908,00		1.937,00		1.960,00		9.485,00	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase persebaran pedagang	%	5,00	5,00	1.550,00	6,00	1.570,00	7,00	1.615,00	7,00	1.639,00	10,00	1.660,00	10,00	8.034,00	Disperindagkop & UKM
		Persentase Sarana dan prasarana pasar yang direvitalisasi	%	90,00	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kenaikan harga barang pokok dan barang penting	%	10,00	10,00	200,00	10,00	200,00	12,00	208,00	12,00	211,00	15,00	210,00	15,00	1.029,00	Disperindagkop & UKM
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal	%	10,00	10,00	80,00	10,00	80,00	12,00	85,00	12,00	87,00	15,00	90,00	15,00	422,00	Disperindagkop & UKM
3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN					280,00		280,00		294,00		298,00		300,00		1.452,00	
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	5,00	5,00	270,00	5,00	270,00	7,00	281,00	7,00	285,00	10,00	290,00	10,00	1.396,00	Disperindagkop & UKM
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pertumbuhan IKM	%	5,00	5,00	10,00	5,00	10,00	7,00	13,00	7,00	13,00	10,00	10,00	10,00	56,00	Disperindagkop & UKM



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.32	BIDANG TRANSMIGRASI					5.653,00		5.767,00		5.938,00		6.056,00		6.234,00		29.648,00	
3.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.168,00	97,00	5.297,00	98,00	5.429,00	100,00	5.565,00	100,00	5.704,00	100,00	27.163,00	Distranaker
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Legalitas Tanah di Kawasan Transmigrasi	%	87,00	87,00	15,00	90,00	0,00	90,00	25,00	95,00	0,00	95,00	30,00	95,00	70,00	Distranaker
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyiapan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%	97,00	97,00	260,00	97,00	260,00	98,00	269,00	98,00	273,00	98,00	280,00	98,00	1.342,00	Distranaker
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Penguatan SDM Transmigrasi	%	95,00	95,00	210,00	95,00	210,00	95,00	215,00	95,00	218,00	95,00	220,00	95,00	1.073,00	Distranaker
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					106.158,00		108.543,00		136.329,00		113.704,00		116.127,00		580.861,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					68.271,00		69.805,00		96.601,00		73.124,00		74.681,00		382.482,00	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	42.961,00	97,00	44.035,00	98,00	45.136,00	100,00	46.265,00	100,00	47.421,00	100,00	225.818,00	Sekretariat Daerah
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Uraian	Satuan		Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00	
		Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B		B		BB		BB		BB		BB	
		Prosentase Kepatuhan Wajib Laporan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Jumlah PD yang memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau /wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK dan WBBM)	OPD	0,00	1,00		2,00		2,00		3,00		3,00		3,00	
		Persentase PD yang nilai SAKIP Minimal B	%	56,41	69,23		74,36		79,49		84,62		89,74		89,74	
		Persentase kematangan Organisasi Perangkat Daerah	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Presentase Perangkat Daerah yang efisien dan proporsional	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap penerapan standar pelayanan	%	85,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Presentase Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan	%	90,00	95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase hibah bantuan sosial yang tepat sasaran	%	94,00	100,00	20.250,00	100,00	20.620,00	100,00	46.171,00	100,00	21.486,00	100,00	21.810,00	100,00	130.337,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Perundang-Undangan yang harmonis	%	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		95,00		95,00		
		Nilai LPPD	Angka	85,00	90,00		95,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat	%	10,00	30,00		50,00		70,00		90,00		100,00		100,00		
		Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	75,00	95,00		95,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dan transparan	%	90,00	100,00	5.060,00	100,00	5.150,00	100,00	5.294,00	100,00	5.373,00	100,00	5.450,00	100,00	26.327,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Perkebunan Skala Besar dan menengah yang menerapkan plasma sesuai aturan	%	50,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		
		Persentase potensi sumber daya alam yang termanfaatkan	%	30,00	30,00		45,00		55,00		65,00		80,00		80,00		
		Laju Inflasi Barang & Jasa	Angka	2,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
		Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan profesional	%	75,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
		Persentase PD yang memiliki anggaran efektif dan efisien	%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan yang akuntabel	%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02	SEKRETARIAT DPRD					37.887,00		38.738,00		39.728,00		40.580,00		41.446,00		198.379,00	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	24.467,00	97,00	25.078,00	98,00	25.705,00	100,00	26.348,00	100,00	27.006,00	100,00	128.604,00	Sekretariat DPRD
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Perda yang dihasilkan per tahun	buah	12,00	14,00	13.420,00	15,00	13.660,00	15,00	14.023,00	14,00	14.232,00	14,00	14.440,00	72,00	69.775,00	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					242.407,21		255.907,15		264.225,87		276.973,66		279.641,33		1.319.155,22	
5.01	PERENCANAAN					11.283,00		11.521,00		11.823,00		12.062,00		12.308,00		58.997,00	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	5.923,00	97,00	6.071,00	98,00	6.223,00	100,00	6.379,00	100,00	6.538,00	100,00	31.134,00	Bappeda & Litbang
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan kebutuhan data perencanaan	%	90,00	95,00	3.710,00	100,00	3.770,00	100,00	3.876,00	100,00	3.934,00	100,00	3.990,00	100,00	19.280,00	Bappeda & Litbang



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan sektoral dan evaluasinya	%	75,00	80,00	1.650,00	85,00	1.680,00	87,00	1.724,00	90,00	1.749,00	100,00	1.780,00	100,00	8.583,00	Bappeda & Litbang
5.02	KEUANGAN					219.419,21		232.418,15		240.124,87		252.368,66		254.517,33		1.198.848,22	
5.02.01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	29.002,44	97,00	34.592,60	98,00	33.760,33	100,00	38.786,34	100,00	33.123,34	100,00	169.265,05	BPKAD dan Bapenda
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian serapan realisasi belanja daerah	%	96,35	96,40	187.296,77	96,45	194.645,55	96,50	203.099,54	96,50	210.268,32	96,50	218.033,99	96,50	1.013.344,17	BPKAD
		Persentase belanja pegawai terhadap APBD	%	57,58	38,00		36,00		34,00		33,00		30,00		30,00		
		Persentase belanja transfer ke desa pada APBD	%	12,91	12,95		12,97		13,00		13,00		13,00		13,00		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase administrasi pengelolaan asset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80,00	90,00	1.420,00	90,00	1.450,00	95,00	1.484,00	95,00	1.506,00	100,00	1.530,00	100,00	7.390,00	BPKAD
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	%	5,60	6,60	1.700,00	7,60	1.730,00	8,60	1.781,00	9,60	1.808,00	10,60	1.830,00	10,60	8.849,00	Bapenda



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03	KEPEGAWAIAN					10.195,00		10.428,00		10.698,00		10.939,00		11.186,00		53.446,00	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	7.715,00	97,00	7.908,00	98,00	8.105,00	100,00	8.308,00	100,00	8.516,00	100,00	40.552,00	BK & PSDM
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	70,00	71,00	2.480,00	71,00	2.520,00	72,00	2.593,00	72,00	2.631,00	73,00	2.670,00	73,00	12.894,00	BK & PSDM
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kualifikasi jabatan	%	75,00	75,00		80,00		80,00		85,00		85,00		85,00		
		Persentase ASN yang nilai SKP nya baik	%	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Angka	80,00	80,00		80,00		83,00		83,00		85,00		85,00		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					690,00		700,00		718,00		729,00		740,00		3.577,00	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Dasar CPNS	%	85,00	85,00	690,00	90,00	700,00	90,00	718,00	95,00	729,00	100,00	740,00	100,00	3.577,00	BK & PSDM
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					820,00		840,00		862,00		875,00		890,00		4.287,00	
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tingkat kesesuaian dokumen litbang dengan kebutuhan perencanaan	%	80,00	85,00	820,00	87,00	840,00	90,00	862,00	90,00	875,00	95,00	890,00	95,00	4.287,00	Bappeda & Litbang



Kode	Usuran Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					12.394,00		12.669,00		12.992,00		13.264,00		13.552,00		64.871,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					12.394,00		12.669,00		12.992,00		13.264,00		13.552,00		64.871,00	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	7.404,00	97,00	7.589,00	98,00	7.778,00	100,00	7.973,00	100,00	8.172,00	100,00	38.916,00	Inspektorat
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Internal dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90,00	95,00	3.220,00	98,00	3.280,00	100,00	3.364,00	100,00	3.414,00	100,00	3.470,00	100,00	16.748,00	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat dan/atau kasus-kasus yang menjadi sorotan publik	%	N/A	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
		Persentase capaian pelaksanaan Indikator kinerja Kunci (IKK) outcome Urusan Penyelenggaraan Pemerintah	%	N/A	85,00		85,00		90,00		95,00		95,00		95,00		
		Indeks Manajemen Risiko (MR) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP	Indeks	N/A	1,00		1,00		2,00		2,00		3,00		3,00		



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bulungan Berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP	angka	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		3,00		3,00		
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah di tindaklanjuti	%	53,54	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang telah di tindaklanjuti	%	83,12	85,00		88,00		90,00		95,00		95,00		95,00		
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase capaian Pencegahan Korupsi Berdasarkan Aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK-RI	%	67,34	70,00	1.770,00	75,00	1.800,00	80,00	1.850,00	85,00	1.877,00	85,00	1.910,00	85,00	9.207,00	Inspektorat
		Indeks Efektivitas Pencegahan korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP	Indeks	N/A	1,00		1,00		2,00		3,00		3,00		3,00		
		Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Bulungan	Indeks	80,27	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00		
		nilai rata-rata Area Perubahan Penguatan Pengawasan dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	angka	3,80	4,00		4,25		4,50		4,75		5,00		5,00		
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bulungan untuk Komponen Evaluasi Internal	angka	5,95	6,00		6,25		6,50		6,75		7,00		7,00		



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	UNSUR KEWILAYAHAN					51.497,00		52.703,00		54.043,00		55.270,00		56.531,00		270.044,00	
7.01	KECAMATAN					51.497,00		52.703,00		54.043,00		55.270,00		56.531,00		270.044,00	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	39.817,00	97,00	40.813,00	98,00	41.833,00	100,00	42.879,00	100,00	43.951,00	100,00	209.293,00	Semua Kecamatan
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	90,00	92,00	2.140,00	95,00	2.180,00	95,00	2.242,00	96,00	2.275,00	96,00	2.310,00	96,00	11.147,00	10 Kecamatan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	%	75,00	80,00	9.540,00	80,00	9.710,00	85,00	9.968,00	85,00	10.116,00	90,00	10.270,00	90,00	49.604,00	10 Kecamatan
		Jumlah Produksi Unggulan Desa*	Produk per Desa	-	0,20		0,40		0,60		0,80		1,00		1,00		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					5.415,00		5.536,00		5.685,00		5.801,00		5.918,00		28.355,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.415,00		5.536,00		5.685,00		5.801,00		5.918,00		28.355,00	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	3.065,00	97,00	3.141,00	98,00	3.220,00	100,00	3.300,00	100,00	3.383,00	100,00	16.109,00	Kesbangpol
		Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		
		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00		97,00		98,00		98,00		100,00		100,00		
		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00		95,00		97,00		97,00		98,00		98,00		



Kode	Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan	Kec	5,00	5,00	120,00	5,00	120,00	5,00	121,00	5,00	123,00	5,00	120,00	5,00	604,00	Kesbangpol
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase tingkat kualitas partai politik dan budaya politik	%	80,00	80,00	750,00	85,00	760,00	87,00	785,00	90,00	797,00	100,00	810,00	100,00	3.902,00	Kesbangpol
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase ormas yang terdaftar dan pembinaannya	%	80,00	80,00	30,00	82,00	35,00	85,00	40,00	90,00	40,00	100,00	45,00	100,00	190,00	Kesbangpol
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Presentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	87,00	87,00	410,00	90,00	420,00	93,00	431,00	96,00	437,00	98,00	440,00	98,00	2.138,00	Kesbangpol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase mediasi/fasilitasi yang ditangani	%	80,00	80,00	1.040,00	85,00	1.060,00	87,00	1.088,00	90,00	1.104,00	100,00	1.120,00	100,00	5.412,00	Kesbangpol
Grand Total Belanja						1.324.332,21		1.377.706,15		1.444.873,87		1.485.378,66		1.521.775,33		7.154.066,22	

BAB VIII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu ditetapkan tolak ukur/indicator tingkat keberhasilannya. Berikut ini adalah terminology tahapan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



Gambar 8.1 Terminologi tahapan pencapaian Visi Pembangunan Daerah



Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu:

- a. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) daerah
- b. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah

8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					Target Akhir Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan produktifitas pertanian	%	5,30	5,59	5,88	6,17	6,46	6,75	6,75
2	Nilai tukar petani	Angka	102,00	105,00	108,00	110,00	113,00	115,00	115,00
3	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	77,78	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
4	Stok Cadangan Pangan	Kg	n/a	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Indeks Pengetahuan	Angka	0,66	0,67	0,67	0,68	0,68	0,69	0,69
6	Indeks Kesehatan	Angka	0,81	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85
7	Jumlah Pemuda yang berprestasi	orang	15	15	15	15	15	15	15
8	Indeks Pembangunan Gender	Angka	85,10	85,48	85,86	86,24	86,62	87,00	87,00
9	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,69	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,20
10	Indeks Inovasi Daerah	Klaster	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
11	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	%	51,45	53,57	56,19	59,80	62,94	65,46	65,46
12	Persentase kawasan permukiman yang layak	%	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41
13	Persentase realisasi rencana struktur ruang	%	95,00	95,00	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00
14	Persentase realisasi rencana pola ruang	%	95,00	95,00	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					Target Akhir Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026	
15	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,45	4,28	4,11	3,96	3,77	3,61	3,61
16	Persentase Peningkatan PAD	%	11,54	11,70	12,00	12,25	12,50	12,80	12,80
17	Realisasi Investasi di Daerah	Trilyun Rupiah	1,50	1,70	2,00	2,30	3,00	3,50	3,50
18	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	32.682	33.387	34.108	34.845	35.597	36.366	36.366
19	Persentase objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Bulungan yang dilestarikan	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
20	Angka Kriminalitas	Angka	194	172	150	168	106	84	84
21	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	85,04	85,04	85,04	87,35	87,35	87,35	87,35
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
22	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	50,00	54,92	55,02	55,12	55,12	55,12	55,12
			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
23	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08
			Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
24	Persentase penduduk miskin	%	9,02	8,60	8,20	7,80	7,40	7,00	7,00
25	Status Desa	Status	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju	Mandiri	Mandiri
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	B	B	B	BB	BB	BB
27	Nilai/Predikat SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	A



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					Target Akhir Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026	
28	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
30	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	n/a	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
31	Level Maturitas SPIP	level	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
33	Indek Efektivitas Pencegahan korupsi	Indeks	n/a	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
33	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	n/a	B	B	B	A	A	A
34	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00



8.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.3 berikut. Indikator kinerja kunci mengacu kepada urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050-2020-SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah, metode perhitungan indikator tiap-tiap urusan berdasarkan metode yang digunakan dalam perhitungan data statistik /BPS, dan juga aspek serta metode dalam penentuan indikator tiap-tiap sektor dan sub-sektor urusan pemerintahan daerah.



8.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, diamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan SPM pada urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal yang termuat dalam Standar Pelayanan Minimal telah menetapkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan membentuk Tim Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan setiap tahunnya.

Dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 terkait dengan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bulungan yakni :

1. Urusan Pendidikan

- Peningkatan kualitas pendidikan dan berdaya saing serta mendorong penguatan muatan lokal sebagai salah satu media Pendidikan karakter, entrepreneurship, dan keahlian yang berbasis potensi sektor ekonomi lokal;
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
- Pengembangan Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan local;
- Penguatan karakter, kreatifitas, inovasi, pengembangan diri, dan prestasi untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- Peningkatan peran serta sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Bulungan;
- Peningkatan beasiswa vokasi yang bersumber dari APBD dan non-APBD.



2. Urusan Kesehatan
 - Membangun kemitraan dengan kelompok swadaya masyarakat di bidang kesehatan masyarakat;
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan dan penyuluhan tentang kesehatan masyarakat hingga perangkat Pemerintahan dengan hirarki terkecil dan juga hingga level keluarga;
 - Mendorong tumbuh kembangnya upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan.

3. Urusan Pekerjaan Umum
 - Penyediaan infrastruktur pendukung permukiman yang layak dan berkualitas, antara lain pemenuhan penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - Pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah.

4. Urusan Perumahan Rakyat
 - Penyediaan infrastruktur pendukung permukiman yang layak dan berkualitas, antara lain pemenuhan penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - Pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Meningkatkan Sinergitas dengan Forkompinda dalam membangun stabilitas keamanan daerah;
 - Meningkatkan peranan aparaturnya daerah dalam menjamin ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

6. Urusan Sosial
 - Penanganan permasalahan sosial anak secara terpadu untuk menurunkan angka permasalahan;
 - Peningkatan layanan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial anak.



Capaian SPM Tahun 2020 dan Target Capaian SPM di Kabupaten Bulungan Tahun 2022 hingga 2026 sebagaimana terlihat dalam tabel yakni :

Tabel 8.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bulungan Tahun 2020

No	Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bulungan	Jenis Layanan	Indikator Jenis Layanan	Target SPM	Capaian Kinerja	SKPD
					Tahun 2020	
1	2	3	4	5	7	8
A.	Pendidikan	a. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		b. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00%	95,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		c. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00%	87,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
B	Kesehatan	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	89,90%	Dinas Kesehatan
		b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	94,37%	Dinas Kesehatan
		c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	101,58%	Dinas Kesehatan
		d. Pelayanan kesehatan balita;	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	79,55%	Dinas Kesehatan
		e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	25,76%	Dinas Kesehatan
		f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	10,70%	Dinas Kesehatan



		g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	35,69%	Dinas Kesehatan
		h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	13,33%	Dinas Kesehatan
		i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	47,39%	Dinas Kesehatan
		j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100,00%	80,08%	Dinas Kesehatan
		k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
		l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
C	Pekerjaan Umum	a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D	Perumahan Rakyat	a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00%	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman



		b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
E	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100,00%	91,02%	Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK
		b. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100,00%	99,40%	Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK
F	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100,00%	0,00%	Dinas Sosial
		b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00%	0,00%	Dinas Sosial
		c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00%	100,00%	Dinas Sosial



		d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100,00%	0,00%	Dinas Sosial
		e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100,00%	100,00%	Dinas Sosial



Tabel. 8.3 Target Capaian Standart Pelayanan Minimal Kabupaten Bulungan Tahun 2022-2026

No	Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bulungan	Jenis Layanan	Indikator Jenis Layanan	Target SPM					SKPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Pendidikan	a. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		b. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		c. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
B	Kesehatan	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		d. Pelayanan kesehatan balita;	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan



		f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus).	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
C	Pekerjaan Umum	a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



		b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D	Perumahan Rakyat	a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota bencana Kab/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
E	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK
		b. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



		e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK
F	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
		b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
		c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
		d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
		e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial



Tabel 8.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
A	BIDANG PENDIDIKAN								
1	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
3	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
4	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
5	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,16	10,00	10,50	11,00	11,50	11,50	11,50
6	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,48	13,48	13,49	13,50	13,51	13,52	13,52
7	Persentase SD terakreditasi A	%	15,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	21,00
8	Persentase SMP terakreditasi A	%	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00
9	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi minimal S1	%	32,00	35,00	38,00	40,00	42,00	45,00	45,00
B	BIDANG KESEHATAN								
10	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
12	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
13	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
14	Serapan belanja BLUD terhadap pendapatan BLUD RSD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	%	85,00	86,00	90,00	93,00	96,00	100,00	100,00
16	Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	%	95,00	96,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
17	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan kompetensi sesuai standar	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
18	Persentase tingkat efektivitas pengawasan obat dan makanan	%	60,00	65,00	70,00	85,00	90,00	100,00	100,00
19	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	%	65,00	70,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
C	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
20	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
21	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
22	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
23	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
24	Persentase Jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	13,52	15,00	15,79	16,50	20,75	21,75	21,75
25	Presentase peningkatan luas daerah terlindungi dari banjir dan genangan	%	90,00	95,00	95,00	98,00	98,00	98,00	98,00
26	Presentase jaringan air bersih yang kondisi baik dan berfungsi	%	75,00	77,14	79,38	81,53	83,29	84,54	84,54
27	persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak	%	92,06	93,00	94,00	94,50	95,00	96,00	96,00
28	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak	%	75,00	80,00	82,00	85,00	88,00	90,00	90,00



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Persentase Saluran Drainase Perkotaan yang dalam kondisi baik	%	54,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
30	Persentase Jalan desa yang terhubung ke pusat kecamatan	%	90,00	93,00	94,00	94,50	95,00	96,00	96,00
31	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten	%	2,58	5,00	10,00	12,00	15,00	20,00	20,00
32	Persentase pembangunan Jalan Lingkungan yang dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	82,00	84,00	85,00	86,00	86,00
33	Presentase peningkatan panjang jalan yang dalam kondisi Mantap	%	68,67	70,00	72,50	75,00	80,00	82,50	82,50
34	Presentase peningkatan jembatan yang dalam kondisi Mantap	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Persentase Perencanaan Tata Ruang Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Presentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
38	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
39	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
40	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
41	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
42	Porsentase ketersediaan Rumah Layak Huni	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43	Porsentase Luas Kawasan Kumuh	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Persentase kawasan permukiman dan peru-mahan yang mendapat-kan fasilitas PSU	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
46	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
47	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
48	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
49	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
50	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Orang/ 10.000 penduduk	6,45	6,45	6,50	6,60	6,60	6,75	6,75
51	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Orang/ 10.000 penduduk	15,40	15,50	15,60	15,75	15,75	15,80	15,80
52	Cakupan penegakan Perda dan Perbup tertangani (%)	%	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	Persentase laporan kejadian kebencanaan (non-karhutla) yang ditangani*	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Persentase laporan kejadian karhutla yang ditangani*	%	90,00	95,00	95,00	96,00	96,00	98,00	98,00
55	Persentase sarana pra-sarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik*	%	34,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
56	Persentase ketersediaan peralatan penanggulangan-ankebakaran dan berkondisi baik	%	85,00	90,00	92,00	95,00	97,00	99,00	99,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	BIDANG SOSIAL								
57	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
58	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
59	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
60	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
61	Persentase PMKS yang tertangani (Lansia, Paca, Anak Terlantar, PRSE dan eks Penyandang Penyakit Sosial)	%	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
62	Persentase PMKS yang mandiri	%	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
63	Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif	PSKS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
64	Persentase PMKS yang tertangani (Lansia, Paca, Anak Terlantar, PRSE dan eks Penyandang Penyakit Sosial dll)	%	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
65	Persentase data PMKS yang ter up to date (tervalidasi)	%	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
66	Persentase fakir miskin yang menerima bantuan beras sejahtera (Rastra) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	%	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
67	Persentase keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	%	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
68	Persentase warga yang memperoleh bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
69	Barang persediaan logistik penanggulangan bencana dalam kondisi kesiapsiagaan (bulan)	bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
70	Cakupan warga korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71	Cakupan warga masyarakat yang terlatih dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terkelola	TMP	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
G	BIDANG TENAGA KERJA								
73	Persentase terlaksana-nya penyusunan laporan rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74	Persentase Pencari Kerja terampil dan bersertifikat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
75	Persentase tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	%	77,90	77,90	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
76	Persentase Perusahaan Yang menerapkan UMK	%	80,00	80,00	83,00	85,00	89,00	92,00	92,00
77	Persentase kasus perse-lisihan yg terselesaikan	%	95,00	95,00	95,00	96,00	96,00	98,00	98,00
H	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
78	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
79	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
80	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
81	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
82	Persentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi penguatan pengarusutamaan gender	%	0,00	10,00	30,00	45,00	60,00	87,00	87,00
83	Persentase Kecamatan yang Mendapat Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	%	30,00	45,00	55,00	65,00	70,00	83,00	83,00
84	Persentase keluarga yang mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	0,00	10,00	30,00	50,00	61,00	75,00	75,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	Persentase Perempuan Pra Keluarga Sejahtera (KS) dan Keluarga Sejahtera (KS) yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	%	0,38	0,45	0,50	0,55	0,75	0,80	0,80
86	Persentase Kelurahan / Desa Layak Anak	%	22,00	30,00	43,00	55,00	60,00	75,00	75,00
87	Persentase Keluarga Bermasalah yang Tertangani melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	60,00	65,00	70,00	70,00	85,00	89,00	89,00
88	Persentase forum anak tingkat kelurahan/desa	%	49,00	60,00	67,00	67,00	67,00	73,00	73,00
I	BIDANG PANGAN								
89	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
90	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
91	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
92	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
93	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,50	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
94	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Angka	76,22	80,00	82,00	84,00	85,00	87,00	87,00
95	Skor pola pangan harapan Konsumsi (PHH)	Angka	77,78	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
96	Konsumsi energi	Kkal/kapita/hari	1.862,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
97	Konsumsi protein	Gr/kapita/hari	71,09	74,00	75,00	77,00	79,00	80,00	80,00
98	Laju pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	3,32	3,38	3,42	3,45	3,45	3,50	3,50
99	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
J	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
100	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
101	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
102	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
103	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
104	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	dokumen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
105	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	%	75,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
106	Persentase tutupan lahan kritis pada daerah aliran sungai (DAS)	%	34,00	47,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
107	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan Limbah B3	%	60,00	70,00	75,00	80,00	82,00	85,00	85,00
108	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan PPLH	%	42,86	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
109	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten	%	0,00	0,00	30,00	40,00	50,00	50,00	50,00
110	Penghargaan lingkungan Hidup	Penghargaan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00
111	Persentase penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
112	Persentase Penanganan Sampah	%	78,74	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
113	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
114	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
115	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
116	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
117	Kartu Keluarga yang diterbitkan	KK	13.856,0	14.200,0	15.000,0	15.500,0	16.000,0	16.500,0	77.200,00
118	KTP-el yang diterbitkan	KTP	21.412,0	21.500,0	22.000,0	22.500,0	23.000,0	23.500,0	112.500,00
119	KIA yang diterbitkan	KIA	5.640,0	6.500,0	7.000,0	7.500,0	8.000,0	8.500,0	37.500,00
120	berkas permohonan pindah yang diterbitkan	SKP WNI	3.274,0	3.350,00	3.500,0	3.600,0	3.700,0	3.800,0	17.950,00
121	Berkas permohonan kedatangan yang diproses	SKD WNI	4.865,0	4.900,00	5.000,0	5.100,0	5.200,0	5.300,0	25.500,00
122	Pelayanan keliling (Jemput bola) pendaftaran penduduk	Des/Kel	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	96,00
123	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	86.166,0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	106.166,00
124	Jumlah kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	46.507,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	47.007,00
125	Jumlah kepemilikan Akta Perkawinan	pasangan	12.011,0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	14.011,00
126	Jumlah kepemilikan Akta Perceraian	pasangan	79,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	129,00
127	Jumlah kepemilikan Akta Pengakuan	Jiwa	324,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	474,00
128	Jumlah kepemilikan Akta Pengesahan	Jiwa	631,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	781,00
129	Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan	Puskes-mas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
130		KUA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
131		OPD	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	15,00
132	Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dilakukan	OPD	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	15,00
133	Fasilitasi pemanfaatan aplikasi IKM	Berkas	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	600,00
134	Verifikasi dan Validasi data kependudukan	Keg/ Berkas	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	8.400,00
L	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
135	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
136	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
137	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
138	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
139	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
140	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
141	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	%	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
142	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	%	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
143	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yg aktif	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
144	Persentase Peserta KB baru terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)	%	43,69	50,00	65,00	71,00	78,00	84,00	84,00
145	Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	%	9,25	15,00	35,00	48,00	59,00	75,00	75,00
146	Persentase Balai yang Dibangun	%	30,00	40,00	48,00	59,00	66,00	74,00	74,00
147	Persentase Peserta MKJP	%	59,52	65,00	75,00	80,00	87,00	90,00	90,00
148	Persentase Toga, Toma dan Pengelola KB yang mendapatkan pelayanan KIE	%	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
149	Persentase Masyarakat yang mendapatkan promosi dan KIE	%	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
150	Persentase Capaian Data Keluarga yang Valid	%	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
151	Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB Aktif	%	70,04	65,00	74,00	86,00	90,00	95,00	95,00
N	BIDANG PERHUBUNGAN								
152	Persentase penatausaha-an keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
153	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
154	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
155	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
156	Menurunnya Kecelakaan Berlalu Lintas	%	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
157	Menurunnya tingkat kecelakaan laik berlayar	%	90,00	95,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
O	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
158	Persentase penatausaha-an keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
159	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
160	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
161	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
162	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163	Persentase Pelayanan Informasi Publik (Bulungan Hebat)	%	19,00	6,00	20,00	30,00	50,00	75,00	100,00
164	Indeks SPBE Kabupaten Bulungan	%	2,10	2,50	3,00	3,50	3,50	4,00	4,30
165	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data, Integrasi, Interoperabilitas serta Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	0,00	10,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
P	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
166	Persentase penatausaha-an keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
167	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
168	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
169	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
170	Persentase koperasi KSP / USP yang sehat	%	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00
171	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang bersertifikat	%	10,00	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00
172	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00	20,00	20,00
173	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00	20,00	20,00
Q	BIDANG PENANAMAN MODAL								
174	Persentase penatausaha-an keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
175	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
176	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
178	Jumlah investor	Investor	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
179	Jumlah Investor yang berinvestasi di Daerah	Investor	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
180	Persentase kesesuaian waktu penyelesaian perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan	%	94,00	96,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00
181	Persentase jenis layanan publik yang disediakan pada Mal Pelayanan Publik	%	0,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
182	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik (IKM)	%	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	3,90
183	Persentase jenis layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi	%	69,50	73,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
184	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	80,00	80,00
185	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	%	-40,00	13,00	17,00	15,00	30,00	17,00	17,00
186	Persentase informasi pelayanan yang dipublikasikan	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
187	Persentase data yang dimanfaatkan	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
188	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
189	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
190	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
191	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
192	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	45,00	45,00	46,00	46,00	50,00	50,00	50,00
193	Jumlah pemuda berprestasi	Pemuda	10,00	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
194	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	%	35,00	35,00	36,00	36,00	38,00	38,00	38,00
195	Jumlah atlet berprestasi	Atlit	8,00	8,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
S	BIDANG PERSANDIAN								
196	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	20,00	40,00	55,00	70,00	85,00	100,00	100,00
T	BIDANG KEBUDAYAAN								
197	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	%	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
198	Persentase 11 objek kemajuan kebudayaan Kabupaten Bulungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
U	BIDANG PERPUSTAKAAN								
199	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
200	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
201	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
202	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
203	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Orang/tahun	5.706,00	7.500,00	8.500,00	9.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00
V	BIDANG KEARSIPAN								
204	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku	OPD	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
205	Persentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan	%	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
W	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
206	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
207	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
208	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
209	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
210	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7.151,44	7.509,01	8.259,91	9.498,89	11.398,7	14.248,3	14.248,34
211	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.180,48	5.439,50	5.983,45	6.880,97	8.257,17	10.321,5	10.321,46
212	Jumlah produksi olahan Perikanan	Ton	143,60	146,47	149,34	152,21	155,09	157,96	157,96
213	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	64,67	64,80	64,83	64,96	65,09	65,22	65,22
X	BIDANG PARIWISATA								
214	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan sapta pesona	%	15,00	15,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00
215	Jumlah Kunjungan wisatawan	wisata-wan	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.200,00	1.200,00
Y	BIDANG PERTANIAN								
216	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
217	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
218	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
219	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
220	Persentase kelompok tani yang mendapatkan bibit unggul dan pupuk pertanian	%	50,00	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
221	Persentase kelompok tani yang menggunakan bibit unggul dan pupuk yang benar	%	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Persentase populasi Ternak	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
223	Persentase kelompok tani yang menggunakan alsintan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
224	Tersedianya akses jalan untuk mendukung produktivitas pertanian	%	65,00	70,00	72,00	75,00	83,00	85,00	85,00
225	Persentase peningkatan Areal Tanaman Perkebunan	%	65,00	67,00	70,00	72,00	75,00	78,00	78,00
226	Persentase penurunan angka kematian ternak	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
227	Persentase kelompok tani dalam penanggulangan hama terpadu	%	70,00	75,00	80,00	82,00	85,00	88,00	88,00
228	Persentase perusahaan besar swasta dan petani swadaya terhadap pengelolaan/usaha perkebunan	%	65,00	70,00	73,00	75,00	80,00	85,00	85,00
229	Persentase kelompok tani mandiri	%	75,00	78,00	80,00	83,00	85,00	90,00	90,00
Z	BIDANG KEHUTANAN								
230	Prosentase keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan	%	50,00	50,00	54,00	55,00	57,00	58,00	60,00
AA	BIDANG PERDAGANGAN								
231	Persentase persebaran pedagang	%	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	10,00	10,00
232	Persentase Sarana dan prasarana pasar yang direvitalisasi	%	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
233	Persentase kenaikan harga barang pokok dan barang penting	%	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	15,00	15,00
234	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan metreologi legal	%	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	15,00	15,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BB	BIDANG PERINDUSTRIAN								
235	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	10,00	10,00
236	Persentase pertumbuhan IKM	%	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	10,00	10,00
CC	BIDANG TRANSMIGRASI								
237	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
238	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
239	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
240	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
241	Persentase Legalitas Tanah di Kawasan Transmigrasi	%	87,00	87,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
242	Persentase Penyiapan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%	97,00	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00
243	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Penguatan SDM Transmigran	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
DD	SEKRETARIAT DAERAH								
244	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
245	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
246	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
247	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
248	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
249	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
250	Presentase Kepatuhan Wajib Laporan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
251	Jumlah PD yang memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau /wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK dan WBBM)	OPD	0,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
252	Persentase PD yang nilai SAKIP Minimal B	%	56,41	69,23	74,36	79,49	84,62	89,74	89,74
253	Persentase kematangan Organisasi Perangkat Daerah	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
254	Presentase Perangkat Daerah yang efisien dan proporsional	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
255	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap penerapan standar pelayanan	%	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
256	Presentase Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan	%	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
257	Persentase hibah bantuan sosial yang tepat sasaran	%	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
258	Persentase Produk Perundang-Undangan yang harmonis	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00
259	Nilai LPPD	Angka	85,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
260	Persentase tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat	%	10,00	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00
261	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	75,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
262	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dan transparan	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
263	Presentase Perkebunan Skala Besar dan menengah yang menerapkan plasma sesuai aturan	%	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
264	Persentase potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan	%	30,00	30,00	45,00	55,00	65,00	80,00	80,00
265	Laju Inflasi Barang & Jasa	Angka	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
266	Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan profesional	%	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	Persentase PD yang memiliki anggaran efektif dan efisien	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
268	Persentase penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan yang akuntabel	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
EE	SEKRETARIAT DPRD								
269	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
270	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
271	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
272	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
273	Jumlah Perda yang dihasilkan per tahun	buah	12,00	14,00	15,00	15,00	14,00	14,00	72,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
FF	PERENCANAAN								
274	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
275	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
276	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
277	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
278	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan kebutuhan data perencanaan	%	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
279	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan sektoral dan evaluasinya	%	75,00	80,00	85,00	87,00	90,00	100,00	100,00
GG	KEUANGAN								
280	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
281	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
282	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
283	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
284	Capaian serapan realisasi belanja daerah	%	96,35	96,40	96,45	96,50	96,50	96,50	96,50
285	Persentase belanja pegawai terhadap APBD	%	57,58	38,00	36,00	34,00	33,00	30,00	30,00
286	Persentase belanja transfer ke desa pada APBD	%	12,91	12,95	12,97	13,00	13,00	13,00	13,00
287	Prosentase administrasi pengelolaan asset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80,00	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00
288	Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	%	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	10,60
HH	KEPEGAWAIAN								
289	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelak-sanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
290	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
291	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
292	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
293	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	70,00	71,00	71,00	72,00	72,00	73,00	73,00
294	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kualifikasi jabatan	%	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00
295	Persentase ASN yang nilai SKP nya baik	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
296	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Angka	80,00	80,00	80,00	83,00	83,00	85,00	85,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ii	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
297	Persentase ASN yang lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Dasar CPNS	%	85,00	85,00	90,00	90,00	95,00	100,00	100,00
Jj	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
298	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen litbang dengan kebutuhan perencanaan	%	80,00	85,00	87,00	90,00	90,00	95,00	95,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
Kk	INSPEKTORAT DAERAH								
299	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
300	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
301	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
302	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
303	Persentase tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Internal dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90,00	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
304	Persentase pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat dan/atau kasus-kasus yang menjadi sorotan publik	%	N/A	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
305	Persentase capaian pelaksanaan Indikator kinerja Kunci (IKK) outcome Urusan Penyelenggaraan Pemerintah	%	N/A	85,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
306	Indeks Manajemen Risiko (MR) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP	Indeks	N/A	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00
307	Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bulungan Berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP	angka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
308	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah di tindaklanjuti	%	53,54	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
309	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang telah di tindaklanjuti	%	83,12	85,00	88,00	90,00	95,00	95,00	95,00
310	Presentase capaian Pencegahan Korupsi Berdasarkan Aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK-RI	%	67,34	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
311	Indeks Efektivitas Pencegahan korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP	Indeks	N/A	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
312	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Bulungan	Indeks	80,27	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
313	nilai rata-rata Area Perubahan Penguatan Pengawasan dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	angka	3,80	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,00
314	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bulungan untuk Komponen Evaluasi Internal	angka	5,95	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
LI	KECAMATAN								
315	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
316	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
317	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
318	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
319	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	90,00	92,00	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00



RPJMD KABUPATEN BULUNGAN 2021-2026
MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
320	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	%	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00
321	Jumlah Produksi Unggulan Desa*	Produk per Desa	-	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
Mm	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
322	Persentase penatausahaan keuangan dan pen-capaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	%	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
323	Persentase pelanggaran disiplin aparat	%	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
324	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,00	95,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
325	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	90,00	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	98,00
326	Persentase Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan	Kec	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
327	Presentase tingkat kualitas partai politik dan budaya politik	%	80,00	80,00	85,00	87,00	90,00	100,00	100,00
328	Presentase ormas yang terdaftar dan pembinaannya	%	80,00	80,00	82,00	85,00	90,00	100,00	100,00
329	Presentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	87,00	87,00	90,00	93,00	96,00	98,00	98,00
330	Presentase mediasi/ fasilitasi yang ditangani	%	80,00	80,00	85,00	87,00	90,00	100,00	100,00
Grand Total Belanja				99.190,86	104.593,49	110.334,21	117.057,34	125.616,78	509.640,08



BAB IX Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulungan, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun setelah RPJMD ini berakhir atau pada masa peralihan Kepala Daerah periode berikutnya.

9.1. Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021-2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun 2021-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda & Litbang;



5. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;
7. Capaian RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026 pada tahun pertama merupakan kombinasi capaian 9 (Sembilan) program super prioritas yang dilakukan melalui penyesuaian anggaran berjalan melalui mekanisme perubahan anggaran atau penyesuaian kegiatan yang memiliki program yang selaras dengan 9 (Sembilan) program super prioritas, untuk selanjutnya keseluruhan capaian pada tahapan pertama RPJMD 2021-2026 diselesaikan pada tahun anggaran 2022;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2021 telah ditetapkan berdasarkan kaidah masa transisi RPJMD periode sebelumnya, oleh karena itu dikarenakan masa kepemimpinan Kepala Daerah periode ini dimulai ketika masa anggaran telah berjalan atau pertengahan tahun anggaran maka RPJMD ini ditetapkan untuk 5 tahun kedepan hingga tahun anggaran 2026;
9. Untuk tahun anggaran 2021 kegiatan yang dilaksanakan adalah pencapaian target yang telah disusun dan ditetapkan pada capaian masa transisi sebelumnya dengan penyesuaian dengan capaian tahun pertama RPJMD 2021-2026, yang artinya hingga tahun 2022 diharapkan capaian RPJMD tahun pertama dapat dicapai dalam 2 tahun pelaksanaan atau tahun 2021-2022 terutama untuk pencapaian program prioritas Bupati dalam triwulan pertama, selain capaian yang telah ditetapkan pada penetapan capaian pembangunan pada masa transisi, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian kegiatan pada tahun anggaran 2021 yang selaras dengan 9 (Sembilan) program super prioritas Bupati untuk triwulan pertama;
10. Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
11. Bupati dan Wakil Bupati Blungan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD



Kabupaten Bulungan 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;

12. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi pelaksana harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026;
13. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
14. Bupati dan Wakil Bupati Bulungan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
15. Bappeda Litbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026;
16. Penyusunan RKPd Kabupaten Bulungan pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bulungan Tahun 2021 sampai dengan 2026;
17. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026;
18. Seluruh OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
19. Renja OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
20. Berdasarkan *Core Strategy* dan *Competitiveness Strategy* dari *Snowball Concept* Bulungan Berdaulat pangan, maka ditetapkan paket pertama sebagai target triwulan pertama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, ditetapkan 9 (sembilan) program prioritas pertama yang akan direalisasikan, oleh karena itu OPD diminta untuk melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kebijakan anggaran pada tahun anggaran 2021 untuk mengakomodir 9 (sembilan) program prioritas tersebut, nantinya OPD yang



terkait dengan capaian triwulan pertama untuk program prioritas ini dapat menyesuaikan kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan capaian tahunan RPJMD 2021-2026 yang disampaikan pada pembahasan Bab VI materi teknis RPJMD ini.

21. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan, dan lain-lain dalam RPJMD 2021-2026 ini, maka penyesuaiannya disusun melalui kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
22. Dengan mempertimbangkan berbagai hal diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bulungan dan diperkirakan akan menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Bulungan untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026 telah mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

9.2. Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan

Pada masa transisi dimana RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026 telah habis masa berlakunya dan belum ditetapkannya RPJMD 2026-2030, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dilaksanakan pada Tahun 2026, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan adalah :

1. Sebagaimana diketahui, tahun 2026 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Bulungan. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulungan 2005-2026. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 menjadi dasar



dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bulungan Tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Bulungan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya;

2. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 sebagai pedoman yang dimaksud pada butir 1 diatas bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya dapat tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD yang lalu, dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru periode selanjutnya;
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah terpilih, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.